



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
UNIT PENGELOLA STATISTIK

ISSN 2809-185X

Jakarta
a city of collaboration

Statistik Sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2021

Volume 3 Tahun 2021





DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
UNIT PENGELOLA STATISTIK

ISSN 2809-185X

Jakarta
a city of collaboration

Statistik Sektoral

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2021

Volume 3 Tahun 2021



Statistik Sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Volume 3 Tahun 2021

Pengarah :

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab :

Kepala Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta

Naskah:

Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta

Penyunting:

Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta

Desain Kover:

Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta

Penerbit:

©Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta

Pencetak:

Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Statistik Sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil kompilasi data statistik sektoral dari Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik dan Instansi lainnya, yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu media diseminasi statistik sektoral Provinsi DKI Jakarta.

Buku Statistik Sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini membahas data statistik sektoral dan analisis deskriptif yang terangkum dalam tujuh bab yaitu Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum, Daya Saing Daerah, Ekonomi dan Keuangan Daerah, Insidensial, serta Politik Dalam Negeri dan Pengawasan Hukum. Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data statistik sektoral yang disajikan.

Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan.

Jakarta, 31 Juli 2021
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta



Atika Nur Rahmania
NIP 197204061998032006

Statistik Sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2021

Volume 3 Tahun 2021

Daftar Isi

Kata Pengantar	V
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xix
BAB I Geografi dan Demografi	1
1.1. Karakteristik Wilayah	3
1.1.1. Kondisi Geografis	3
1.1.2. Wilayah Administrasi	4
1.1.3. Iklim dan Cuaca	6
1.2. Demografi	9
1.2.1. Kependudukan	9
1.2.2. Dinamika Penduduk	14
BAB II Kesejahteraan Masyarakat	19
2.1. Kemiskinan	21
2.2. Indeks Pembangunan Manusia	25
2.3. Harapan Hidup	26
2.4. Pengeluaran Per Kapita	28
2.5. Indeks Pembangunan Gender	29
BAB III Pelayanan Umum	31
3.1. Pendidikan	35
3.1.1. Murid, Guru dan Sekolah	35
3.1.2. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar	41
3.1.3. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah	42
3.1.4. Angka Melek Huruf	45
3.2. Kesehatan	45
3.2.1. Fasilitas Kesehatan	46
3.2.2. Tenaga Kesehatan	48
3.2.3. Bayi dan Balita	49
3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49
3.3.1. Luas dan Panjang Jalan	49
3.3.2. Panjang dan Luas Trotoar	51
3.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman	52
3.4.1. Rumah Susun Sederhana	52
3.4.2. Sanitasi	55
3.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	59
3.5.1. Pelanggaran Terkait Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan ...	59
3.5.2. Perlindungan Masyarakat	63
3.5.3. Kebakaran dan Penyelamatan	66
3.6. Sosial	69
3.6.1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	69
3.6.2. Pekerja Sosial	70
3.6.3. Lembaga Kesejahteraan Sosial	71
3.7. Tenaga Kerja	74
3.7.1. Kesempatan Kerja	75
3.7.2. Partisipasi Kerja dan Pengangguran	77
3.8. Perempuan dan Perlindungan Anak	79
3.9. Pertanian	86
3.9.1. Tanaman Pangan	87
3.9.2. Hortikultura	89

3.9.3.	Agrowisata	95
3.10.	Lingkungan Hidup	97
3.10.1.	Kualitas Udara	97
3.10.2.	Pengelolaan Sampah	101
3.11.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	103
3.11.1.	Akta Kelahiran	103
3.11.2.	Akta Kematian	104
3.11.3.	Akta Perkawinan dan Perceraian	105
3.11.4.	Kartu Keluarga	106
3.11.5.	Kartu Tanda Penduduk	107
3.12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	108
3.12.1.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Kemasyarakatan	109
3.12.2.	Pos Layanan Terpadu	110
3.13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110
3.13.1.	Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana	111
3.13.2.	Peserta Keluarga Berencana	112
3.13.3.	Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa	114
3.13.4.	Metode Kontrasepsi	115
3.14.	Perhubungan	116
3.14.1.	Angkutan Umum	117
3.14.2.	Angkutan Perairan	120
3.14.3.	Penindakan Penegakan Hukum terhadap Kendaraan	122
3.15.	Komunikasi dan Informatika	123
3.15.1.	Kantor Pos Indonesia	123
3.15.2.	Sambungan Telepon, Internet dan Telepon Seluler	124
3.15.3.	Siaran Pers	126
3.15.4.	Jakwifi	127
3.16.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	131
3.16.1.	Koperasi	131
3.16.2.	Anggota Koperasi	133
3.16.3.	Modal Usaha, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha	134
3.17.	Penanaman Modal	135
3.18.	Kepemudaan dan Olahraga	136
3.18.1.	Aktivitas Berolahraga Masyarakat	136
3.18.2.	Fasilitas Olahraga	137
3.18.3.	Kegiatan Kepemudaan	139
3.18.4.	Peserta Kegiatan Olahraga	139
3.19.	Kebudayaan	140
3.19.1.	Organisasi Kesenian	140
3.19.2.	Patung dan Museum	141
3.20.	Perpustakaan dan Kearsipan	142
3.21.	Pariwisata	144
3.21.1.	Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	144
3.21.2.	Akomodasi	149
3.21.3.	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	154
3.22.	Kehutanan	155
3.23.	Energi dan Sumber Daya Mineral	157
3.23.1.	Distribusi Listrik	159
3.24.	Perdagangan	159
3.24.1.	Ekspor dan Impor	160
3.24.2.	Komoditas Pangan	165
3.25.	Kelautan dan Perikanan	170
3.25.1.	Produksi Perikanan	170
3.25.2.	Nelayan	172
3.26.	Kepegawaian	173
3.26.1.	Pegawai Negeri Sipil	173
3.26.2.	Jabatan Struktural	174
BAB IV	Daya Saing Daerah	175
4.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	177
4.2.	Sumber Daya Manusia	178
4.2.1.	Tingkat Pendidikan	178

4.2.2. Sektor Pekerjaan	179
BAB V Ekonomi dan Keuangan Daerah	183
5.1. Perbankan	185
5.2. Transaksi Perbankan.....	187
5.3. Produk Domestik Regional Bruto	190
5.4. Inflasi.....	193
5.5. Indeks Harga Konsumen.....	195
5.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	195
BAB VI Insidensial.....	199
6.1. Bencana Alam.....	201
6.1.1. Kejadian Bencana Alam	201
6.1.2. Dampak Bencana Alam.....	202
6.2. Penyakit Menular	203
6.3. Pandemi Covid-19	205
6.3.1 Kasus Covid-19.....	205
6.3.2 Kasus Meninggal dan Sembuh dari Covid-19.....	209
BAB VII Politik Dalam Negeri dan Pengawasan Hukum.....	211
7.1. Lembaga Demokrasi	213
7.2. Indeks Demokrasi Indonesia	214

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Luas Wilayah (km ²) di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	4
Gambar 1.2.	Sepuluh Kecamatan Terluas (km ²) di DKI Jakarta Tahun 2020	4
Gambar 1.3.	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	5
Gambar 1.4.	Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	5
Gambar 1.5.	Suhu Rata-Rata (°C) di DKI Jakarta Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2020	6
Gambar 1.6.	Curah Hujan (mm) di DKI Jakarta Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2020	7
Gambar 1.7.	Kelembaban Udara (%) Rata-Rata di DKI Jakarta Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2020	7
Gambar 1.8.	Kecepatan Angin (meter/detik) di DKI Jakarta Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2020	8
Gambar 1.9.	Rata-Rata Lama Penyinaran Matahari (%) di DKI Jakarta Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2020.....	8
Gambar 1.10.	Jumlah Penduduk WNI di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	10
Gambar 1.11.	Jumlah Penduduk WNA di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	10
Gambar 1.12.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	11
Gambar 1.13.	Piramida Penduduk DKI Jakarta Menurut Kelompok Usia Tahun 2020	11
Gambar 1.14.	Jumlah Penduduk di DKI Jakarta Menurut Agama dan Kepercayaan Tahun 2020.....	12
Gambar 1.15.	Penduduk DKI Jakarta (> 7 Tahun) Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2020	13
Gambar 1.16.	Persentase Penduduk DKI Jakarta Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2020	13
Gambar 1.17.	Penduduk DKI Jakarta (> 15 Tahun) Menurut Pekerjaan Tahun 2020	14
Gambar 1.18.	Jumlah Pelaporan Kelahiran di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	15
Gambar 1.19.	Jumlah Pelaporan Kematian di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	15
Gambar 1.20.	Penduduk DKI Jakarta Menurut Status Perkawinan (Usia>= 10 Tahun) Tahun 2020	16
Gambar 1.21.	Status Perkawinan Penduduk DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	16
Gambar 2.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Tahun 2020	21
Gambar 2.2.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	22
Gambar 2.3.	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) di DKI Jakarta Tahun 2020	22
Gambar 2.4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di DKI Jakarta Tahun 2020	23
Gambar 2.5.	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	24
Gambar 2.6.	Koefisien Gini DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020.....	24
Gambar 2.7.	Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020	25
Gambar 2.8.	Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	26
Gambar 2.9.	Angka Harapan Hidup Saat Lahir DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020 ...	27
Gambar 2.10.	Angka Harapan Hidup Saat Lahir di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	27
Gambar 2.11.	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020	28
Gambar 2.12.	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020.....	28

Gambar 2.13.	Indeks Pembangunan Gender DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020	29
Gambar 2.14.	Indeks Pembangunan Gender di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	30
Gambar 3.1.	Jumlah Siswa/Mahasiswa dan Tenaga Pendidik di Semua Jenjang di DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021	35
Gambar 3.2.	Persentase Penduduk Usia 7-24 tahun yang Masih Bersekolah di DKI Jakarta Menurut Kelompok Usia Tahun 2020	36
Gambar 3.3.	Jumlah Siswa Putus Sekolah di DKI Jakarta Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020	36
Gambar 3.4.	Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru di Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun 2020	37
Gambar 3.5.	Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru di Sekolah di Bawah Kementerian Agama Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021	37
Gambar 3.6.	Rasio Murid Terhadap Guru di DKI Jakarta Menurut Status Sekolah Tahun 2020	38
Gambar 3.7.	Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi di DKI Jakarta Tahun 2020	39
Gambar 3.8.	Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun 2020	39
Gambar 3.9.	Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Agama Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021	40
Gambar 3.10.	Rasio Murid Terhadap Sekolah di DKI Jakarta Menurut Status Sekolah Tahun 2020	40
Gambar 3.11.	Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020	41
Gambar 3.12.	Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020	42
Gambar 3.13.	Harapan Lama Sekolah di DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020	43
Gambar 3.14.	Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020	43
Gambar 3.15.	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2020	44
Gambar 3.16.	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi	44
Gambar 3.17.	Angka Melek Huruf di DKI Jakarta Menurut Kelompok Usia Tahun 2020 ...	45
Gambar 3.18.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	46
Gambar 3.19.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir di DKI Jakarta Menurut Alasan Tahun 2020	47
Gambar 3.20.	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di DKI Jakarta Tahun 2020	47
Gambar 3.21.	Jumlah Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	48
Gambar 3.22.	Persentase Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta Tahun 2020	48
Gambar 3.23.	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah, dan Bergizi Kurang di DKI Jakarta Tahun 2020	49
Gambar 3.24.	Panjang Jalan (m) di DKI Jakarta Menurut Kota Administrasi dan Tingkat Kewenangan Pemerintah	50
Gambar 3.25.	Panjang Jalan Nasional (m) di DKI Jakarta Menurut Jenis Status Tahun 2020	50
Gambar 3.26.	Luas Jalan (m ²) di DKI Jakarta Menurut Kota Administrasi dan Tingkat Kewenangan Pemerintah	51
Gambar 3.27.	Luas Jalan Nasional (m ²) di DKI Jakarta Menurut Jenis Status Tahun 2020	51
Gambar 3.28.	Panjang (m) dan Luas (m ²) Trotoar di DKI Jakarta Tahun 2020	52
Gambar 3.29.	Distribusi Persentase Rumah Tangga di DKI Jakarta Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2020	53
Gambar 3.30.	Distribusi Persentase Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020.	53

Gambar 3.31.	Jumlah Unit yang Tersedia pada Rumah Susun Sederhana di DKI Jakarta Tahun 2020.....	54
Gambar 3.32.	Jumlah Blok, Tower dan Lokasi pada Rumah Susun Sederhana di DKI Jakarta Tahun 2020	55
Gambar 3.33.	Jumlah Volume (m3) Air Bersih yang Disalurkan di DKI Jakarta Menurut Jumlah Pelanggan Tahun 2020.....	56
Gambar 3.34.	Distribusi Persentase Rumah Tangga di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi dan Sumber Air Bersih Tahun 2020	56
Gambar 3.35.	Persentase Rumah Tangga di DKI Jakarta Menurut Status Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di DKI Jakarta Tahun 2020.....	57
Gambar 3.36.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di DKI Jakarta Tahun 2020	58
Gambar 3.37.	Data Pelanggaran di DKI Jakarta Tahun 2020	59
Gambar 3.38.	Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan di DKI Jakarta Tahun 2020	60
Gambar 3.39.	Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tertinggi di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020.....	61
Gambar 3.40.	Jumlah Tawuran dan Korban di DKI Jakarta Tahun 2020.....	62
Gambar 3.41.	Jumlah Tawuran di DKI Jakarta Menurut Unsur Pelaku Tahun 2020	62
Gambar 3.42.	Jumlah Perlindungan Masyarakat per 10.000 Penduduk di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	63
Gambar 3.43.	Cakupan Perlindungan Masyarakat di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	64
Gambar 3.44.	Jumlah Polisi Pamong Praja di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	65
Gambar 3.45.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020.....	66
Gambar 3.46.	Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	66
Gambar 3.47.	Jumlah Kebakaran di DKI Jakarta Menurut Penyebab Kebakaran Tahun 2020	67
Gambar 3.48.	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.....	68
Gambar 3.49.	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	68
Gambar 3.50.	Jumlah Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta Menurut Suku Dinas Wilayah Administrasi Tahun 2020.	69
Gambar 3.51.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis dan Kota Administrasi Tahun 2020	70
Gambar 3.52.	Jumlah Pekerja Sosial di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	71
Gambar 3.53.	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi dan Jenis Tahun 2020	72
Gambar 3.54.	Jumlah Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Milik Masyarakat/Swasta dan Binaan di DKI Jakarta Menurut Jenis Lembaga Tahun 2020	72
Gambar 3.55.	Jumlah Lembaga dan Warga Binaan Sosial pada Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial di DKI Jakarta Menurut Pengelola Lembaga Tahun 2020	73
Gambar 3.56.	Jumlah Lembaga dan Warga Binaan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Lembaga Tahun 2020	74
Gambar 3.57.	Jumlah Lembaga dan Warga Binaan Sosial Lembaga Swasta Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Lembaga Tahun 2020	74
Gambar 3.58.	Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja di DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	75
Gambar 3.59.	Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	76
Gambar 3.60.	Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja di DKI Jakarta Menurut Bulan Tahun 2020	76
Gambar 3.61.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DKI Jakarta Tahun 2020	77

Gambar 3.62. Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di DKI Jakarta Tahun 2020	77
Gambar 3.63. Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Jakarta Tahun 2020	78
Gambar 3.64. Rasio Penduduk Bekerja, Tingkat Partisipasi Angka Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020.....	78
Gambar 3.65. Jumlah Penduduk Pengangguran dengan Kategori Pernah Bekerja dan Tidak Pernah Bekerja di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020.....	79
Gambar 3.66. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan pada Lembaga Layanan di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2020	80
Gambar 3.67. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DKI Jakarta Tahun 2020.....	81
Gambar 3.68. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi dan Jenis Klien Tahun 2020	81
Gambar 3.69. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut Pelaku Kekerasan Tahun 2020.....	82
Gambar 3.70. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut Tempat Kejadian Tahun 2020.....	83
Gambar 3.71. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut Bentuk Kekerasan Tahun 2020.....	83
Gambar 3.72. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut Usia Pelaku Tahun 2020.....	84
Gambar 3.73. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut Usia Klien Tahun 2020 ..	84
Gambar 3.74. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DKI Jakarta Menurut Pendidikan Pelaku dan Klien Tahun 2020	85
Gambar 3.75. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DKI Jakarta Menurut Pekerjaan Pelaku dan Klien Tahun 2020.	85
Gambar 3.76. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut yang Melapor ke Kepolisian Tahun 2020	86
Gambar 3.77. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di DKI Jakarta Tahun 2020.....	87
Gambar 3.78. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah di DKI Jakarta Tahun 2020.	88
Gambar 3.79. Produksi Padi di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020...	88
Gambar 3.80. Persentase Luas Panen Tanaman Sayuran di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	90
Gambar 3.81. Persentase Luas Panen Tanaman Sayuran di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020.....	90
Gambar 3.82. Persentase Produksi Tanaman Sayuran di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020.....	91
Gambar 3.83. Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran di DKI Jakarta Tahun 2020	91
Gambar 3.84. Produksi Buah-buahan (Kuintal) di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	92
Gambar 3.85. Produksi Buah-buahan (Kuintal) di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020.....	92
Gambar 3.86. Luas Panen (m ²) dan Produksi Tanaman Biofarmaka (kg) di DKI Jakarta Tahun 2020	93
Gambar 3.87. Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka (kg) di DKI Jakarta Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020.	94
Gambar 3.88. Luas Panen (m ²) dan Produksi Tanaman Hias (tangcai) di DKI Jakarta Tahun 2020.....	94
Gambar 3.89. Jumlah Produksi Tanaman Hias (tangcai) di DKI Jakarta Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020	95
Gambar 3.90. Luas Agrowisata (m ²) di DKI Jakarta Tahun 2020.....	96
Gambar 3.91. Luas Kebun Bibit (m ²) di DKI Jakarta Tahun 2020	96
Gambar 3.92. Kualitas Udara Berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara di DKI Jakarta Menurut Banyaknya Hari Tahun 2020	98
Gambar 3.93. Tingkat Pencemaran Udara di DKI Jakarta Menurut Nilai Ukur Paling Tinggi Tahun 2020	99
Gambar 3.94. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melakukan Uji Emisi di DKI Jakarta Menurut Hasil Uji Tahun 2020.	99
Gambar 3.95. Hasil Uji Emisi Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Menurut Bahan Bakar Tahun 2020.....	100

Gambar 3.96.	Rata-Rata Volume Sampah Sungai (m ³) di DKI Jakarta Menurut Kota Administrasi Tahun 2020	101
Gambar 3.97.	Jumlah Tempat Pembuangan Sementara di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	102
Gambar 3.98.	Jenis Tempat Pembuangan Sementara di DKI Jakarta Tahun 2020.....	102
Gambar 3.99.	Jumlah Pencatatan Akta Kelahiran di DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Administrasi Tahun 2020	104
Gambar 3.100.	Jumlah Pencatatan Akta Kematian di DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Administrasi Tahun 2020.....	105
Gambar 3.101.	Jumlah Pencatatan Akta Perkawinan di DKI Jakarta Menurut Agama dan Wilayah Administrasi Tahun 2020	105
Gambar 3.102.	Jumlah Pencatatan Akta Perceraian di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	106
Gambar 3.103.	Jumlah Kartu Keluarga di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	106
Gambar 3.104.	Jumlah Pemilik Wajib Kartu Tanda Penduduk di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	107
Gambar 3.105.	Jumlah Pemilik Kartu Identitas Anak di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	108
Gambar 3.106.	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Aktif dan Kelompok Binaan di DKI Jakarta Tahun 2020.....	109
Gambar 3.107.	Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta Tahun 2020	109
Gambar 3.108.	Jumlah Pos Layanan Terpadu di DKI Jakarta Tahun 2020	110
Gambar 3.109.	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020.....	111
Gambar 3.110.	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melayani KB di DKI Jakarta Tahun 2020.	111
Gambar 3.111.	Jumlah Klinik Keluarga Berencana di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	112
Gambar 3.112.	Jumlah Pasangan Usia Subur Menurut Wilayah Administrasi di DKI Jakarta Tahun 2020	113
Gambar 3.113.	Jumlah Keluarga Berencana Aktif di DKI Jakarta Tahun 2020.....	113
Gambar 3.114.	Jumlah Keluarga Berencana Baru Selama di DKI Jakarta Tahun 2020	114
Gambar 3.115.	Jumlah Peserta Keluarga Berencana Baru di DKI Jakarta Menurut Metode Penanganan Tahun 2020.....	114
Gambar 3.116.	Jumlah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa Berencana di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020.....	115
Gambar 3.117.	Jumlah Keluarga Berencana Aktif di DKI Jakarta Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2020	115
Gambar 3.118.	Jumlah Keluarga Berencana Baru di DKI Jakarta Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2020	116
Gambar 3.119.	Armada Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2020.	117
Gambar 3.120.	Jenis Bus Transjakarta Tahun 2020.....	118
Gambar 3.121.	Operator/Perusahaan Angkutan Massal Transjakarta Tahun 2020	118
Gambar 3.122.	Jumlah Angkutan Umum yang Telah Terintegrasi dengan JakLingko di DKI Jakarta Tahun 2020	119
Gambar 3.123.	Jumlah Penumpang Mass Rapid Transit, Light Rail Transit dan Bus Rapid Transit Transjakarta Tahun 2020	119
Gambar 3.124.	Rekapitulasi Kecepatan Rata-Rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk di DKI Jakarta Tahun 2020	120
Gambar 3.125.	Jumlah Kapal Berangkat dan Penumpang Naik Ke Kepulauan Seribu Tahun 2020	121
Gambar 3.126.	Jumlah Penumpang Kapal di Kepulauan Seribu Berdasarkan Tujuan Pulau yang Dikunjungi Tahun 2020.....	121
Gambar 3.127.	Jumlah Kapal Tiba dan Berangkat di Kepulauan Seribu Tahun 2020	122
Gambar 3.128.	Bentuk Penindakan Penegakan Hukum terhadap Kendaraan di DKI Jakarta Tahun 2020.....	122
Gambar 3.129.	Jumlah Kantor Pos Pembantu di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	124
Gambar 3.130.	Jumlah Kelurahan di DKI Jakarta Penerima Sinyal Internet Telepon Seluler Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	125

Gambar 3.131. Jenis Sinyal Internet Telepon Seluler di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	125
Gambar 3.132. Jumlah Sambungan Telepon di DKI Jakarta Tahun 2020.	126
Gambar 3.133. Jumlah Siaran Pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020	126
Gambar 3.134. Topik Siaran Pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020	127
Gambar 3.135. JakWifi di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	128
Gambar 3.136. JakWifi di DKI Jakarta Menurut Gedung Tahun 2020	129
Gambar 3.137. Titik Akses JakWifi di DKI Jakarta Menurut Skema Penyediaan Tahun 2020	129
Gambar 3.138. Titik Akses JakWifi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	130
Gambar 3.139. Titik Akses JakWifi Corporate Social Responsibility di DKI Jakarta Tahun 2020	130
Gambar 3.140. Titik Akses JakWifi Kolaborasi di DKI Jakarta Tahun 2020.	131
Gambar 3.141. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di DKI Jakarta Tahun 2020	132
Gambar 3.142. Jumlah Koperasi di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	132
Gambar 3.143. Jumlah Anggota Koperasi di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	133
Gambar 3.144. Jumlah Modal Usaha di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	134
Gambar 3.145. Jumlah Volume Usaha di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	134
Gambar 3.146. Proyek dan Investasi Dalam dan Luar Negeri di DKI Jakarta Tahun 2020	135
Gambar 3.147. Jumlah Masyarakat Aktif Berolahraga di DKI Jakarta Tahun 2020	136
Gambar 3.148. Jumlah Masyarakat Aktif Berolahraga di DKI Jakarta Menurut Lokasi Kegiatan Tahun 2020	137
Gambar 3.149. Jumlah Fasilitas Olahraga di DKI Jakarta Menurut Kota Administrasi Tahun 2020	138
Gambar 3.150. Jumlah Fasilitas Olahraga di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020	138
Gambar 3.151. Jumlah Kegiatan Kepemudaan di DKI Jakarta Menurut Lokasi dan Jumlah Peserta Tahun 2020	139
Gambar 3.152. Jumlah Peserta Kegiatan Olahraga di DKI Jakarta Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2020	140
Gambar 3.153. Jumlah Organisasi Kesenian di DKI Jakarta Tahun 2020	140
Gambar 3.154. Ragam Organisasi Kesenian di DKI Jakarta Tahun 2020	141
Gambar 3.155. Jumlah Patung dan Museum di DKI Jakarta Tahun 2020	142
Gambar 3.156. Jumlah Koleksi Buku, Kunjungan ke Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020	142
Gambar 3.157. Jumlah Kendaraan Perpustakaan Keliling di DKI Jakarta Tahun 2020	143
Gambar 3.158. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke <i>Tourist Information Center</i> di DKI Jakarta Menurut Tempat Kunjungan Tahun 2020	145
Gambar 3.159. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Masuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tahun 2020	145
Gambar 3.160. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara melalui Pintu Masuk Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma Tahun 2020	146
Gambar 3.161. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke <i>Tourist Information Center</i> DKI Jakarta Menurut Tempat Kunjungan Tahun 2020	146
Gambar 3.162. Jumlah Pengunjung Nusantara di DKI Jakarta Menurut Lima Destinasi Wisata Unggulan Tahun 2020	147
Gambar 3.163. Jumlah Pengunjung Mancanegara di DKI Jakarta Menurut Lima Destinasi Wisata Unggulan Tahun 2020	147
Gambar 3.164. Jumlah Pengunjung Nusantara Museum di DKI Jakarta Menurut Jenis Museum Tahun 2020	148
Gambar 3.165. Jumlah Pengunjung Mancanegara Museum di DKI Jakarta Menurut Jenis Museum Tahun 2020	148
Gambar 3.166. Jumlah Kamar yang Tersedia di Hotel Bintang di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	149
Gambar 3.167. Jumlah Kamar yang Tersedia pada Hotel Non Bintang di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	150

Gambar 3.168.	Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Berbintang di DKI Jakarta Menurut Jenis Hotel Tahun 2020	150
Gambar 3.169.	Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang dan Non Bintang di DKI Jakarta Menurut Jenis Hotel dan Bulan Tahun 2020	151
Gambar 3.170.	Persentase Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang di DKI Jakarta Menurut Bulan (Hari) dan Kategori Tahun 2020	151
Gambar 3.171.	Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara pada Hotel Berbintang di DKI Jakarta Menurut Bulan (Hari) dan Kategori Tahun 2020	152
Gambar 3.172.	Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Nusantara di Hotel Berbintang di DKI Jakarta Menurut Bulan (Hari) Tahun 2020	153
Gambar 3.173.	Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara di Hotel Berbintang di DKI Jakarta Menurut Bulan (Hari) Tahun 2020	153
Gambar 3.174.	Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Nusantara di Hotel Berbintang di DKI Jakarta Menurut Bulan (Hari) Tahun 2020	154
Gambar 3.175.	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2020	154
Gambar 3.176.	Jumlah Titik Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Menurut Kota Administrasi Tahun 2020.	155
Gambar 3.177.	Luas Ruang Terbuka Hijau (m ²) di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	156
Gambar 3.178.	Distribusi Listrik PT PLN pada Golongan/Ranting PLN (GWh) di DKI Jakarta Menurut Unit Pelayanan Pelanggan Tahun 2020	158
Gambar 3.179.	Jumlah Daya Terjual (GWh) di DKI Jakarta Menurut Golongan Tahun 2020.	158
Gambar 3.180.	Jumlah Pelanggan Listrik (Ribuan) di DKI Jakarta Menurut Golongan Tahun 2020	159
Gambar 3.181.	Rasio Ekspor Impor dalam Struktur Produk Domestik Regional Bruto di DKI Jakarta Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020	160
Gambar 3.182.	Sepuluh Komoditas Utama Ekspor dengan Nilai <i>Free on Board</i> Tertinggi (Juta USD) di DKI Jakarta Tahun 2020	161
Gambar 3.183.	Sepuluh Komoditas Utama Impor dengan Nilai <i>Free on Board</i> Tertinggi (Juta USD) di DKI Jakarta Tahun 2020	161
Gambar 3.184.	Sepuluh Negara Tujuan Ekspor Terbesar (Ton) di DKI Jakarta Menurut Volume Tahun 2020	162
Gambar 3.185.	Sepuluh Negara Tujuan Ekspor Terbesar dari DKI Jakarta Menurut Nilai <i>Free on Board</i> (USD) Tahun 2020	162
Gambar 3.186.	Sepuluh Negara Pengimpor Terbesar ke DKI Jakarta Menurut Volume (Ton) Tahun 2020	163
Gambar 3.187.	Sepuluh Negara Pengimpor Terbesar Menurut Nilai <i>Free on Board</i> (USD) Tahun 2020	163
Gambar 3.188.	Ekspor dan Impor Melalui DKI Jakarta (Miliar USD) Tahun 2020.	164
Gambar 3.189.	Ekspor Barang Asal DKI Jakarta (Juta USD) Tahun 2020	164
Gambar 3.190.	Harga Rata-rata Bahan Pangan Utama (Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020.	165
Gambar 3.191.	Sepuluh Komoditas Pangan dengan Tingkat Fluktuasi Harga Tertinggi (persen) di DKI Jakarta Tahun 2020	166
Gambar 3.192.	Sepuluh Komoditas Pangan dengan Tingkat Fluktuasi Harga Terendah (persen) di DKI Jakarta Tahun 2020	166
Gambar 3.193.	Tren Harga Beras (Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020	167
Gambar 3.194.	Pemasukan dan Pengeluaran Stok Beras (Ton) di DKI Jakarta Tahun 2020	167
Gambar 3.195.	Pemasukan Stok Beras (Ton) di DKI Jakarta Tahun 2020	168
Gambar 3.196.	Pengeluaran Stok Beras (Ton) di DKI Jakarta Tahun 2020	168
Gambar 3.197.	Stok Beras Periode Tiap Akhir Bulan (Ton) di DKI Jakarta Tahun 2020	169
Gambar 3.198.	Perbandingan Harga Rata-Rata Bahan Pangan (Rupiah) di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	169
Gambar 3.199.	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton) di DKI Jakarta Tahun 2020	170
Gambar 3.200.	Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di DKI Jakarta Tahun 2020	171

Gambar 3.201.	Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di DKI Jakarta Tahun 2020	171
Gambar 3.202.	Jumlah Nelayan di DKI Jakarta Menurut Jenis dan Status Tahun 2020 ..	172
Gambar 3.203.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	173
Gambar 3.204.	Rekapitulasi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020	174
Gambar 4.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam Struktur Produk Domestik Regional Bruto (Persen) di DKI Jakarta Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020	177
Gambar 4.2.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DKI Jakarta Tahun 2020.....	178
Gambar 4.3.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di DKI Jakarta dengan Pendidikan Ditamatkan Sekolah Dasar Menurut Sektor Tahun 2020.	179
Gambar 4.4.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di DKI Jakarta dengan Pendidikan yang Ditamatkan Sekolah Menengah Pertama Menurut Sektor Tahun 2020.....	180
Gambar 4.5.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di DKI Jakarta dengan Pendidikan yang Ditamatkan Sekolah Menengah Atas Menurut Sektor Tahun 2020.....	180
Gambar 4.6.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Perguruan Tinggi di DKI Jakarta Menurut Sektor Tahun 2020.....	181
Gambar 5.1.	Jumlah Bank dan Kantor Bank di DKI Jakarta Menurut Jenis Bank Tahun 2020.	185
Gambar 5.2.	Posisi Simpan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing di Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020.....	187
Gambar 5.3.	Total Pinjaman yang Diberikan Bank Umum (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020.....	187
Gambar 5.4.	Total Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020	188
Gambar 5.5.	Posisi Simpanan, Pinjaman yang Diberikan dan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Menurut Bulan Tahun 2020.	189
Gambar 5.6.	Posisi Simpanan, Pinjaman yang Diberikan dan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020.....	189
Gambar 5.7.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan DKI Jakarta Tahun 2020	190
Gambar 5.8.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta dan Indonesia (persen) Tahun 2020	191
Gambar 5.9.	PDRB ADHB DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi di DKI Jakarta (Miliar Rupiah) Tahun 2020	191
Gambar 5.10.	Sepuluh Lapangan Usaha dengan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Terbesar (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020.....	192
Gambar 5.11.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen) di DKI Jakarta Tahun 2020.....	192
Gambar 5.12.	Inflasi Tahunan DKI Jakarta dan Nasional (Persen) Tahun 2020	193
Gambar 5.13.	Inflasi DKI Jakarta per Bulan (Persen) Tahun 2020	194
Gambar 5.14.	Laju Inflasi Harga Konsumen per Bulan (Persen) di DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020	194
Gambar 5.15.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Triliun Rupiah) Tahun 2020.....	195
Gambar 5.16.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta (Miliar Rupiah) Tahun 2020.	196
Gambar 5.17.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer di DKI Jakarta (Miliar Rupiah) Tahun 2020	196
Gambar 5.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta (Miliar Rupiah) Tahun 2020	197

Gambar 5.19.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi di DKI Jakarta (Miliar Rupiah) Tahun 2020	197
Gambar 5.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal di DKI Jakarta (Triliun Rupiah) Tahun 2020	198
Gambar 6.1.	Kebencanaan di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020	201
Gambar 6.2.	Jumlah Korban Bencana Alam di DKI Jakarta Tahun 2020	202
Gambar 6.3.	Jumlah Korban Bencana Alam di DKI Jakarta Menurut Jenis Korban Tahun 2020	202
Gambar 6.4.	Jumlah Kelurahan Terdampak Banjir di DKI Jakarta Tahun 2020	203
Gambar 6.5.	Jumlah Penyakit Menular di DKI Jakarta Tahun 2020	204
Gambar 6.6.	Jumlah Penderita Penyakit Menular di DKI Jakarta Tahun 2020	204
Gambar 6.7.	Tiga Penyakit Menular Terbanyak di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020	205
Gambar 6.8.	Total Kasus Positif Covid-19 di DKI Jakarta Bulan Maret-Desember Tahun 2020	206
Gambar 6.9.	<i>Positivity Rate Covid-19</i> di DKI Jakarta Bulan Maret-Desember Tahun 2020	206
Gambar 6.10.	Perbandingan Total Kasus Covid-19 Nasional dengan DKI Jakarta Bulan Maret-Desember Tahun 2020	207
Gambar 6.11.	Persentase Perbandingan Kasus di DKI Jakarta dengan Nasional Bulan Maret-Desember Tahun 2020	207
Gambar 6.12.	Kasus Positif Covid-19 di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Bulan Maret-Desember Tahun 2020	208
Gambar 6.13.	Lima Kecamatan di DKI Jakarta dengan Kasus Positif Covid-19 Terbanyak pada Bulan Maret-Desember Tahun 2020	208
Gambar 6.14.	Total Kasus Meninggal Covid-19 di DKI Jakarta Bulan Maret-Desember Tahun 2020	209
Gambar 6.15.	Total Kasus Sembuh dari Covid-19 di DKI Jakarta Bulan Maret-Desember Tahun 2020	209
Gambar 7.1.	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DKI Jakarta Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024	213
Gambar 7.2.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020	215
Gambar 7.3.	Sepuluh Provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia Tertinggi Tahun 2020	216

Daftar Tabel

Tabel 3.1.	ISPU Berdasarkan Tingkat Pencemaran Udara dan Dampak Kesehatan Bagi Manusia.....	98
-------------------	---	----



BAB I

GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Geografi dan Demografi

DKI Jakarta pada Tahun 2020

664,01
km²

Luas DKI Jakarta
pada tahun 2020.



182,70
km²

Luas dari Jakarta Selatan,
sekaligus menjadi wilayah
administrasi paling luas.

11.201.121
Jiwa



88

sungai atau kanal
dengan total
panjang sungai/
kanal yaitu 652,03 km.

25,66%

atau sebanyak 2.848.771 jiwa
penduduk DKI Jakarta pada
tahun 2020 bekerja sebagai
karyawan swasta.



5,00%

> 65 tahun



70,50%

15-64 tahun



24,50%

0-14 tahun

I. Geografi dan Demografi

1.1. Karakteristik Wilayah

DKI Jakarta adalah daerah khusus yang dijadikan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. DKI Jakarta resmi menjadi ibukota negara pada tahun 1961 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari satu kabupaten dan lima kota administrasi yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu didefinisikan bahwa kabupaten administrasi adalah unsur pembantu gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh camat dan lurah serta mengoordinasikan, memantau, dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di wilayah kabupaten administrasi. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi mendefinisikan bahwa kota administrasi sebagai unsur pembantu gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat dan lurah serta mengoordinasikan, memantau, dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di wilayah kota administrasi. Kabupaten administrasi dipimpin oleh seorang bupati dan kota administrasi dipimpin oleh seorang walikota yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

1.1.1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah yang dilihat dari aspek-aspek tertentu seperti posisi geografis, ketinggian dari permukaan laut, batas wilayah, dan sebagainya. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta mencatat secara astronomis DKI Jakarta terletak pada 5° 10' 00" LS - 6° 22' 21,5" LS dan 106° 41' 12,5" BT - 106° 58' 24,2" BT dengan titik tertingginya berada pada ketinggian 79 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, DKI Jakarta berbatasan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan; Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur; Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten di sebelah barat; dan Laut Jawa di sebelah utara. Secara wilayah, DKI Jakarta dikelilingi oleh Jawa Barat, Banten, dan Laut Jawa.

Secara administrasi, DKI Jakarta mempunyai 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan, 267 kelurahan, 2.741 rukun warga (RW), dan 30.470 rukun tetangga (RT). Secara teritori, DKI Jakarta mempunyai 110 pulau dengan 79 pulau berada di Kepulauan Seribu Utara dan 31 pulau berada di Kepulauan Seribu Selatan. Jika dilihat dari segi perairan, DKI Jakarta memiliki 88 sungai/kanal dengan total panjang mencapai 652,03 km. DKI Jakarta juga memiliki waduk/situ/embung sebanyak 97 buah dengan luas badan air 509,36 hektare. Luas DKI Jakarta pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 664,01 km². Pada tahun 2019, DKI Jakarta mengalami perluasan wilayah sebesar 1,68 km². Perluasan wilayah ini dapat terjadi dikarenakan adanya program reklamasi di Pantai Utara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.1.2. Wilayah Administrasi

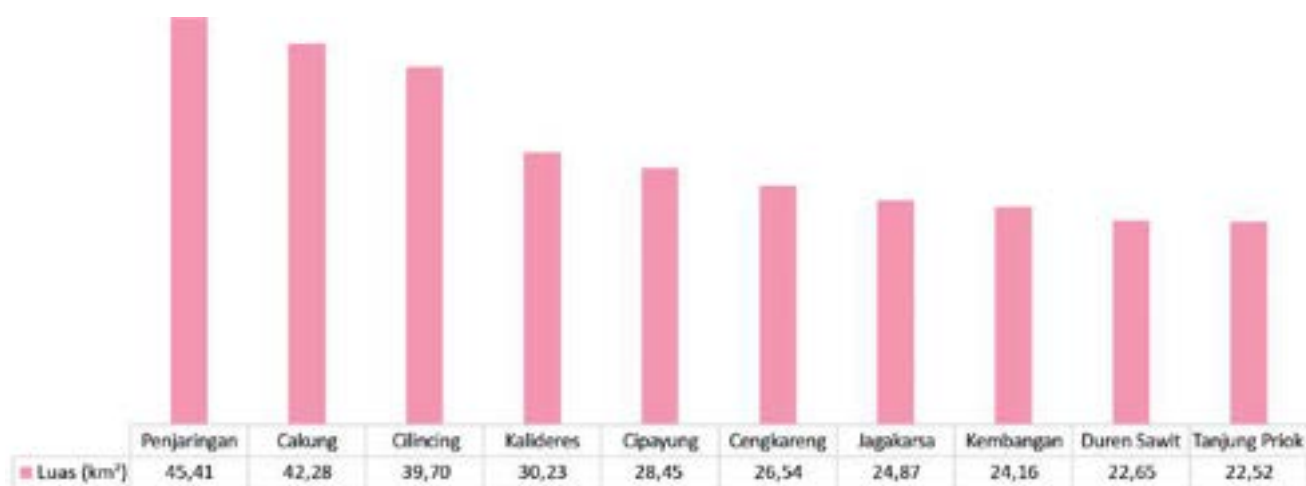
Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Republik Indonesia membagi wilayah negaranya dalam daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mendefinisikan bahwa wilayah administrasi sebagai lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah.



Gambar 1.1. Luas Wilayah (km²) di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Menurut pembagian wilayah administrasi, Jakarta Timur merupakan wilayah terluas dengan luas wilayah yang mencapai 27,51%. Luas Jakarta Timur disusul oleh Jakarta Selatan dengan 23,24%. Luasnya Jakarta Timur ini menjadi salah satu faktor yang mendukung banyaknya penduduk yang bermukim di wilayah ini. Sehingga, terdapat banyak fasilitas pemerintah yang berada di Jakarta Timur seperti fasilitas kesehatan, olahraga, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan, Kepulauan Seribu adalah wilayah administrasi terkecil di DKI Jakarta dengan persentase luas sebesar 1,53%.

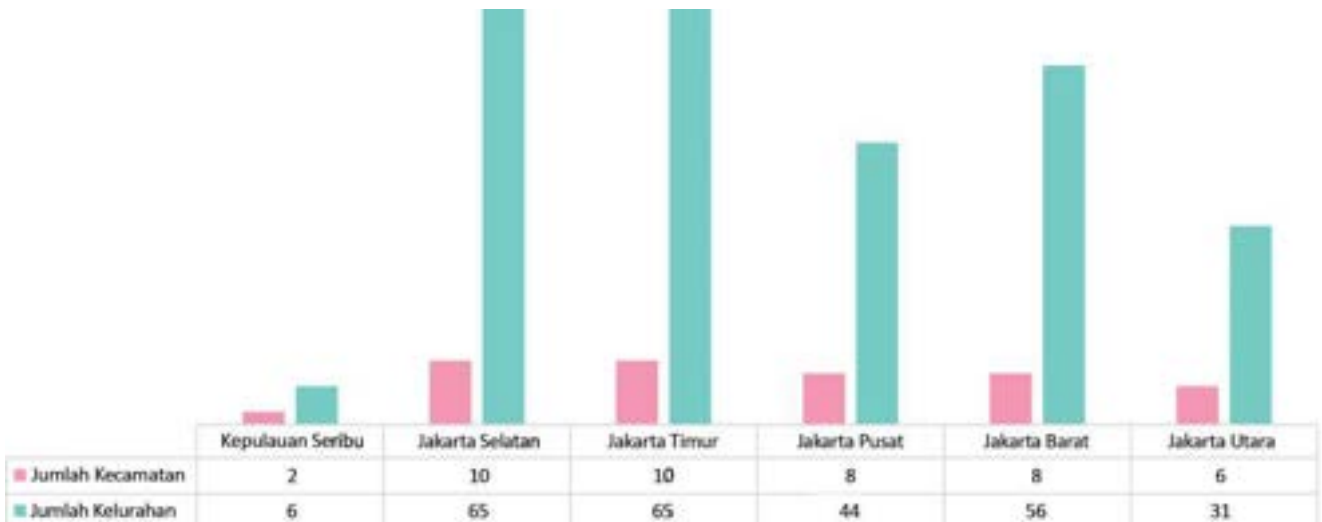


Gambar 1.2. Sepuluh Kecamatan Terluas (km²) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Kecamatan Penjaringan di Jakarta Utara merupakan kecamatan terluas di DKI Jakarta dengan luas yang mencapai 45,41 km², sedangkan Kecamatan Johar Baru di Jakarta Pusat merupakan kecamatan paling sempit di DKI Jakarta dengan luas 2,38 km². Sepuluh kecamatan terluas di DKI Jakarta mencakup

sebesar 46,20% dari luas DKI Jakarta. Sepuluh kecamatan tersebut masing-masing terdapat sebanyak tiga kecamatan di Jakarta Utara (Penjaringan, Cilincing, dan Tanjung Priok), tiga kecamatan di Jakarta Timur (Cakung, Cipayung, dan Duren Sawit), tiga kecamatan di Jakarta Barat (Kalideres, Cengkareng, dan Kembangan), dan satu kecamatan di Jakarta Selatan (Jagakarsa). Kelurahan terluas berada di Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur dengan luas 13,07 km², sedangkan Kelurahan Jelambar Baru di Jakarta Barat merupakan kelurahan paling sempit dengan luas 0,14 km².



Gambar 1.3. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Selatan dan Jakarta Timur merupakan wilayah administrasi dengan jumlah kecamatan dan kelurahan terbanyak yaitu 10 kecamatan dan 65 kelurahan di DKI Jakarta, sedangkan untuk jumlah kecamatan dan kelurahan paling sedikit berada di Kepulauan Seribu dengan dua kecamatan dan enam kelurahan.



Gambar 1.4. Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Jika melihat dari jumlah RW dan RT, Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah RW dan RT terbanyak dengan total mencapai 709 RW dan 7.929 RT. Hal ini berhubungan dengan kepadatan penduduk di Jakarta Timur yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk di wilayah administrasi lainnya. Sedangkan, wilayah dengan jumlah RW dan RT paling sedikit berada di Kepulauan Seribu yaitu 24 RW dan 127 RT. Banyaknya jumlah RT, RW, kelurahan, dan kecamatan yang berada di DKI Jakarta berkaitan dengan banyaknya penduduk dan luas wilayah.

1.1.3. Iklim dan Cuaca

Secara geografis, DKI Jakarta memiliki iklim tropis yang menyebabkan wilayah ini memiliki dua musim yaitu hujan dan kemarau. Dua musim ini berkaitan erat dengan suhu minimum dan maksimum yang terjadi setiap tahunnya. Iklim dan cuaca merupakan gambaran parameter dari kondisi atmosfer di suatu wilayah yang dibentuk dari unsur-unsur seperti kelembaban, suhu udara, tekanan udara, dan kecepatan angin. Iklim dan cuaca ini dapat diukur dengan menggunakan alat seperti termometer atau higrometer.



Gambar 1.5. Suhu Rata-Rata (°C) di DKI Jakarta Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2020

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pada tahun 2020, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia mencatat suhu minimum di DKI Jakarta sepanjang tahun 2020 adalah 24,00°C, sedangkan suhu maksimum mencapai 35,60°C dengan suhu rata-rata 28,90°C. Jika dilihat dari gambar di atas, suhu rata-rata di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok lebih tinggi dari suhu rata-rata di Stasiun Pengamatan Kemayoran. Suhu rata-rata terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 27,72°C di Stasiun Kemayoran dan 27,92°C di Stasiun Tanjung Priok. Setelah itu, suhu rata-rata cenderung naik hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei yaitu 29,58°C di Stasiun Pengamatan Kemayoran dan 29,72°C di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok.

Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan negara ini mempunyai iklim tropis, sehingga terdapat dua musim yaitu hujan dan kemarau. Dua musim ini berkaitan erat dengan suhu minimum dan maksimum yang terjadi setiap tahunnya. Suhu minimum tahunan yang diamati dari Stasiun Pengamatan Kemayoran adalah 24,00°C yang terjadi pada bulan Januari, Februari, Agustus, September, dan Oktober. Sedangkan, dari pengamatan di Stasiun Kemayoran suhu tertinggi mencapai 35,60°C yang terjadi pada bulan Mei. Suhu minimum tahunan yang diamati dari Stasiun Tanjung Priok adalah 24,00°C yang terjadi hanya pada bulan Desember, sedangkan suhu tertinggi mencapai 35,200°C yang terjadi pada bulan Mei dan Juni.





Gambar 1.6. Curah Hujan (mm) di DKI Jakarta Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2020

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

BMKG Indonesia mencatat terjadi sebanyak 168 hari hujan di DKI Jakarta sepanjang tahun 2020. Curah hujan tertinggi pada tahun 2020 menurut Stasiun Pengamatan Kemayoran dan Tanjung Priok terjadi pada bulan Februari masing-masing sebesar 1.043,20 dan 784,50 mm. Setelah itu, curah hujan yang diamati dari Stasiun Pengamatan Kemayoran mengalami penurunan yang signifikan sampai dengan titik terendahnya yaitu 12,10 mm pada bulan Juli. Curah hujan di antara bulan Maret sampai dengan Desember cenderung stabil baik berdasarkan pengamatan di Stasiun Pengamatan Kemayoran maupun Tanjung Priok.



Gambar 1.7. Kelembaban Udara (%) Rata-Rata di DKI Jakarta Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2020

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Kelembaban udara yang dapat diukur menggunakan higrometer dapat berubah-ubah dan sangat bergantung pada suhu di suatu wilayah. Pada tahun 2020, kelembaban udara minimum di DKI Jakarta adalah 38,00% dan kelembaban maksimum adalah 100,00%. Pada tahun yang sama, kelembaban udara rata-rata di DKI Jakarta adalah 76,96%. Kelembaban udara rata-rata tertinggi yang diamati dari Stasiun Pengamatan Kemayoran dan Tanjung Priok terjadi pada bulan Februari masing-masing sebesar 83,78% dan 84,19%. Bulan Agustus merupakan bulan dengan kelembaban udara rata-rata tertinggi masing-masing 70,89% di Stasiun Pengamatan Kemayoran dan 73,27% di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok. Tren kelembaban udara di dua stasiun pengamatan yaitu Kemayoran dan Tanjung Priok cenderung sama yang sempat naik pada bulan Februari dan cenderung turun dari bulan Maret sampai dengan September.



Gambar 1.8. Kecepatan Angin (meter/detik) di DKI Jakarta Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2020

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pada tahun 2020, BMKG Indonesia mencatat kecepatan angin minimum di DKI Jakarta sebesar 1,23 meter/detik, sedangkan kecepatan maksimum angin mencapai 1,98 meter/detik. Kecepatan angin yang diamati dari Stasiun Pengamatan Tanjung Priok lebih tinggi jika dibandingkan dengan Stasiun Pengamatan Kemayoran. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 3,61 meter/detik yang tercatat di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok. Kecepatan angin terendah pada bulan Mei yaitu 1,23 meter/detik yang tercatat di Stasiun Pengamatan Kemayoran. Pada tahun yang sama, BMKG mencatat tekanan udara rata-rata di DKI Jakarta sebesar 1.003,30 millibars. Sedangkan, tekanan udara minimum dan maksimum masing-masing berada pada angka 1.003,90 dan 1.014,30 millibars.



Gambar 1.9. Rata-Rata Lama Penyinaran Matahari (%) di DKI Jakarta Menurut Stasiun Pengamatan Tahun 2020

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Data dari BMKG Indonesia menunjukkan, rata-rata penyinaran matahari sepanjang tahun 2020 sebesar 55,00%. Rata-rata lama penyinaran matahari dari pengamatan di Stasiun Tanjung Priok lebih tinggi jika dibandingkan dengan Stasiun Kemayoran. Rata-rata lama penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 96,85% yang tercatat di Stasiun Pengamatan Tanjung Priok. Rata-rata lama penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 35,34% yang tercatat di Stasiun Pengamatan Kemayoran.



1.2. Demografi

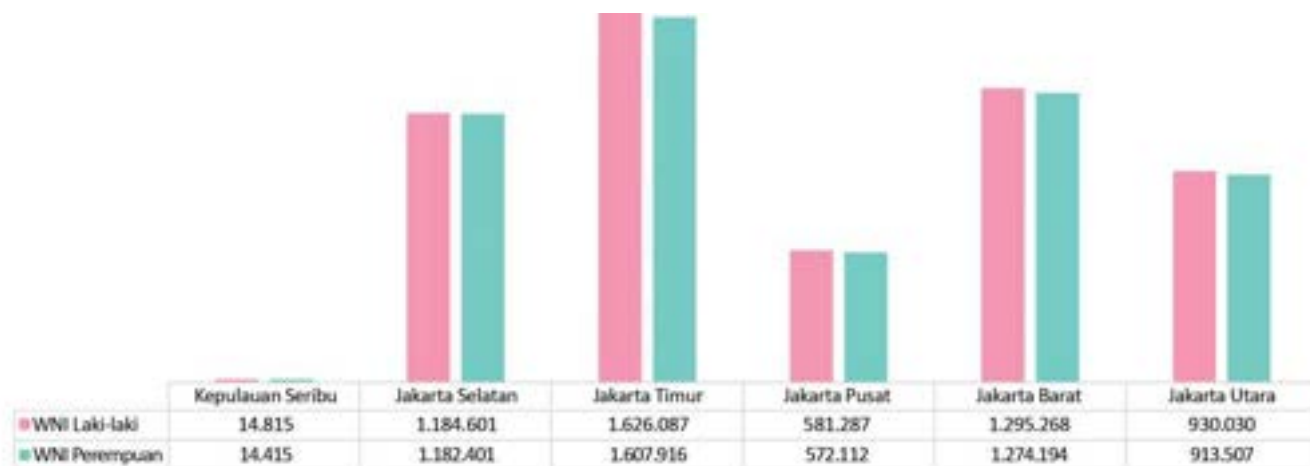
Demografi adalah data yang menjelaskan keadaan populasi suatu masyarakat. Data yang dijelaskan dapat berupa usia, jenis kelamin, suku, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Selain untuk menggambarkan suatu populasi, data demografi juga dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak baik pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh penggunaan data demografi untuk mengetahui atau menentukan potensi pasar. Selain itu, demografi juga sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan.

1.2.1. Kependudukan

Kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan penduduk seperti kepadatan penduduk, pembagian penduduk menurut usia kerja, mobilitas penduduk, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penduduk di suatu wilayah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas dalam pendataan data-data kependudukan serta pemberian pelayanan dokumen kependudukan di DKI Jakarta. Dalam rangka memberikan akses langsung kepada penduduk DKI Jakarta untuk mengajukan berbagai pelayanan administrasi kependudukan, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menyediakan sebuah kanal pelayanan yang bernama Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat (Alpukat Betawi).





Gambar 1.10. Jumlah Penduduk WNI di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 didefinisikan penduduk sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia. Sehingga, penduduk dibagi menjadi dua jenis kewarganegaraan, yaitu WNI dan WNA. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2020 sebanyak 11.201.121 jiwa yang terdiri dari 11.196.633 jiwa WNI dan 4.488 jiwa WNA. Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan 2020, pertumbuhan penduduk WNI DKI Jakarta selalu positif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,41%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 6,91%. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa penduduk laki-laki menjadi penduduk yang paling banyak. Pada tahun 2020, jumlah WNI laki-laki mencapai 50,28% atau sebanyak 5.632.088 jiwa. Jumlah WNI di DKI Jakarta naik sebesar 1,25% atau sebanyak 137.689 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebesar 28,88% atau sebanyak 3.234.003 jiwa penduduk WNI di DKI Jakarta berdomisili di Jakarta Timur. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak di DKI Jakarta, sedangkan jumlah paling sedikit berada di Kepulauan Seribu yaitu sebesar 0,26% atau sebanyak 29.230 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk yang begitu signifikan antara Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu dapat disebabkan oleh luas wilayah yang berbeda.



Gambar 1.11. Jumlah Penduduk WNA di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pertumbuhan penduduk WNA di DKI Jakarta cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir, angka pertumbuhan penduduk naik pada tahun 2017 sampai dengan 2018, kemudian turun pada tahun 2019, dan kemudian naik kembali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, jumlah WNA laki-laki mencapai 61,43% atau sebanyak 2.757 jiwa. Jumlah WNA di DKI Jakarta naik sebesar 1,23% atau sebanyak 108 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebesar 39,91% atau sebanyak 1.191 jiwa penduduk WNA di DKI Jakarta berdomisili di Jakarta Selatan. Nilai ini merupakan jumlah terbanyak di

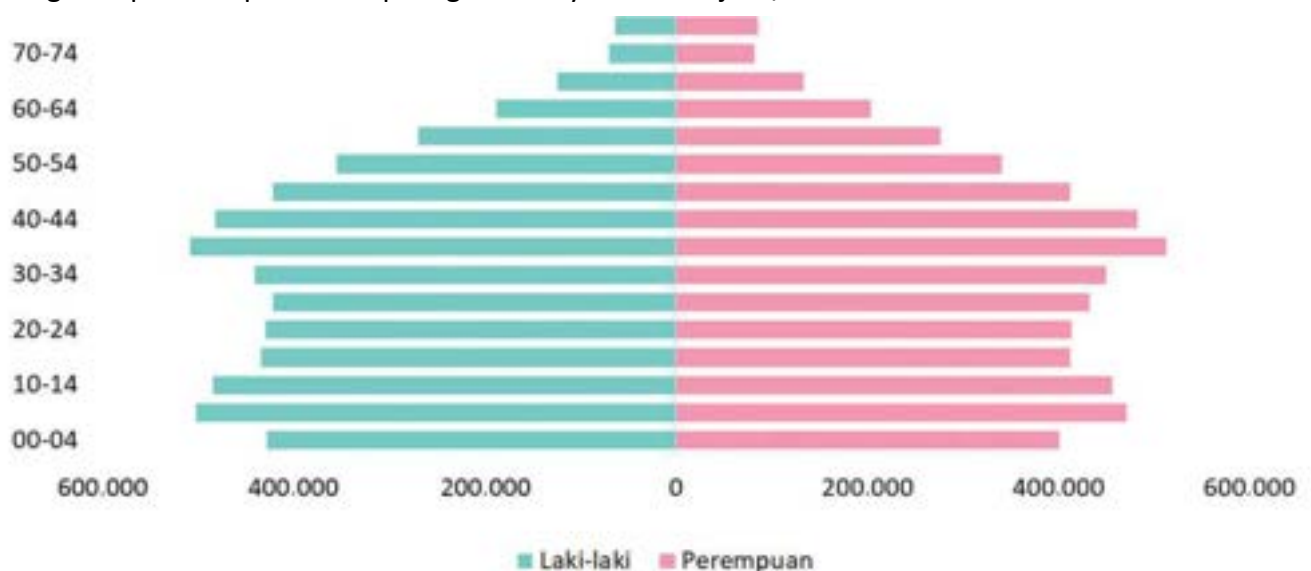
DKI Jakarta, sedangkan tidak ada satupun WNA yang berdomisili di Kepulauan Seribu. Banyaknya WNA yang menetap di Jakarta Selatan menunjukkan wilayah administrasi ini paling banyak diminati oleh WNA. Faktor lingkungan merupakan salah satu alasan yang membuat banyak WNA memilih Jakarta Selatan sebagai tempat tinggalnya. Lingkungan di Jakarta Selatan menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung keberlangsungan hidup WNA, seperti satuan pendidikan bertaraf internasional, pemukiman yang memadai, dan berbagai pusat perbelanjaan yang dapat memenuhi kebutuhan para WNA.



Gambar 1.12. Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

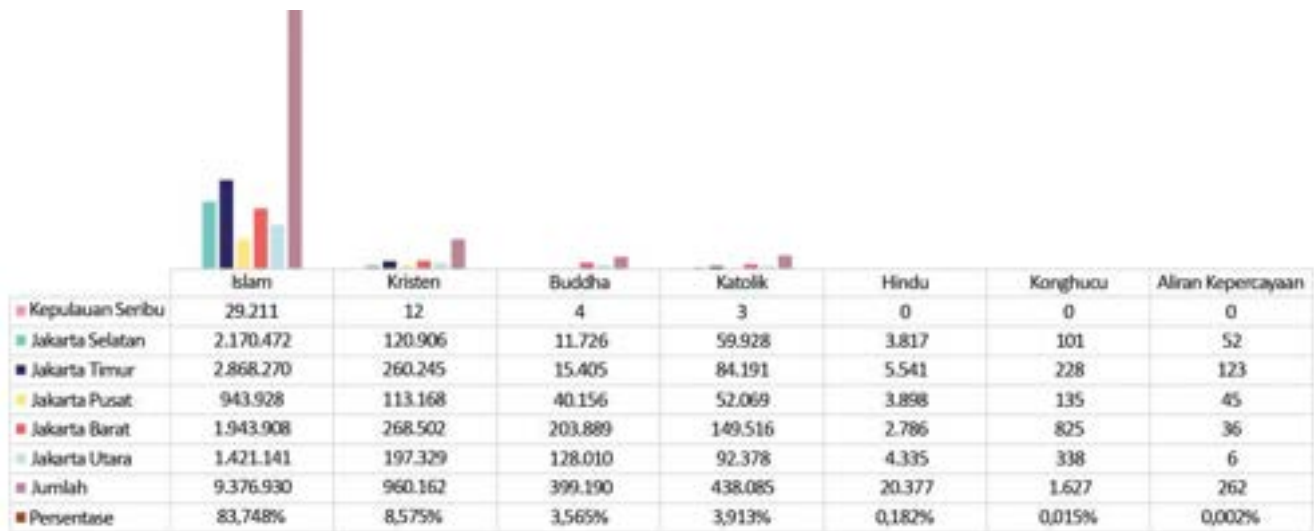
Kepadatan penduduk di DKI Jakarta dihitung dari jumlah penduduk (WNI dan WNA) dibagi dengan luas wilayah. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 16.869 jiwa/km². Meskipun jumlah penduduk Jakarta Timur paling banyak dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya, namun Jakarta Pusat merupakan wilayah terpadat dengan rata-rata kepadatan yang mencapai 22.034 jiwa/km². Selain memiliki luas wilayah paling sempit, Kepulauan Seribu juga menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu 2.871 jiwa/km².



Gambar 1.13. Piramida Penduduk DKI Jakarta Menurut Kelompok Usia Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Kelompok usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan usia 65 tahun ke atas masing-masing mencakup sebesar 24,50%, 70,50%, dan 5,00%. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, rentang usia pada 35 sampai dengan 39 tahun merupakan kelompok usia mayoritas dengan persentase sebesar 9,12%. Rasio jenis kelamin penduduk DKI Jakarta adalah 101,21 yang artinya apabila di suatu wilayah terdapat 100 perempuan, maka di sana terdapat 101 laki-laki.

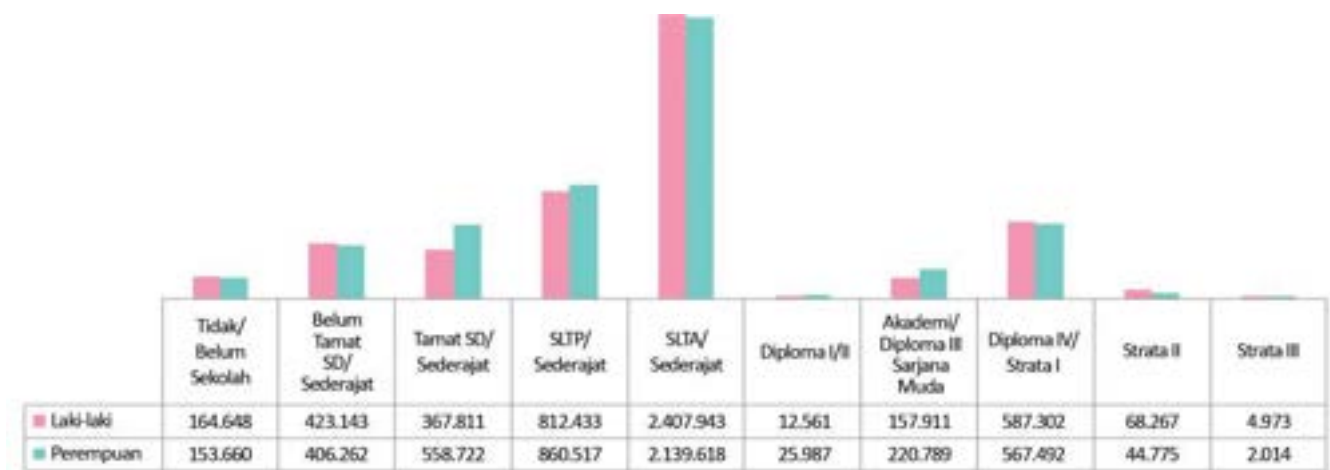


Gambar 1.14. Jumlah Penduduk di DKI Jakarta Menurut Agama dan Kepercayaan Tahun 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, terdapat enam agama dan satu kepercayaan yang diyakini oleh penduduk DKI Jakarta yaitu Islam sebesar 83,75%, Kristen sebesar 8,58%, Katolik sebesar 3,91%, Buddha sebesar 3,57%, Hindu sebesar 0,18%, Konghucu sebesar 0,01%, dan sisanya adalah aliran kepercayaan sebanyak 262 orang. Sebanyak 99,93% penduduk di Kepulauan Seribu beragama Islam, sedangkan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat pemeluk agama Kristen cukup banyak yang masing-masing mencapai 10,70% dan 10,45% dari penduduknya. Sebagian besar penganut aliran kepercayaan berdomisili di Jakarta Timur sebanyak 123 jiwa. Persebaran penganut agama di DKI Jakarta menyebabkan terjadinya pluralisme budaya yang dapat terlihat seperti halnya Masjid Istiqlal yang berdiri berhadapan dengan Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Dengan data persebaran penduduk di DKI Jakarta yang sangat banyak dan majemuk, penduduk diharapkan dapat saling berkomunikasi dengan bahasa yang dapat dipahami oleh semua makhluk, yaitu kebaikan dan akhirnya dapat saling mengucapkan syukur kepada sang Raja Semesta Alam dengan cara yang sesuai bagi masing-masing pemeluk agama.

Program Pintar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Setiap jenjang pendidikan memiliki waktu tempuh masing-masing dan kelompok usia tersendiri.





Gambar 1.15. Penduduk DKI Jakarta (> 7 Tahun) Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

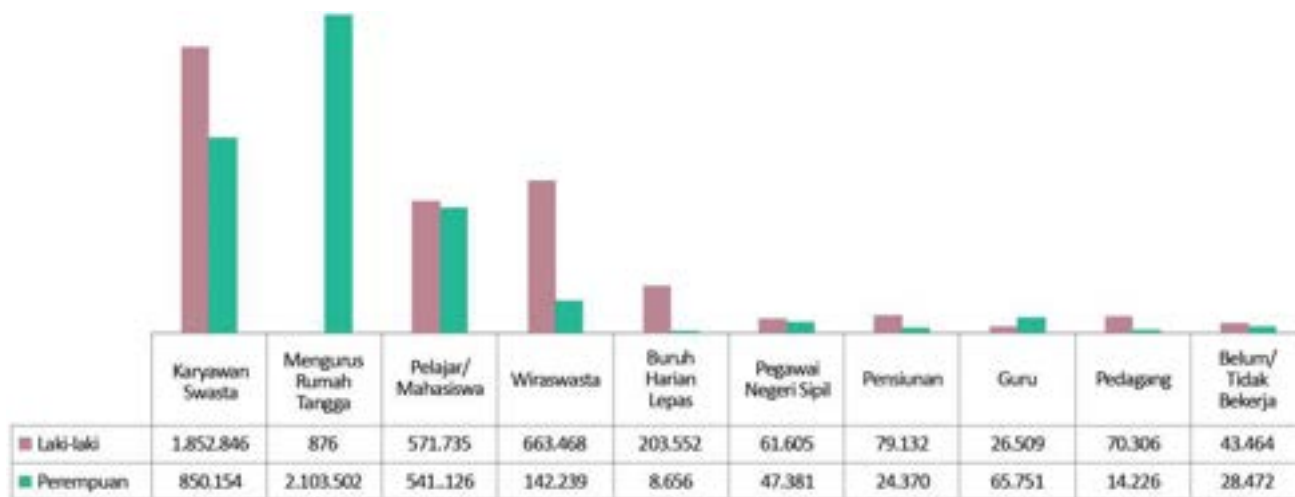
Data yang berhasil dihimpun dari Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebesar 45,54% atau sebanyak 4.547.561 jiwa penduduk DKI Jakarta berhasil menyelesaikan pendidikan pada tingkat SLTA/ sederajat. Tingginya persentase jumlah penduduk DKI Jakarta yang berhasil menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah yang mendukung program wajib belajar 12 tahun. Banyaknya penduduk DKI Jakarta dengan pendidikan terakhir SLTA/ sederajat disusul oleh penduduk yang menyelesaikan pendidikan SLTP/ sederajat dan Diploma IV/ Strata I masing-masing sebesar 16,75% atau sebanyak 1.672.950 jiwa dan 11,56% atau sebanyak 1.154.794 jiwa.



Gambar 1.16. Persentase Penduduk DKI Jakarta Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Sebanyak 21,63% penduduk di Jakarta Selatan telah menamatkan bangku perguruan tinggi, angka ini merupakan yang tertinggi di DKI Jakarta. Sedangkan, angka terendah berada di Kepulauan Seribu yang memiliki persentase penduduk sebesar 7,17%. Sebanyak 44,66% penduduk di Jakarta Timur dan 44,55% penduduk di Jakarta Pusat telah menamatkan bangku SMA/ sederajat. Persentase penduduk yang telah menamatkan bangku SMA/ sederajat merupakan persentase tertinggi di DKI Jakarta jika dibandingkan dengan persentase penduduk dengan pendidikan terakhir lainnya. Dari data yang dimiliki oleh Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, Kepulauan Seribu merupakan wilayah yang paling tertinggal dibanding wilayah lain dalam hal pendidikan formal. Hal ini dapat disebabkan karena letak geografis Kepulauan Seribu dan sarana prasarana pendidikan di wilayah ini yang tidak sebanyak wilayah administrasi lainnya.



Gambar 1.17. Penduduk DKI Jakarta (> 15 Tahun) Menurut Pekerjaan Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Sebagai pusat ekonomi di Indonesia, DKI Jakarta mempunyai banyak perusahaan swasta nasional maupun multinasional sehingga memengaruhi persentase jumlah penduduk dengan status sebagai karyawan swasta. Pada tahun 2020, mayoritas penduduk DKI Jakarta bekerja sebagai karyawan swasta sebesar 31,98% atau sebanyak 2.703.000 jiwa. Pekerjaan mengurus rumah tangga menduduki posisi kedua setelah penduduk dengan status sebagai karyawan swasta sebesar 24,90% atau sebanyak 2.104.378 jiwa. Jumlah ini disusul oleh penduduk yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa. Banyaknya sekolah dan perguruan tinggi di DKI Jakarta menjadi salah satu faktor banyaknya penduduk dengan status pelajar/mahasiswa yang mencapai sebesar 13,17% atau sebanyak 1.112.861 jiwa. Pekerjaan lainnya dengan jumlah penduduk yang cukup banyak seperti Tentara Nasional Indonesia, sopir, karyawan badan usaha milik negara, dokter, Polisi Republik Indonesia, dosen, wartawan, pengacara, dan lain-lain.

1.2.2. Dinamika Penduduk

Dinamika penduduk adalah perubahan yang terjadi dalam hal kuantitas penduduk. Beberapa faktor yang memengaruhi dinamika penduduk antara lain seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan. Kelahiran merupakan salah satu proses yang dialami manusia dalam berkembang biak. Di DKI Jakarta, setiap kelahiran penduduk dilaporkan melalui Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta dan selanjutnya diterbitkan nomor induk kependudukan (NIK) yang dapat digunakan sebagai nomor identitas kependudukan yang sah.

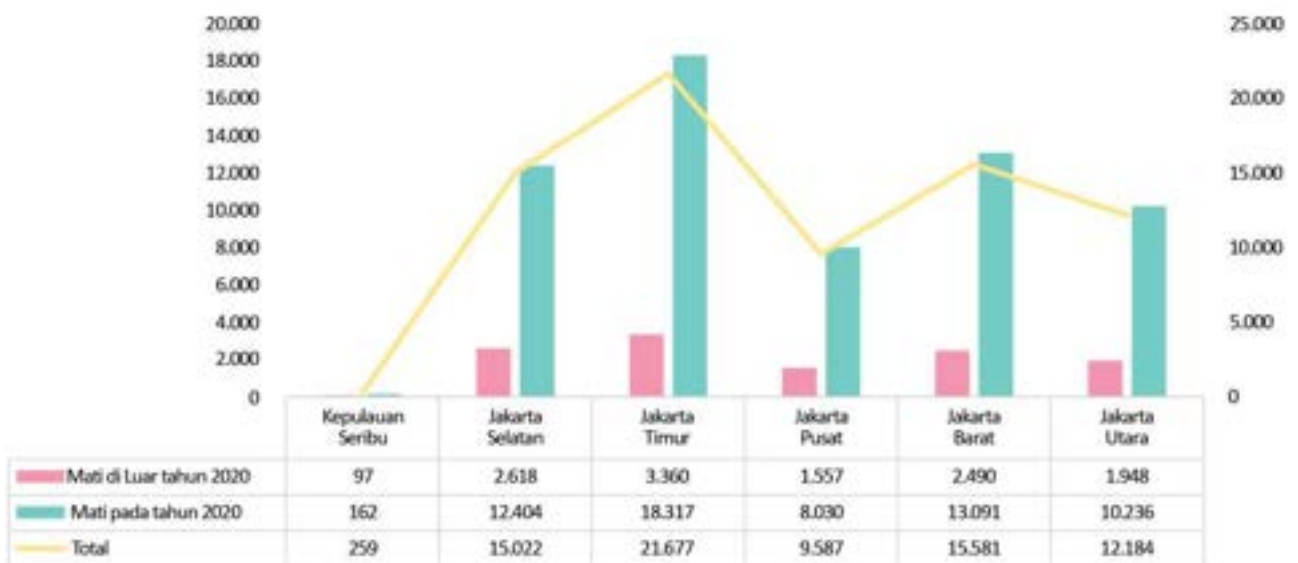




Gambar 1.18. Jumlah Pelaporan Kelahiran di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

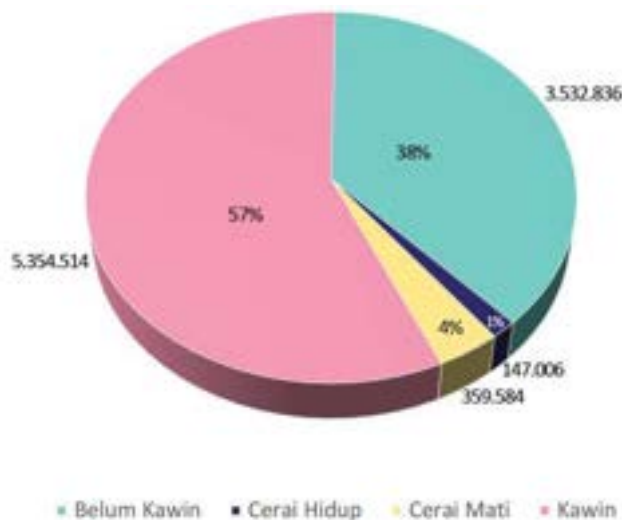
Pada tahun 2020, jumlah pelaporan kelahiran penduduk di DKI Jakarta sebanyak 137.161 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki sebesar 51,79% dan perempuan sebesar 48,21%. Jumlah pelaporan kelahiran terbanyak berada di Jakarta Timur sebesar 30,39% atau sebanyak 41.684 jiwa, sedangkan jumlah pelaporan kelahiran paling sedikit berada di Kepulauan Seribu yaitu 535 jiwa.



Gambar 1.19. Jumlah Pelaporan Kematian di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pelaporan kematian adalah jumlah kematian yang terjadi di suatu wilayah pada tahun tertentu yang dilaporkan oleh penduduk ke Disdukcapil terdekat. Dari 74.210 pelaporan di DKI Jakarta pada tahun 2020, sebanyak 16,24% laporan kematian di luar tahun 2020 dan 83,76% laporan kematian pada tahun 2020. Angka ini terjadi dikarenakan adanya penduduk yang meninggal dunia pada tahun 2019, namun pihak keluarga baru melaporkan kematiannya pada tahun 2020 sehingga laporan kematiannya tercatat pada tahun 2020.



Gambar 1.20. Penduduk DKI Jakarta Menurut Status Perkawinan (≥ 10 Tahun) Tahun 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 5.354.514 penduduk DKI Jakarta berstatus kawin. Jumlah ini disusul oleh penduduk dengan status belum kawin dan cerai hidup masing-masing sebanyak 3.532.836 dan 147.006 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah cerai hidup pada tahun 2020 bertambah sebesar 11,59% dan cerai mati bertambah sebesar 7,91%.



Gambar 1.21. Status Perkawinan Penduduk DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Menurut wilayah administrasi, persentase penduduk kawin tertinggi berada di Kepulauan Seribu yaitu 59,39%. Sedangkan, persentase penduduk cerai hidup, cerai mati, dan belum kawin tertinggi berada di Jakarta Pusat masing-masing sebesar 1,94%, 4,94%, dan 38,78%. Persentase cerai hidup di Jakarta Pusat menunjukkan bahwa terjadi sebanyak 19 perceraian hidup dari setiap 1.000 perkawinan.

Pada tahun 2020, pelaporan kelahiran penduduk di DKI Jakarta berkurang sebesar 1,97% atau sebanyak 2.750 pelaporan. Berkurangnya pelaporan kelahiran dari tahun sebelumnya dapat disebabkan oleh status kawin penduduk yang pada tahun 2020 juga berkurang sebesar 1,35% atau sebanyak 73.424 orang. Di sisi lain, pelaporan kematian pada periode yang sama bertambah sebanyak 1.285 pelaporan. Selain meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya untuk melaporkan anggota keluarganya

yang meninggal dunia, peningkatan pelaporan kematian dapat disebabkan oleh meningkatnya angka kematian penduduk dikarenakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menyebabkan penduduk harus melaporkan penyebab kematian dengan prosedur yang telah ditetapkan selama pandemi.

Setiap peristiwa yang berkaitan dengan hukum seperti kematian, kelahiran, dan perkawinan sangatlah penting untuk dibuat pencatatannya. Tujuannya adalah agar kedudukan seseorang menjadi jelas di mata hukum. Hal-hal seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), surat nikah, pembelian tanah, dan sebagainya tentu harus memiliki syarat catatan kependudukan untuk memilikinya. Dengan demikian, negara dapat bertanggung jawab atas penduduknya yang memiliki catatan penting dalam setiap kejadian yang berhubungan dengan hukum.





BAB II

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Rp18.227.000,00

pengeluaran per kapita DKI Jakarta pada tahun 2020.

1,62%

pengeluaran perkapita mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

80,77

adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta pada tahun 2020.

5

tahun terakhir, IPM di DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Rp683.339,00

menjadi nilai garis kemiskinan yang ditetapkan di DKI Jakarta.

4,69%

atau sebanyak 496,840 jiwa adalah penduduk miskin di DKI Jakarta.

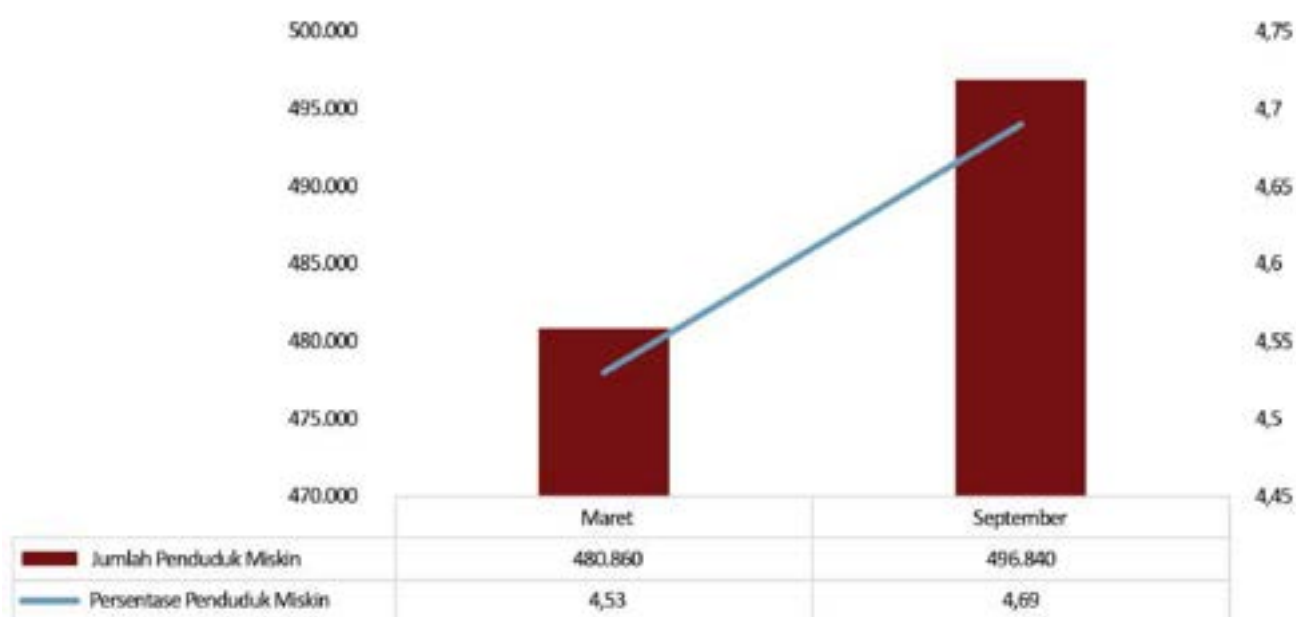


II. Kesejahteraan Masyarakat

2.1. Kemiskinan

Kesejahteraan merupakan suatu tujuan dalam hidup manusia yang memperoleh ketentraman baik dalam bidang material dan/atau spiritual. Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta adalah PD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Salah satu fungsi dari PD ini adalah mengendalikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta memberikan perlindungan sosial kepada korban bencana. Selama pandemi Covid-19, Dinsos Provinsi DKI Jakarta berperan aktif dalam memberikan bantuan sosial seperti sembako dan uang tunai kepada penduduk yang terdampak langsung dari pandemi ini.

Kemiskinan merupakan salah satu kesenjangan sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Secara umum, kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Keadaan ini juga membuat seseorang tidak memiliki akses atas kesehatan, pendidikan, listrik, air, dan akses-akses lain yang seharusnya dimiliki untuk menopang keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Kemiskinan dapat menyebabkan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh manusia dalam bertahan hidup.



Gambar 2.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, terjadi fluktuasi jumlah penduduk miskin dari Maret 2016 sampai dengan September 2020. Dalam kurun waktu tersebut, kenaikan yang paling signifikan terjadi pada September 2019 ke Maret 2020 sebesar 32,72% atau sebanyak 118.560 penduduk miskin. Penambahan penduduk miskin pada September 2019 sampai dengan Maret 2020 dapat disebabkan karena penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa. Kehilangan sumber pendapatan dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 juga menjadi faktor lain yang menyebabkan meningkatnya penduduk miskin pada tahun 2020. Sehingga, kelompok hampir miskin pada periode sebelumnya masuk dalam kategori miskin

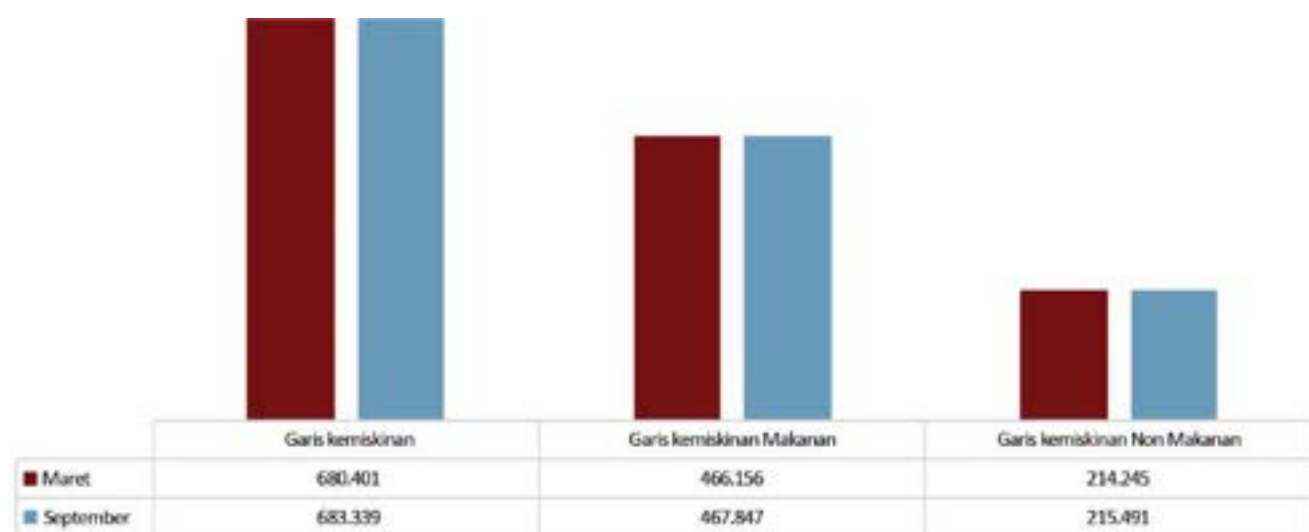
pada periode Maret 2020. Pada September 2020, keadaan ekonomi penduduk di DKI Jakarta belum membaik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang naik sebesar 3,32% atau sebanyak 15.980 penduduk miskin. Namun, kenaikan ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya.



Gambar 2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada periode Maret 2020, Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara merupakan dua wilayah dengan persentase penduduk miskin terbanyak dengan persentase masing-masing sebesar 14,87% dan 6,78%. Persentase penduduk miskin di Kepulauan Seribu naik sebesar 2,78% dan Jakarta Utara naik sebesar 1,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jakarta Utara memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak jika dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya yaitu 123.590 jiwa dan mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin terbanyak dari tahun sebelumnya sebesar 35,68%.

Garis kemiskinan adalah sejumlah uang bukan makanan yang dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok minimum per hari yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita¹. Sehingga, dapat didefinisikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

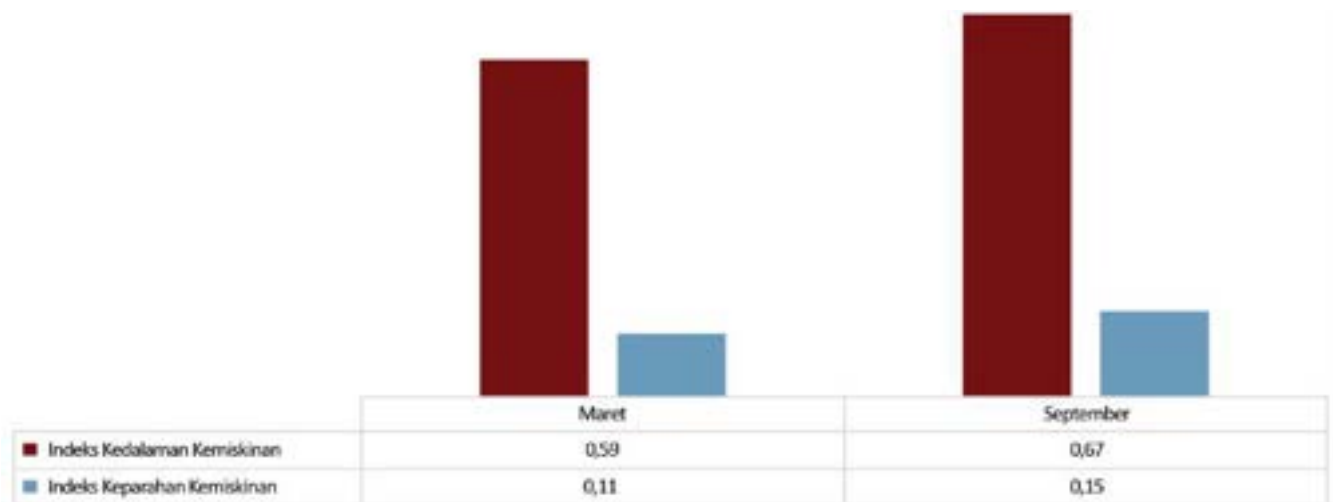


Gambar 2.3. Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

¹ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021). "Garis Kemiskinan (GK)". <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/50>, diakses pada 15 Juli 2021.

Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, angka garis kemiskinan, garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan mengalami peningkatan. Peningkatan paling signifikan terjadi dari Maret 2017 ke September 2017 masing-masing sebesar Rp41.701,00/kapita/bulan untuk garis kemiskinan, Rp35.809,00/kapita/bulan untuk garis kemiskinan makanan, dan Rp5.891,00/kapita/bulan untuk garis kemiskinan non makanan. Pada September 2020, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp683.339,00 nilai ini menunjukkan jika pengeluaran penduduk DKI Jakarta kurang dari Rp683.339,00 per bulan atau sekitar Rp22.000,00 per hari, maka penduduk masuk dalam kategori miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan, Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum manusia dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan manusia². GKM di DKI Jakarta per September 2020 sebesar Rp467.847,00 sedangkan GKNM pada periode yang sama sebesar Rp215.491,00 Baik GKM maupun GKNM dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu mengalami kenaikan.

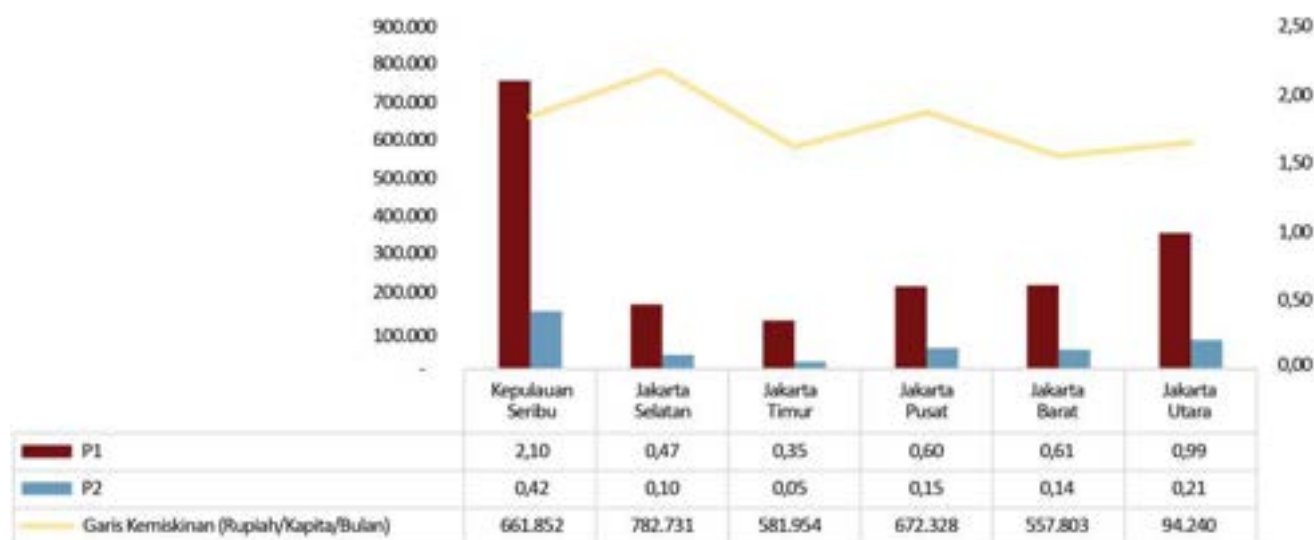


Gambar 2.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) adalah nilai rerata kesenjangan pengeluaran dari setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan ketika semakin tingginya nilai indeks ini maka semakin jauh rerata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan³. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan persentase penduduk miskin, P1 juga meningkat. Dari Maret 2016 sampai dengan September 2020, P1 dan P2 mengalami fluktuasi. P1 dan P2 terendah berada pada September 2019 yaitu 0,40% dan 0,07%, nilai ini meningkat sebesar 0,19 poin dan 0,04 poin pada Maret 2020. Pada September 2020, P1 kembali meningkat sebesar 0,08 poin dari Maret 2020, nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indeks keparahan kemiskinan (P2) juga meningkat sebesar 0,04 poin pada Maret dan September 2020. Namun, pergerakan P2 cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan P1.

² Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021). "Penduduk Miskin", <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diakses pada 15 Juli 2021.

³ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021). "Penduduk Miskin", <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diakses pada 15 Juli 2021.

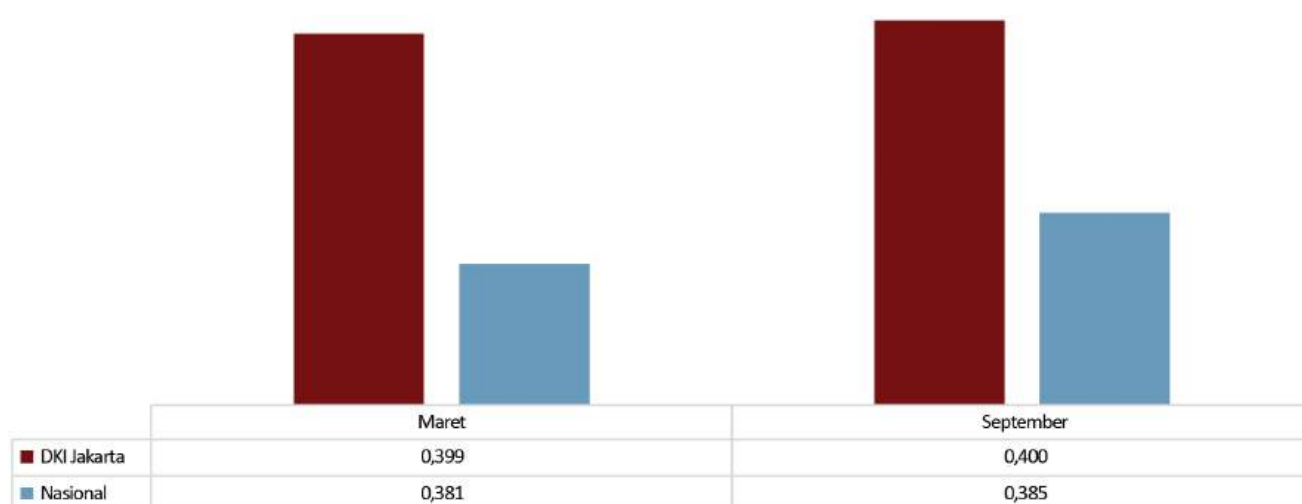


Gambar 2.5. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di DKI Jakarta Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Selatan memiliki garis kemiskinan tertinggi dengan Rp782.731,00 kapita per bulan. Nilai ini menunjukkan bahwa biaya hidup di Jakarta Selatan tertinggi dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya. Nilai P1 dan P2 di Kepulauan Seribu merupakan yang tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kepulauan Seribu tertinggi dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya.

Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dengan nilai di antara nol (pemerataan sempurna) sampai dengan satu (ketimpangan yang sempurna)⁴. Koefisien gini dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai koefisien terbagi dalam tiga kategori distribusi pendapatan yaitu ketimpangan rendah dengan nilai lebih kecil dari 0,40; ketimpangan sedang dengan nilai di antara 0,40 dan 0,50; dan ketimpangan tinggi dengan nilai di atas 0,50.



Gambar 2.6. Koefisien Gini DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

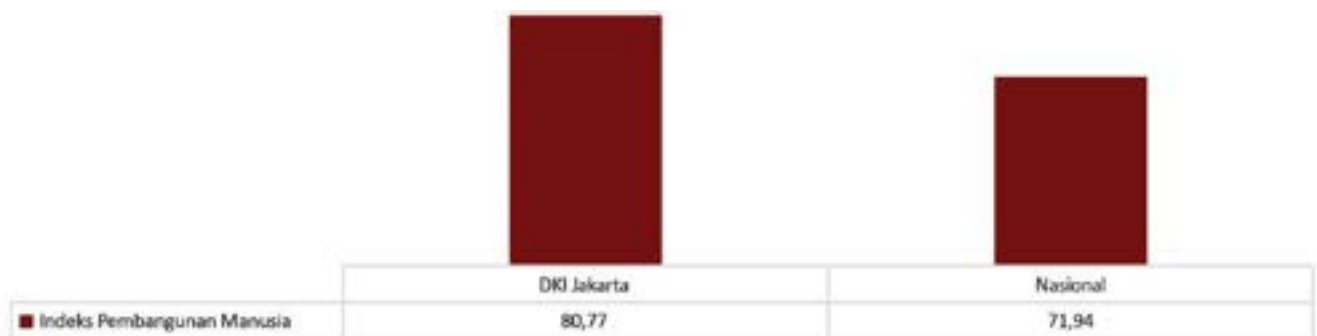
⁴ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021). "Koefisien Gini", <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/22>, diakses pada 16 Juli 2021.

Dalam lima tahun terakhir, koefisien gini di DKI Jakarta selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat nasional. Pada tahun 2020, koefisien gini di DKI Jakarta berada pada tingkat ketimpangan 0,39 sampai dengan 0,40. Dalam kurun waktu Maret 2016 sampai dengan September 2020, koefisien gini nasional berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, koefisien gini tingkat nasional paling rendah berada pada tahun 2019 yaitu 0,38.

Kemiskinan sudah sejak lama dirasakan oleh sebagian penduduk DKI Jakarta. Ibarat penyakit, kemiskinan merupakan sebuah wabah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, kemiskinan bukanlah sebuah pilihan hidup seseorang. Banyak faktor yang membuat seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Salah satu cara untuk menghindari kemiskinan adalah dengan jalan pendidikan. Seseorang akan mendapat bekal ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan dan menjadikan ilmu pengetahuan tersebut sebagai senjata untuk melawan kemiskinan dan mendapatkan hidup yang lebih baik.

2.2. Indeks Pembangunan Manusia

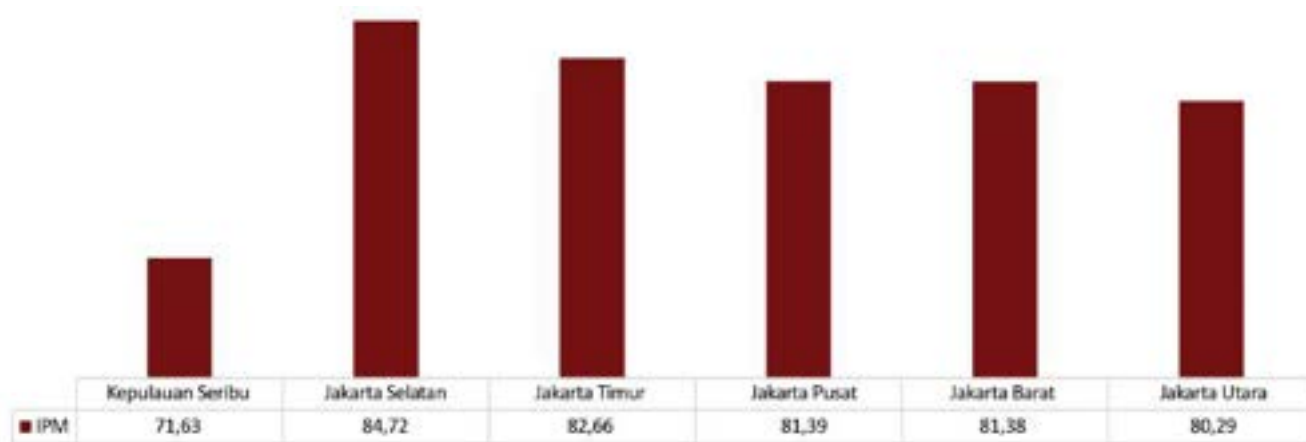
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu data yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebagai upaya dalam membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak⁵. Ketiga dimensi dasar IPM ini harus dihitung dengan nilai yang sama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. IPM dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah.



Gambar 2.7. Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sedikitnya dalam lima tahun terakhir, IPM DKI Jakarta merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya di Indonesia. Dalam perkembangannya, IPM DKI Jakarta dan Indonesia menunjukkan tren positif. Menurut United Nations Development Program, IPM terbagi menjadi empat kategori yaitu kategori sangat tinggi dengan nilai IPM lebih dari 80, kategori tinggi dengan nilai IPM pada rentang 70 sampai dengan 79, kategori sedang dengan nilai IPM pada rentang 60 sampai dengan 69, dan kategori rendah dengan nilai IPM di bawah 60. Sejak tahun 2017, IPM DKI Jakarta masuk dalam kategori sangat tinggi dan terus bertumbuh secara konsisten. Selama periode 2016 sampai dengan 2020, rata-rata pertumbuhan IPM DKI Jakarta adalah 0,36 poin sedangkan rata-rata pertumbuhan pada tingkat nasional adalah 0,48 poin. IPM DKI Jakarta dan nasional sama-sama mengalami peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir.

⁵ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021). "Apa itu Indeks Pembangunan Manusia?", <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>, diakses pada 16 Juli 2021.



Gambar 2.8. Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jika dilihat IPM di DKI Jakarta menurut wilayah administrasi pada tahun 2020, IPM di Jakarta Selatan merupakan yang tertinggi dengan nilai yang mencapai 84,72, sedangkan posisi terendah dimiliki oleh Kepulauan Seribu dengan nilai 71,63. Walaupun berada pada posisi pertama dengan nilai IPM tertinggi pada tahun 2020, IPM Jakarta Selatan turun sebesar 0,03 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2020 IPM Kepulauan Seribu menjadi yang paling rendah, namun selama periode 2016 sampai dengan 2020, rata-rata pertumbuhan IPM Kepulauan Seribu menjadi yang tertinggi dengan nilai 0,56.

IPM DKI Jakarta yang terus berkembang setiap tahunnya menggambarkan bahwa kualitas hidup masyarakat terus meningkat. Pertumbuhan ini berhubungan erat dengan sarana dan prasarana dari pendidikan yang juga terus meningkat setiap tahunnya. Fasilitas kesehatan pun juga menunjang pertumbuhan ini sehingga masyarakat dapat meningkatkan standar hidupnya menjadi lebih baik setiap tahunnya.

2.3. Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir adalah rata-rata umur yang dicapai oleh seseorang ketika hidup dan berhubungan dengan mortalitas suatu masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan suatu masyarakat⁶. AHH berkaitan erat dengan perkembangan kesehatan penduduk di suatu daerah.



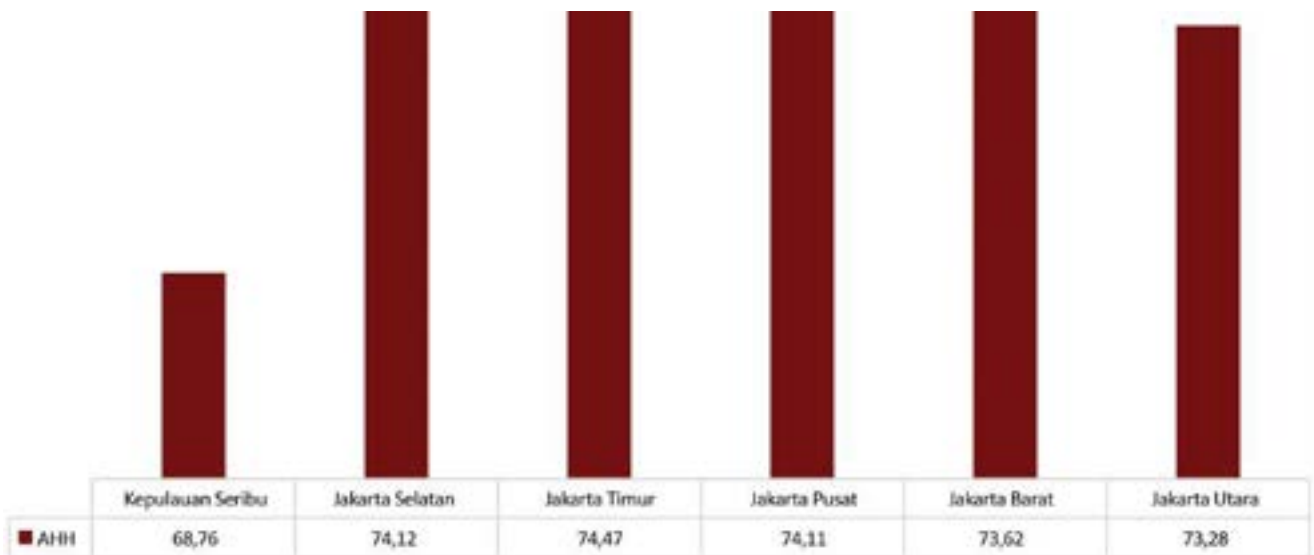
⁶ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)", <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1060>, diakses pada 16 Juli 2021.



Gambar 2.9. Angka Harapan Hidup Saat Lahir DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir di DKI Jakarta mencapai 72,91 tahun. Angka ini menjelaskan bahwa setiap bayi yang lahir di DKI Jakarta pada tahun 2020 mempunyai peluang hidup sampai usia 72,91 tahun. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020, rata-rata pertumbuhan AHH di DKI Jakarta adalah 0,10 tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan secara nasional sebesar 0,14 tahun.



Gambar 2.10. Angka Harapan Hidup Saat Lahir di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

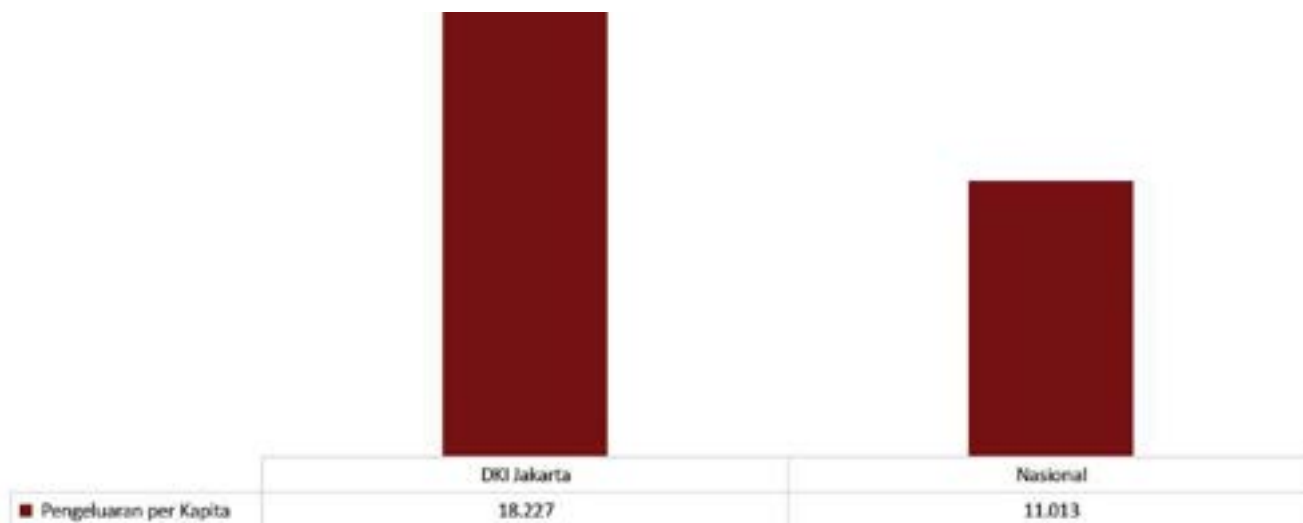
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, Jakarta Timur merupakan wilayah administrasi dengan AHH tertinggi yaitu 74,47, sedangkan posisi terendah berada di Kepulauan Seribu dengan nilai 68,76. Secara umum, AHH mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan kenaikan tertinggi terjadi di Kepulauan Seribu yaitu 0,25 tahun. Selama periode 2016 sampai dengan 2020, rata-rata pertumbuhan AHH tertinggi berada di Kepulauan Seribu dengan nilai 0,21 tahun dan pertumbuhan AHH terendah berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yaitu 0,06 tahun.

Faktor-faktor seperti lingkungan, kesehatan, dan ekonomi turut serta dalam memengaruhi AHH suatu masyarakat. AHH yang rendah di suatu wilayah harus ditanggulangi dengan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sementara itu apabila AHH suatu masyarakat tinggi, hal ini akan menggambarkan keberhasilan suatu masyarakat dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan sangat berhubungan dengan AHH masyarakatnya.

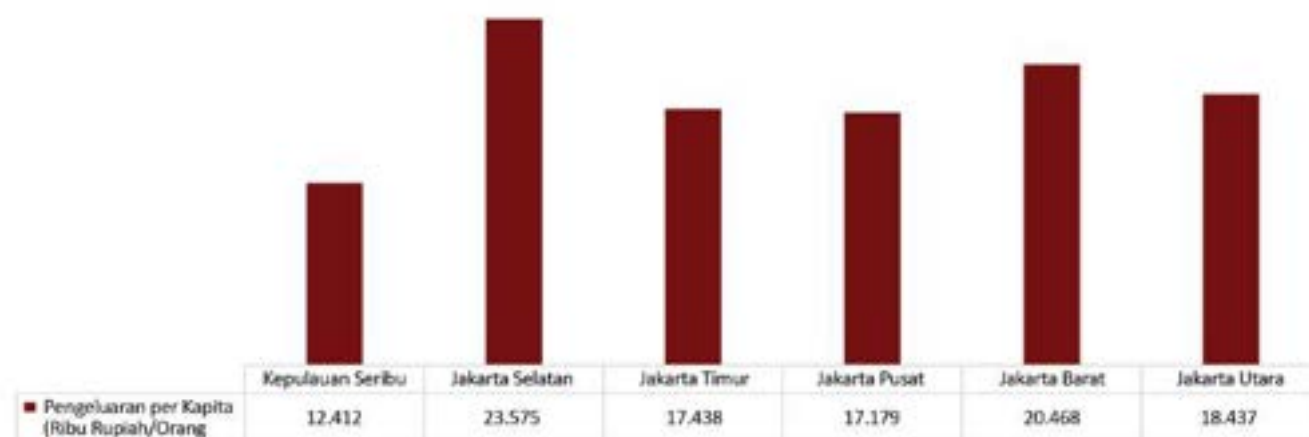
2.4. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang digunakan untuk seluruh anggota keluarga yang dapat berupa pembelian, pemberian, dan/atau produksi sendiri untuk kategori makanan atau nonmakanan selama satu bulan dibagi dengan jumlah anggota keluarga⁷.



Gambar 2.11. Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dari tahun 2016 sampai dengan 2019, pengeluaran per kapita DKI Jakarta dan nasional terus meningkat, namun pengeluaran per kapita keduanya mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita per tahun di DKI Jakarta tercatat sebesar Rp18.227.000,00. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk DKI Jakarta menghabiskan sebanyak Rp1.510.000,00 setiap bulannya. Nilai ini 1,6 kali lebih tinggi dari rata-rata pada tingkat nasional yang menghabiskan sebanyak Rp917.000,00 setiap bulannya. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita di DKI Jakarta turun sebesar 1,62% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tingkat nasional turun sebesar 2,53%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020.



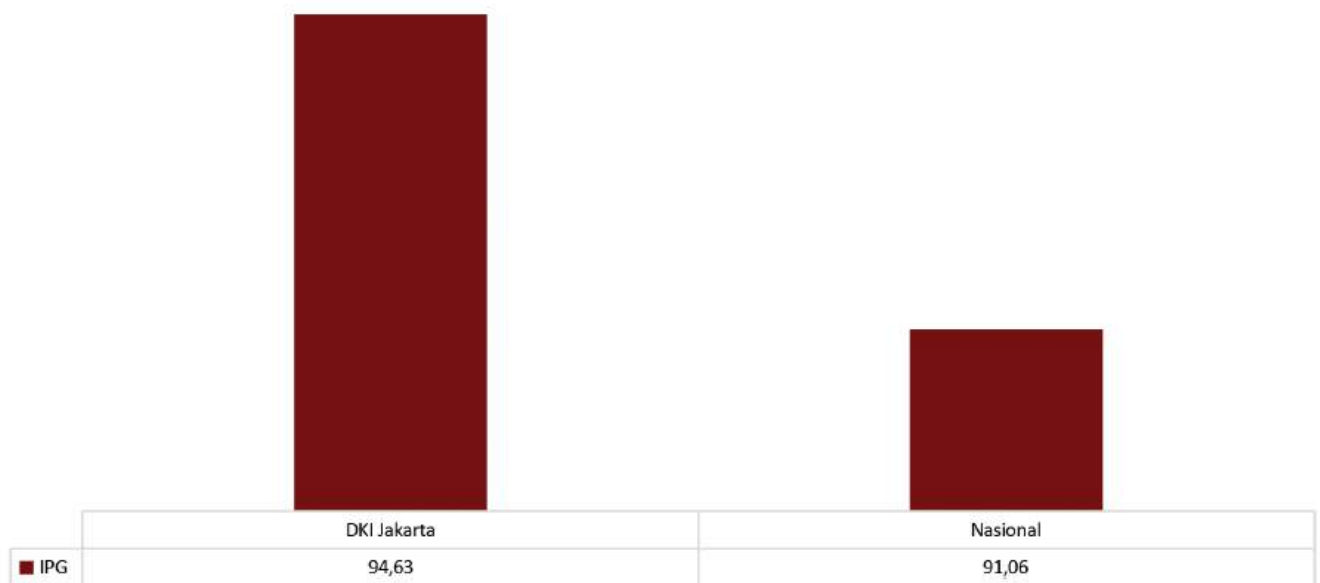
Gambar 2.12. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

⁷ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Pengeluaran per Kapita", <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/197>, diakses pada 16 Juli 2021.

Jakarta Selatan merupakan wilayah administrasi yang memiliki pengeluaran per kapita paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu Rp23.575.000,00 atau Rp1.960.000,00 per bulan. Pengeluaran per kapita terendah berada di Kepulauan Seribu yaitu Rp12.412.000,00 per tahun atau Rp1.030.000,00 per bulan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.5. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian dimensi dan variabel seperti kesehatan dan pendidikan dengan mempertimbangkan kesamarataan laki-laki dan perempuan⁸. IPG sendiri dapat menjelaskan kesenjangan pencapaian dalam bidang dasar seperti pendidikan dan kesehatan antara laki-laki dan perempuan.

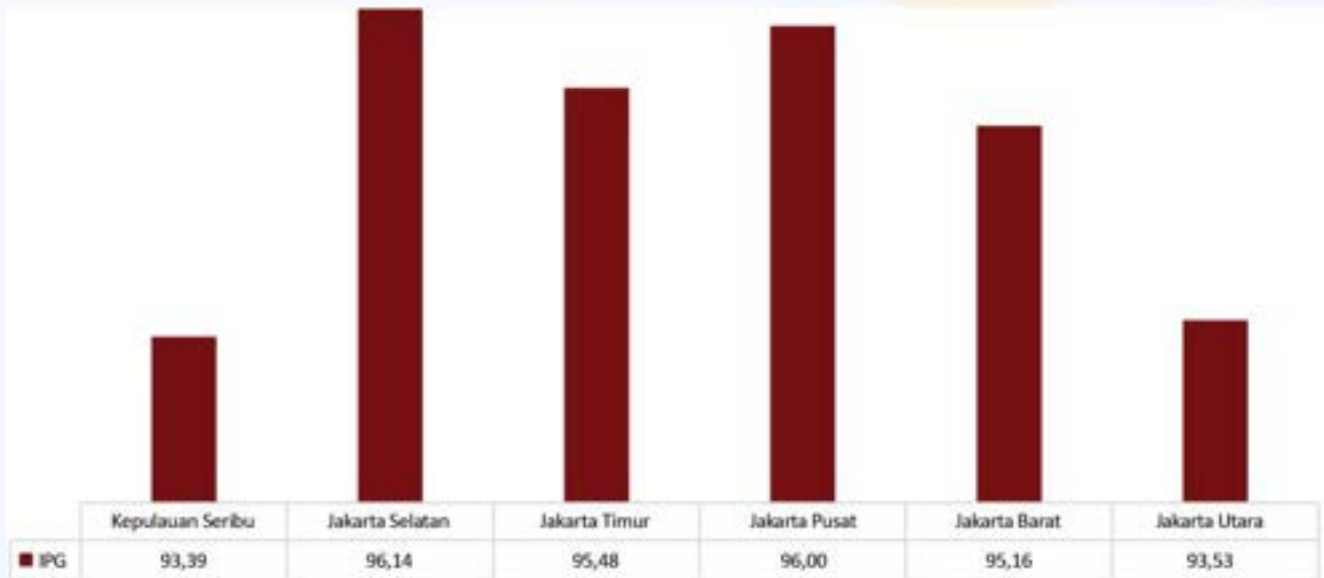


Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Gender DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

IPG di DKI Jakarta selama tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu lebih tinggi daripada nilai IPG pada tingkat nasional. Pada tahun 2020, nilai IPG di DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 0,08 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitupun dengan nilai IPG nasional yang mengalami penurunan sebesar 0,01 poin.



⁸ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Gender", <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>, diakses pada 16 Juli 2021.



Gambar 2.14. Indeks Pembangunan Gender di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, Jakarta Selatan merupakan wilayah administrasi dengan poin IPG tertinggi yaitu 96,14. Sedangkan, Kepulauan Seribu menjadi wilayah administrasi dengan nilai IPG terendah yaitu 93,39. Selain itu, pada tahun 2020 hanya Jakarta Pusat yang mengalami kenaikan IPG dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu naik sebesar 0,32 poin.



BAB III

PELAYANAN UMUM

Pelayanan Umum

DKI Jakarta Pada Tahun 2020

99,70%

Usia 15 sampai dengan 50 tahun ke atas sudah melek huruf.

12,98 tahun

Angka harapan sekolah di DKI Jakarta tahun 2020.

11,13 tahun

Rata-rata rentang pendidikan penduduk DKI Jakarta berusia 25 tahun ke atas.



4.469

Posyandu

1.361

Klinik Kesehatan

332

Puskesmas

143

Rumah Sakit Umum

47

Rumah Sakit Khusus

19

Rumah Sakit Bersalin

10.112

dokter

36.215

perawat

7.127

bidan

8.127

farmasi

1.517

ahli gizi



85,24%

Penduduk DKI Jakarta memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan.





3.569.264 KK

Jumlah KK tercetak atau
99,11% dari total KK tercatat.

99,86%

Jumlah perekaman KTP elektronik
dari total penduduk usia wajib KTP.

16.018 orang

Jumlah lowongan kerja tahun 2020
yang mengalami penurunan
52,94% dari tahun sebelumnya.

4,73 poin

penurunan rasio penduduk bekerja
dari tahun 2020.



2,9 triliun rupiah

Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
pada tahun 2020, yang mengalami
penurunan 53,56% dari tahun sebelumnya.



436.814 pelanggaran

yang terjadi tahun 2020, yang terdiri dari
17 macam pelanggaran

31.540 pelanggaran

kategori khusus/baru dari 6 jenis pelanggaran
terkait protokol kesehatan diantaranya
penggunaan masker dan berkerumun
di area publik.



2.169

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di DKI Jakarta yang ditertibkan sepanjang tahun 2020.
jumlah ini mengalami penurunan sebesar 18,49%
dari tahun sebelumnya.

54,54%

kenaikan jumlah pekerja sosial
di DKI Jakarta tahun 2020
dengan jumlah 3.083



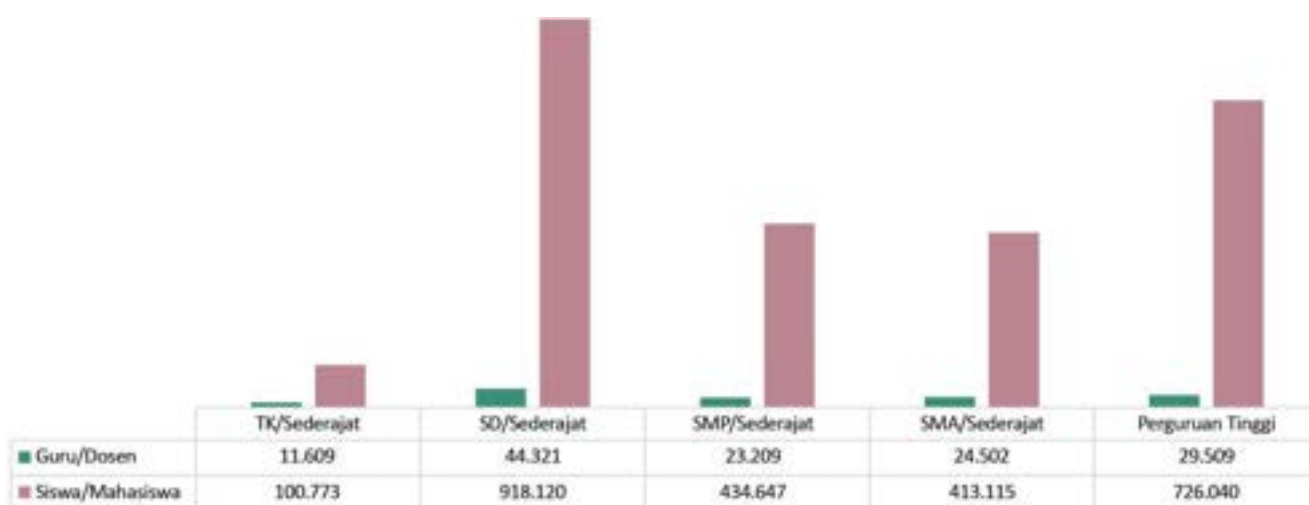
III. Pelayanan Umum

3.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak segala bangsa, kalimat ini tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan merupakan elemen penting dalam kesejahteraan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Pendidikan sendiri terbagi dalam beberapa jenjang seperti pendidikan usia dini, dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi.

3.1.1. Murid Guru dan Sekolah

Murid dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belajar pada guru di berbagai tingkatan jenjang pendidikan. Di sisi lain, guru adalah salah satu profesi yang mempunyai peran penting dalam mencerdaskan bangsa. Profesi ini berperan sebagai pengajar, pendidik, pelatih hingga pembimbing peserta didik. Murid dan guru mempunyai keterkaitan yang saling berhubungan dan melengkapi satu sama lainnya. Peserta didik yang menempuh pendidikan pada tingkat perguruan tinggi disebut sebagai mahasiswa. Seseorang yang berperan dalam membimbing, mengajar, melatih, dan mendidik mahasiswa disebut dosen. Sama halnya dengan profesi guru, seorang dosen mempunyai peran yang penting dalam menyebarluaskan ilmunya kepada peserta didiknya.

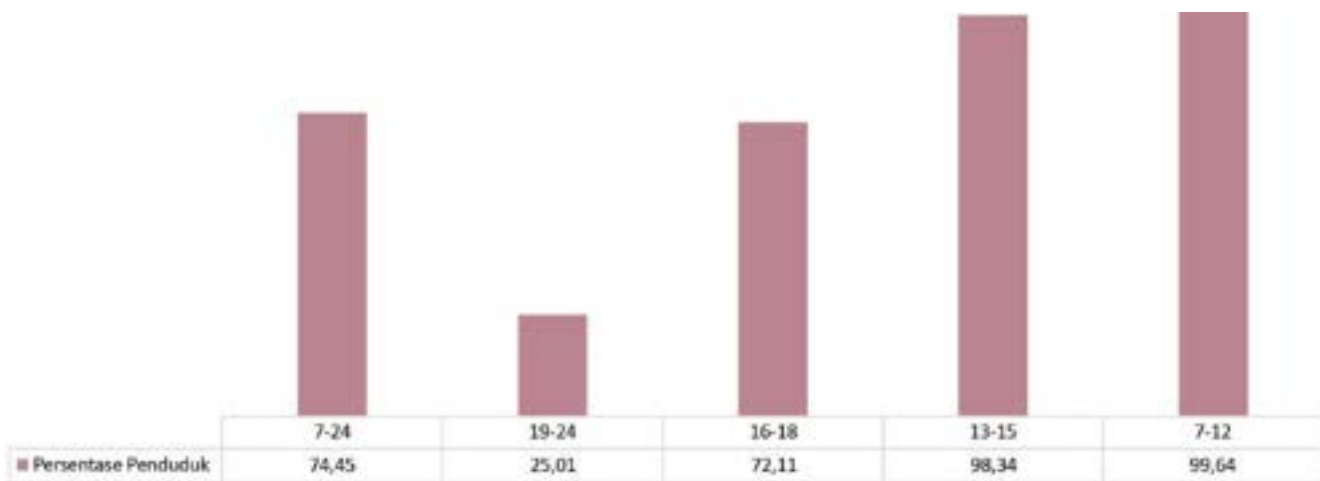


Gambar 3.1. Jumlah Siswa/Mahasiswa dan Tenaga Pendidik di Semua Jenjang di DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Secara keseluruhan, SD/ sederajat mempunyai jumlah guru dan murid paling banyak jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Tercatat sebanyak 35% dari jumlah tenaga pendidik dari semua tingkatan jenjang pendidikan merupakan guru SD/ sederajat. Murid SD pada tahun ajaran 2020/2021 mencapai 44.321 murid.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat bahwa anak usia tujuh tahun diwajibkan untuk bersekolah pada jenjang pendidikan dasar.

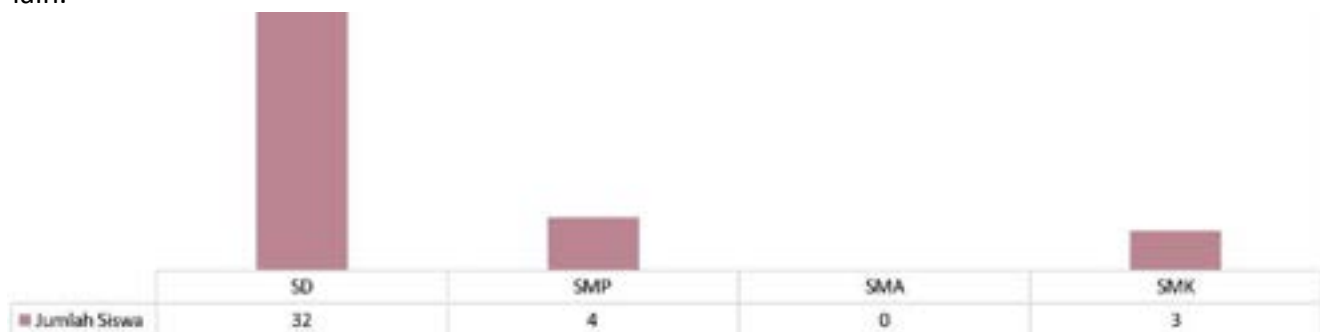


Gambar 3.2. Persentase Penduduk Usia 7-24 tahun yang Masih Bersekolah di DKI Jakarta Menurut Kelompok Usia Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Secara umum, persentase penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah pada tahun 2020 di DKI Jakarta adalah 74,45%. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi kelompok usia maka persentase penduduk yang masih bersekolah semakin kecil. Persentase pada usia 7-12 tahun (rentang usia SD) sebesar 99,64%, sedangkan pada usia 19-24 tahun (rentang usia mahasiswa) hanya sebesar 25,01%.

Siswa putus sekolah adalah peserta didik menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Putus sekolah disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah ekonomi, kurangnya minat belajar, keluarga, dan lain-lain.

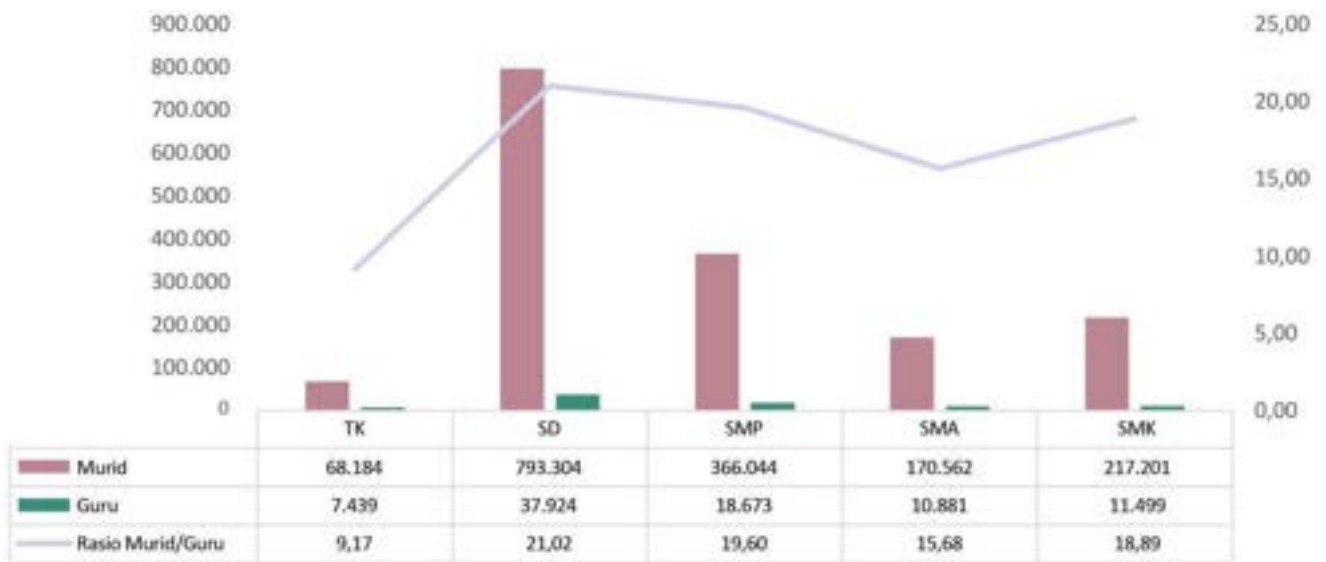


Gambar 3.3. Jumlah Siswa Putus Sekolah di DKI Jakarta Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Adapun kelompok usia yang dimaksud adalah kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun⁹. Terjadi penurunan sebanyak 550 siswa yang putus sekolah dari tahun 2018 ke tahun 2020 yang artinya penduduk DKI Jakarta semakin banyak yang tidak putus sekolah. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan. Pada tahun 2018, siswa SMA yang putus sekolah sebanyak 49 orang, sedangkan pada tahun 2020 tidak ada satupun siswa SMA yang putus sekolah. Jika dibandingkan dengan persentase penurunan siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan lainnya, SD mempunyai persentase siswa putus sekolah paling rendah yaitu 89,15% atau sebanyak 263 siswa. Pada tahun 2020, jumlah siswa yang putus sekolah adalah 32 siswa SD, 4 siswa SMP, dan 3 siswa SMK.

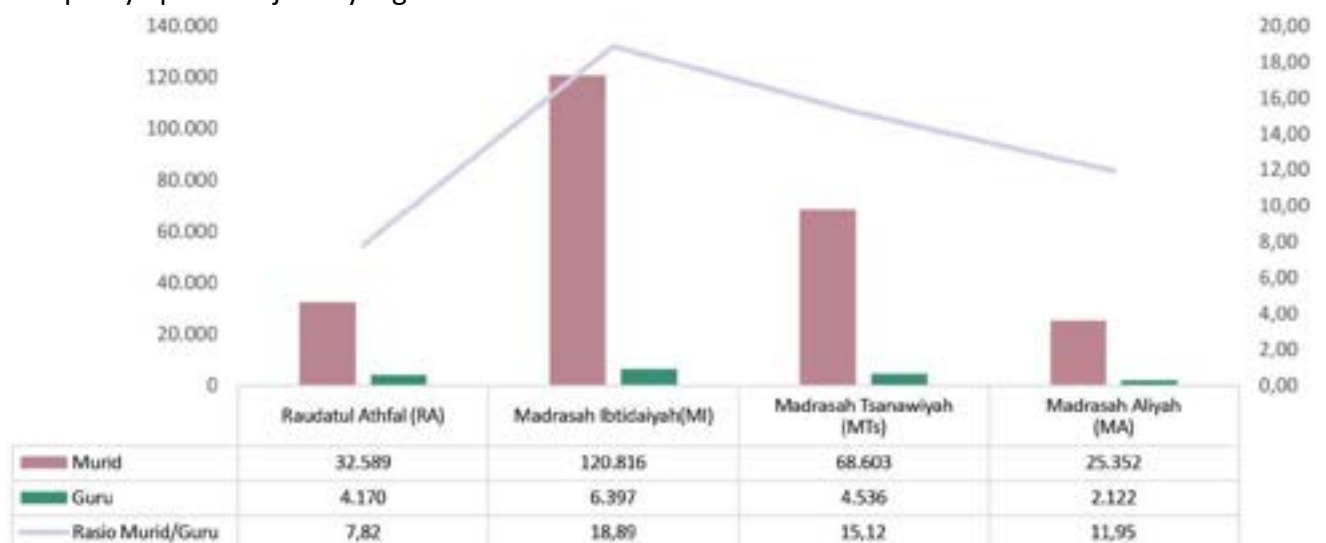
⁹ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Angka Putus Sekolah (APTS)", <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/12>, diakses pada 6 Juli 2021.



Gambar 3.4. Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru di Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, data diolah

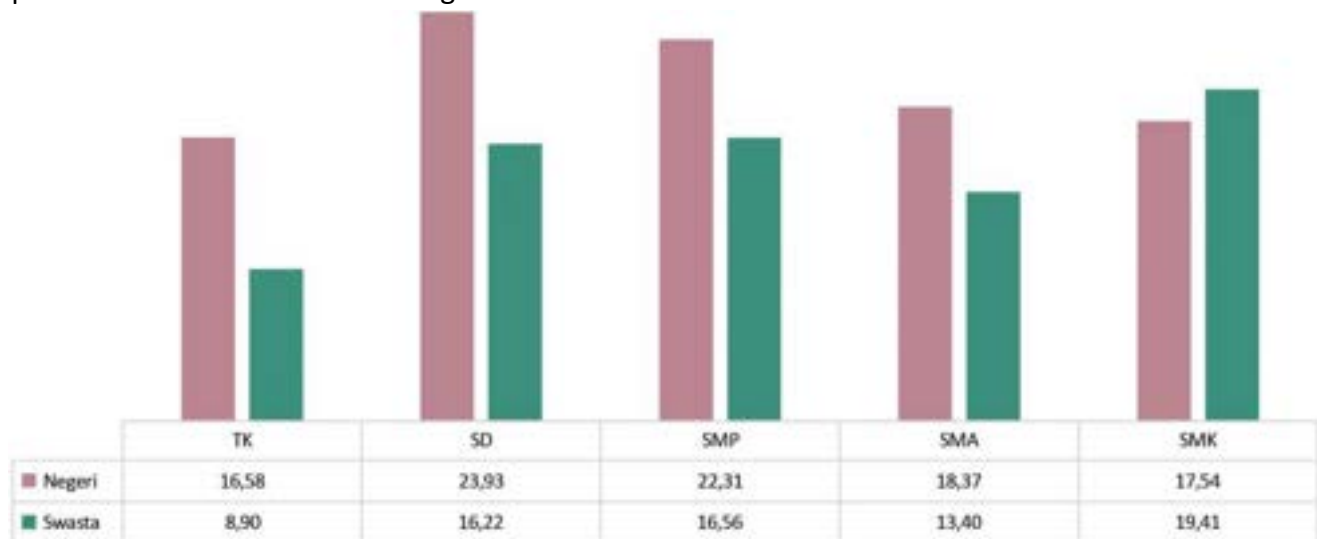
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota bahwa setiap SD harus memiliki 1 guru untuk 32 murid. Pada tahun 2020 menurut Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, jumlah Murid SD di sekolah di bawah kementerian ini berjumlah 797.304 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 37.924 orang sehingga menghasilkan rasio murid terhadap guru 21,02. Rasio ini menunjukkan rata-rata satu guru SD di DKI Jakarta mengajar sebanyak 21 murid. Rasio ini jauh lebih baik dibandingkan dengan standar minimal yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Rasio merupakan angka yang menunjukkan hubungan atau keterkaitan antar jumlah. Rasio murid terhadap guru menunjukkan keterkaitan antar jumlah murid terhadap guru. Semakin sedikit jumlah murid maka guru akan lebih mudah dalam mengawasi proses belajar di ruang kelas sehingga terciptanya pembelajaran yang efektif.



Gambar 3.5. Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid terhadap Guru di Sekolah di Bawah Kementerian Agama Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, data diolah

Sekolah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki murid dengan jumlah 120.816 orang dan guru dengan jumlah 6.397 orang. Sehingga menghasilkan rasio murid terhadap guru sebesar 18,89. Rasio ini menunjukkan rata-rata satu guru MI di DKI Jakarta mengajar sebanyak 19 murid. Secara keseluruhan, nilai rata-rata rasio guru dan murid di seluruh satuan pendidikan telah memenuhi standar minimal yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru. Seperti contoh dalam Pasal 3 peraturan ini diatur bahwa jumlah kapasitas maksimal untuk SPAUD adalah 20 peserta didik dalam setiap rombongan, faktanya rata-rata rasio pada SPAUD/TK/RA di DKI Jakarta sebesar 7,82. Jumlah ini hampir sepertiga dari maksimal peserta didik dalam satu rombongan.

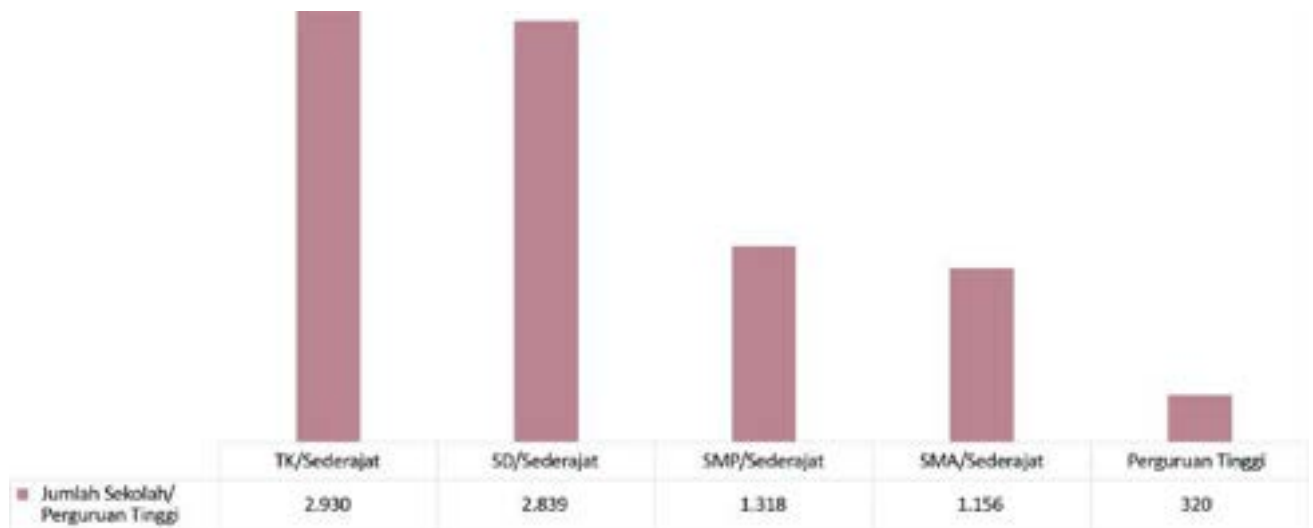


Gambar 3.6. Rasio Murid Terhadap Guru di DKI Jakarta Menurut Status Sekolah Tahun 2020

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, data diolah

Rasio murid terhadap guru di DKI Jakarta menurut status sekolah ternyata tidak begituimbang. Guru di sekolah negeri memiliki beban mengajar yang lebih besar dibanding guru di sekolah swasta hampir di semua tingkat, kecuali pada SMK. Contohnya saja, guru TK di sekolah negeri mengajar hampir dua kali lipat murid di TK swasta. Terdapat perbedaan persyaratan untuk menjadi guru sekolah negeri dan guru sekolah swasta. Sekolah negeri biasanya mempunyai minimal jenjang pendidikan atau sertifikat tertentu yang harus dimiliki oleh calon guru yang ingin mendaftar sebagai guru di sekolah negeri. Selain itu juga, terdapat kuota maksimal dalam penerimaan guru di sekolah negeri. Sedangkan, guru swasta mempunyai persyaratan yang cenderung menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Inilah salah satu penyebab guru sekolah negeri lebih sedikit dibandingkan dengan guru sekolah swasta.

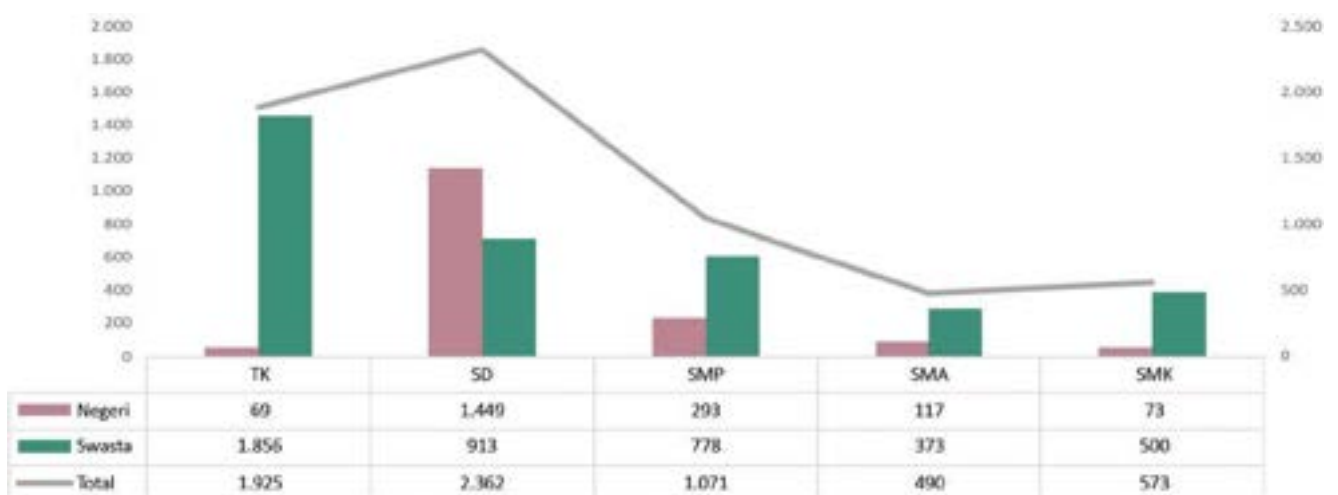




Gambar 3.7. Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

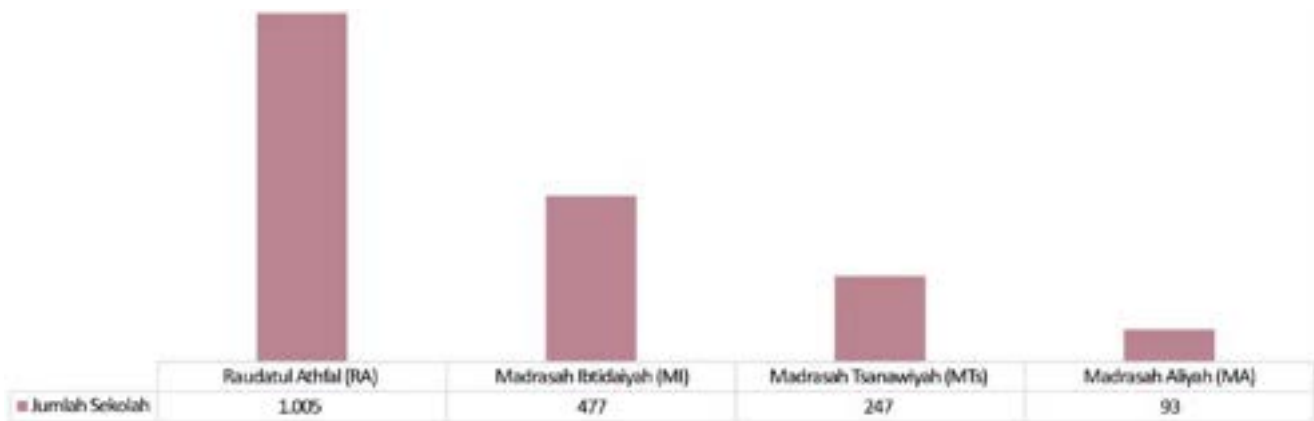
Gambar di atas menunjukkan jumlah sekolah dan perguruan tinggi di DKI Jakarta pada tahun 2020. Terdapat sebanyak 8.563 sekolah dan perguruan tinggi. Dari berbagai tingkat pendidikan di atas, jumlah sekolah pada tingkat pendidikan TK/ sederajat mendominasi sebesar 34,32% atau sebanyak 2.930 TK. Aturan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun membuat masyarakat bisa menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA dengan berbagai keringanan biaya yang tersedia. Namun, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra dikarenakan jenjang pendidikan ini terhitung lebih mahal jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.



Gambar 3.8. Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

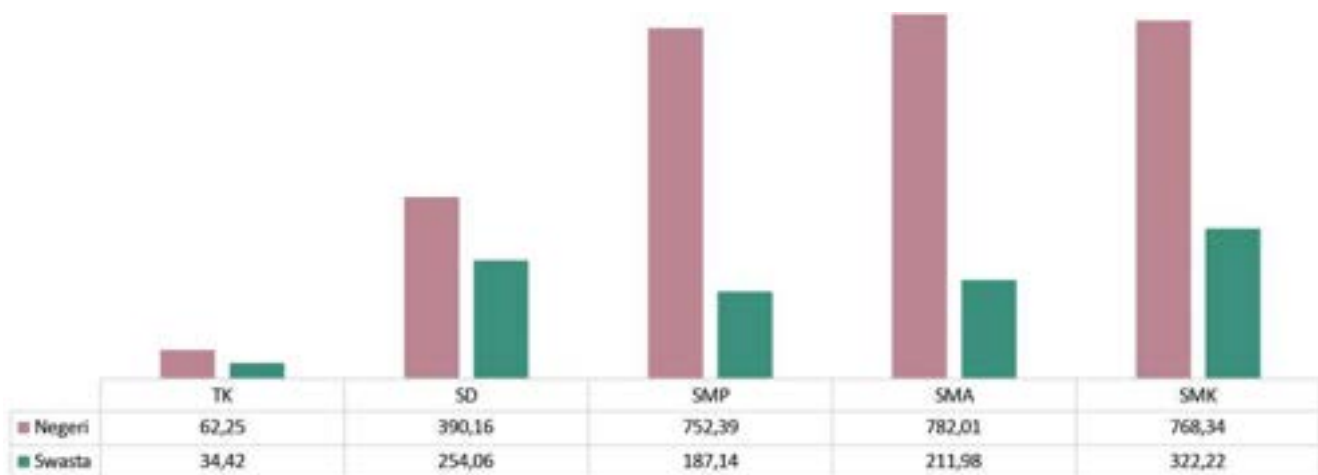
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2020 terdapat 6.421 sekolah reguler di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 1.925 TK, 2.362 SD, 1.071 SMP, 490 SMA, dan 573 SMK. Sekolah swasta mendominasi semua jenjang pendidikan, kecuali SD dengan persentase sebesar 61,35%. Sekolah terbanyak ada pada jenjang SD dengan 1.449 SD negeri dan 913 SD swasta, sedangkan yang paling sedikit adalah SMA dengan 117 SMA negeri dan 373 SMA swasta.



Gambar 3.9. Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Agama Republik Indonesia di DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Selain itu pada tahun yang sama, di DKI Jakarta terdapat 1.822 sekolah Islami di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 1.005 Raudatul Athfal (RA/setingkat TK), 477 Madrasah Ibtidaiyah (MI/setingkat SD), 247 Madrasah Tsanawiyah (MTs/setingkat SMP), dan 93 Madrasah Aliyah (MA/setingkat SMA). Sehingga total sekolah di bawah dua kementerian ini mencapai 8.243 sekolah yang terdiri dari 2.930 TK/ sederajat, 2.839 SD/ sederajat, 1.318 SMP/ sederajat, dan 1.063 SMA/ sederajat.

Rasio murid terhadap sekolah menunjukkan keterkaitan antar jumlah murid terhadap sekolah. Keputusan Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru menjelaskan bahwa rasio kelas paling banyak pada setiap jenjang pendidikan yaitu PAUD sebanyak 20 peserta didik, SD sebanyak 32 peserta didik, SMP sebanyak 36 peserta didik, SMA sebanyak 36 peserta didik, dan SMK sebanyak 36 peserta didik.



Gambar 3.10. Rasio Murid Terhadap Sekolah di DKI Jakarta Menurut Status Sekolah Tahun 2020
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, data diolah

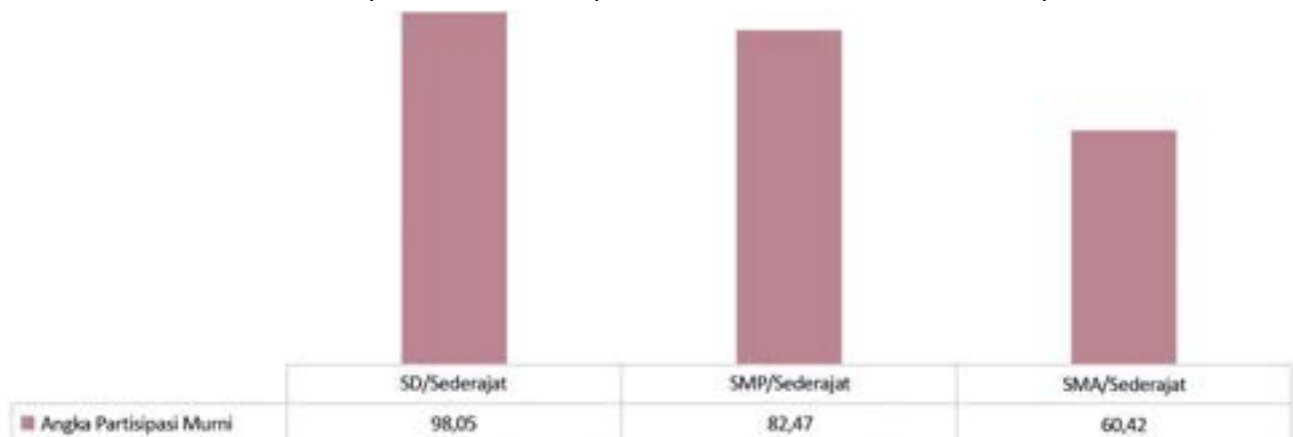
Sama seperti rasio murid terhadap guru di sekolah negeri yang lebih banyak daripada sekolah swasta di DKI Jakarta, sekolah negeri pun menampung jauh lebih banyak siswa dibandingkan dengan sekolah swasta. Sebagai contoh, di tingkat SMP, rasio di sekolah negeri adalah 752,39. Rasio ini menunjukkan rata-rata satu SMP negeri di DKI Jakarta menampung sebanyak 752 murid, sedangkan di SMP swasta sebanyak 187 murid. Biaya yang murah dan keringanan yang diberikan pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) membuat kebanyakan masyarakat lebih memilih sekolah negeri daripada sekolah swasta.

Di tingkat TK, rata-rata satu TK negeri menampung 1,81 kali lebih banyak murid dibandingkan dengan sekolah swasta, di SD 1,54 kali, di SMP 4,02 kali, di SMA 3,69 kali, dan di SMK 2,38 kali. Perbedaan jumlah siswa yang begitu mencolok dapat disebabkan oleh biaya SD negeri yang lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan biaya pendidikan di SD swasta yang bervariasi.

Demi memenuhi kebutuhan wajib belajar 12 tahun, pembangunan sekolah akan terus dilakukan. Pertumbuhan penduduk pun juga menjadi salah satu faktor pembangunan sekolah guna dapat memfasilitasi kebutuhan akan wajib belajar 12 tahun. Semoga pertumbuhan sekolah dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat dinikmati semua orang. Kuantitas manusia yang akan selalu bertumbuh dari waktu ke waktu tentu harus diiringi juga dengan kualitas. Kualitas ini tentu dipengaruhi oleh keberadaan guru dan murid. Guru dan murid akan selalu menjadi kesatuan yang memengaruhi kualitas manusia. Pemerintah tentu mempunyai peran penting dalam kemajuan guru dan murid melalui berbagai kebijakan seperti penambahan fasilitas pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.

3.1.1. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi murni (APM) adalah rasio dari jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat pada waktu di jenjang pendidikan yang seharusnya sedang ditempuh sesuai dengan ketentuan usia sekolah terhadap sekumpulan usia sekolah yang sesuai¹⁰. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100%.



Gambar 3.11. Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020

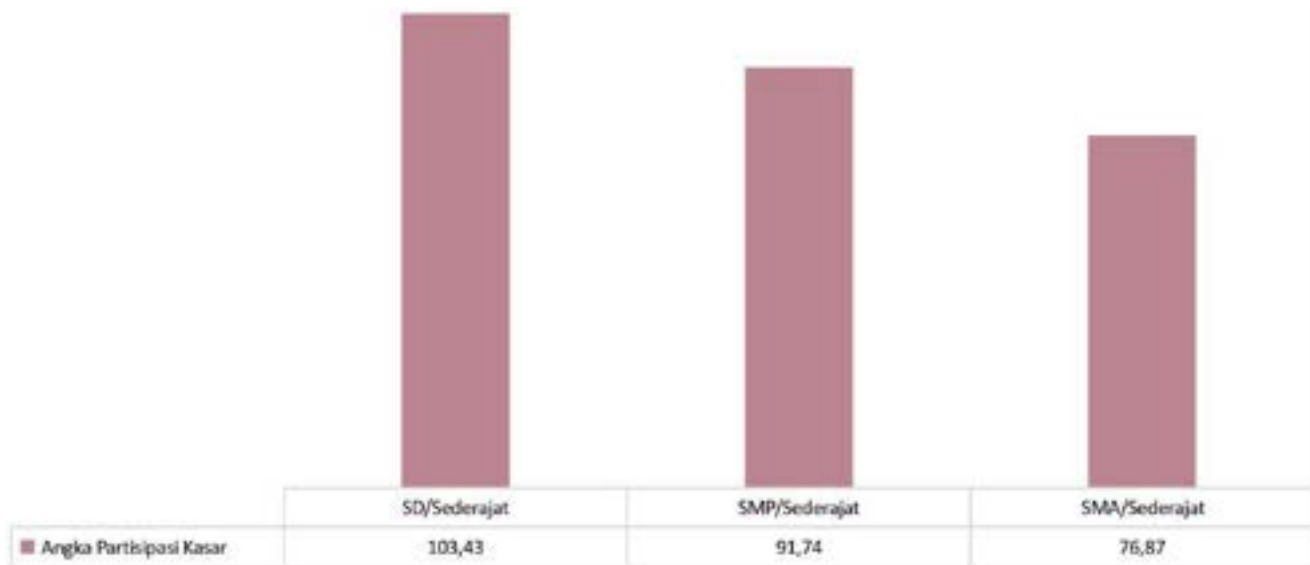
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

APM di DKI Jakarta dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan pada setiap jenjang pendidikan. Dalam kurun waktu lima tahun ini, APM pada jenjang SD selalu tertinggi jika dibandingkan dengan APM pada jenjang SMP maupun SMA. Pada tahun 2020, nilai APM tertinggi terdapat pada jenjang SD yaitu 98,05%. Sedangkan, APM terendah berada pada jenjang SMA yaitu 60,42%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usianya dengan kelompok usia yang memenuhi syarat sah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut¹¹.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Angka Partisipasi Murni (APM)", <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/568>, diakses pada 6 Juli 2021.

¹¹ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Angka Partisipasi Kasar (APK)", <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/565>, diakses pada 6 Juli 2021.



Gambar 3.12. Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, APK di DKI Jakarta pada SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat mengalami fluktuasi. APK tertinggi pada SD/ sederajat dan SMP/ sederajat terdapat pada tahun 2018 masing-masing sebesar 105,27 dan 94,91. Sedangkan, APK pada SMA/ sederajat tertinggi berada pada tahun 2017 sebesar 79,51. Pada tahun 2020, APK SD/ sederajat turun sebesar 1,40 poin menjadi 103,43%, APK SMP/ sederajat naik sebesar 0,72 poin menjadi 91,74%, dan APK SMA/ sederajat naik sebesar 2,10 poin menjadi 76,87%. Sama dengan APM, APK terendah pada tahun 2020 terdapat pada jenjang SMA/ sederajat sebesar 76,87%. Berbeda dengan APM, APK DKI Jakarta pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi pada semua jenjang pendidikan.

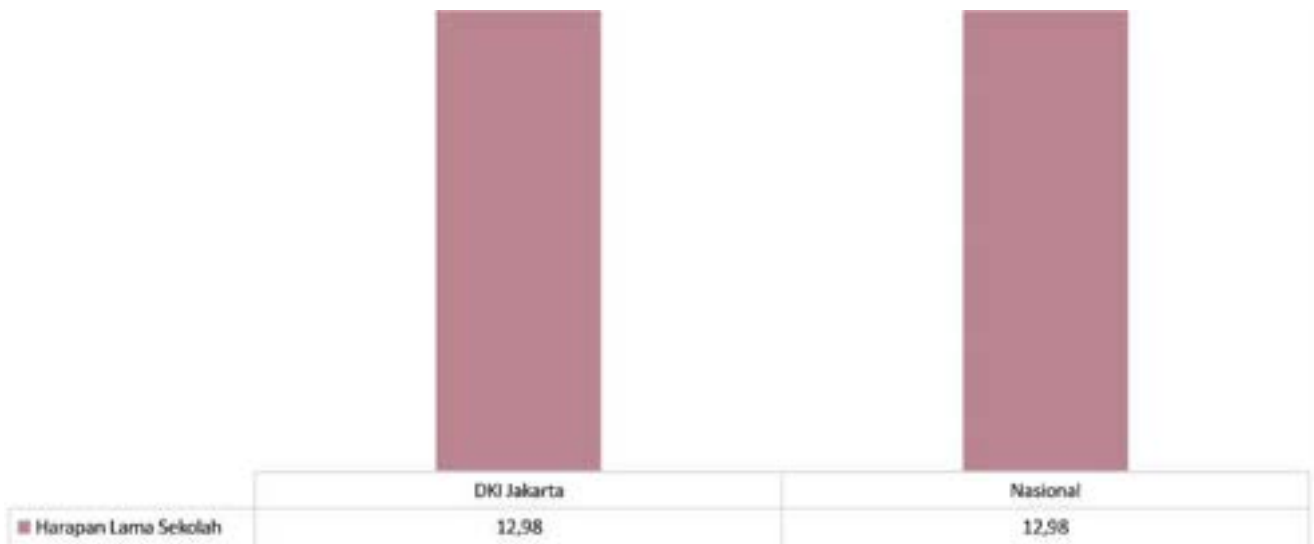
3.1.3. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dimana angka ini menunjukkan peluang anak usia tujuh tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu¹². Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal¹³. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan kondisi pernah ataupun tidak pernah tinggal sekolah. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah.



¹² Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Harapan Lama Sekolah (HLS)", <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1016>, diakses pada 6 Juli 2021.

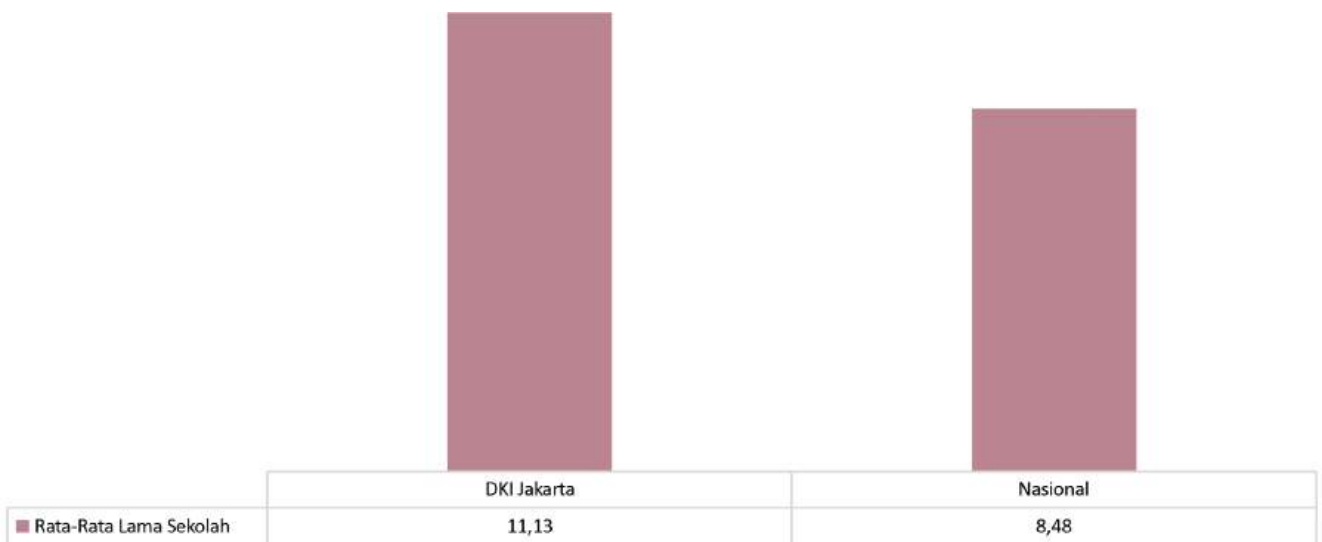
¹³ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Harapan Lama Sekolah (HLS)", <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1016>, diakses pada 6 Juli 2021.



Gambar 3.13. Harapan Lama Sekolah di DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, HLS di DKI Jakarta dan nasional selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,13 poin baik di DKI Jakarta maupun nasional. HLS di Indonesia pada tahun 2016 mencapai angka sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia tujuh tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I. Pada tahun 2020, HLS DKI Jakarta dan nasional berada di angka yang sama 12,98 tahun. Anak-anak di DKI Jakarta pada tahun 2020 mempunyai peluang untuk bisa menamatkan pendidikan hingga Diploma I atau sekitar 13 tahun.



Gambar 3.14. Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

RLS DKI Jakarta dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat nasional. Dalam kurun lima tahun ini, HLS tertinggi di DKI Jakarta dan nasional berada pada tahun 2020 masing-masing sebesar 11,13 dan 8,48. HLS di DKI Jakarta dan nasional selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,13 poin baik di DKI Jakarta maupun nasional. RLS Indonesia pada tahun 2016 mencapai angka sebesar 7,95 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh

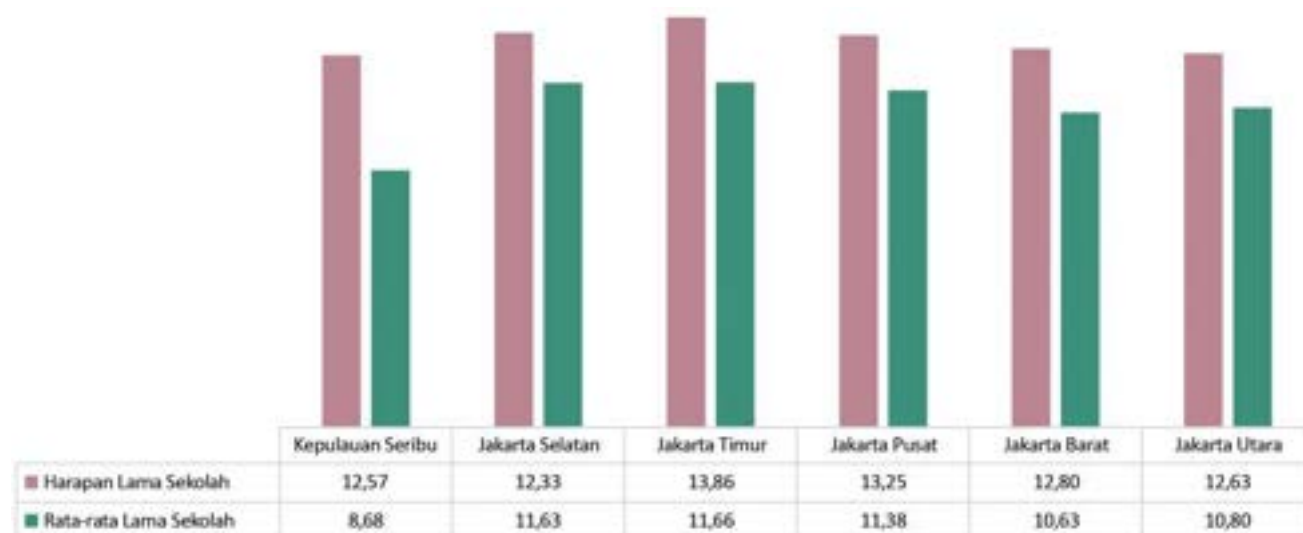
pendidikan selama 7,95 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII¹⁴. Menurut BPS Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 angka RLS selalu meningkat, baik di DKI Jakarta maupun nasional. RLS di DKI Jakarta selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional. Pada tahun 2020, RLS di DKI Jakarta sebesar 11,13 tahun yang artinya secara rata-rata penduduk DKI Jakarta berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,13 tahun atau hampir menamatkan kelas tiga SMA.



Gambar 3.15. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2016 sampai dengan 2020, rata-rata pertumbuhan HLS di DKI Jakarta adalah 0,08 tahun, sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan RLS 0,09 tahun. Perkembangan HLS maupun RLS yang selalu mengalami pertumbuhan menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pendidikan dari penduduk DKI Jakarta. Beberapa kebijakan pemerintah seperti penambahan fasilitas sekolah, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar menjadi beberapa alasan yang menyebabkan naiknya HLS dan RLS di DKI Jakarta.



Gambar 3.16. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta

Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

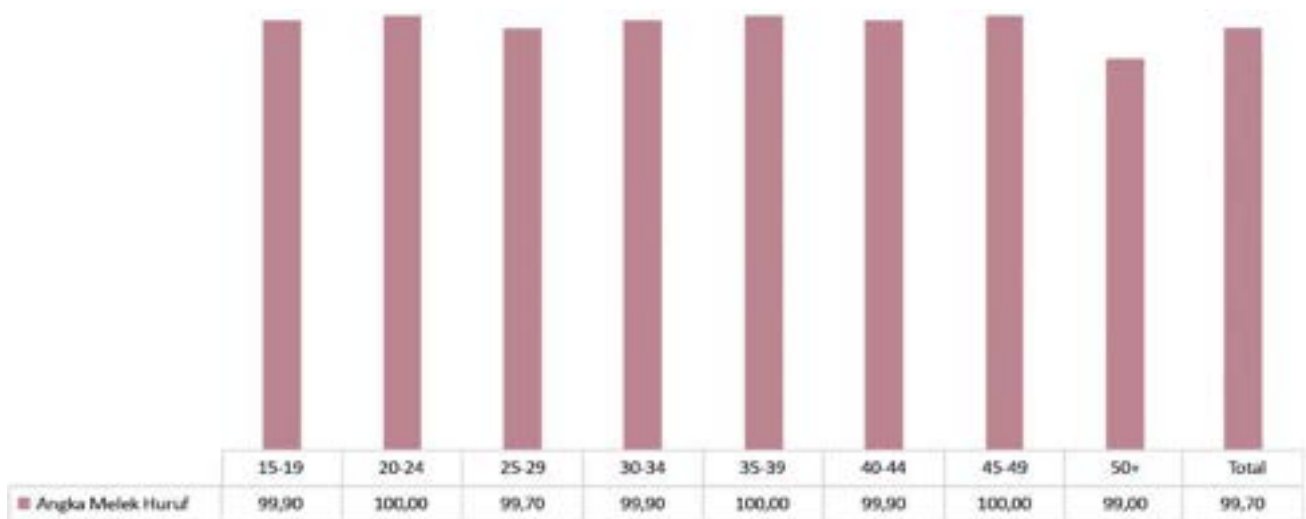
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

¹⁴ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Rata-rata Lama Sekolah (RLS)", <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/572>, diakses pada 6 Juli 2021.

Jika melihat HLS dan RLS di DKI Jakarta pada tahun 2020 menurut kota dan kabupaten, Jakarta Timur merupakan wilayah dengan HLS dan RLS tertinggi. Sedangkan, HLS dan RLS terendah berada di Kepulauan Seribu dengan masing-masing 12,57 dan 8,68 tahun. Perbedaan RLS antara Kepulauan Seribu dengan wilayah administrasi lainnya di DKI Jakarta perlu diperhatikan lebih lanjut dan dicari solusi terhadap permasalahan ini sehingga Kepulauan Seribu tidak menjadi wilayah yang begitu tertinggal dengan wilayah lainnya khususnya di bidang pendidikan.

3.1.4. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) adalah rasio penduduk berusia di atas 15 tahun yang mampu membaca dan menulis kalimat dalam berbagai huruf¹⁵. Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar yang membantu seseorang dalam beraktivitas sehari-hari.



Gambar 3.17. Angka Melek Huruf di DKI Jakarta Menurut Kelompok Usia Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Sistem pendidikan dasar yang efektif dapat memengaruhi tingginya tingkat melek huruf penduduk, seperti AMH kelompok usia 30 sampai dengan 34 tahun di DKI Jakarta tahun 2020 sebesar 99,90% yang artinya hampir 100% penduduk di DKI Jakarta berumur antara 30 sampai dengan 34 tahun dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya¹⁶. Pada tahun 2020, AMH menurut kelompok usia di DKI Jakarta paling tinggi terdapat pada kelompok usia, 20-24 tahun, 35-39 tahun, dan 45-49 tahun dengan persentase 100%. Sedangkan, AMH terendah berada pada kelompok usia 50 tahun ke atas dengan nilai 99,00%.

3.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan dimana seseorang sejahtera secara fisik dan mental. Kesehatan dibutuhkan seseorang untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Menjaga kesehatan hendaknya menjadi tanggung jawab masing-masing individu agar dapat terus beraktivitas. Pada masa sekarang ini, akses akan kebutuhan kesehatan sudah lebih mudah didapatkan dengan banyaknya tenaga dan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Angka Melek Huruf (AMH)", <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/313>, diakses pada 6 Juli 2021.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal", https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1461/sdgs_4/1, diakses pada 6 Juli 2021.

3.2.1. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam fasilitas kesehatan adalah klinik, posyandu, puskesmas hingga rumah sakit. Masing-masing dari fasilitas kesehatan ini memiliki tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, bidan, dan lain-lain. Setiap fasilitas ini memiliki tenaga kesehatan yang berbeda-beda jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.



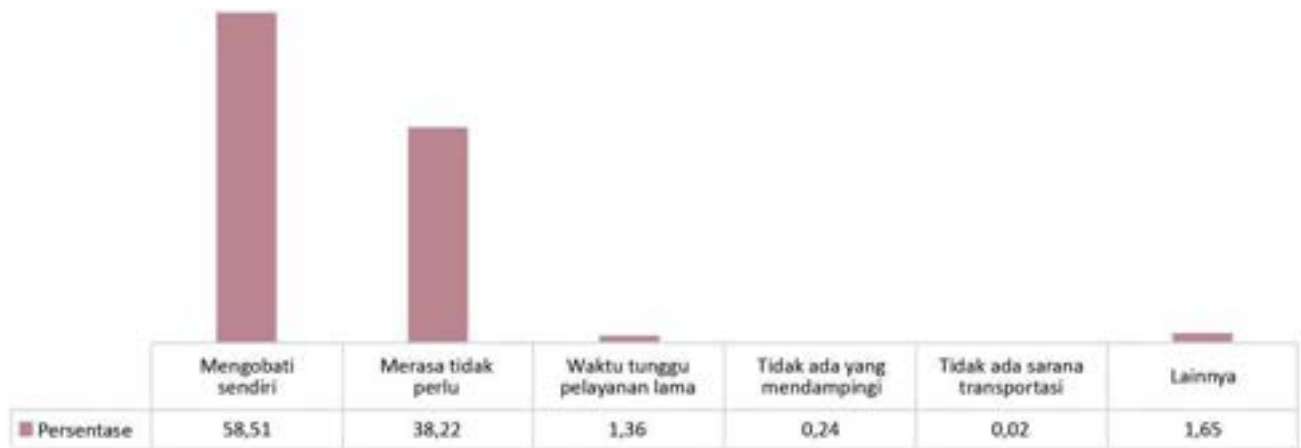
Gambar 3.18. Jumlah Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, terdapat 143 rumah sakit umum, 47 rumah sakit khusus, 19 rumah sakit bersalin, 332 puskesmas, 1.361 klinik/balai kesehatan, dan 4.469 posyandu yang tersebar di enam wilayah di DKI Jakarta. Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan rumah sakit umum, klinik/balai kesehatan, dan posyandu terbanyak di DKI Jakarta. Sedangkan, Kepulauan Seribu hanya terdapat satu rumah sakit umum dan enam puskesmas. Sampai dengan tahun 2020, tidak ada satupun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit khusus, rumah sakit bersalin, dan klinik/balai kesehatan di Kepulauan Seribu. Sampai saat ini, warga Kepulauan Seribu harus merujuk ke lima kota di DKI Jakarta untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih memadai dan/atau spesifik terhadap penyakit tertentu.

Keluhan kesehatan merupakan salah satu hal yang banyak dialami oleh penduduk. Sayangnya banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menanggulangi keluhannya atas kesehatan. Ada beberapa alasan kenapa masyarakat tidak memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan seperti melakukan pengobatan sendiri atau merasa tidak perlu berobat.



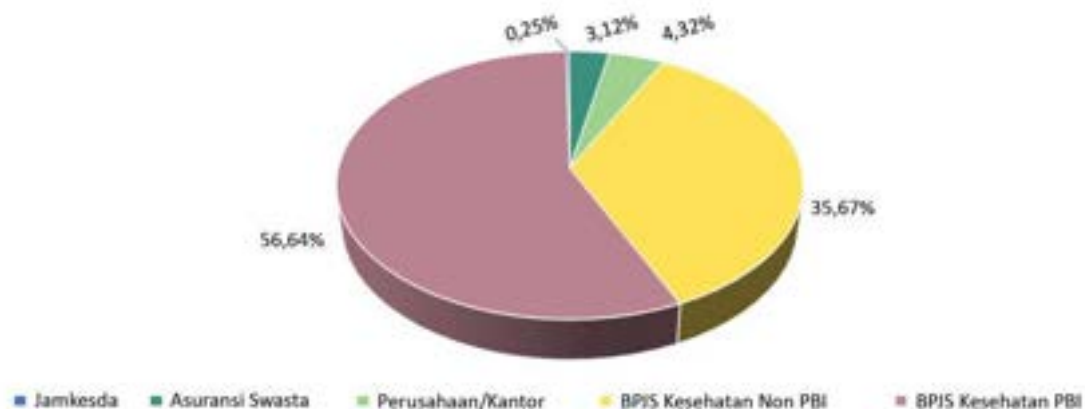


Gambar 3.19. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir di DKI Jakarta Menurut Alasan Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Alasan utama penduduk DKI Jakarta tidak berobat jalan pada tahun 2020 adalah karena keinginan untuk mengobati sendiri yaitu 58,51% dan merasa tidak perlu yaitu 38,22%. Beberapa cara yang dilakukan oleh penduduk yang memilih mengobati dirinya sendiri seperti membeli obat pada apotek terdekat atau mengonsumsi obat tradisional untuk mempercepat penyembuhan tubuh.

Di tengah-tengah pandemi yang melanda Indonesia sejak Maret 2020, memiliki jaminan kesehatan merupakan langkah yang tepat dalam bertahan di masa pandemi Covid-19. Kebutuhan akan kesehatan dalam masa pandemi membuat masyarakat sadar akan jaminan kesehatan.



Gambar 3.20. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 85,24% penduduk DKI Jakarta memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan. Terdapat lima kategori jaminan kesehatan yang dimiliki oleh penduduk DKI Jakarta adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), Non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI), perusahaan/kantor, asuransi swasta, dan Jamkesda. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa lebih dari setengah penduduk DKI Jakarta memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI.

Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir mengalami peningkatan sekitar 4,23 poin. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir sebesar 49,96%. Persentase ini mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 8,35 poin dari tahun 2019.

3.2.2. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan di bidang kesehatan dan melakukan upaya kesehatan untuk masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kesehatan dapat mencakup dokter, bidan, perawat, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis.



Gambar 3.21. Jumlah Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 10.112 dokter, 36.215 perawat, 7.127 bidan, 8.127 farmasi, dan 1.517 ahli gizi yang tersebar di enam wilayah DKI Jakarta. Jumlah dokter paling banyak terdapat di Jakarta Pusat dengan jumlah 2.350 orang. Banyaknya tenaga kesehatan di Jakarta Pusat berbanding lurus dengan banyaknya rumah sakit tipe A dan tipe B di Jakarta Pusat. Seperti Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, dan Rumah Sakit Umum Angkatan Laut dr. Mintoharjo. Sedangkan, untuk tenaga farmasi paling banyak terdapat di Jakarta Selatan dengan jumlah 1.993 orang. Hal ini sebanding dengan banyaknya perusahaan farmasi di Jakarta Selatan seperti Kimia Farma, Aneka Farma, Guardian, K24, dan Century. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk DKI Jakarta, maka satu dokter diperuntukkan bagi 1.108 penduduk.



Gambar 3.22. Persentase Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Secara keseluruhan persentase penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan di DKI Jakarta pada tahun 2020 sudah terbilang sangat tinggi yakni 99,43%, namun pada kenyataannya masih ada 0,57% atau sekitar 973 bayi yang lahir dengan bantuan dari tenaga non medis.

3.2.3. Bayi dan Balita

Bayi adalah individu baru lahir yang membutuhkan perhatian khusus dan adaptasi. Bayi harus menyesuaikan diri dengan beberapa keadaan seperti bernafas, menelan hingga membuang air. Kesalahan terhadap penyesuaian bayi dapat memberikan dampak buruk bagi bayi seperti kekurangan gizi. Balita bergizi kurang (malnutrisi) adalah kondisi dimana balita mengalami gangguan kesehatan. Padahal asupan nutrisi yang cukup sangat dibutuhkan terutama bagi anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan.



Gambar 3.23. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah dan Bergizi Kurang di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, dari sebanyak 170.777 bayi yang lahir di DKI Jakarta, terdapat 2.145 atau sekitar 1,26% bayi dengan berat badan lahir rendah (kurang dari 2.500 gram). Pada tahun yang sama, terdapat sebanyak 6.047 balita gizi kurang. Jakarta Timur merupakan wilayah administrasi dengan jumlah bayi lahir tertinggi yaitu 50.025 bayi dan juga merupakan wilayah dengan jumlah balita gizi kurang tertinggi yaitu 1.826 bayi.

3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara garis besar, pekerjaan umum mempunyai fungsi dalam pengelolaan bangunan gedung, kawasan pemukiman, pembuatan infrastruktur dan penyelenggaraan jalan. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu pembangunan dalam bidang pekerjaan umum ini juga sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Fasilitas-fasilitas seperti gedung dan jalan inilah yang digunakan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

3.3.1. Luas dan Panjang Jalan

Jalan merupakan infrastruktur transportasi yang dinilai sangat penting bagi masyarakat. Jalan berguna untuk memfasilitasi perpindahan manusia ataupun barang baik dengan menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan sebagai salah satu infrastruktur transportasi yang sangat berguna untuk memfasilitasi mobilisasi penduduk serta mempunyai peran penting dalam berbagai bidang seperti sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, dan lain-lain.



Gambar 3.24. Panjang Jalan (m) di DKI Jakarta Menurut Kota Administrasi dan Tingkat Kewenangan Pemerintah Tahun 2020

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan tingkat kewenangan pemerintah, jalan di DKI Jakarta terbagi menjadi dua kategori yaitu jalan dengan kewenangan negara dan provinsi. Pada tahun 2020, jumlah panjang jalan di lima wilayah administrasi DKI Jakarta adalah 6.652.679 meter. Menurut panjang jalan, Jakarta Selatan adalah wilayah dengan panjang jalan terpanjang dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu 2.028.618 meter. Total panjang meliputi panjang jalan dalam kewenangan negara sepanjang 42.461 meter dan panjang dalam kewenangan provinsi sepanjang 1.986.157 meter. Kemudian jalan negara atau nasional di DKI Jakarta dikategorikan menjadi dua jenis yaitu jalan tol dan negara.



Gambar 3.25. Panjang Jalan Nasional (m) di DKI Jakarta Menurut Kota Administrasi dan Jenis Status Tahun 2020

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Jumlah panjang jalan tol di lima wilayah administrasi di DKI Jakarta adalah 160.350 meter dengan jalan terpanjang yang berada di Jakarta Timur yaitu 52.450 meter dan jumlah jalan terpendek berada di Jakarta Pusat yaitu 2.500 meter. Sedangkan, jumlah panjang jalan negara di lima wilayah administrasi di DKI Jakarta adalah 59.856 meter dengan jumlah jalan nasional terpanjang berada di Jakarta Timur yaitu 22.306 meter dan tidak adanya jalan nasional kategori negara di Jakarta Pusat. Pada tahun 2020, jumlah luas jalan di lima wilayah administrasi di DKI Jakarta adalah 46.426.531 m². Total luas tersebut meliputi luas jalan dalam kewenangan negara yaitu 4.998.386 m² dan kewenangan provinsi yaitu 41.428.145 m².

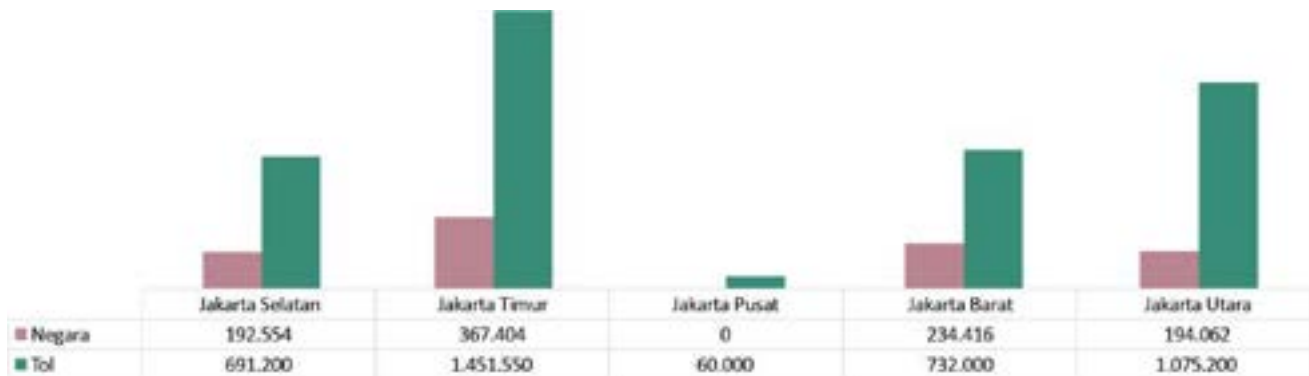




Gambar 3.26. Luas Jalan (m²) di DKI Jakarta Menurut Kota Administrasi dan Tingkat Kewenangan Pemerintah Tahun 2020

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Menurut luas jalan tahun 2020, Jakarta Selatan adalah wilayah dengan jalan terluas dibandingkan dengan wilayah lain yaitu 12.643.872 m². Total luas jalan meliputi luas jalan dalam kewenangan negara sebesar 883.754 m² dan kewenangan provinsi sebesar 11.760.118 m². Sedangkan, Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan luas jalan terkecil dibandingkan dengan wilayah lain yaitu 6.019.548 m². Total luas jalan meliputi luas jalan dalam kewenangan negara sebesar 60.000 m² dan kewenangan provinsi sebesar 5.959.548 m².



Gambar 3.27. Luas Jalan Nasional (m²) di DKI Jakarta Menurut Jenis Status Tahun 2020

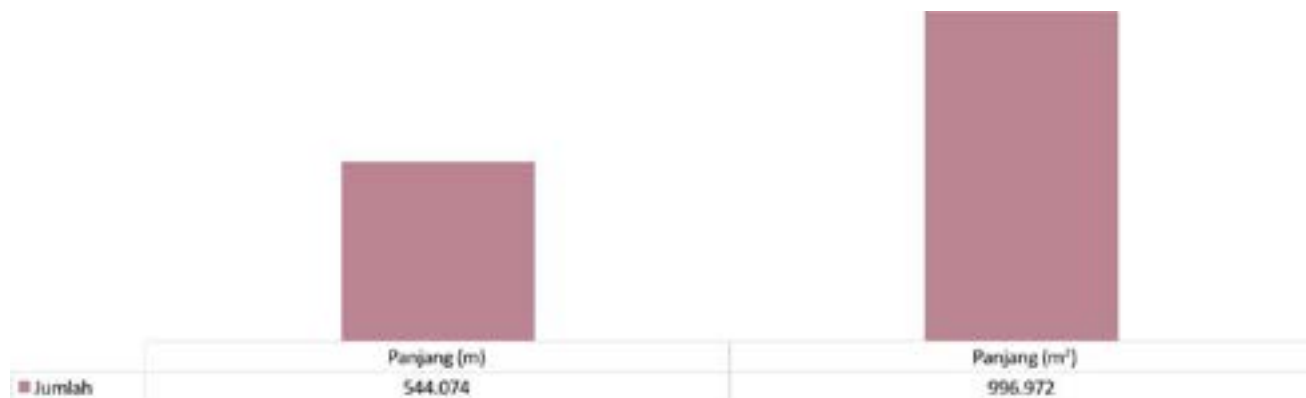
Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Jumlah luas jalan tol di lima wilayah administrasi di DKI Jakarta adalah 4.009.950 m² dengan jalan terluas yang berada di Jakarta Timur yaitu 1.451.550 m² dan jumlah luas jalan terkecil berada di Jakarta Pusat yaitu sebesar 60.000 m². Sedangkan, jumlah luas jalan negara di lima wilayah administrasi di DKI Jakarta adalah 988.436 m² dengan jumlah jalan nasional terluas berada di Jakarta Timur yaitu 367.404 m² dan tidak adanya jalan nasional kategori negara di Jakarta Pusat.

3.3.2. Panjang dan Luas Trotoar

Trotoar adalah bagian dari jalan yang digunakan oleh para pejalan kaki dengan permukaan yang lebih tinggi dari permukaan dan digunakan untuk menjaga keselamatan para pejalan kaki. Selain untuk memperindah jalan, trotoar juga berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat yang lebih memilih jalan kaki daripada menggunakan kendaraan umum atau pribadi dalam mobilitas sehari-hari.





Gambar 3.28. Panjang (m) dan Luas (m²) Trotoar di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Dapat dilihat bahwa total luas dan panjang trotoar di DKI Jakarta sejak tahun 2018 tidak mengalami perubahan. Jumlah panjang trotoar selama tiga tahun terakhir yaitu 544.074 meter dan luas trotoar sebesar 996.972 m². Meskipun tidak ada penambahan panjang trotoar, namun revitalisasi trotoar tetap dilakukan sepanjang tahun 2020. Revitalisasi ini mencakup pelebaran, menambah taman, membangun halte sampai dengan memperindah trotoar. Beberapa trotoar yang direvitalisasi seperti trotoar sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamrin di Jakarta Pusat.

3.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

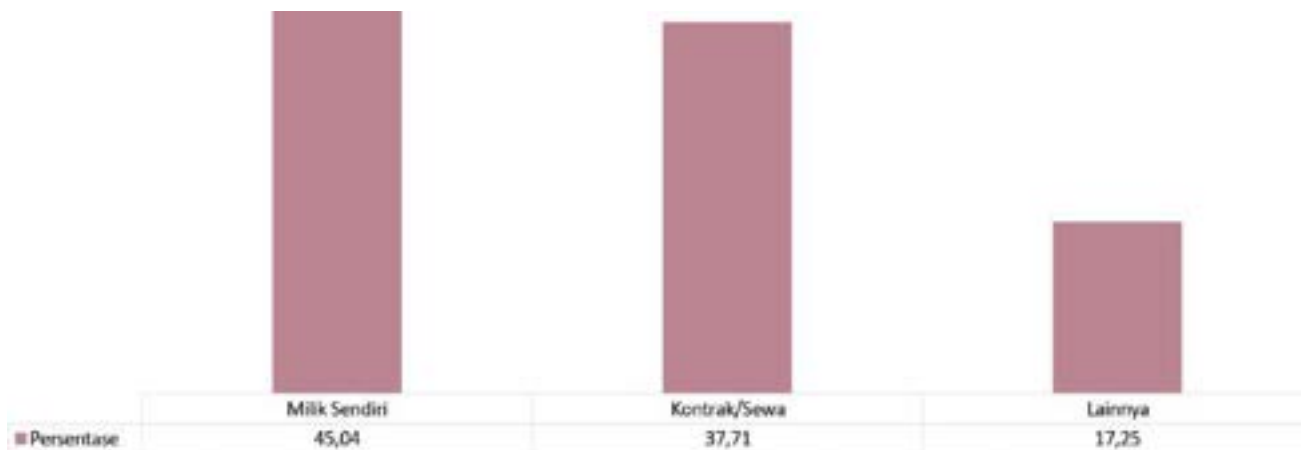
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan perumahan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dalam peraturan ini juga didefinisikan kawasan permukiman sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan¹⁷.

3.4.1. Rumah Susun Sederhana

Penguasaan bangunan adalah status kepemilikan bangunan oleh seseorang yang terbagi atas milik sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya. Status milik sendiri adalah status dimana seseorang memiliki rumah secara penuh dan lengkap dengan administrasinya. Berbeda dengan bangunan yang berstatus milik sendiri, kontrak/sewa memberikan jangka waktu tertentu kepada pemakai terhadap pemilik bangunan.



¹⁷ Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2019. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Gambar 3.29. Distribusi Persentase Rumah Tangga di DKI Jakarta Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DKI Jakarta melalui Susenas, status penguasaan bangunan milik sendiri terbanyak dibandingkan dengan status kepemilikan bangunan lainnya dengan persentase sebesar 45,04%. Jumlah rumah tangga yang memiliki sendiri tempat tinggalnya pada tahun 2020 menurun sebesar 2,08 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan, status penguasaan bangunan tempat tinggal kontrak/sewa meningkat sebesar 1,35 poin dari tahun sebelumnya. Dalam kurun tiga tahun terakhir, persentase rumah tangga dengan status penguasaan bangunan kontrak/sewa meningkat sebesar 2,08 poin.

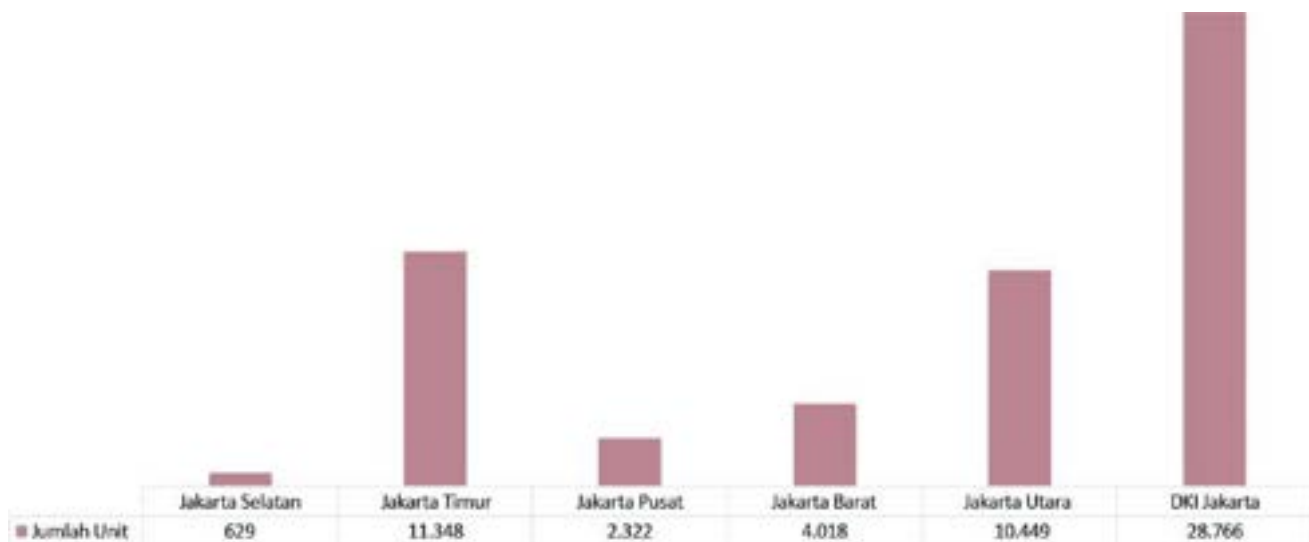


Gambar 3.30. Distribusi Persentase Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jika dilihat menurut wilayah administrasi, persentase terbesar rumah tangga dengan tempat tinggal milik sendiri yaitu di Kepulauan Seribu dengan persentase 85,93% rumah tangga. Sedangkan, di Jakarta Pusat hanya sebesar 39,83% rumah tangga yang tempat tinggalnya milik sendiri. Persentase rumah tinggal milik sendiri di semua wilayah administrasi lebih besar dibandingkan dengan sewa/kontrak dan lainnya, kecuali di Jakarta Selatan yang lebih banyak dengan status sewa/kontrak yaitu 43,26% rumah tangga. Salah satu penyebab banyaknya tempat tinggal dengan status sewa di Jakarta Selatan adalah karna banyaknya WNA yang menetap di wilayah ini. WNA lebih memilih untuk menyewa rumah daripada membeli dikarenakan tidak akan menetap atau tinggal dalam waktu yang lama di DKI Jakarta.

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok penduduk yang seiring bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan rumah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perumahan. Selain itu, pembangunan rusunawa juga bertujuan untuk penataan lingkungan permukiman kumuh dan efisiensi lahan yang terbatas dan mahal harga lahan. Dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rusunawa sebagai salah satu hunian layak tinggal. Masyarakat menengah ke bawah umumnya adalah para pekerja non-formal yang penghasilannya di bawah rata-rata.



Gambar 3.31. Jumlah Unit yang Tersedia pada Rumah Susun Sederhana di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Secara umum terjadi fluktuasi pada jumlah unit rusunawa pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Jakarta Selatan menjadi wilayah administrasi dengan unit rusunawa yang paling sedikit dalam tiga tahun terakhir yaitu 629 unit. Di sisi lain, Jakarta Timur menjadi wilayah administrasi dengan unit rusunawa yang paling banyak pada tahun 2020 sebanyak 11.348 unit. Hal ini berbanding lurus dengan Jakarta Timur yang memiliki banyak lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal seperti rusunawa. Pada tahun yang sama, jumlah unit rusunawa di Jakarta Barat bertambah sebanyak 542 unit, sedangkan jumlah unit rusunawa di Jakarta Utara berkurang sebanyak 928 unit. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, jumlah unit rusunawa di DKI Jakarta pada tahun 2020 berkurang 1,43% atau sebanyak 436 unit dari tahun sebelumnya.

Selama pandemi Covid-19, para penghuni rusunawa yang terdampak langsung dari pandemi ini sejak diberlakukannya PSBB dibantu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meringankan beban para penghuni rusunawa untuk tidak perlu membayar sewa selama masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19.



Gambar 3.32. Jumlah Blok, Tower, dan Lokasi pada Rumah Susun Sederhana di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Total unit rusunawa pada tahun 2020 sebanyak 28.766 unit yang tersebar di 27 titik lokasi di lima wilayah kota administrasi dengan 183 blok dan 51 tower. Jumlah blok terbanyak berada di Jakarta Timur dengan 85 blok yang berada di lima titik lokasi. Sedangkan, yang terkecil jumlah blok paling sedikit berada di Jakarta Selatan dengan enam blok. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Jakarta Timur mempunyai jumlah blok yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya di DKI Jakarta. Banyaknya blok yang berada di rusunawa Jakarta Timur sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk membangun rusunawa demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Keunggulan seperti dekat ke pusat kota, mudah akses, dan biaya sewa yang murah diharapkan mampu menjadi daya tarik agar masyarakat menjadikan rusunawa sebagai pilihan untuk tempat tinggal.

3.4.2. Sanitasi

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari rumah tangga, toko, kantor, dan lain-lain. Air bersih sendiri bermanfaat untuk menjaga kesehatan masyarakat yang digunakan untuk mandi, minum, memasak, dan berbagai kebutuhan lainnya.





Gambar 3.33. Jumlah Volume (m³) Air Bersih yang Disalurkan di DKI Jakarta Menurut Jumlah Pelanggan Tahun 2020
Sumber: PT PAM Jaya

Pada tahun 2020, jumlah pelanggan pengguna air bersih yang bersumber dari PT PAM Jaya untuk kebutuhan rumah tangga sebanyak 888.036 pelanggan. Jumlah pelanggan meliputi rumah tempat tinggal, hotel/objek wisata, badan sosial/rumah sakit, tempat ibadah, sarana umum, perusahaan/toko/industri/niaga, instansi pemerintah, pelabuhan, dan lain-lain. Jumlah volume air yang digunakan oleh pelanggan sebanyak 341.977.048 m³ per tahun.

Jumlah air minum yang disalurkan terbanyak terdapat pada kategori rumah tempat tinggal sebanyak 790.339 pelanggan, jumlah ini disusul oleh perusahaan toko dan industri sebanyak 86.598 pelanggan. Volume terbanyak penyaluran air berada di rumah tempat tinggal dengan 246.676.966 m³ lalu perusahaan toko dan industri berada pada peringkat kedua dengan 56.205.695 m³ dan setelah itu di peringkat ketiga yaitu hotel atau objek wisata dengan 18.915.700 m³ air.



Gambar 3.34. Distribusi Persentase Rumah Tangga di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi dan Sumber Air Bersih Tahun 2020

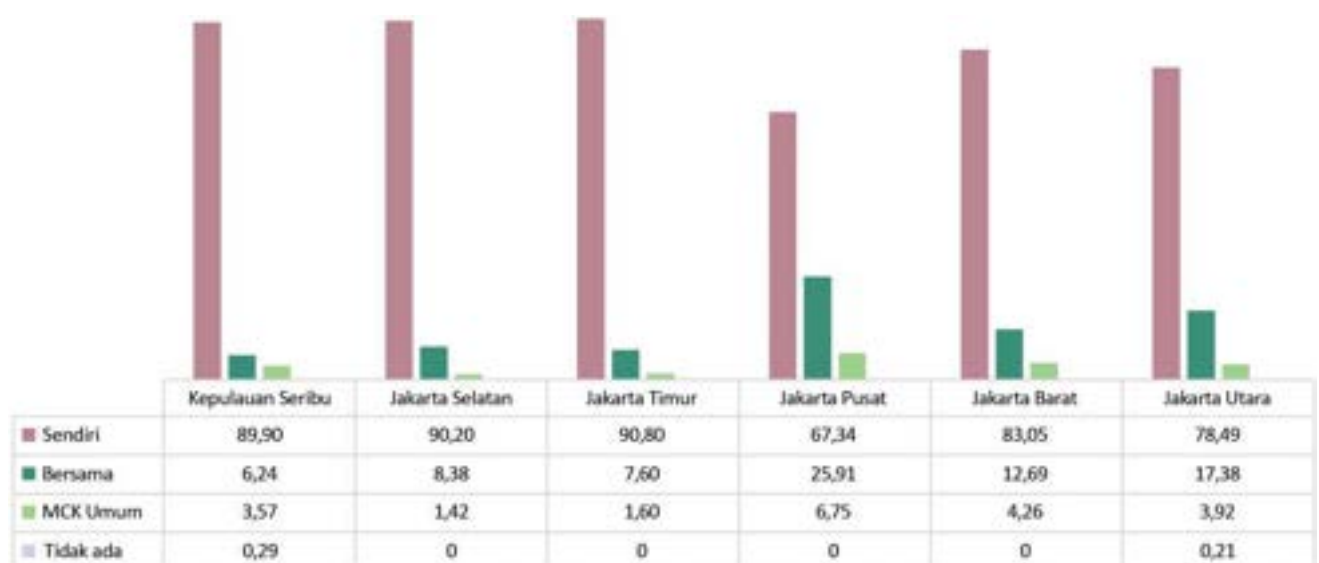
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta



Distribusi persentase air leding tertinggi berada di Jakarta Pusat dengan nilai 19,14%, sedangkan distribusi terendah berada di Jakarta Selatan dengan nilai 0,44%. Penggunaan air pompa sendiri paling banyak berada di Jakarta Selatan dengan nilai 26,08%, sedangkan penggunaan terendah berada di Jakarta Utara dengan nilai 0,57%. Penggunaan air dalam kemasan terbanyak terdapat di Kepulauan Seribu dengan persentase sebesar 87,12%, sedangkan yang terendah berada di Jakarta Selatan dengan persentase sebesar 73,39%. Kelangkaan air bersih di Kepulauan Seribu membuat masyarakat harus menggunakan air sumur bor yang diolah menggunakan brackish water reverse osmosis (BWRO). Air olahan inilah yang nantinya akan dikemas ke dalam bentuk galon dan digunakan oleh warga untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat penggunaan air kemasan cukup tinggi di Kepulauan Seribu.

Sanitasi adalah salah satu upaya yang dilakukan seseorang untuk membuat lingkungan yang sehat. Kebutuhan akan sanitasi berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup. Keberadaan sanitasi akan membantu masyarakat untuk menjadi lebih sehat karena sanitasi berperan penting dalam menjauhkan benda-benda kotor dan bakteri dari kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga sanitasi adalah dengan membuat fasilitas buang air besar dengan tujuan untuk menjauhkan benda-benda kotor yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

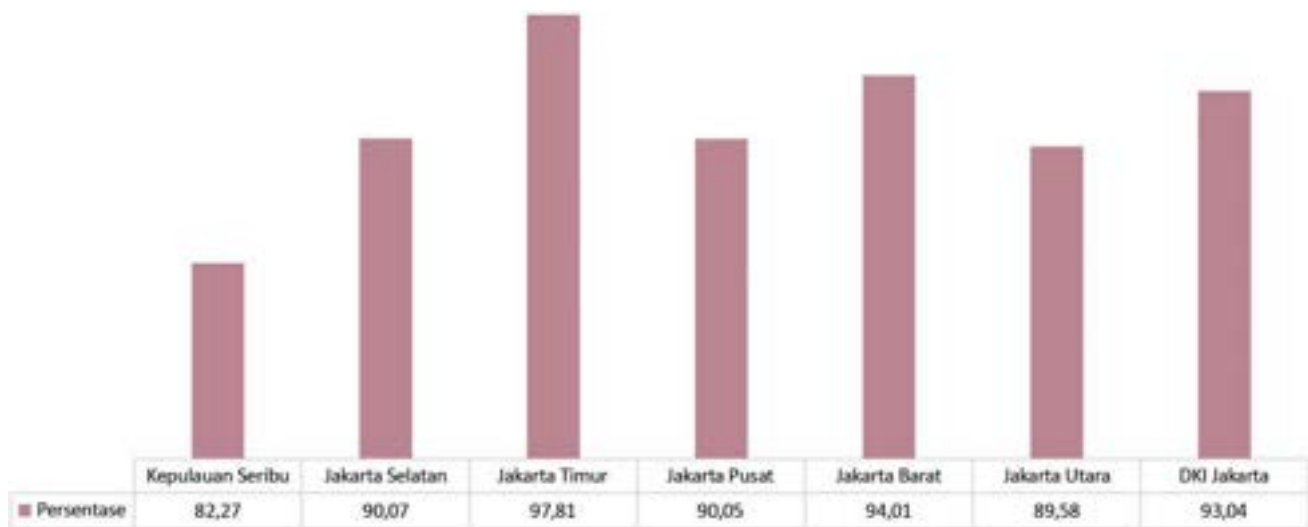
Kondisi keadaan perumahan di DKI Jakarta dapat dilihat dari penggunaan fasilitas buang air besar (BAB) yang dimiliki oleh rumah tangga. Data dari Susenas yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dari tahun 2018 sampai dengan 2020, persentase rumah tangga dengan status penggunaan fasilitas BAB sendiri selalu paling tinggi jika dibandingkan dengan status penggunaan fasilitas BAB lainnya. Sedangkan, persentase rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas BAB selalu paling kecil di antara 0,04 sampai dengan 0,40. Pada tahun 2020, sebesar 84,42% rumah tangga sudah memiliki fasilitas BAB dan 12,44% rumah tangga menggunakan fasilitas BAB bersama. Jumlah persentase rumah tangga dengan fasilitas BAB milik sendiri meningkat sebesar 1,40 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 3.35. Persentase Rumah Tangga di DKI Jakarta Menurut Status Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Hasil Susenas yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa Jakarta Timur memiliki persentase rumah tangga terbesar yang memiliki fasilitas BAB sendiri yaitu 90,80%, sedangkan wilayah dengan persentase terendah berada di Jakarta Pusat yaitu 67,34%. Jakarta Pusat mempunyai persentase tertinggi untuk penggunaan fasilitas BAB bersama terbanyak yaitu 25,91%. Hal ini dapat dikatakan sejalan dengan kepemilikan tempat tinggal kontrak/sewa yang mencapai 30,64%. Rumah tangga yang memiliki status kontrak/sewa tidak memiliki fasilitas BAB sehingga menggunakan fasilitas BAB bersama atau MCK umum. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri mencapai 83,13% namun jumlah ini turun sebesar 0,09% pada tahun 2019 dan naik kembali sebesar 1,40 menjadi 84,42%. Sementara itu penggunaan fasilitas bersama mengalami peningkatan sebesar 0,92. Di sisi lain untuk penggunaan MCK umum mengalami penurunan dari 3,64 menjadi 2,96 atau mengalami penurunan sebesar 0,95 poin.



Gambar 3.36. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2019, rumah tangga yang memiliki akses layak paling besar berada di Jakarta Timur dengan 95,36%. Sementara itu wilayah administrasi dengan akses terhadap sanitasi paling rendah berada di Kepulauan Seribu dengan 72,79%. Jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,15 poin dari tahun sebelumnya. Namun, walaupun nilai persentase ini meningkat akan tetapi jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari enam wilayah administrasi, terdapat dua wilayah yang mengalami penurunan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dari tahun sebelumnya yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masing-masing 0,94 dan 2,68 poin.

Kesehatan merupakan salah satu keinginan setiap individu agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar. Sanitasi merupakan salah satu faktor penunjang kesehatan yang wajib dipenuhi oleh setiap penduduk. Semakin bertambahnya penduduk, kebutuhan akan sanitasi tentu juga akan semakin bertambah. Hal ini membuat masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan pentingnya sanitasi dalam kehidupan sehari-hari.

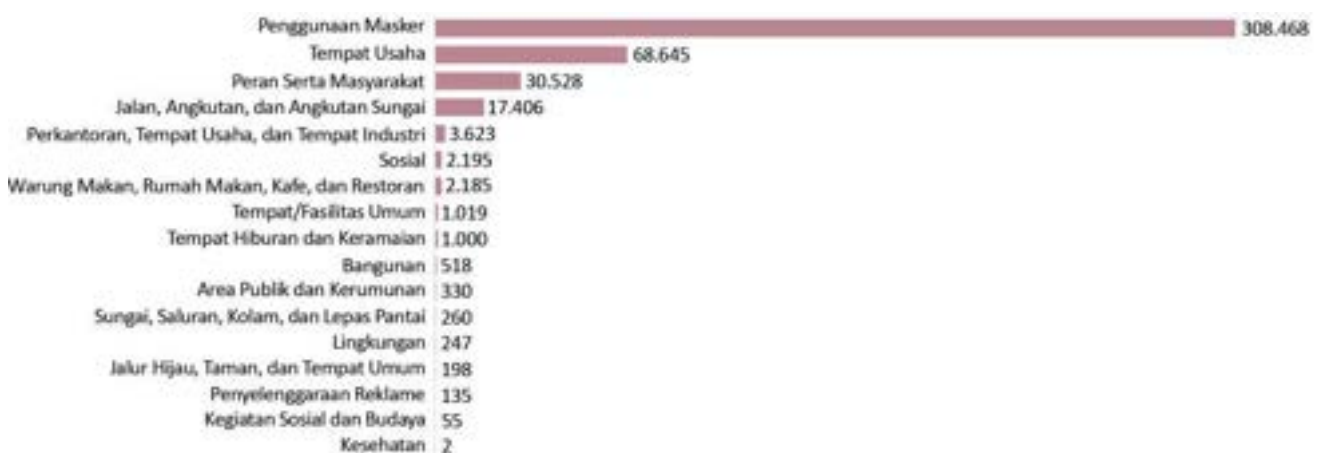


3.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu mengupayakan usaha-usaha agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah¹⁸. Selain Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta yang bertugas sebagai penegak aturan, terdapat beberapa lembaga pemerintahan yang turut menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, seperti Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

3.5.1. Pelanggaran Terkait Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan

Pelanggaran akan ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) masih sering terjadi di DKI Jakarta. Mulai dari pelanggaran ketertiban di jalan, tempat usaha, bangunan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa terjadi dimana saja. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta merupakan aparat pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam menertibkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.



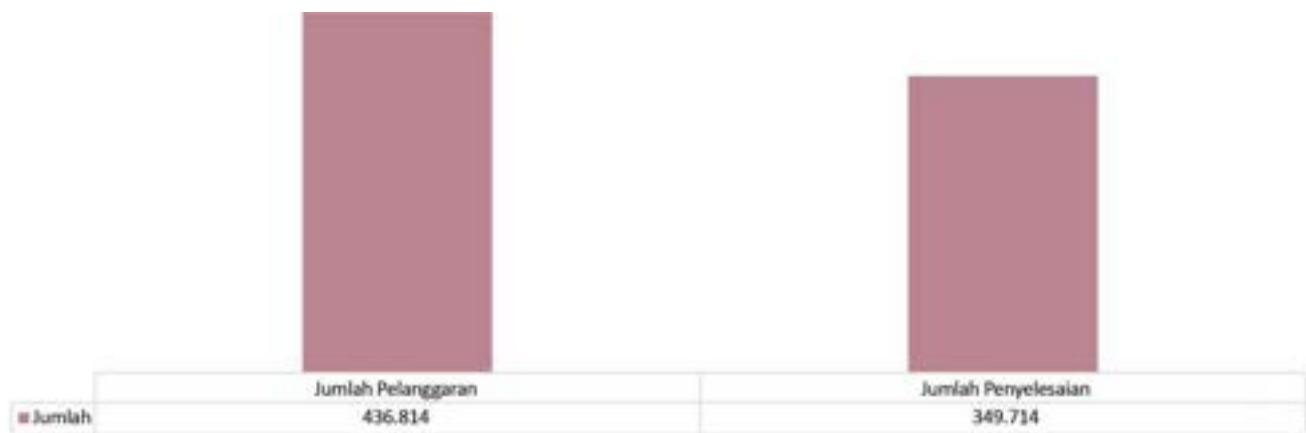
Gambar 3.37. Data Pelanggaran di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data pelanggaran K3 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 436.814 pelanggaran pada tahun 2020 yang masuk dalam 17 kategori pelanggaran. Dari 17 jenis pelanggaran ini, terdapat enam jenis pelanggaran yang merupakan kasus khusus/baru yang dicatat sebagai penyesuaian keadaan terkait protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 seperti pelanggaran di area publik dan kerumunan; perkantoran, tempat usaha, rumah makan, tempat industri, dan tempat umum lainnya. Pada tahun 2020, jenis pelanggaran dalam penggunaan masker mempunyai persentase tertinggi dibandingkan dengan pelanggaran jenis lainnya yang mencapai 70,61%. Hal ini berhubungan erat dengan gencarnya Satpol PP yang melakukan razia pelanggaran protokol kesehatan khususnya penggunaan masker selama masa pandemi.

¹⁸ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Sebagai Upaya Penegakan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, penduduk yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah mendapatkan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 menit atau denda ministrasi paling banyak sebesar Rp250.000,00.



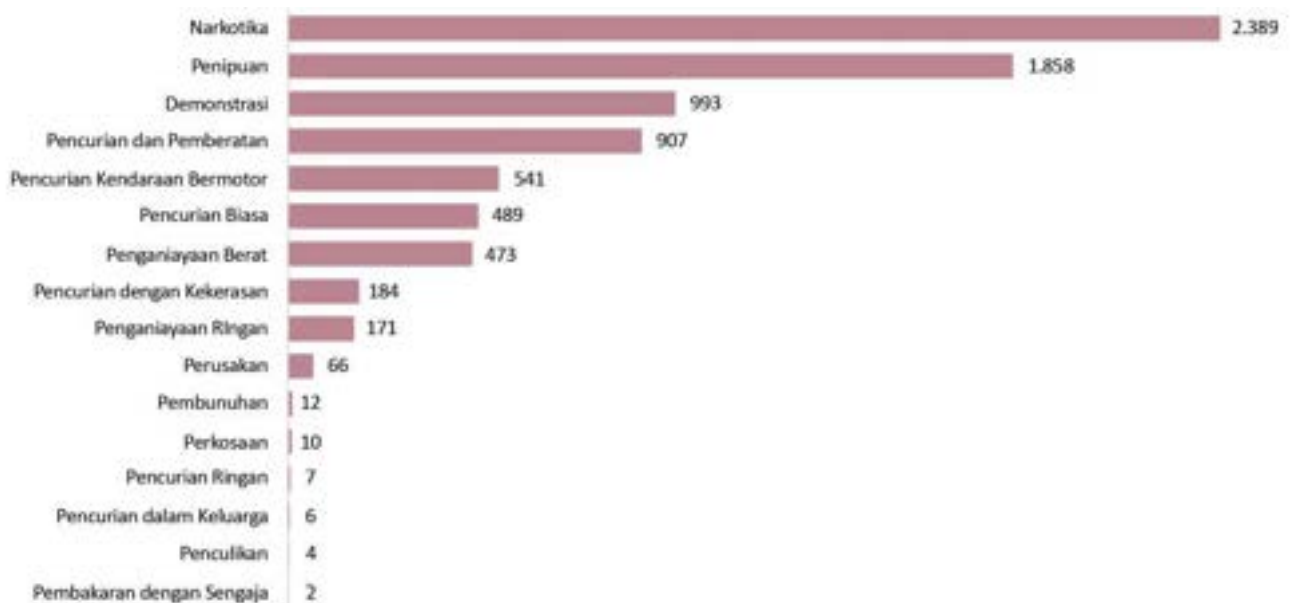
Gambar 3.38. Jumlah Pelanggaran dan Penyelesaian Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran pada tahun 2020 turun sebesar 27,57%. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berfokus pada ketertiban yang berkaitan dengan protokol kesehatan, sehingga jumlah pada beberapa jenis pelanggaran lainnya menjadi lebih sedikit. Jenis pelanggaran tertinggi pada tahun 2020 yaitu pelanggaran penggunaan masker yang mencapai 308.468 pelanggaran. Masih berhubungan dengan K3, tingkat penyelesaian pelanggaran selama tahun 2020 mencapai 80,06%. Meskipun turun 18,80 poin dari capaian tahun sebelumnya, tetapi penindakan terkait protokol kesehatan seperti penggunaan masker mencapai 97,66% dengan jumlah penyelesaian sebanyak 301.264.

Kejahatan merupakan salah satu hal yang meresahkan karena dapat merugikan masyarakat dan negara. Berbagai macam kejahatan seperti narkoba, penipuan hingga kerusakan masih terjadi sampai dengan saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi berbagai kejahatan ini seperti pengerahan satuan keamanan dan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai kondisi dinamis masyarakat yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminannya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.

Meskipun terjadi pandemi pada tahun 2020, angka kejahatan di DKI Jakarta tercatat masih cukup tinggi yaitu sebanyak 8.112 kejahatan. Terjadi penurunan jumlah kejahatan/pelanggaran kamtibmas jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir sebesar 8,10% atau sebanyak 715 kejahatan/pelanggaran.





Gambar 3.39. Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tertinggi di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020

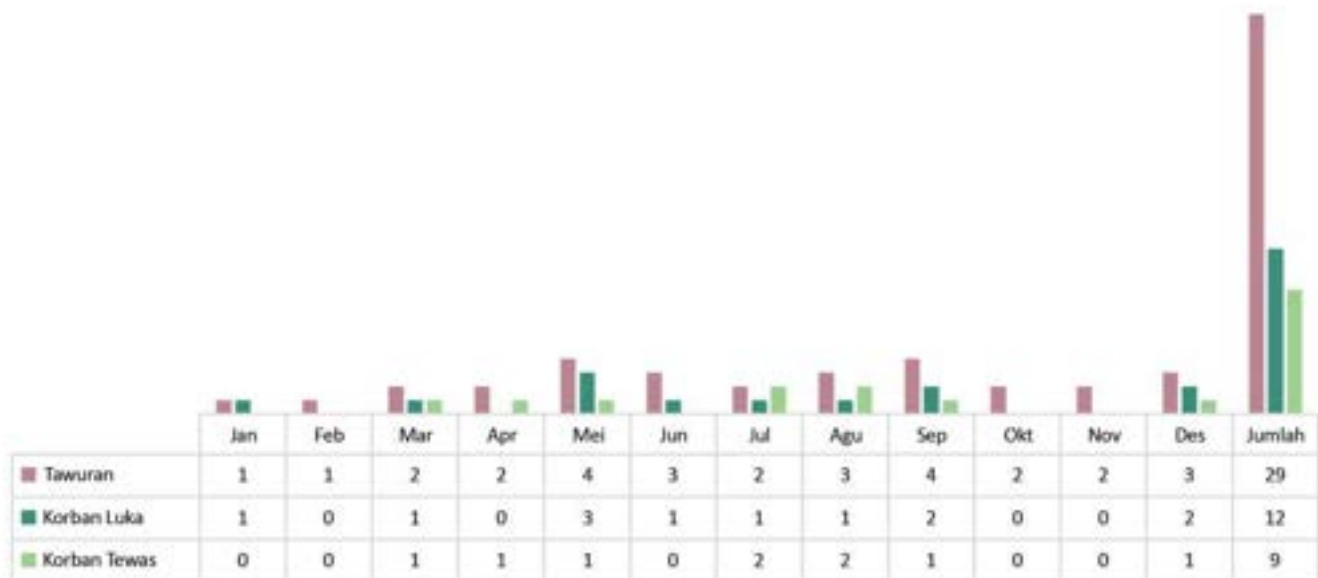
Sumber: Polda Metro Jaya

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, pada tahun 2020 jumlah kejahatan terkait narkoba masih menduduki posisi pertama terbanyak dengan persentase terbanyak sebesar 29,45% atau sebanyak 2.389 kejahatan. Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang teroganisir. Mulai dari produksi, distribusi sampai dengan penjualan narkoba yang tersusun dengan baik. Transaksi yang terjadi juga melibatkan banyak pihak seperti pembuat, pembeli, pengedar, dan pengguna. Jumlah pelaku kejahatan narkoba yang melibatkan banyak orang ini menjadi salah satu penyebab kejahatan ini selalu menempati urutan teratas dengan jumlah kejahatan terbanyak dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah pelanggaran jenis penipuan pada tahun 2020 meningkat cukup signifikan yang mencapai 32,15% atau sebanyak 452 pelanggaran jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir.

Pelanggaran atau kejahatan adalah masalah yang cukup pelik karena melibatkan pelaku dan korban. Salah satu cara menanggulangi kejahatan adalah dengan menghukum pelaku kejahatan dengan hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, tindakan preventif seperti razia juga perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran oleh masyarakat.

Tawuran adalah proses saling pukul yang dilakukan oleh satu kelompok dengan kelompok lainnya seperti tawuran antar pelajar, warga hingga organisasi masyarakat. Tidak jarang tawuran kerap menimbulkan korban luka hingga jiwa. Penyebab tawuran bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah karena kesalahpahaman dan warga yang tidak pandai mengendalikan emosi.

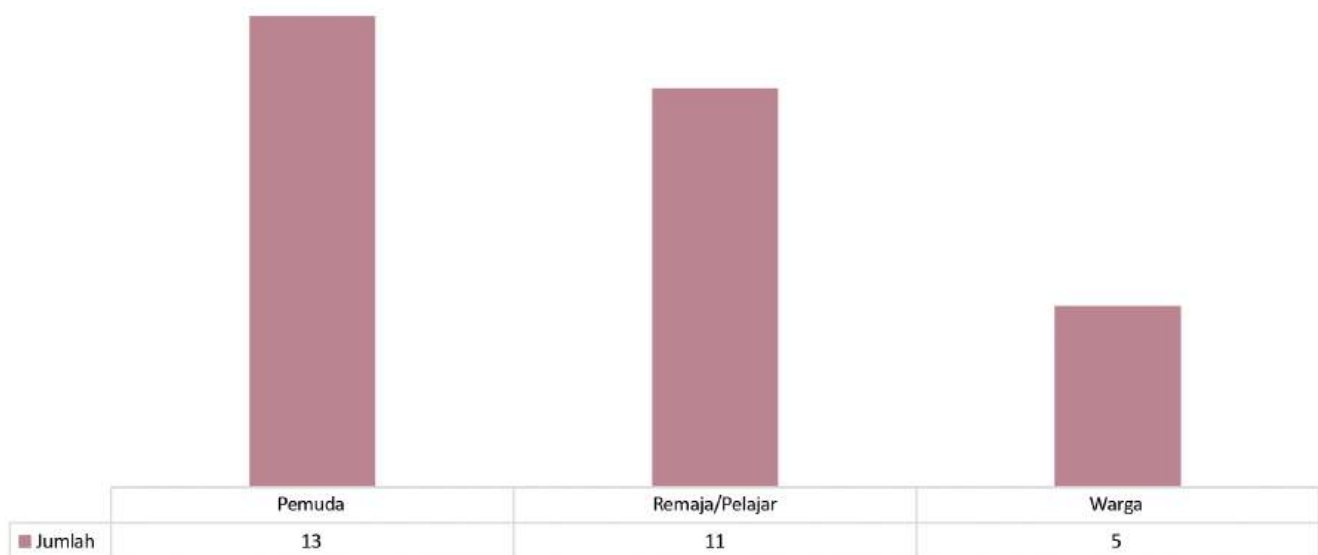




Gambar 3.40. Jumlah Tawuran dan Korban di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, jumlah tawuran yang terjadi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2020 sebanyak 29 tawuran. Jumlah ini menurun sebesar 27,50% atau sebanyak 11 tawuran jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah tawuran paling sedikit terjadi pada bulan Januari dan Februari yaitu satu kali tawuran. Sedangkan tawuran terbanyak terjadi pada bulan Mei dan September dengan empat kali tawuran. Tawuran yang terjadi sepanjang tahun 2019 mengakibatkan 33 korban luka dan 13 meninggal dunia. Lalu pada 2020, jumlah korban luka dan meninggal dunia masing-masing sebanyak 13 dan 7 jiwa. Korban tewas terbanyak terjadi pada bulan Juli dan Agustus sebanyak dua jiwa.



Gambar 3.41. Jumlah Tawuran di DKI Jakarta Menurut Unsur Pelaku Tahun 2020

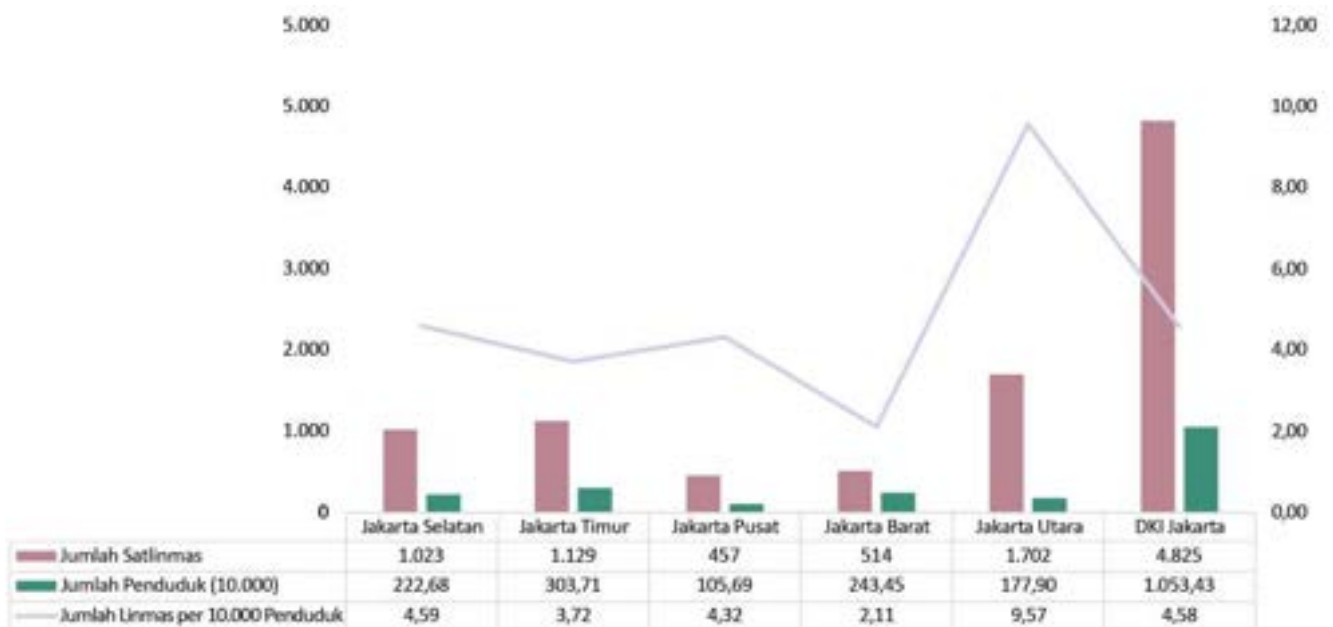
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Tawuran yang terjadi pada tahun 2020 mayoritas dilakukan oleh tiga unsur yaitu pemuda, remaja/pelajar, dan warga dengan jumlah masing-masing sebanyak 13, 11, dan 5 tawuran. Sama dengan tahun sebelumnya, unsur terbanyak yang menyebabkan tawuran adalah pemuda dan remaja/pelajar masing-masing sebanyak 20 dan 11 tawuran. Pada tahun 2019, suporter bola dan TNI AD merupakan pelaku yang paling sedikit melakukan tawuran dengan jumlah hanya satu kali. Tawuran

merupakan fenomena yang sering terjadi pada masyarakat. Tawuran merupakan salah satu konflik horizontal yang sering kali terjadi di DKI Jakarta. Mulai dari tawuran antar warga, siswa sekolah sampai dengan organisasi masyarakat. Beberapa faktor penyebab tawuran adalah tidak bisa mengendalikan emosi, saling ejek, masalah pertemanan, dan dalam rangka membela suatu kelompok. Lingkungan keluarga dan sekolah tentu menjadi pihak yang harus bisa menanamkan pada setiap anak tentang bahaya yang ditimbulkan dari tawuran. Selain itu, pemerintah juga tidak segan untuk memberikan sanksi kepada warga yang terlibat dalam aksi tawuran.

3.5.2. Perlindungan Masyarakat

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat bahwa selain Satpol PP sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di provinsi dan kota/kabupaten, terdapat Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dibawah oleh kepala desa/lurah sebagai penyelenggaraan di tingkat desa/kelurahan. Satlinmas yang sebelumnya bernama Pertahanan Sipil (Hansip) mempunyai peran yang penting dalam menjaga keamanan lingkungan.

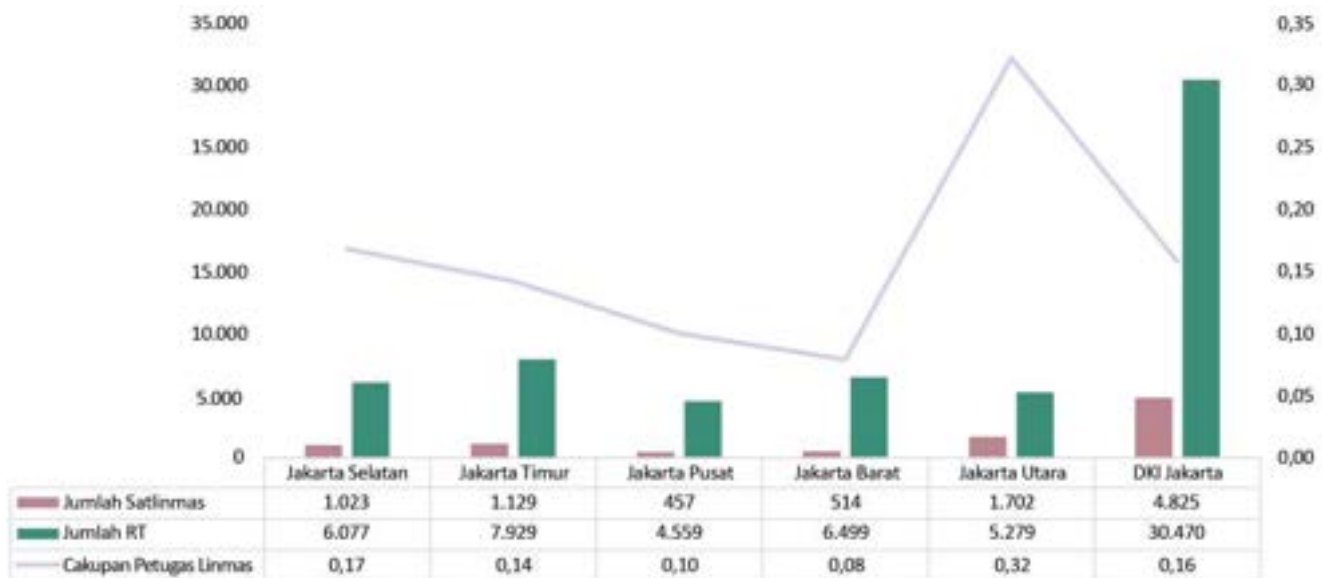


Gambar 3.42. Jumlah Perlindungan Masyarakat per 10.000 Penduduk di DKI Jakarta
Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dan Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, jumlah Satlinmas di DKI Jakarta sebanyak 4.825 petugas dengan jumlah linmas per 10.000 penduduk. Jumlah ini menunjukkan bahwa sebanyak empat sampai dengan lima petugas linmas untuk 10.000 penduduk di DKI Jakarta. Jakarta Utara memiliki rasio terbesar yaitu 9,57. Sedangkan, Jakarta Barat memiliki rasio terkecil yaitu 2,11.





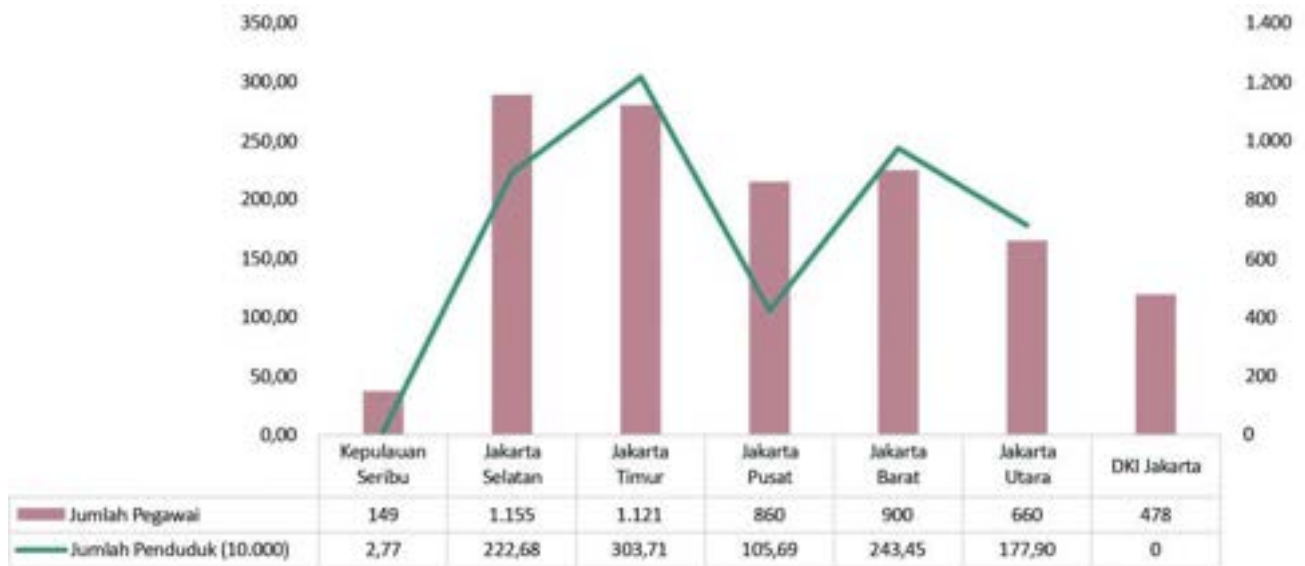
Gambar 3.43. Cakupan Perlindungan Masyarakat di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dan Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa cakupan petugas linmas di DKI Jakarta tahun 2020 mencapai 0,16 orang per RT dari target nasional satu orang setiap RT. Hal ini disebabkan oleh adanya perumahan yang menggunakan jasa pengamanan swasta dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga tidak dimasukkan dalam jumlah Satlinmas di atas.

Satpol PP adalah aparat pemerintah daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat¹⁹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 148 Satpol PP didefinisikan sebagai perangkat pemerintah daerah yang bertugas dalam menegakkan peraturan daerah (perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam upaya penegakkan perda, Satpol PP membutuhkan anggota yang dapat mendukung kinerjanya pada setiap wilayah administrasi, sehingga jumlah Satpol PP di setiap wilayah dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan.



¹⁹ Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.



Gambar 3.44. Jumlah Polisi Pamong Praja di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

*Jumlah di bagan DKI Jakarta merupakan penempatan di pusat, bukan akumulasi enam wilayah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 256 Ayat 1 menyebutkan bahwa status Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun faktanya tidak semua Satpol PP berstatus sebagai PNS. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2020 sebesar 54,87% atau 2.921 orang berstatus PNS. Jakarta Selatan mempunyai Satpol PP berstatus PNS sebanyak 608 orang yang disusul oleh Jakarta Timur sebanyak 593 orang dan Jakarta Barat sebanyak 497 orang.

Satpol PP yang berstatus kepegawaian sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebesar 29,96% atau sebanyak 1.595 orang. Dari sebanyak 1.595 pegawai Satpol PP yang berstatus PTT, sebesar 23,00% atau sebanyak 374 Satpol PP berada di Jakarta Selatan. Jumlah ini disusul oleh Jakarta Timur sebesar 23,00% atau sebanyak 367 orang dan Jakarta Barat sebesar 18,55% atau sebanyak 296 orang. Selain Satpol PP berstatus PTT, terdapat juga Satpol PP dengan status sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) sebesar 15,25% atau sebanyak 812 orang Satpol PP. Berbeda dengan Satpol PP dengan status PNS dan PTT, penyebaran personel Satpol PP dengan status PJLP terbanyak berada di Jakarta Selatan yaitu 173 orang, Jakarta Timur yaitu 161 orang, dan Jakarta Pusat yaitu 151 orang.





Gambar 3.45. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Rasio Satpol PP per 10.000 penduduk pada tahun 2020 sebesar 2,82. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat dua sampai dengan tiga Satpol PP yang melayani 10.000 penduduk DKI Jakarta. Jika dilihat menurut trennya, dari tahun 2016 sampai dengan 2020, jumlah Satpol PP terus menurun, sedangkan jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah Satpol PP di DKI Jakarta sebesar 10,98% atau sebanyak 327 orang. Penurunan jumlah Satpol PP di DKI Jakarta dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti memasuki masa purna bakti, meninggal dunia, dan lain-lain. Jumlah Satpol PP di setiap wilayah belum terdistribusi sesuai dengan jumlah penduduk. Hal ini membuat rasio antara Satpol PP dengan jumlah penduduk di setiap wilayah di DKI Jakarta berbeda cukup jauh antar wilayah terutama di Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Sedangkan, di Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara memiliki sekitar tiga sampai dengan empat Satpol PP yang melayani 10.000 penduduk di setiap wilayah tersebut.

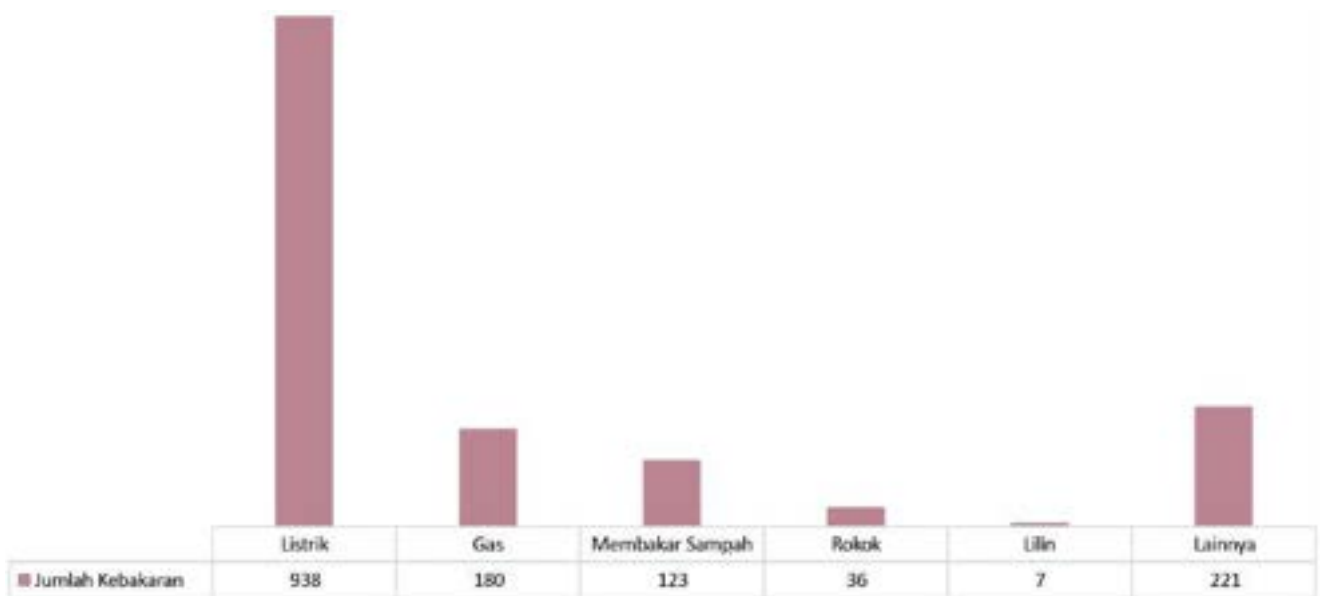
3.5.3. Kebakaran dan Penyelamatan

Kebakaran merupakan kondisi dimana api tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan kerusakan hingga korban jiwa. Kebakaran dapat dikategorikan sebagai salah satu bencana yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan sampai dengan kerugian harta benda. DKI Jakarta sebagai daerah yang memiliki banyak pemukiman padat penduduk tentu memiliki risiko yang tinggi terhadap kebakaran. Banyak faktor yang menjadi penyebab dari kebakaran mulai dari gempa bumi, arus pendek listrik hingga puntung rokok.



Gambar 3.46. Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Menurut data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Diskgulkarmat) Provinsi DKI Jakarta, jumlah kebakaran tertinggi setiap tahunnya rata-rata berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Pada tahun 2019, jumlah kebakaran tertinggi berada di Jakarta Timur dengan 577 kejadian, sedangkan pada tahun 2020 berada di Jakarta Selatan dengan 397 kejadian. Dari tahun 2018 ke tahun 2019, terjadi peningkatan kasus kebakaran sebesar 24,67% atau sebanyak 432 kejadian. Pada tahun 2020, jumlah kebakaran di DKI Jakarta sebanyak 1.505 kejadian. Jumlah kebakaran yang terjadi menurun sebesar 31,06% atau sebanyak 678 kejadian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Banyaknya jumlah penduduk dan tingginya angka kepadatan penduduk di Jakarta Timur dapat menjadi salah satu penyebab wilayah administrasi ini lebih sering mengalami banyak bencana kebakaran dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya.

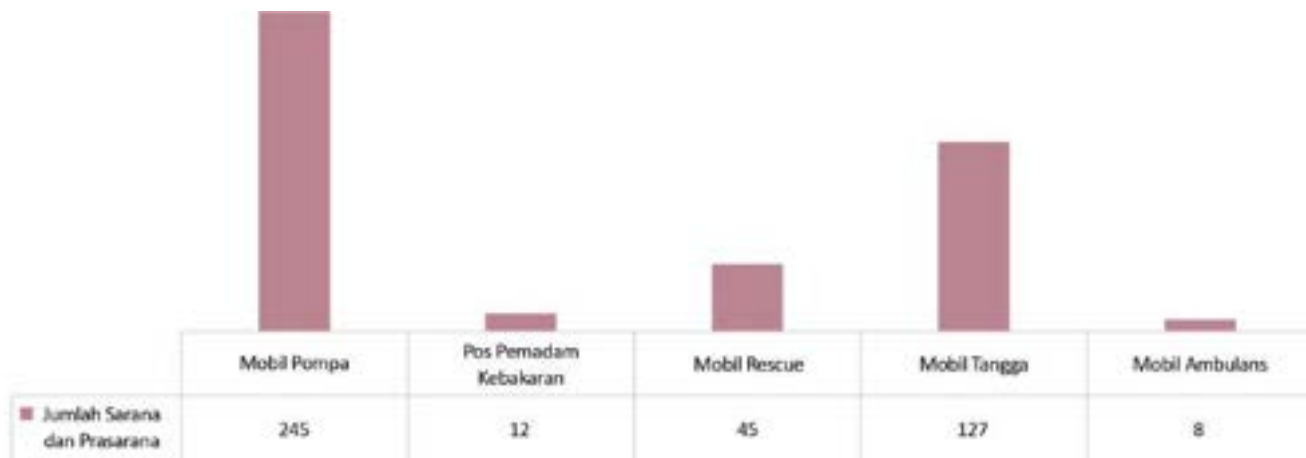


Gambar 3.47. Jumlah Kebakaran di DKI Jakarta Menurut Penyebab Kebakaran Tahun 2020
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Sama seperti tahun 2019, mayoritas kejadian kebakaran di DKI Jakarta pada tahun 2020 disebabkan oleh korsleting listrik sebanyak 938 kejadian atau 62,33% dari total kejadian. Penyebab kebakaran terbanyak kedua pada tahun 2020 yaitu gas sebanyak 180 kejadian. Penggunaan listrik secara berlebihan menjadi penyebab utama terjadinya korsleting. Pokok benda terbakar pada kejadian kebakaran di DKI Jakarta meliputi bangunan perumahan, bangunan umum dan perdagangan, bangunan industri, kendaraan, instalasi luar gedung, tumbuhan, lapak, sampah, dan lain-lain. Adapun pokok bahan terbakar di DKI Jakarta terbanyak adalah bangunan perumahan sebesar 30,63% atau sebanyak 461 buah. Jumlah ini disusul oleh bangunan umum dan perdagangan sebesar 17,87% atau sebanyak 269 buah.

Disgulkarmat bertugas untuk menanggulangi kebakaran dan bencana alam yang membutuhkan sarana dan prasarana pendukung secara cepat. Fasilitas seperti mobil pompa, mobil rescue, dan lain-lain adalah kebutuhan pokok yang harus dimiliki Disgulkarmat agar dapat bekerja secara maksimal.





Gambar 3.48. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Jumlah sarana dan prasarana Disgulkarmat pada tahun 2020 meningkat 42,81% dari tahun 2018 sejumlah 437 sarana. Sarana yang memiliki peningkatan terbesar yaitu pada mobil pompa yang meningkat sebanyak 108 buah. Penambahan mobil pompa ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses penanggulangan bencana kebakaran yang terjadi di DKI Jakarta.



Gambar 3.49. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020*

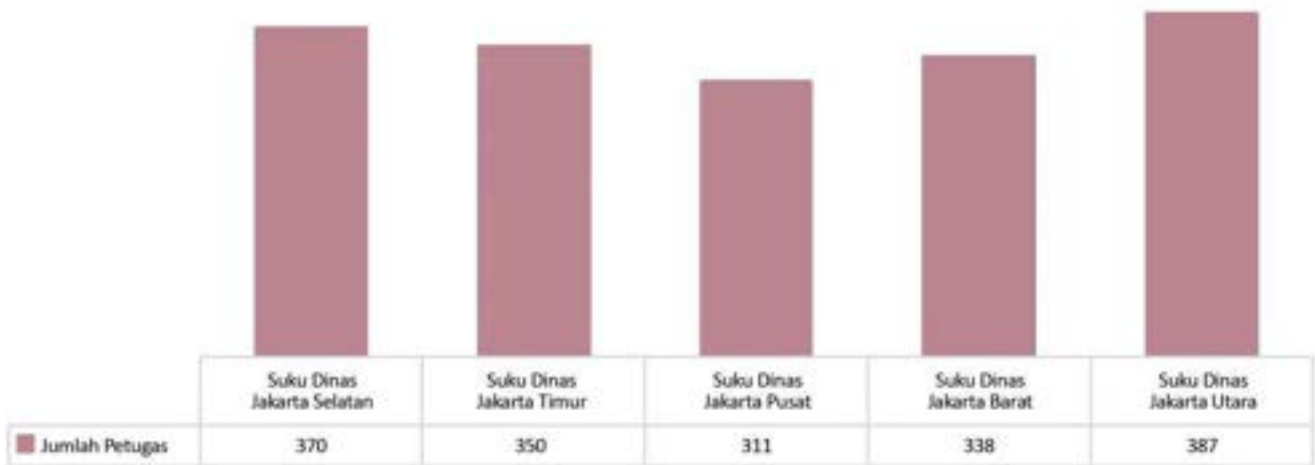
Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

*jumlah di DKI Jakarta merupakan penempatan di pusat, bukan akumulasi enam wilayah

Menurut wilayah administrasi, terdapat 437 sarana dan prasarana yang tersebar di lima wilayah dengan jumlah terbanyak berada di Jakarta Utara yaitu 95 sarana dan prasarana. Fasilitas jalan di Jakarta Utara memungkinkan banyak kendaraan besar bisa melewati jalan. Infrastruktur jalan yang besar ini adalah salah satu alasan yang menyebabkan terdapat banyak pos pemadam kebakaran yang berada di Jakarta Utara. Pos pemadam terbanyak berada di Jakarta Utara yaitu 33 pos.

Petugas penanganan, penanggulangan dan kebakaran di DKI Jakarta merupakan orang yang bertugas untuk melakukan penyelamatan, memadamkan kebakaran, dan menanggulangi bencana alam. Petugas ini juga bertugas untuk memberikan sosialisasi mengenai bencana alam kepada masyarakat serta cara menanggulangnya.





Gambar 3.50. Jumlah Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta Menurut Suku Dinas Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

Jumlah petugas penanganan penanggulangan kebakaran di DKI Jakarta sebanyak 1.756 orang. Selain memiliki sarana Gulkarmat terbanyak, Jakarta Utara juga mempunyai petugas penanganan penanggulangan kebakaran yaitu 387 petugas. Banyaknya petugas di Jakarta Utara berbanding lurus dengan banyak pos pemadam kebakaran yang ada di wilayah administrasi ini.

Dalam rangka memberikan pengetahuan masyarakat mengenai bencana kebakaran, Disgulkarmat Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk terus melakukan sosialisasi sebagai tindakan pencegahan kebakaran. Sosialisasi ini diberikan dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami berbagai penyebab kebakaran dan keterampilan dalam menangani bencana kebakaran, sehingga dapat menekan angka kebakaran yang terjadi.

3.6. Sosial

Di balik kemegahan dan keramaian hiruk pikuk Ibu Kota Republik Indonesia, masih terdapat permasalahan sosial yang menjadi salah satu fokus khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara garis besar masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan unsur budaya serta membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi. Masalah sosial seperti gelandangan, anak terlantar dan pengemis masih sering ditemui di DKI Jakarta. Banyak faktor yang menyebabkan masalah sosial ini mulai dari ekonomi sampai dengan budaya.

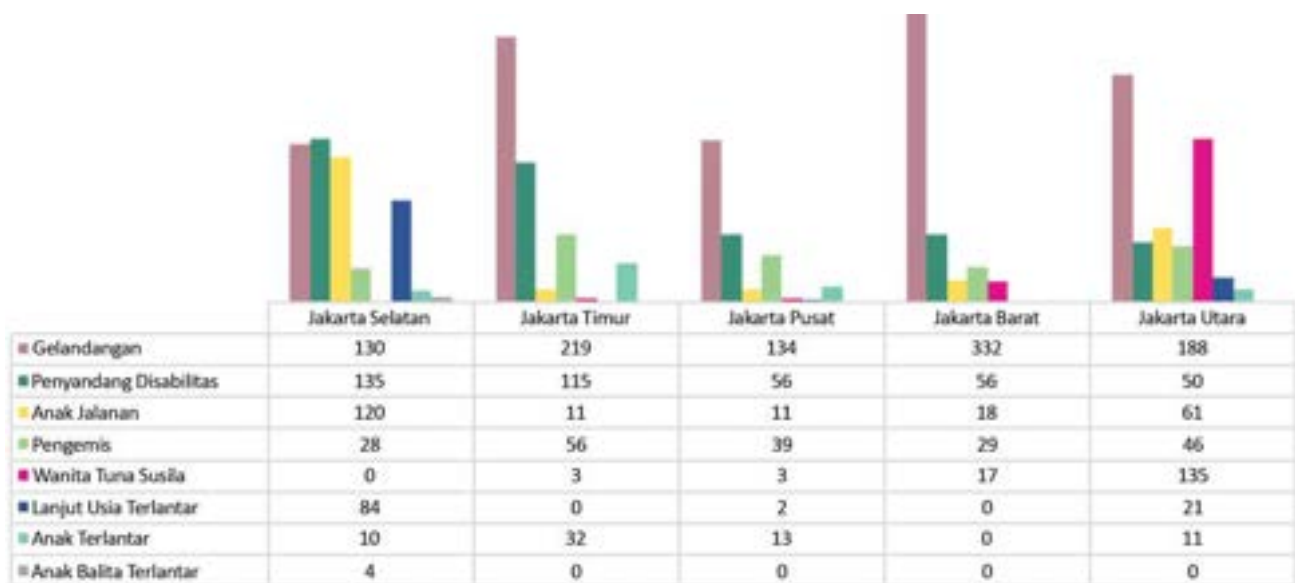
3.6.1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan seseorang atau kelompok yang mempunyai kesulitan dalam melaksanakan perannya di kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 5 mengategorikan PMKS seperti penyandang disabilitas, tuna susila, usia lanjut terlantar, anak terlantar, anak balita terlantar, dan lain-lain. Sering kali beberapa dari PMKS ini berada di pusat keramaian seperti pasar, stasiun kereta, ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, terdapat sebanyak 2.169 PMKS di DKI Jakarta yang ditertibkan pada tahun 2020. Jumlah ini turun sebesar 18,49% atau sebanyak 492 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terlihat pada tingkat provinsi

secara keseluruhan. Jakarta Pusat merupakan wilayah administrasi dengan penurunan jumlah PMKS paling tinggi sebesar 63,20% atau sebanyak 443 orang. Namun, jika dilihat dari masing-masing kota administrasinya terdapat satu wilayah administrasi yang mengalami peningkatan jumlah PMKS yang tertibkan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wilayah administrasi tersebut adalah Jakarta Selatan yang naik sebesar 21,09% atau sebanyak 89 orang.

Berdasarkan jenisnya, jumlah PMKS terbanyak adalah gelandangan yaitu 1.003 orang dan jumlah paling sedikit adalah anak balita terlantar yaitu empat orang. Meskipun jumlah gelandangan tergolong besar, jumlah tersebut sudah lebih rendah sebesar 34,32% atau sebanyak 524 orang jika dibandingkan dengan jumlah gelandangan pada tahun 2019. Lalu, meskipun jumlah anak balita terlantar pada tahun 2020 adalah jenis PMKS terendah yang tertibkan pada tahun 2020, namun jumlah tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018 yang tidak ada satupun jenis anak balita terlantar.



Gambar 3.51. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis dan Kota Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Gelandangan dan anak balita terlantar adalah jenis PMKS dengan jumlah terbanyak di DKI Jakarta. Jika melihat data jumlah PMKS menurut jenis dan kota administrasi pada tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, jenis PMKS dengan jumlah terbanyak di masing-masing wilayah adalah gelandangan, kecuali di Jakarta Selatan yang memiliki jumlah PMKS terbanyak pada jenis penyandang disabilitas. Berbeda dengan wilayah administrasi lainnya, Jakarta Utara memiliki PMKS berjenis wanita tuna susila yang cukup banyak yaitu 135 orang.

3.6.2. Pekerja Sosial

Di tengah permasalahan sosial yang ada di DKI Jakarta, terdapat fasilitas pekerja sosial dan lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki peran dalam penanganan, pemberdayaan, dan usaha dalam meminimalisir masalah sosial. Pekerja sosial sebagai sebuah profesi mempunyai peran dalam memberikan pelayanan kepada individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.





Gambar 3.52. Jumlah Pekerja Sosial di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

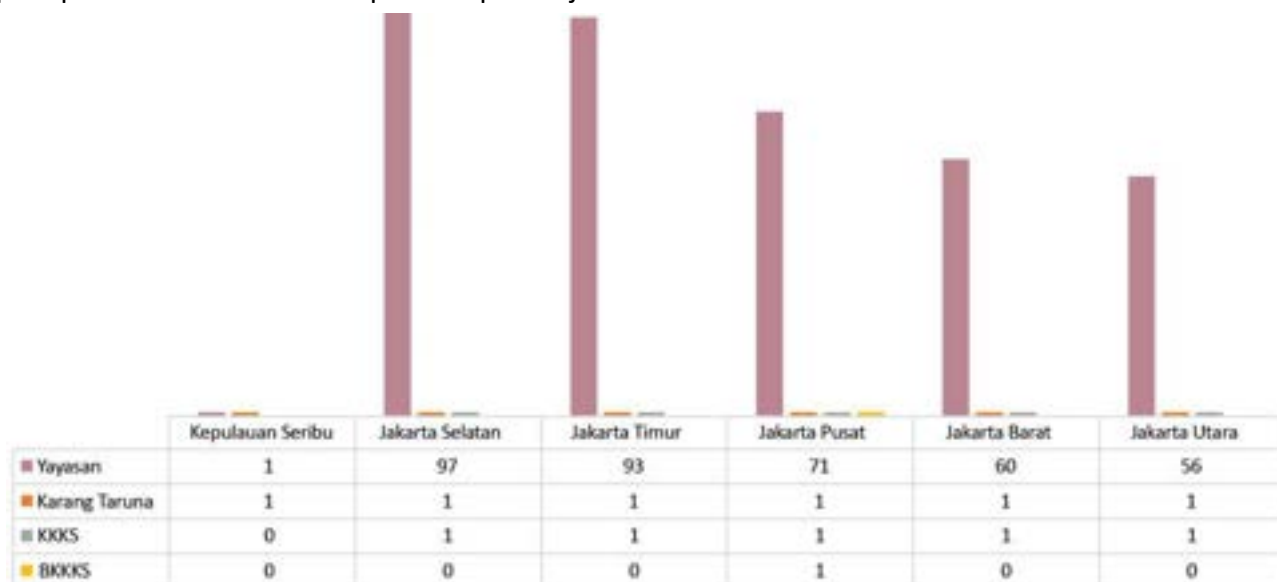
Terjadi peningkatan jumlah pekerja sosial menurut wilayah administrasi pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Persentase peningkatan jumlah pekerja sosial paling tinggi terjadi di Kepulauan Seribu yang sebelumnya tidak ada satupun pekerja sosial menjadi satu pekerja sosial. Pada tahun 2020, jumlah pekerja sosial di DKI Jakarta naik sebesar 54,54% atau sebanyak 1.088 pekerja dari tahun sebelumnya. Jumlah tertinggi berada di Jakarta Timur dengan 857 pekerja. Jenis pekerja sosial terbanyak pada tahun 2020 yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebesar 85,59% atau sebanyak 2.639 pekerja. Sedangkan, organisasi sosial dan pejuang masing-masing sebanyak 378 dan 66 pekerja.

3.6.3. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga kesejahteraan sosial berperan dalam mengatur hubungan yang terjalin antar manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Lembaga kesejahteraan sosial terbagi dalam lima jenis, yaitu yayasan, karang taruna, Kelompok Kerja Kesejahteraan Sosial Usaha Masyarakat (Pokja Kesuma), Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS), dan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS). Menurut tingkat cakupan organisasinya, karang taruna dan Pokja Kesuma berada di tingkat kelurahan, KKKS berada di tingkat kota administrasi, dan BKKKS berada di tingkat provinsi.

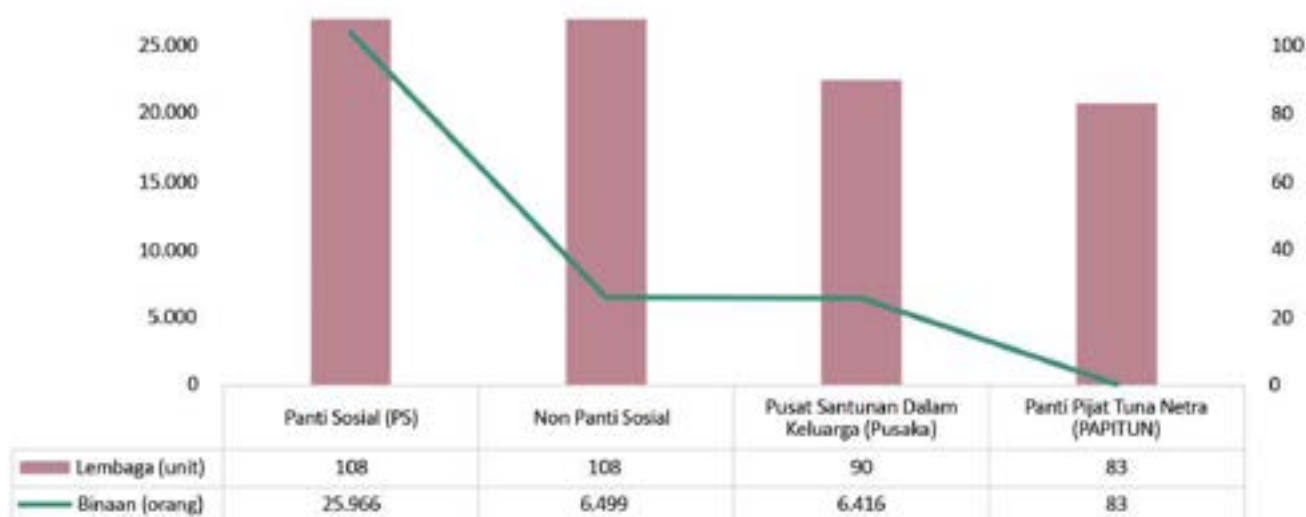


Tercatat sebanyak 390 lembaga kesejahteraan sosial pada tahun 2020. Jumlah ini turun sebanyak 52,44% atau sebanyak 430 lembaga dibandingkan dengan tahun 2019. Jenis lembaga terbanyak yaitu yayasan sebanyak 378 lembaga, sedangkan pada tahun 2020 jumlah karang taruna turun secara signifikan menjadi enam lembaga. Karang Taruna merupakan organisasi yang diisi oleh para pemuda suatu kelurahan dan RW. Namun, saat ini karang taruna kurang diminati karena banyaknya kegiatan para pemuda di sekolah maupun tempat kerja.



Gambar 3.53. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi dan Jenis Tahun 2020
Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI

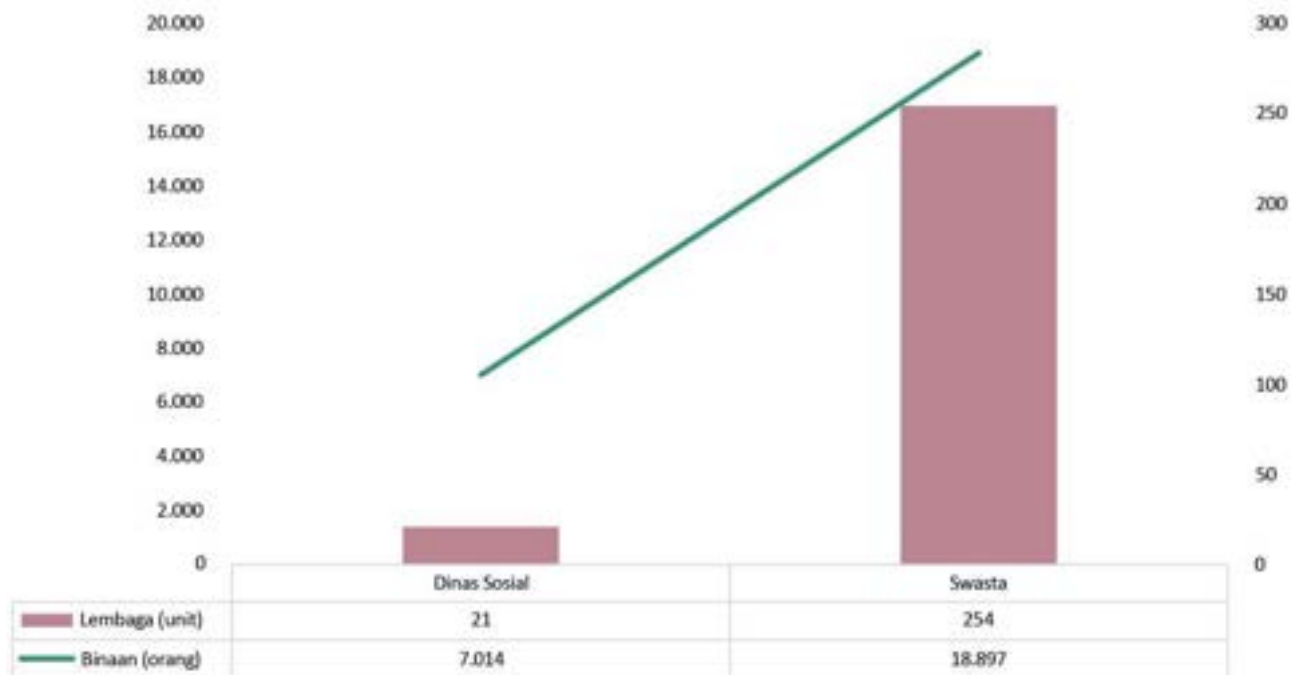
Secara umum lembaga kesejahteraan sosial paling banyak berada di Jakarta Selatan sebanyak 99 lembaga. Jumlah ini diikuti oleh Jakarta Timur dan Jakarta Pusat masing-masing sebanyak 95 dan 74 lembaga. Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial merupakan lingkup dari lembaga kesejahteraan sosial dengan status kepemilikan berada pada masyarakat/swasta dan dinas sosial.



Gambar 3.54. Jumlah Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Milik Masyarakat/Swasta dan Binaan di DKI Jakarta Menurut Jenis Lembaga Tahun 2020
Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, lembaga pelayanan kesejahteraan sosial milik masyarakat/swasta sebanyak 389 unit dengan binaan sebanyak 38.964 orang. Jumlah ini bertambah 112 unit dan 2.479 orang binaan dari tahun sebelumnya. Jenis lembaga terbanyak pada tahun 2019 dan 2020 yaitu lembaga

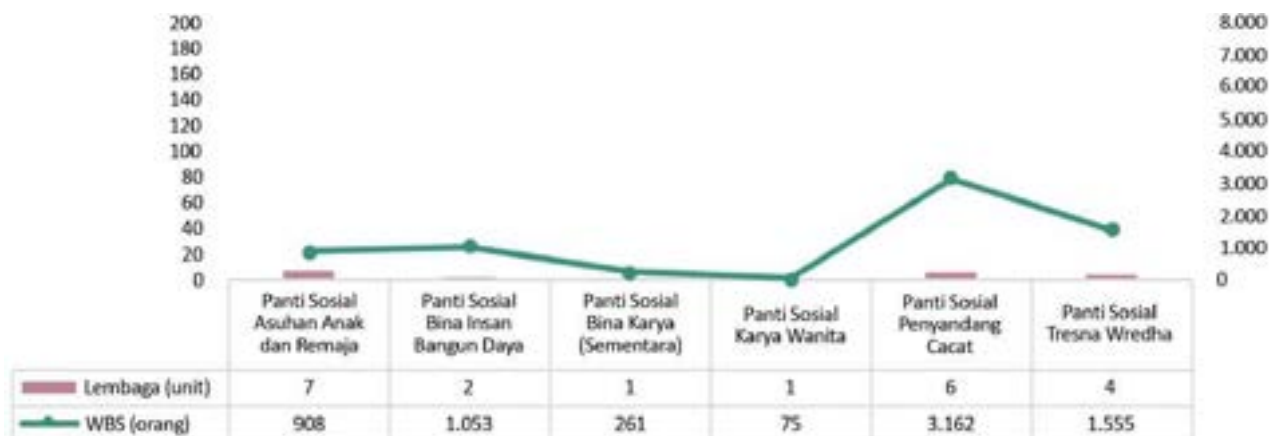
non panti sosial sebanyak 108 unit. Lembaga non panti sosial dapat berupa lembaga non pemerintah dengan bantuan swadaya masyarakat yang memberikan pelayanan non panti. Namun, pada kedua tahun tersebut jumlah binaan terbanyak justru berada di panti sosial dengan jumlah binaan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebanyak 25.402 dan 25.966 orang.



Gambar 3.55. Jumlah Lembaga dan Warga Binaan Sosial pada Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial di DKI Jakarta Menurut Pengelola Lembaga Tahun 2020
Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Jumlah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebanyak 21 unit dengan binaan sebanyak 7.014 orang. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengelola lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang berada di DKI Jakarta sebanyak 21 unit dengan binaan sebanyak 7.014 orang. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya sebanyak 11 unit. Sedangkan, lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh lembaga swasta pada tahun 2020 justru naik sebanyak 17 unit. Jumlah lembaga dan binaan yang dikelola swasta pada tahun 2020 sebanyak 254 unit dengan 18.897 orang binaan. Peningkatan ini juga terjadi pada tahun 2018 menuju 2019 terjadi peningkatan jumlah lembaga swasta sebanyak 120 lembaga. Hal ini diimbangi dengan lonjakan jumlah binaan yang meningkat sebanyak 11.196 orang.

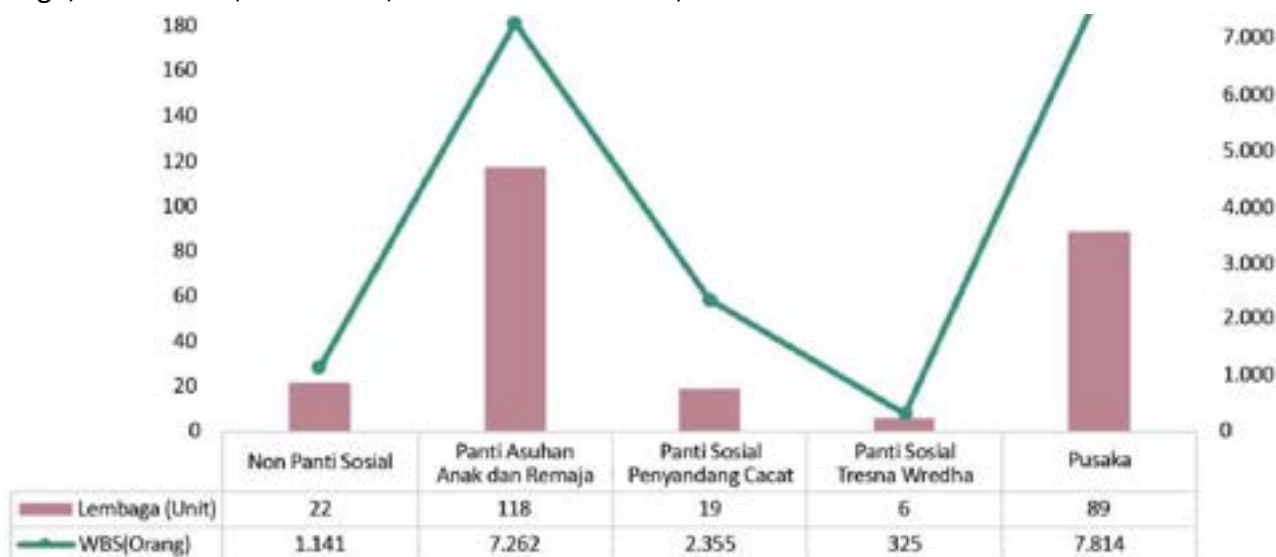




Gambar 3.56. Jumlah Lembaga dan Warga Binaan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Lembaga Tahun 2020

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Jenis lembaga pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah terbanyak yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yaitu pantti sosial penyandang cacat dengan jumlah enam unit lembaga dan 3.162 orang binaan. Pantti sosial di DKI Jakarta dapat berupa pantti sosial disabilitas tubuh, tuna rungu, tuna wicara, tuna netra, disabilitas intelektual, dan lain-lain.



Gambar 3.57. Jumlah Lembaga dan Warga Binaan Sosial Lembaga Swasta Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Lembaga Tahun 2020

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Jenis lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh lembaga swasta di DKI Jakarta adalah pantti sosial asuhan anak dan remaja dengan jumlah 118 unit dan 7.262 orang binaan. Pantti asuhan anak dan remaja di DKI Jakarta seperti Pantti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Balita Tunas Bangsa, PSAA Putra Utama 1, Pantti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya, dan lain-lain.

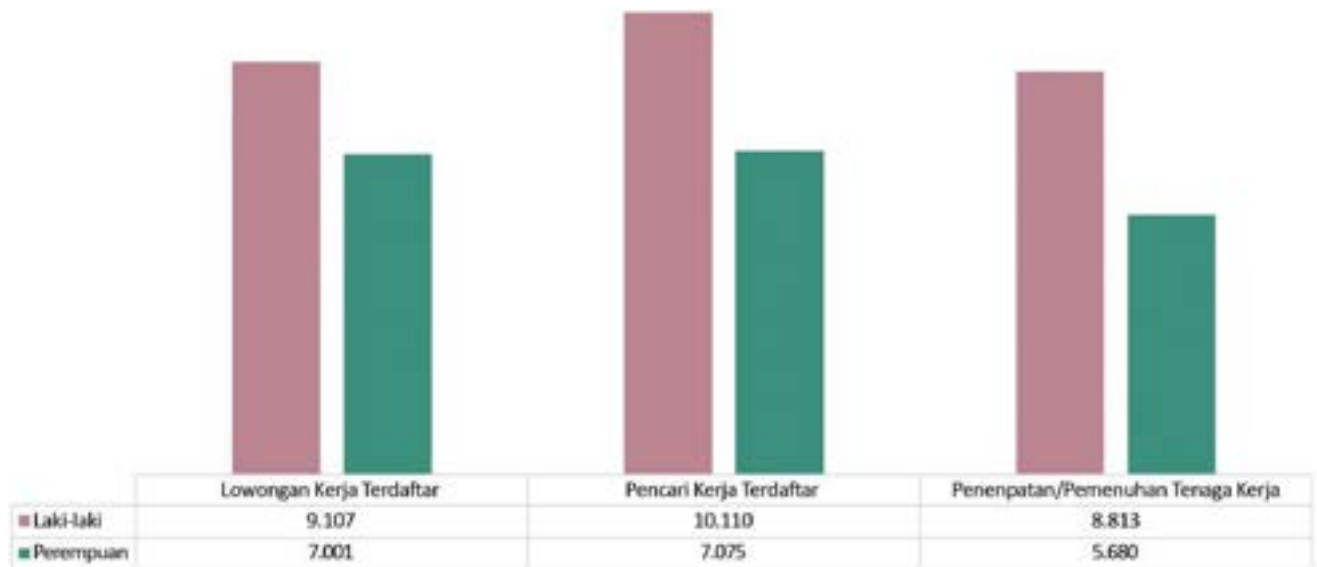
3.7. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seseorang yang sedang mencari kerja atau sudah mampu untuk bekerja dengan tujuan menghasilkan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja berada pada rentang usia 16 sampai dengan 64 tahun. Setiap tenaga kerja mempunyai bidang pekerjaan yang berbeda-beda, seperti pendidikan, teknologi informasi, pemerintahan, perbankan, dan lain-lain.

3.7.1. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya lowongan pekerjaan atau keadaan yang menandakan adanya lapangan kerja yang dapat diisi oleh pencari kerja. Setiap kesempatan kerja mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pencari kerja. Semakin banyak syarat yang terpenuhi maka semakin besar juga kesempatan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang dituju.

Jumlah pencari kerja, lowongan yang terdaftar, dan penempatan tenaga kerja pada tahun 2020 turun jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah lowongan kerja turun secara signifikan sebesar 52,94% atau sebanyak 18.020 lowongan dari tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor yang menyebabkan turunnya lowongan pekerjaan secara drastis dari tahun 2019 ke 2020. Pada tahun 2020, banyak perusahaan yang gulung tikar yang terpaksa harus memutus hubungan kerja dengan pegawainya. Pada tahun 2020, persentase penempatan tenaga kerja terhadap pencari kerja yang terdaftar sebesar 84,34%, jumlah ini lebih besar 18,40 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

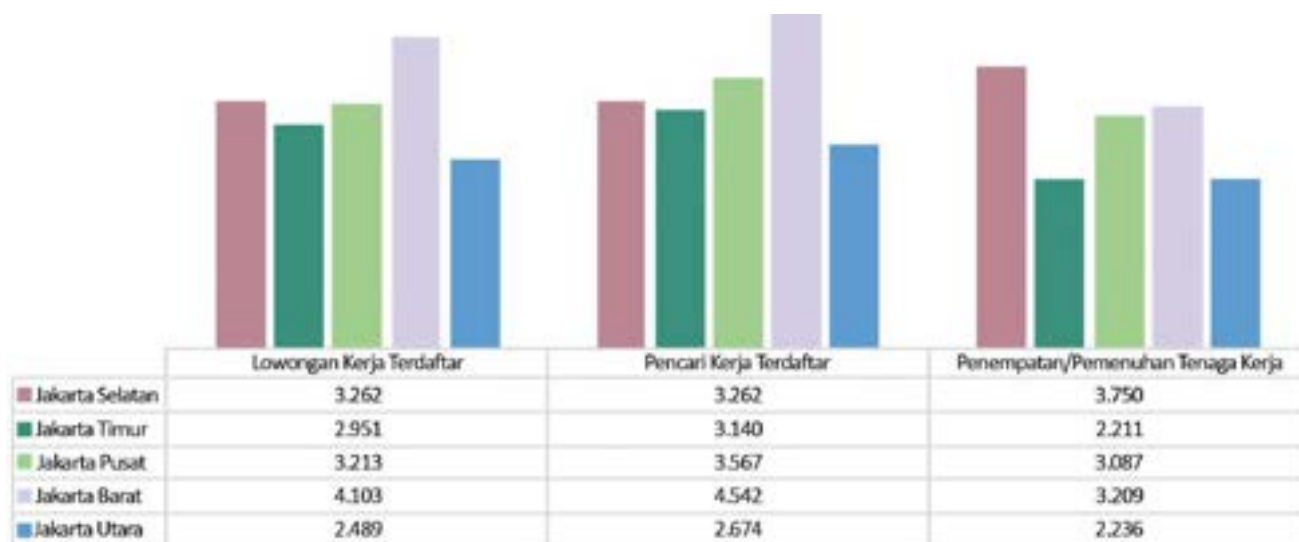


Gambar 3.58. Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja di DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Pencari kerja, lowongan kerja yang terdaftar, dan penempatan tenaga kerja lebih dari setengahnya merupakan laki-laki, terutama pada penempatan tenaga kerja yang sebesar 60,81% atau sebanyak 8.813 tenaga kerja. Salah satu penyebab banyaknya tenaga kerja laki-laki adalah karena perempuan lebih banyak memilih untuk mengurus urusan rumah tangga.





Gambar 3.59. Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Jika dilihat berdasarkan sebaran per wilayah administrasi, pada tahun 2020 jumlah lowongan kerja terdaftar di Jakarta Selatan mengalami penurunan secara signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 78,09% atau sebanyak 11.623 lowongan. Sedangkan, wilayah administrasi dengan pencari kerja terdaftar yang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 adalah Jakarta Utara sebanyak 12.065 orang.



Gambar 3.60. Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja di DKI Jakarta Menurut Bulan Tahun 2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Jika dilihat dari jumlah pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan/pemenuhan tenaga kerja per bulan pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa jumlah tiga kategori tersebut mengalami penurunan drastis pada bulan April. Jumlah lowongan kerja pada bulan maret sebanyak 1.784 lowongan, jumlah ini mengalami penurunan pada bulan April sebesar 44,28% atau sebanyak 790 lowongan. Jumlah pencari kerja juga mengalami penurunan sebesar 33,81% atau sebanyak 589 orang, namun jumlah pencari kerja lebih banyak dari lowongan yang tersedia pada bulan April. Hal ini diperkirakan karena pada Maret 2020, pandemi Covid-19 mulai merambah ke Indonesia terutama DKI Jakarta sehingga berpengaruh kepada stabilitas keuangan perusahaan. Dampaknya, banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan kerja, bahkan mengurangi jumlah karyawan.

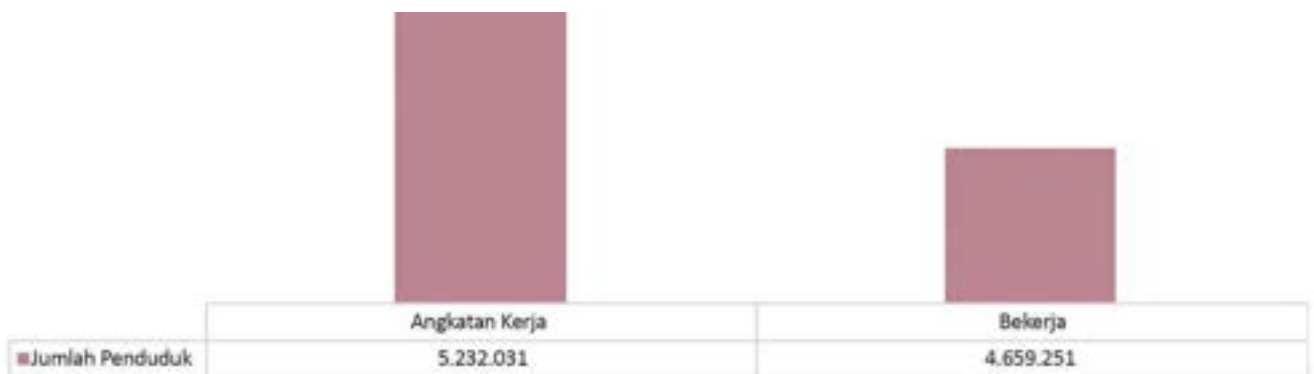
3.7.2. Partisipasi Kerja dan Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur di atas 10 tahun. Pengangguran adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang tidak memiliki pekerjaan untuk menunjang keberlangsungan hidup sehari-hari.



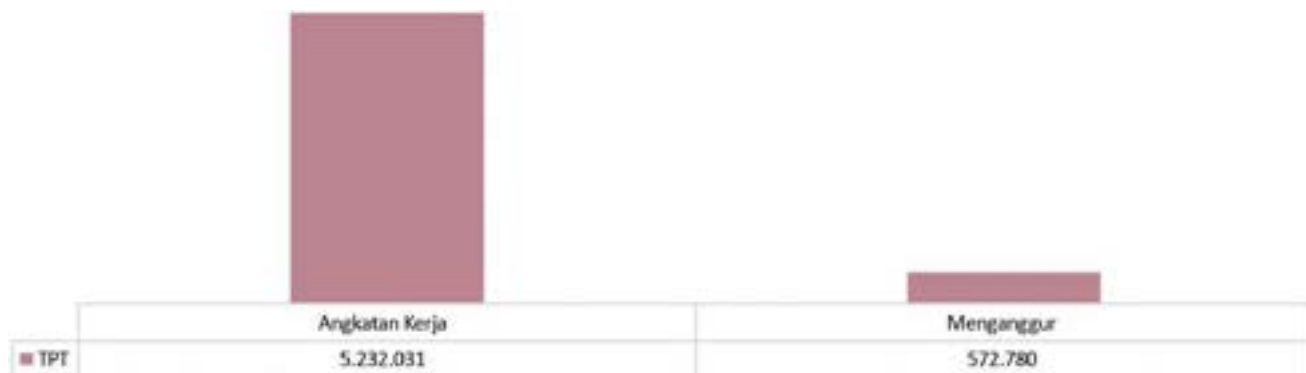
Gambar 3.61. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Hasil dari Survei Angkat Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,44% dari tahun sebelumnya mengikuti peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK di DKI Jakarta dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Dalam rentang lima tahun tersebut, angkatan kerja dan penduduk usia 15 tahun ke atas terbanyak berada pada tahun 2020, namun TPAK tertinggi berada pada tahun 2016 yaitu 66,91. TPAK tahun 2020 sebesar 63,81, nilai ini turun sebesar 1,00 poin dari tahun sebelumnya.



Gambar 3.62. Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Hasil dari Sakernas menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja yang berkategori penduduk bekerja sebesar 89,05% dengan jumlah orang kerja sebanyak 4.659.251 orang dan angkatan kerja sebanyak 5.232.031 orang. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 membuat jumlah penduduk bekerja turun secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini membuat rasio penduduk bekerja pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,73 poin. Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di DKI Jakarta pada tahun 2020 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2019.



Gambar 3.63. Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Hasil Sakernas menunjukkan bahwa penduduk yang menganggur pada tahun 2020 sebanyak 572.780 jiwa atau sekitar 10,95% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari jumlah angkatan kerja. Jumlah ini meningkat sebanyak 78,48% dari tahun sebelumnya dan peningkatan ini yang tertinggi dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Hal ini juga membuat TPT di DKI Jakarta pada tahun 2020 meningkat secara signifikan sebesar 4,73 poin dari tahun sebelumnya. Dalam kurun lima tahun ini, TPT terendah berada pada tahun 2016 yaitu 6,12, sedangkan jumlah penduduk yang menganggur paling sedikit berada pada tahun 2018 yaitu 314.840 jiwa.

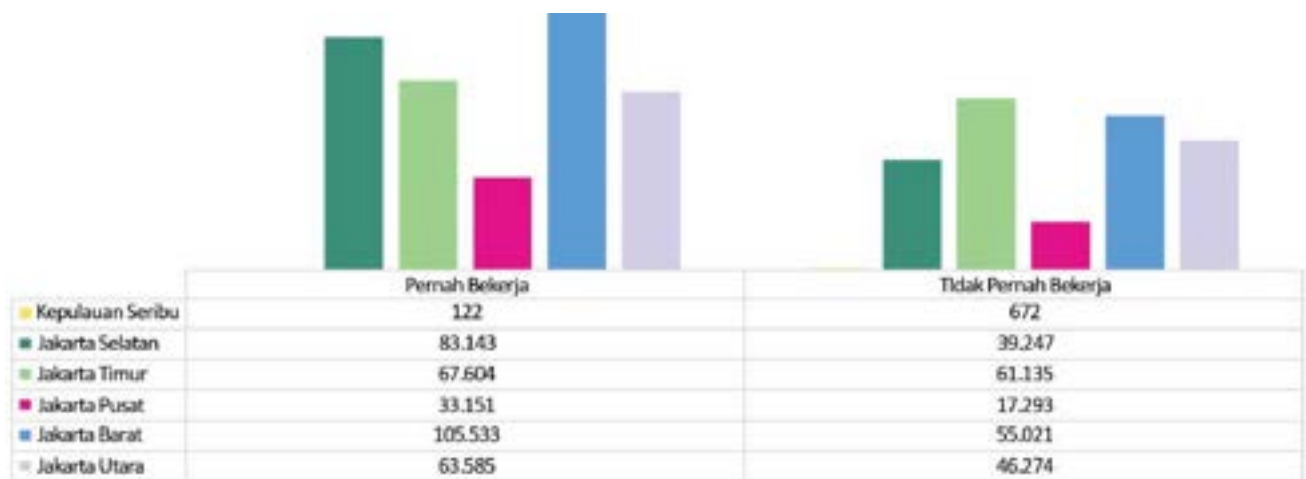


Gambar 3.64. Rasio Penduduk Bekerja, Tingkat Partisipasi Angka Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Data hasil Sakernas menunjukkan bahwa menurut wilayah administrasi, rasio penduduk bekerja di Jakarta Barat mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya yaitu 7,06 poin. Namun, TPT di Jakarta Barat mengalami kenaikan terbesar. Sementara itu, wilayah dengan penurunan TPAK terbesar adalah Jakarta Timur dengan 2,90 poin. Pada tahun 2020, Kepulauan Seribu memiliki rasio bekerja terbesar yaitu 92,63% sehingga membuat TPT di wilayah ini menjadi yang terkecil. Sedangkan, rasio penduduk bekerja di Jakarta Barat merupakan yang terkecil yaitu 87,73% dan penganggurannya sebesar 12,27% dari angkatan kerja.





Gambar 3.65. Jumlah Penduduk Pengangguran dengan Kategori Pernah Bekerja dan Tidak Pernah Bekerja di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Data hasil Sakernas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran tertinggi pada tahun 2020 berada di Jakarta Barat sebesar 28,03% atau sebanyak 160.554 orang. Jumlah pengangguran terbesar selanjutnya yaitu Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masing-masing sebesar 22,47% dan 21,36%. Kenaikan jumlah pengangguran dari yang pernah bekerja di Jakarta Barat menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya dengan kenaikan sebanyak 73.081 orang. Jumlah ini disusul oleh Jakarta Selatan sebesar 35.962 orang, sedangkan Jakarta Timur merupakan wilayah dengan kenaikan dari kategori tidak bekerja tertinggi sebesar 24.735 orang.

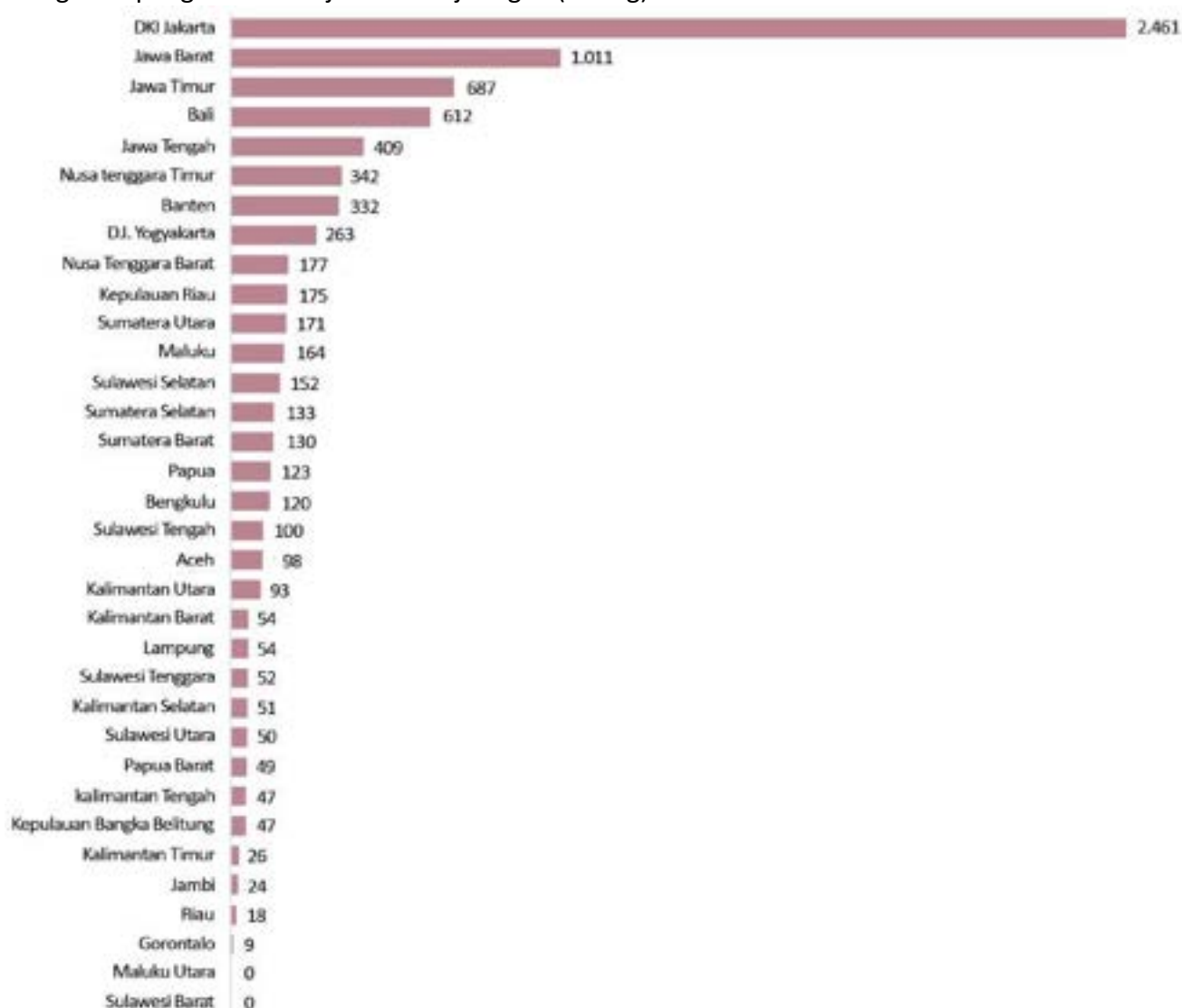
3.8. Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan dan anak menjadi salah dua kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Hal ini disebabkan karena minimnya pengawasan terhadap jaminan perlindungan terhadap kelompok korban ini. Dari data yang didapatkan, kekerasan dan diskriminasi tidak hanya terjadi pada lingkungan luar rumah dan kekerasan fisik saja namun juga dapat terjadi di dalam lingkungan rumah dan kekerasan psikis.

Walau tidak bisa diselesaikan secara singkat dan langsung hilang, namun kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu diselesaikan. Perempuan dan anak adalah pilar kesejahteraan dalam keluarga, oleh sebab itu pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tidak selalu mengenai kekerasan fisik saja, namun psikis. Bahkan beberapa di antara korban tidak mengetahui cara dan tidak berani untuk melapor.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Jumlah kekerasan terbanyak yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun ini berada pada tahun 2019 yaitu 431.471 kasus, sedangkan jumlah kasus kekerasan paling sedikit berada pada tahun 2016 yaitu 259.150 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebanyak 299.911 kasus atau mengalami penurunan sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Jumlah ini berdasarkan kasus yang tercatat di Pengadilan Agama Republik Indonesia sebanyak 291.677 kasus dan data kuesioner lembaga penyedia layanan sebanyak 8.234 kasus. Penurunan ini bukan berarti jumlah kasus yang sebenarnya turun melainkan sejalan dengan hasil survei dinamika

di masa pandemi yang terjadi penurunan jumlah kasus kekerasan. Hasil survei tersebut menyimpulkan empat penyebab penurunan jumlah kasus kekerasan yaitu korban dekat dengan pelaku selama masa PSBB, korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam, persoalan literasi teknologi, dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi di mana masyarakat belum beradaptasi mengubah pengaduan menjadi dalam jaringan (daring)²⁰.



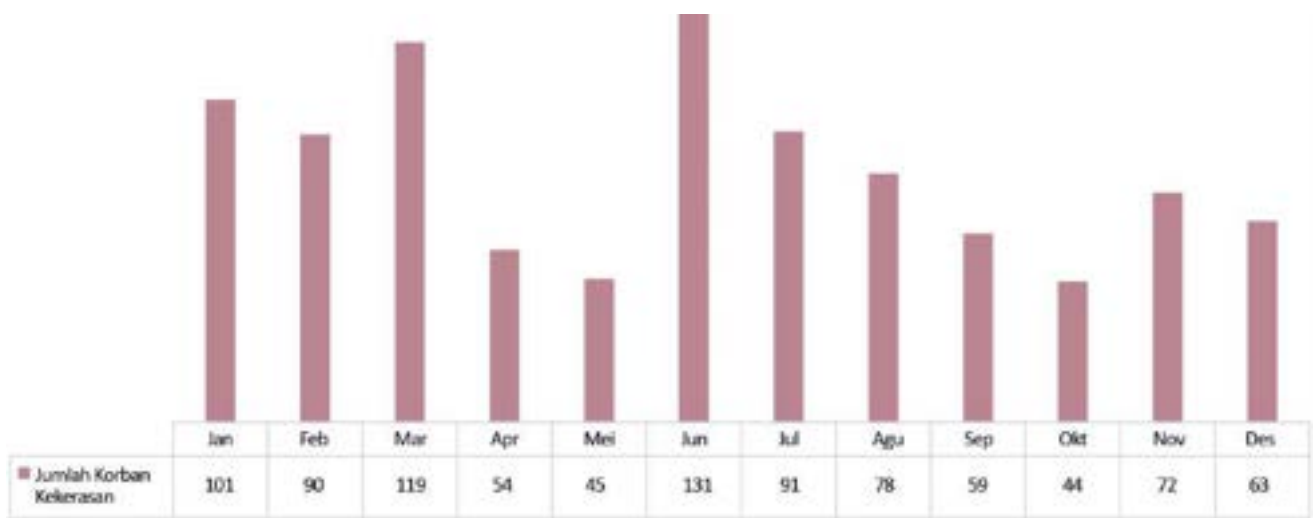
Gambar 3.66. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan pada Lembaga Layanan di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2020
Sumber: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan data pada lembaga layanan, DKI Jakarta memiliki angka kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 2.461 kasus. Sedangkan, pada tahun sebelumnya DKI Jakarta menempati posisi tertinggi ketiga sebanyak 2.222 kasus setelah Jawa Tengah sebanyak 2.525 kasus dan Jawa Barat sebanyak 2.738 kasus. Komnas Perempuan menilai tingginya angka berbanding lurus dengan jumlah lembaga penyedia layanan, kualitas, dan kapasitas pendokumentasian lembaga di provinsi tersebut²¹. Lembaga penyedia layanan dianggap penting sebagai tempat pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dikarenakan rendahnya jumlah laporan kekerasan sangat mungkin terjadi disebabkan oleh minimnya lembaga untuk mengadu bahkan rendahnya kepercayaan untuk mengadu kepada lembaga yang tersedia.

²⁰ Komnas Perempuan (2021), "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020", <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses pada 28 Juni 2021.

²¹ Komnas Perempuan (2021), "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020", <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses pada 28 Juni 2021.





Gambar 3.67. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Beralih ke topik kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) telah melakukan pencatatan terhadap jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta sepanjang tahun 2020. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta yang ditangani oleh P2TP2A pada tahun 2020 sebanyak 947 kasus. Dari tren gambar di atas, jumlah kekerasan perempuan dan anak cukup fluktuatif setiap bulannya. Masa pandemi Covid-19 yang mulai melanda DKI Jakarta pada Maret 2020 tidak menyulutkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini terlihat dari jumlah kasus kekerasan yang meningkat sekitar empat kali lipat atau sebanyak 105 kasus pada Juni 2020 jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Salah satu faktor meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini.



Gambar 3.68. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DKI Jakarta

Menurut Wilayah Administrasi dan Jenis Klien Tahun 2020

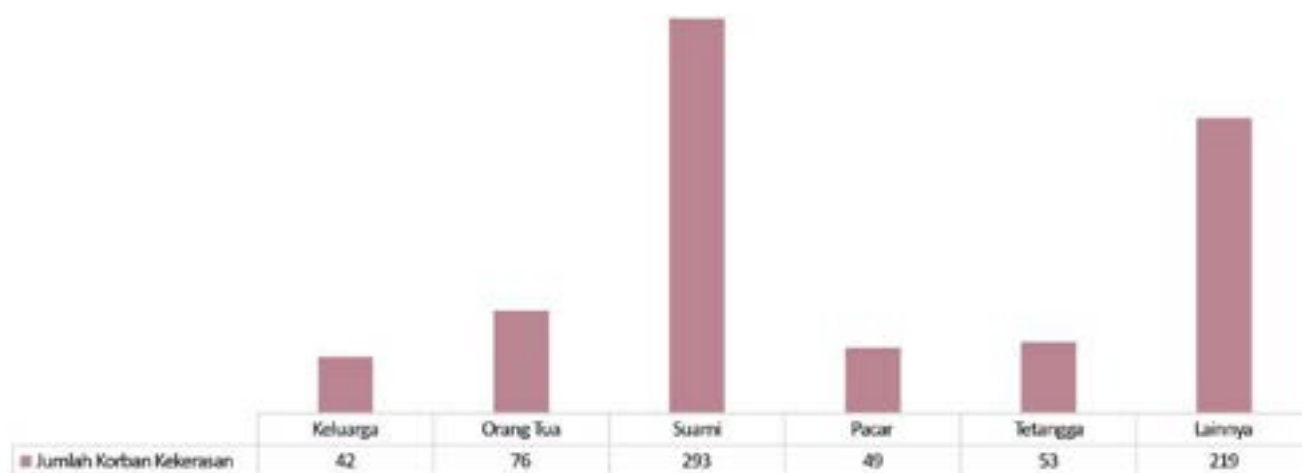
Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan jenis klien pada tahun 2020, P2TP2A paling banyak menangani korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 453 kasus. Sementara itu, kasus terbanyak kedua yaitu pada anak perempuan sebanyak 385 kasus, selanjutnya anak laki-laki sebanyak 109 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, korban kekerasan pada perempuan dan anak perempuan mengalami

peningkatan. Sedangkan, pada anak laki-laki mengalami penurunan. Walau berbeda angka, baik perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki tetap menjadi korban kekerasan. Inipun menjadi bukti kuat bahwa kekerasan tidak memandang gender, status sosial, ekonomi maupun pendidikan.

Jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020 terbanyak berada di Jakarta Timur dengan persentase sebesar 28,72% atau sebanyak 272 kasus. Jumlah ini kemudian diikuti oleh Jakarta Utara dan Jakarta Selatan masing-masing sebesar 22,49% dan 20,38%. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, salah satu faktor yang menjadi alasan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih cenderung tinggi di DKI Jakarta adalah adanya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi pertama dibandingkan dengan perempuan.

Mayoritas jumlah korban kekerasan yang ditangani P2TP2A di setiap wilayah administrasi di DKI Jakarta yaitu kekerasan terhadap perempuan, kecuali di Jakarta Barat. Jumlah korban kekerasan di Jakarta Barat lebih banyak terhadap anak perempuan dibandingkan perempuan dewasa dengan 88 kasus.

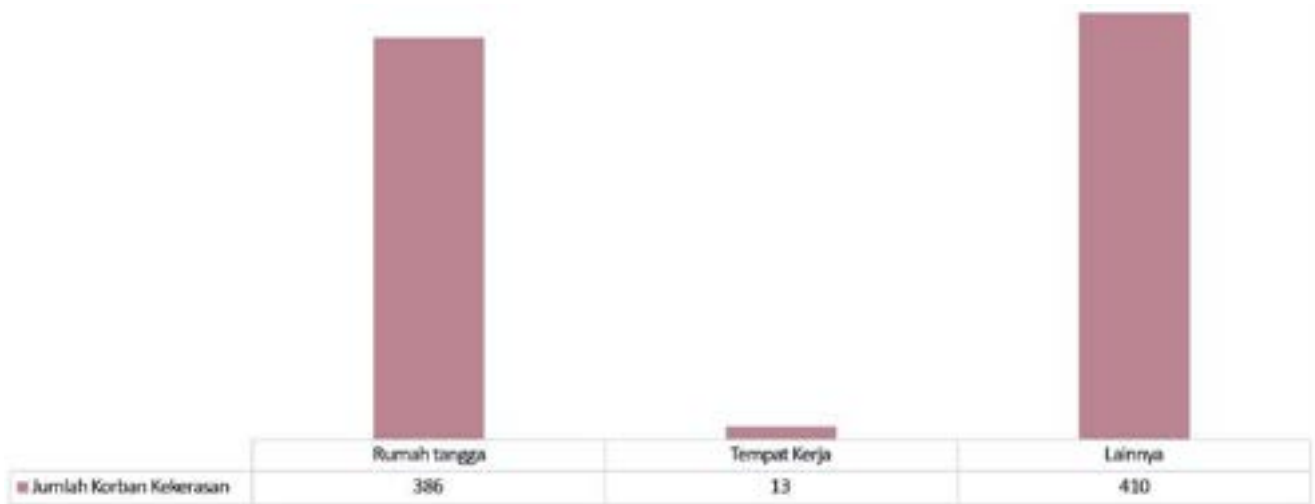


Gambar 3.69. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut Pelaku Kekerasan Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

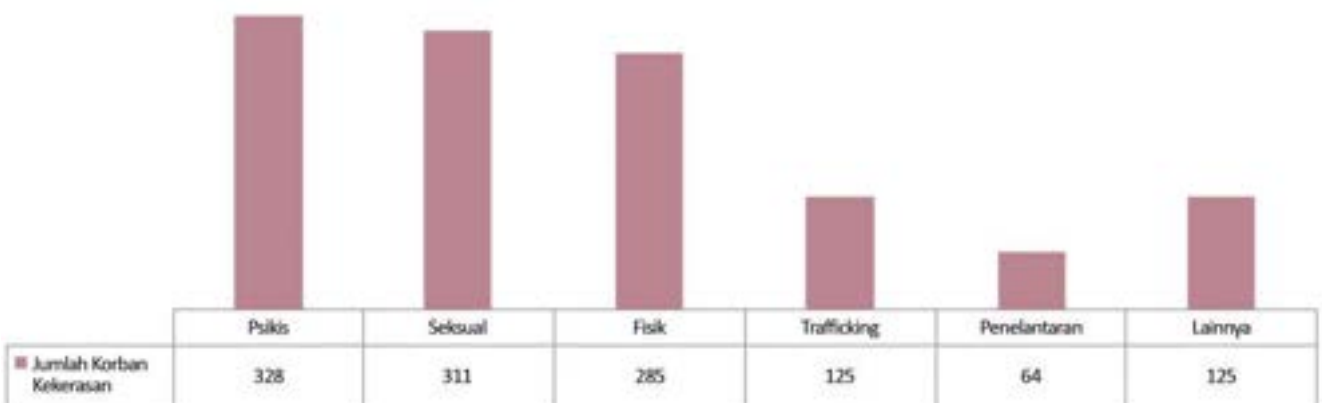
Pada tahun 2020, sebesar 40,02% atau sebanyak 293 kasus pelaku kekerasan adalah suami. Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki banyak faktor, salah satunya adalah masalah ekonomi. Masalah ini menjadi salah satu faktor yang memancing seorang suami, sebagai tulang punggung keluarga, melakukan kekerasan karena tekanan dan tuntutan ekonomi tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah korban kekerasan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 34,97% atau sebanyak 256 kasus.





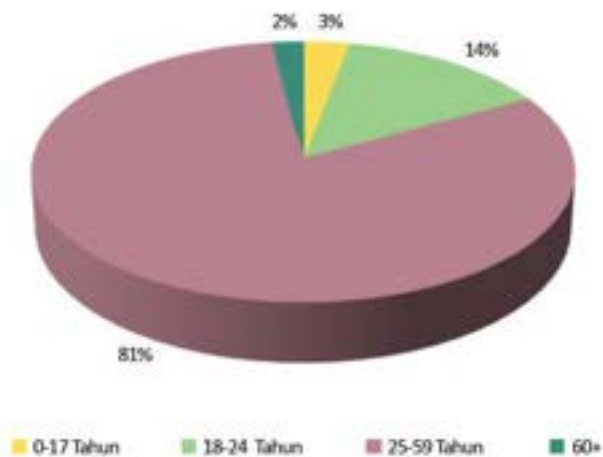
Gambar 3.70. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut Tempat Kejadian Tahun 2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, terdapat 369 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh suami dan orang tua. Hal ini berdampak terhadap tempat kejadian perkara (TKP) kekerasan itu terjadi. Faktanya, sebesar 47,73% atau sebanyak 386 kasus kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga. Walaupun pada 2020 terjadi pandemi dan pembatasan pergerakan penduduk di luar rumah, itu tidak serta merta menjadi faktor utama kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga. Bahkan, penurunan yang terjadi di lingkungan rumah tangga disebabkan karena adaptasi dan perubahannya pelaporan kekerasan secara resmi yang terjadi dari model laporan tatap muka ke daring.



Gambar 3.71. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut Bentuk Kekerasan Tahun 2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

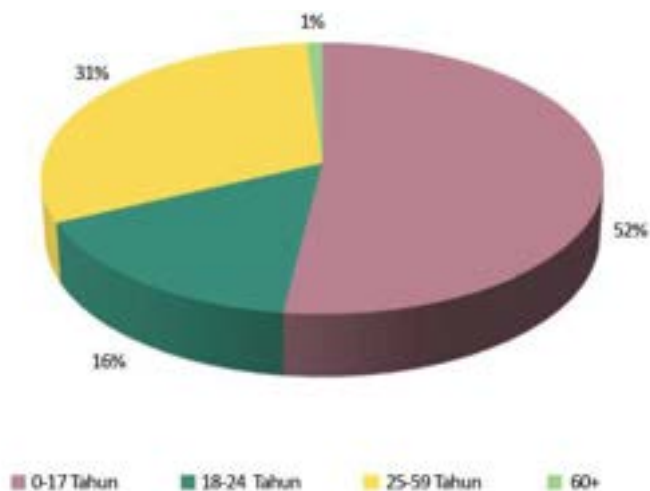
Kekerasan yang dialami korban baik pada tahun 2019 maupun 2020, kekerasan dalam bentuk psikis menjadi kekerasan yang paling sering dialami oleh korban dengan persentase sebesar 33,89% atau sebanyak 825 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik sebesar 29,00% atau sebanyak 706 kasus dan kekerasan seksual sebesar 20,46% atau sebanyak 498 kasus. Walaupun ketiga bentuk kekerasan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang dialami DKI Jakarta sejak Maret 2020. Sehingga, beberapa Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam masa transisi dari pelayanan terhadap penduduk yang dilakukan secara tatap muka menjadi daring.



Gambar 3.72. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut Usia Pelaku Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

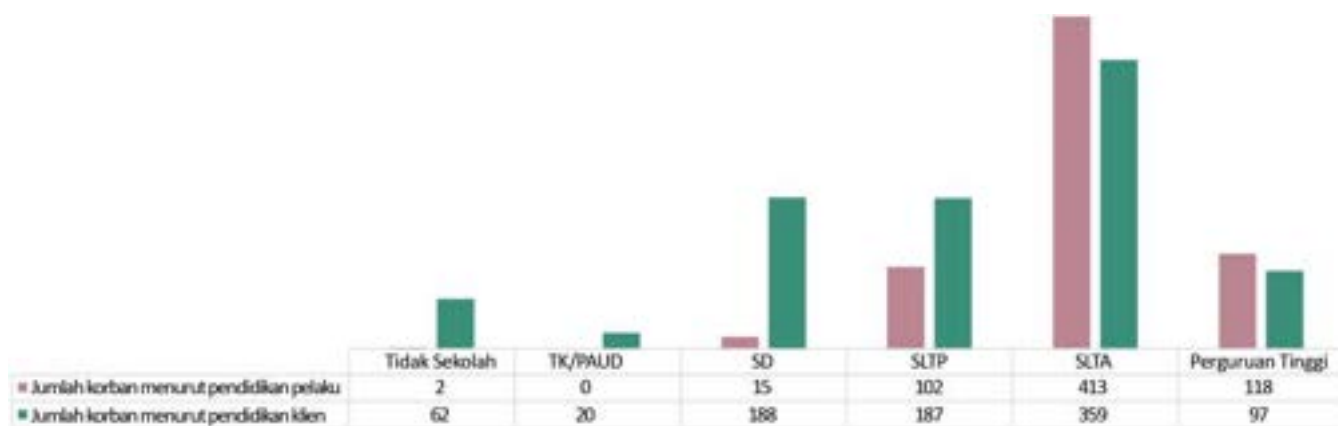
Jika diidentifikasi lebih dalam, orang dewasa yang memiliki rentang usia 25 sampai dengan 59 tahun merupakan pelaku kekerasan terbanyak sebesar 81,23% atau sebanyak 528 orang pada tahun 2020. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan rentang usia yang lain. Walau banyak faktor yang menyebabkan kekerasan dilakukan pada rentang usia tersebut, faktor psikologi menjadi salah satu faktor yang paling mendominasi. Ada kemungkinan, pelaku-pelaku kekerasan tersebut pernah menjadi korban. Menurut Kuriake Kharismawan, seorang psikolog, terdapat kemungkinan bahwa pelaku-pelaku kekerasan tersebut pernah menjadi korban. Kharismawan menambahkan jika energi emosi negatif ketika menjadi korban kekerasan tidak ditransformasikan, maka ada potensi korban akan melampiaskan energi tersebut ketika ada kesempatan.



Gambar 3.73. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut Usia Klien Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

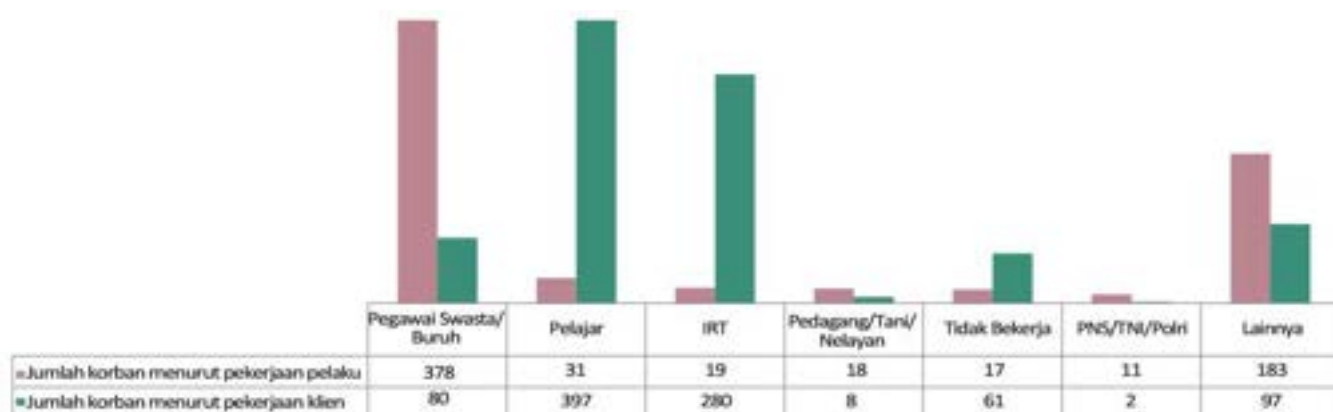
Jumlah usia korban paling banyak di antara 0 sampai dengan 17 tahun dengan jumlah persentase sebesar 52,05% atau sebanyak 493 kasus. Angka ini berhubungan dengan data sebelumnya perihal kekerasan yang terjadi di rumah. Anak usia di bawah umur sebagai korban kekerasan cenderung tinggal bersama dengan pelaku seperti orang tua yang berada pada rentang usia 24 sampai dengan 59 tahun. Jumlah usia korban paling banyak kedua berada pada rentang 25 sampai dengan 59 tahun dengan persentase sebesar 31,15% atau sebanyak 295 kasus.



Gambar 3.74. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DKI Jakarta Menurut Pendidikan Pelaku dan Klien Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Dilihat berdasarkan pendidikan klien, jumlah pelaku kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A didominasi oleh pelaku yang berpendidikan terakhir SLTA dan sederajat sebesar 63,53% atau sebanyak 413 kasus. Begitu juga klien atau korban, mayoritasnya dari lulusan SLTA dan sederajat yaitu sebesar 39,32% atau sebanyak 359 kasus.

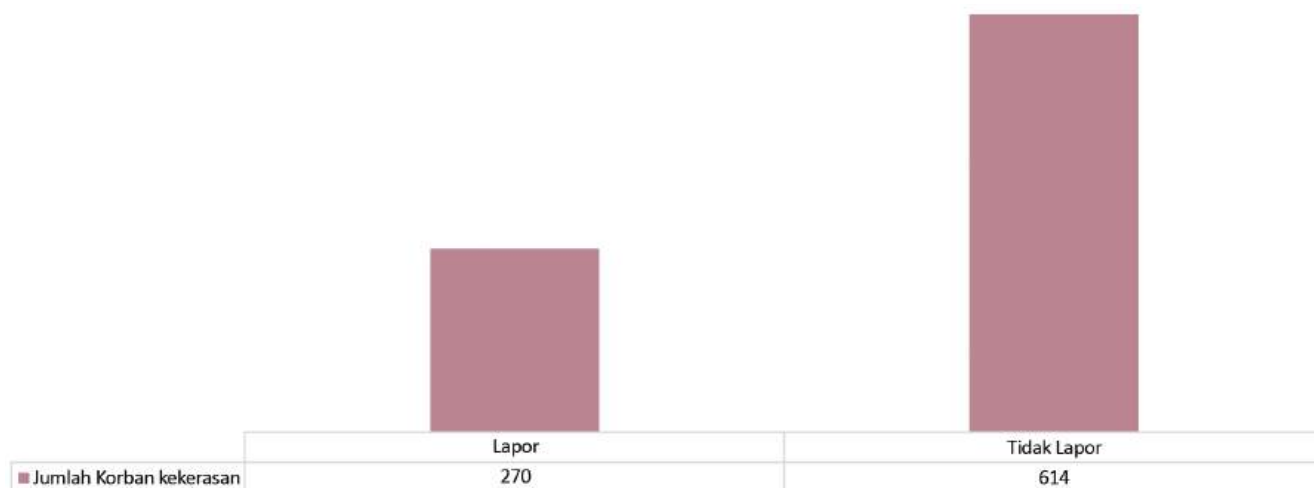


Gambar 3.75. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DKI Jakarta Menurut Pekerjaan Pelaku dan Klien Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan catatan sebelumnya, bahwa jumlah kekerasan mayoritas dilakukan oleh suami. Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa para suami yang melakukan kekerasan mayoritas merupakan pegawai swasta/buruh dengan persentase sebesar 57,53% atau sebanyak 378 kasus. Sedangkan, korban terbanyak merupakan pelajar dan ibu rumah tangga dengan masing-masing sebanyak 397 kasus dan 280 kasus.





Gambar 3.76. Jumlah Korban Kekerasan di DKI Jakarta Menurut yang Melapor ke Kepolisian Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Selain melaporkan kejadian kekerasan kepada P2TP2A, korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dapat juga melaporkan kekerasan yang terjadi ke kepolisian terdekat. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 270 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak ke kepolisian. Pada tahun 2020, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melaporkan kasusnya ke kepolisian menurun sebesar 17,43% atau sebanyak 57 laporan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data dari P2TP2A menunjukkan bahwa tahun 2019 sampai dengan 2020 tidak banyak korban yang melaporkan kasusnya kepada kepolisian yaitu hanya sebesar 33,10% atau sebanyak 327 kasus pada tahun 2019 dan sebesar 30,54% atau sebanyak 270 kasus pada tahun 2020.

Dapat dilihat dari gambar di atas, bahwa jumlah korban yang tidak melapor jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan korban yang melaporkan kasusnya ke kepolisian. Menurut Komisioner Komisi Nasional Perempuan, Bahrul Fuad, adanya perubahan kesadaran untuk melapor kekerasan perempuan dari model resmi yang datang ke kepolisian maupun organisasi perlindungan perempuan dan anak berubah menjadi laporan melalui pesan daring ke akun media sosial resmi.

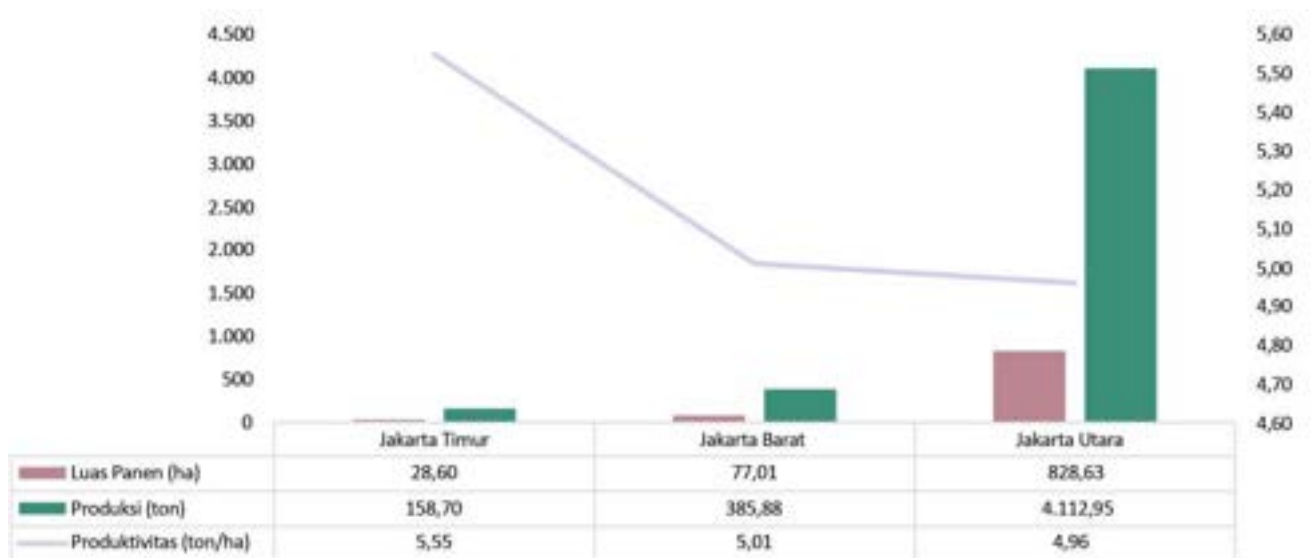
Jika dilihat dari keseluruhan angka, kekerasan yang terjadi di DKI Jakarta cukup tinggi. Walau angka ini tergolong tinggi, menurut Anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susianah Affandy, fenomena yang terjadi sebenarnya seperti fenomena gunung es, walau jumlah pelapor sangat tinggi, terdapat beberapa korban memutuskan untuk tidak melapor disebabkan karena kedekatan yang dimiliki oleh pelaku dan korban. Dalam kasus ini, dapat dilihat tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh suami, orang tua, dan TKP di lingkungan rumah menjadi faktor pendukung.

3.9. Pertanian

Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan tanaman. Padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon, dan ubi jalar merupakan hasil pertanian. Walau begitu, masih banyak hasil pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti buah-buahan, tanaman hias, dan rempah-rempah. Oleh sebab itu, pertanian menjadi salah satu bidang yang menjadi perhatian oleh pemerintah.

3.9.1. Tanaman Pangan

Salah satu hal yang mendasar bagi manusia adalah kebutuhan pangan. Walau kebutuhan pangan tiap orang itu berbeda, namun tebu, jagung, beras, kentang, dan gandum merupakan lima kebutuhan pangan yang paling dibutuhkan penduduk Indonesia pada umumnya. Pangan menjadi komoditas utama yang sangat dibutuhkan oleh semua golongan masyarakat. Namun, padi adalah komoditas bahan pangan utama yang dibutuhkan oleh mayoritas penduduk Indonesia. Pangan dapat menjadi sumber energi dan protein manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Indonesia yang mempunyai banyak gedung tinggi ternyata masih memiliki lahan untuk ditanami tanaman pangan seperti padi. Lokasi lahan sawah di DKI Jakarta hanya terdapat di tiga wilayah yakni Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Di Jakarta Timur, terdapat dua kecamatan yang mempunyai lahan sawah yaitu Cakung dan Makasar, sedangkan hanya satu kecamatan di Jakarta Barat yang mempunyai lahan sawah yaitu Cilincing. Di Jakarta Barat, tiga kawasan yang mempunyai lahan sawah yaitu RW 3 dan 8 di Kelurahan Semanan, RW 4 di Kelurahan Pegadungan, dan RT 9 RW 3 di Kelurahan Meruya Selatan.

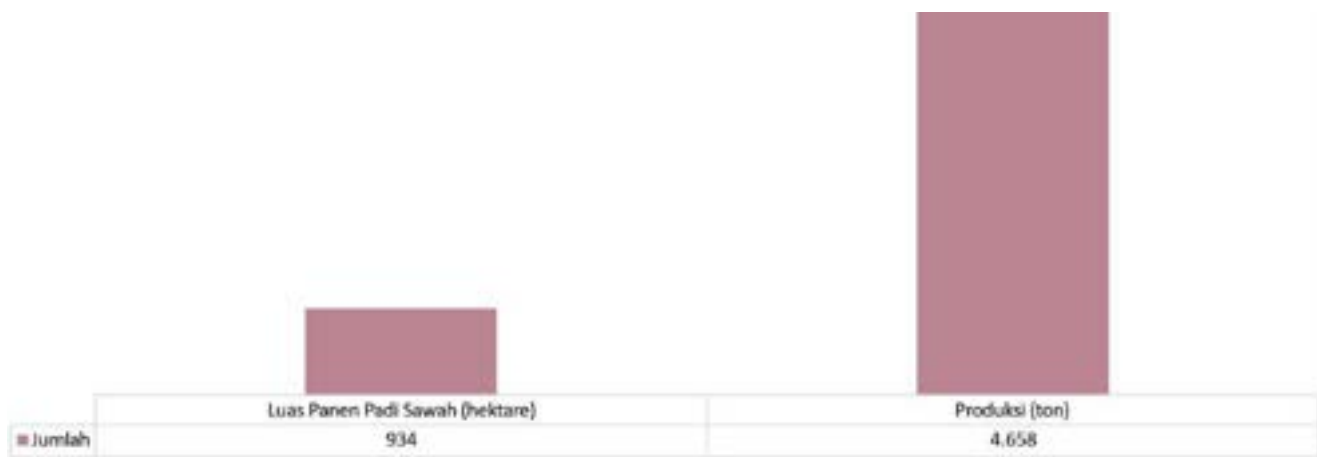


Gambar 3.77. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Laporan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan tahun 2020, Jakarta Utara memiliki lahan sawah terluas yaitu 828,63 hektare. Sehingga, produksi padi sawah di Jakarta Utara juga memiliki jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Meskipun begitu, produktivitas di Jakarta Utara masih lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah lain dengan produktivitas sebesar 4,96 ton/hektare. Sedangkan, produktivitas di Jakarta Timur dan Jakarta Barat masing-masing sebesar 5,55 dan 5,01 ton/hektare.





Gambar 3.78. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan dari BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir selama periode tahun 2010 sampai dengan 2020, luas panen padi sawah di DKI Jakarta mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu 10 tahun, hanya terjadi satu kali kenaikan jumlah luas panen sawah, yaitu pada tahun 2012 sebesar 174 hektar yang sebelumnya seluas 1.723 hektare pada tahun sebelumnya. Selebihnya, terjadi penurunan luas panen padi sawah sampai dengan tahun 2019 dan luas panen padi sawah meningkat kembali pada tahun 2020 sebesar 311 hektare. Rata-rata produktivitas dalam kurun waktu sepuluh tahun ini masih di atas 5,51 ton/hektare. Pada tahun 2010, luas panen padi sawah sebesar 2.015 hektare dan dengan seiringnya waktu luas ini terus menurun sebesar 934 hektare pada tahun 2020 dengan produksi sebanyak 4.658 ton padi dan produktivitas sebesar 4,99 ton/hektare. Banyaknya lahan yang digunakan untuk membangun berbagai bangunan di DKI Jakarta menjadi salah satu penyebab menurunnya lahan panen setiap tahunnya.

Meskipun luas panen dan jumlah produksi pada tahun 2020 ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi produktivitasnya justru turun cukup signifikan sebesar 0,41 poin. Produktivitas ini menjadi produktivitas paling rendah dalam 10 tahun terakhir. Menurut BMKG, kemarau yang dimulai pada Juni 2020 jauh lebih kering sebesar 30,00% yang disebabkan karena rendahnya curah hujan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama penyebab menurunnya produktivitas panen padi di DKI Jakarta pada tahun 2020.



Gambar 3.79. Produksi Padi di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan dari BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dan 2020, Jakarta Utara merupakan wilayah administrasi penghasil produksi padi terbesar di DKI Jakarta jika dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya. Pada tahun 2020, jumlah produksi padi di Jakarta Utara sebesar 88,30% atau sebanyak 2.411,88 ton. Namun, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 18,19% dari tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, Jakarta Timur juga mengalami penurunan produksi sebesar 62,63%, sedangkan di Jakarta Barat produktivitasnya meningkat sebesar 39,48%.

Selain produksi padi, DKI Jakarta juga memiliki produksi padi setara beras. Produksi padi setara beras merupakan produksi padi yang dikonversikan menjadi beras untuk dikonsumsi oleh penduduk. Pada tahun 2020, produksi padi jenis ini sebanyak 4.630,63 ton. Berbeda dengan produksi padi, secara keseluruhan produksi padi setara beras justru meningkat signifikan sebesar 135,06% dari tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, jika dilihat menurut wilayah administrasi, produksi padi setara beras di Jakarta Utara meningkat sangat signifikan dari 1.729 ton menjadi 4.113 ton.

DKI Jakarta adalah salah satu kota tujuan dari banyak perantau dari seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk semakin tinggi dan berdampak pada lahan sawah yang semakin sempit. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya agar produksi padi tetap maksimal setiap tahunnya dengan cara menghasilkan sendiri benih padi dan memberikan bantuan serta pembinaan kepada petani agar para petani tetap dapat bekerja secara optimal dalam memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan akan pangan penduduk DKI Jakarta.

3.9.2. Hortikultura

Selain tanaman pangan, sub sektor lainnya yang berkembang di DKI Jakarta adalah hortikultura yang meliputi tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias. Buah dan sayur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Buah dan sayur juga termasuk ke dalam kategori empat sehat lima sempurna. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari mengonsumsi buah dan sayur. Selain mudah ditemui di hampir semua pasar, rasa yang enak membuat penduduk suka mengonsumsi buah dan sayur.

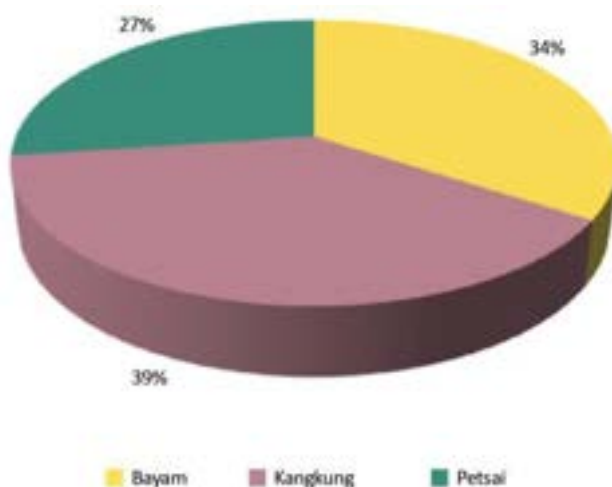
Dengan keterbatasan lahan yang ada, DKI Jakarta tetap menghasilkan tanaman hortikultura dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduknya. Irigasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menunjang kesuksesan dalam produksi pertanian. Pada tahun 2020, DKI Jakarta mempunyai sebanyak 1.223 irigasi untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman.





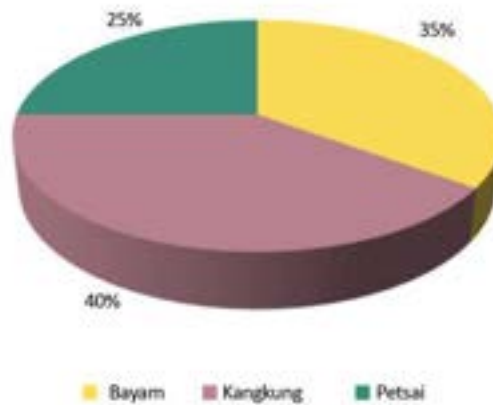
Gambar 3.80. Persentase Luas Panen Tanaman Sayuran di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Seluas 680 hektare atau sebesar 44,30% luas panen tanaman sayuran tahun 2020 berasal dari Jakarta Timur. Jakarta Pusat tidak masuk dalam persentase penghasil panen tanaman karena tidak adanya lahan untuk menanam dalam hektare di Jakarta Pusat. Jakarta Selatan menjadi wilayah yang paling sedikit menghasilkan tanaman sayuran, yaitu hanya seluas 48 hektare atau sebesar 3,13% dari total luas lahan panen di DKI Jakarta.



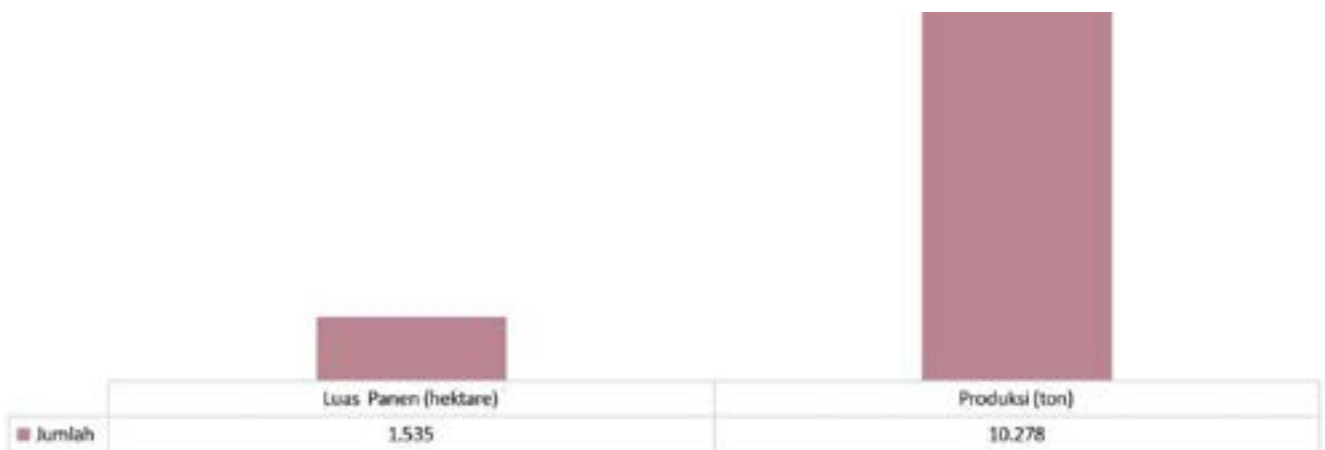
Gambar 3.81. Persentase Luas Panen Tanaman Sayuran di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berbeda dengan tanaman pangan, lokasi lahan tanaman sayuran di DKI Jakarta tersebar di empat wilayah administrasi, meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Jenis tanaman yang tercatat meliputi bayam, kangkung, dan petsai. Selama tahun 2020, DKI Jakarta memiliki luas panen tanaman sayuran yang mencapai 1.535 hektare dengan produksi sebanyak 10.278 ton. Pada tahun 2020, kangkung menjadi tanaman sayur terbanyak yang dipanen di lahan seluas 40.772 hektare atau sebesar 38,63% dari total lahan di DKI Jakarta. Kangkung merupakan salah satu tanaman sayur yang diminati oleh banyak penduduk Indonesia pada umumnya dan masuk ke dalam tanaman sayur yang mudah untuk ditanam. Kedua faktor tersebut yang menjadikan sayur ini sebagai komoditas panen terbanyak di DKI Jakarta.



Gambar 3.82. Persentase Produksi Tanaman Sayuran di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Timur memiliki luas panen sayuran terbesar seluas 680 hektare atau sebesar 44,30% dari total luas panen sayuran di DKI Jakarta. Luas panen sayuran terbesar yaitu pada jenis sayuran kangkung yang mencapai 593 hektare atau sebesar 38,63% dari total keseluruhan luas panen. Hal ini membuat jumlah produksi kangkung sangat tinggi sebesar 39,67% atau sebanyak 4.077,20 ton. Sementara itu, jumlah produksi bayam sebanyak 3.646 ton dengan luas panen seluas 525 hektare, dan produksi petsai sebesar 2.554,40 ton dengan luas panen seluas 417 hektare.



Gambar 3.83. Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jika dilihat trennya, produksi sayuran selama periode 2013 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah produksi sayuran sebanyak 10.278 ton. Produksi tersebut merupakan hasil panen dari lahan seluas 1.535 hektare dengan produktivitasnya sebesar 6,70 ton/hektare. Produktivitas ini meningkat 0,69 ton/hektare jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selama tujuh tahun terakhir, produksi sayuran terbesar berada pada tahun 2015 sebanyak 15.947 ton yang dihasilkan dari luas panen seluas 2.315 hektare. Meskipun pada tahun 2015 DKI Jakarta memiliki jumlah produksi dan luas panen terbesar, akan tetapi produktivitasnya masih di bawah tahun 2017 yaitu 7,46 ton/hektare. Rendahnya produktivitas pada tahun 2015 disebabkan oleh kecilnya luas panen pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Sejak tahun 2011, petani buah dan sayuran menggunakan teknik budidaya yang tepat sasaran dengan cara vertikultur. Ini disebabkan oleh lahan yang sempit sehingga sistem budidaya yang dilakukan adalah secara vertikal atau bertingkat. Namun, setelah tahun 2015 banyak petani yang memutuskan untuk berhenti menanam sayuran dikarenakan luas panen yang semakin sempit.

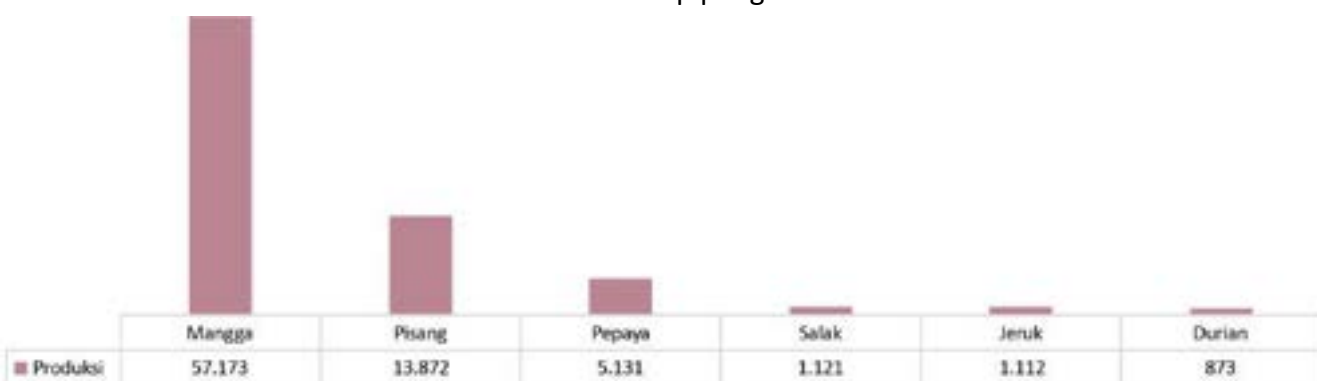
Jumlah produksi buah-buahan di DKI Jakarta dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif. Jumlah produksi buah-buahan terbesar berada pada tahun 2017 sebanyak 210.230 kuintal. Sedangkan, pada tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah produksi buah-buahan terendah sebanyak 86.379 kuintal. Pada tahun 2020 jumlah produksi buah-buahan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,88% atau sebanyak 3.502 kuintal. Tidak hanya mengalami penurunan produksi pada tahun 2020 saja, pada tahun yang sama beberapa buah impor dari China seperti jeruk, apel, dan pir mengalami penurunan yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Walau begitu, konsumsi buah-buahan pada tahun 2020 justru mengalami peningkatan yang disebabkan oleh munculnya tren gaya hidup sehat.



Gambar 3.84. Produksi Buah-buahan (Kuintal) di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Timur menjadi wilayah administrasi penghasil buah-buahan terbanyak di DKI Jakarta pada tahun 2020 dengan total 43.011 kuintal atau sebesar 54,25% dari total penghasilan buah-buahan di DKI Jakarta. Berbeda dengan sayuran, Jakarta Pusat memproduksi buah-buahan sebanyak 19 kuintal. Buah-buahan tidak membutuhkan lahan seluas padi, buah-buahan yang diproduksi adalah mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, dan salak. Oleh sebab itu Jakarta Pusat dengan keterbatasan lahan tanam masih memberikan kontribusi terhadap penghasilan buah-buahan.

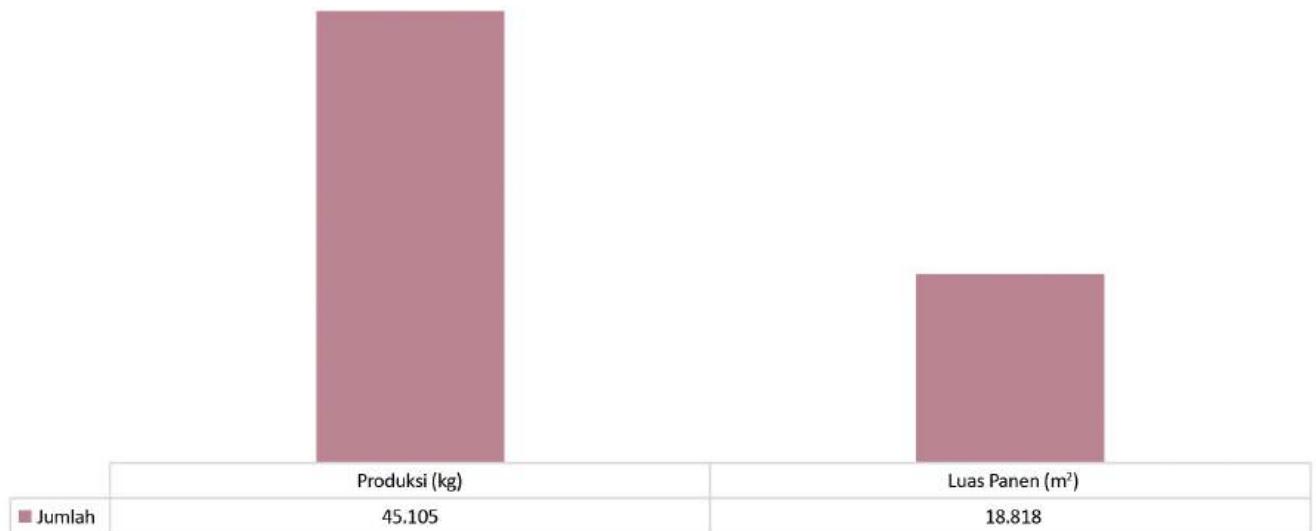


Gambar 3.85. Produksi Buah-buahan (Kuintal) di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Sebesar 72,11% dari total keseluruhan produksi buah-buahan adalah mangga. Sementara itu, durian memiliki jumlah produksi paling rendah dibandingkan dengan buah-buahan lainnya yaitu 873 kuintal atau sebesar 1,10%. Rendahnya produksi durian di DKI Jakarta dapat disebabkan karena sulitnya untuk menanam dan memanen buah ini, selain itu dibutuhkannya lahan yang lebih luas dibandingkan dengan tanaman lainnya seperti mangga, pisang, pepaya, salak, dan jeruk.

Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seorang manusia haruslah dalam kondisi sehat agar dapat menjalankannya dengan baik. Salah satu cara agar kondisi tubuh selalu sehat adalah dengan mengonsumsi buah dan sayur. Zat-zat seperti vitamin dan antioksidan sangat banyak terkandung dalam buah dan sayur. Saat ini masyarakat dimudahkan untuk bisa mendapatkan sayur dan buah segar. Hampir di setiap pasar tradisional tersedia buah dan sayur. Kampanye hidup sehat yang dicanangkan oleh pemerintah secara tidak langsung juga berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur oleh masyarakat.

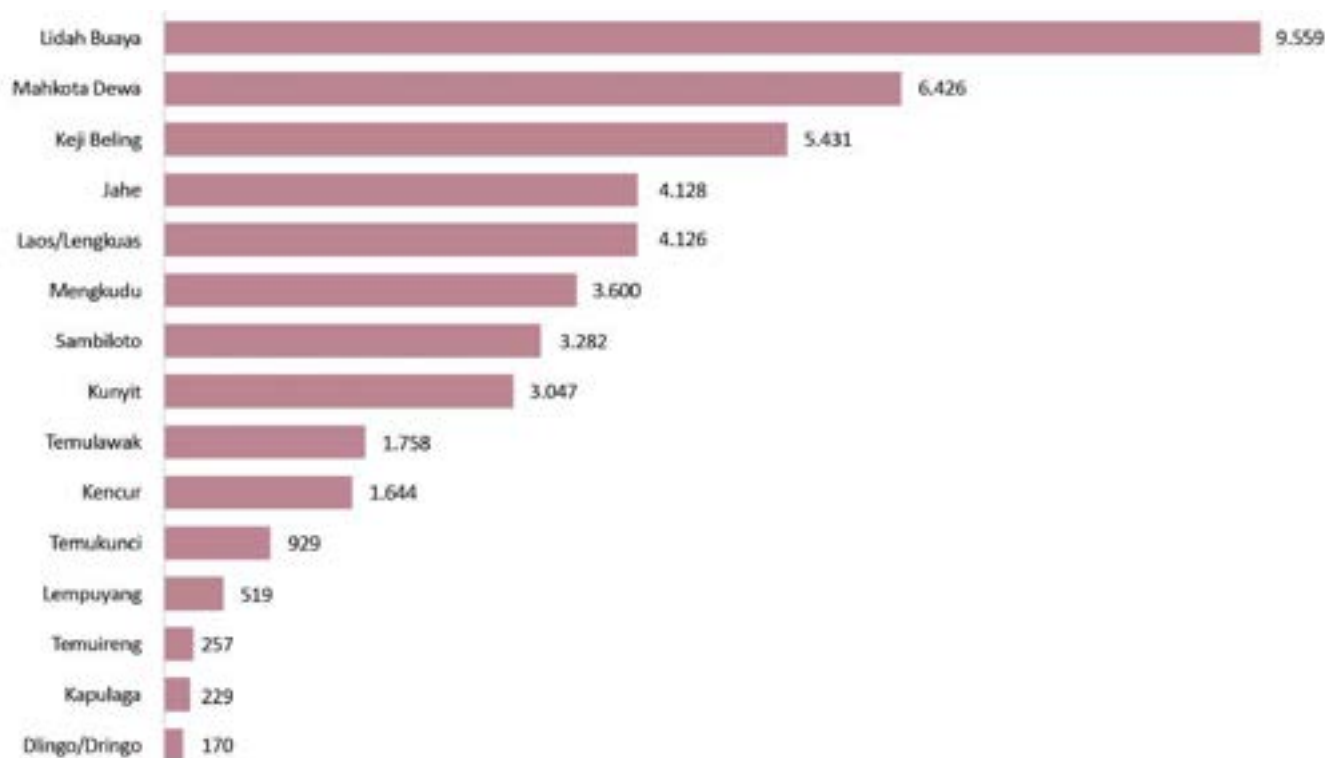


Gambar 3.86. Luas Panen (m²) dan Produksi Tanaman Biofarmaka (kg) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

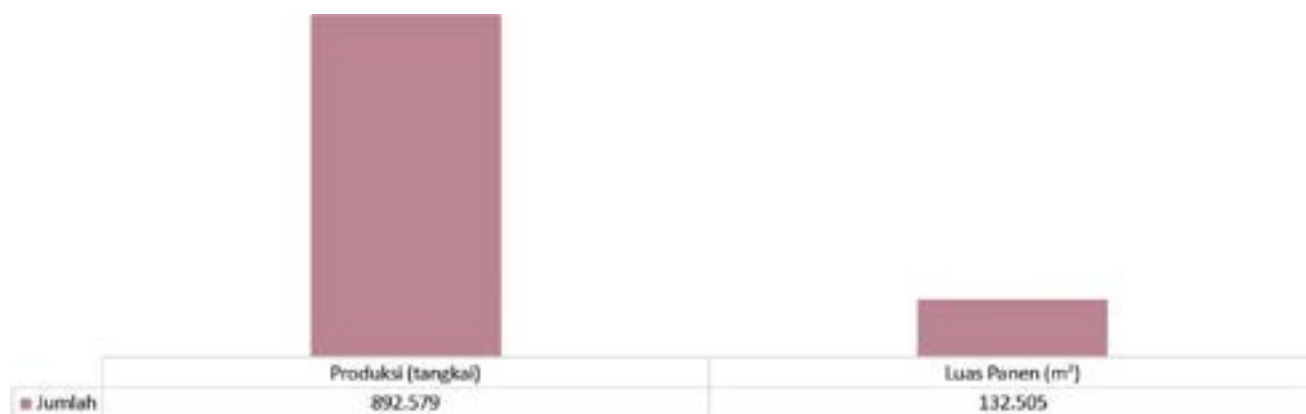
Selain memproduksi buah-buahan, DKI Jakarta juga memproduksi tanaman biofarmaka. Tanaman biofarmaka meliputi jahe, kunyit, lengkuas/laos, temulawak, lidah buaya, kumis kucing, kapulaga, dan lain-lain. Berdasarkan Laporan Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF yang dipublikasi oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, produksi biofarmaka dari tahun 2017 sampai dengan 2020 paling banyak berada pada tahun 2017 yaitu 401.370 kg. Selain memproduksi tanaman hias terbanyak, tahun 2017 juga mempunyai luas panen tanaman terluas yaitu 28.104 m². Pada tahun 2020, jumlah produksi tanaman biofarmaka mengalami penurunan sebesar 50,65% atau sebanyak 46.291 kg dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan luas panen tanaman biofarmaka juga mengalami pengurangan sebesar 35,68% atau seluas 10.438 m² dari tahun sebelumnya.





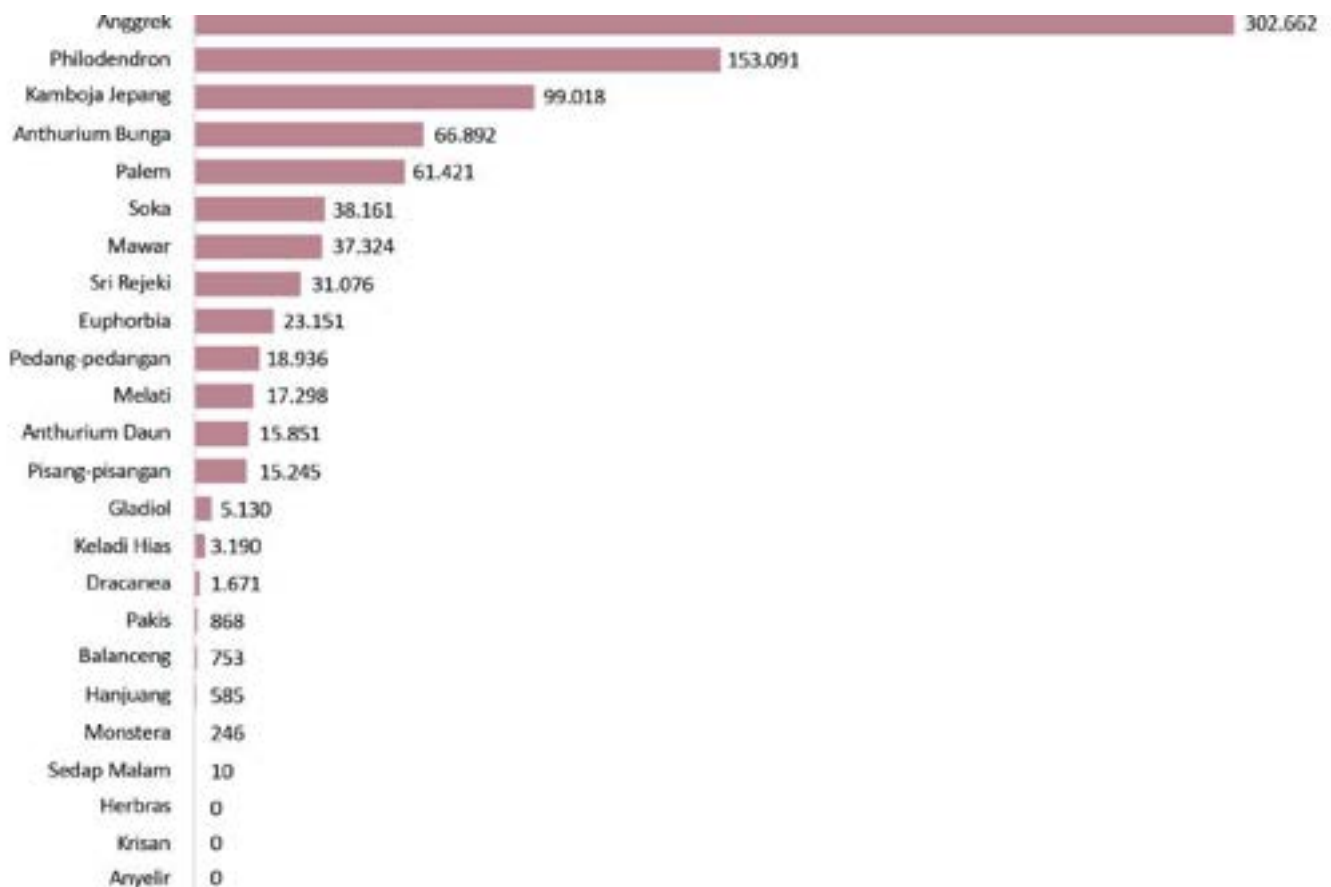
Gambar 3.87. Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka (kg) di DKI Jakarta Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dari 15 jenis tanaman biofarmaka yang diproduksi di DKI Jakarta, jumlah produksi tanaman biofarmaka terbesar yaitu pada tanaman lidah buaya sebesar 21,19% atau sebanyak 9.559 kg. Persentase tanaman biofarmaka terbesar kedua dan ketiga yaitu mahkota dewa sebesar 14,25% dan jahe sebesar 12,04%. Sedangkan, terdapat tanaman yang jumlah produksinya di bawah 1,00% yaitu temuireng sebesar 0,57%, kapulaga sebesar 0,51%, dan dlingo sebesar 0,38%. Rendahnya produksi pada ketiga tanaman tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya permintaan atas kebutuhan pasar.



Gambar 3.88. Luas Panen (m²) dan Produksi Tanaman Hias (tangcai) di DKI Jakarta Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta juga memproduksi berbagai tanaman hias. Berdasarkan Laporan Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH yang dipublikasi oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, produksi tanaman hias dari tahun 2017 sampai dengan 2020 paling banyak berada pada tahun 2019 yaitu 813.672 tangkai. Selain memproduksi tanaman hias terbanyak, tahun 2019 juga mempunyai luas panen tanaman terluas yaitu 269.912 m². Pada tahun 2020, jumlah produksi tanaman hias mengalami peningkatan sebesar 9,70% atau sebanyak 78.907 tangkai dari tahun sebelumnya. Namun, dari produksi tersebut luas panen justru menurun sebesar 50,91% atau seluas 137.407 m².



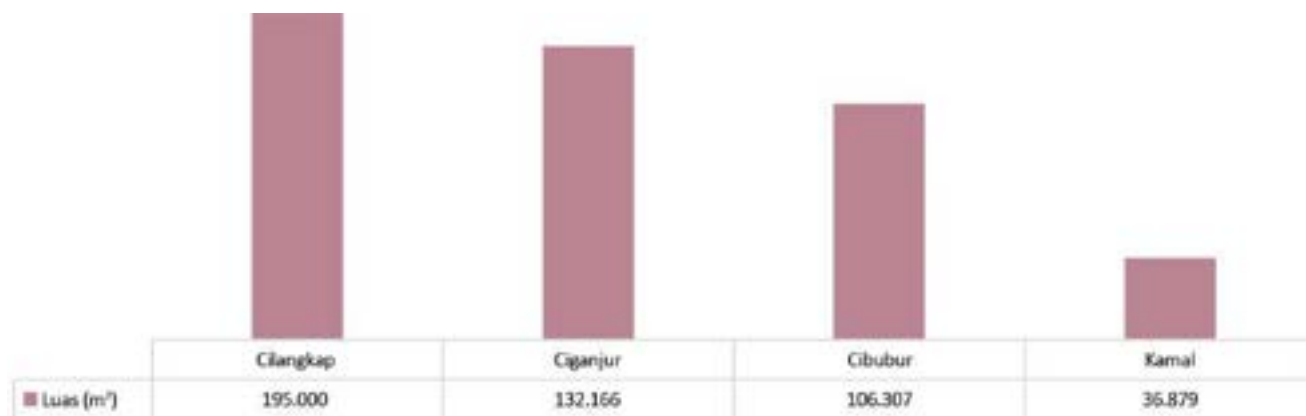
Gambar 3.89. Jumlah Produksi Tanaman Hias (tangcai) di DKI Jakarta Menurut Jenis Tanaman Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Terdapat 24 jenis tanaman hias yang tercatat pada Laporan Statistik Pertanian Hortikultura yaitu Anyelir, Herbras, Krisan, Monstera, Sedap Malam, Anggrek, Philodendron, Palem, Anthurium Bunga, Sri Rejeki, Melati, Mawar, Anthurium Daun, Adenium (Kamboja Jepang), Pisang–pisangan, Soka, Pedang-pedangan, Euphorbia, Gladiol, Caladium, Dracaena, Pakis, Balanceng, dan Hanjuang. Namun, jenis tanaman Anyelir, Herbras, dan Krisan tercatat tidak berproduksi lagi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Dari 21 jenis tanaman hias, jumlah produksi terbesar yaitu pada tanaman anggrek sebesar 33,90% atau sebanyak 302.662 tangkai. Anggrek merupakan salah satu tren bisnis yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Tren ini mulai meningkat pada awal pertengahan tahun 2019 hingga akhir tahun 2020. Walau sempat mengalami penurunan produksi yang dikarenakan pandemi, tren bisnis anggrek masih berjalan sampai akhir tahun 2020. Jumlah tanaman hias terbesar kedua dan ketiga yaitu Philodendron sebesar 17,15% dan Adenium sebesar 11,09%. Sedangkan, terdapat tanaman yang jumlah produksinya di bawah 1% yaitu Caladium, Dracaena, Pakis, Diffenbachia, dan Cordyline.

3.9.3. Agrowisata

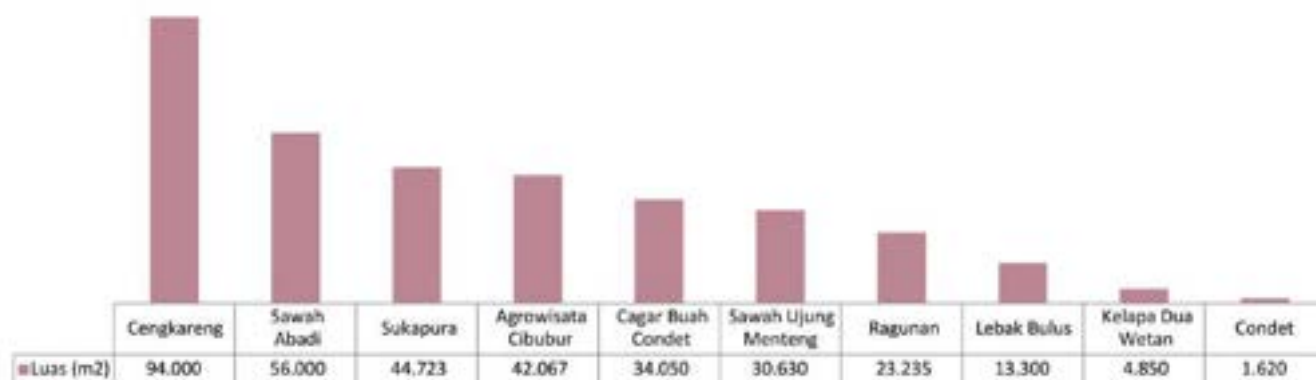
DKI Jakarta bukan merupakan pusat pariwisata dan tidak memiliki sawah yang luas, namun provinsi ini memiliki daya tarik lain melalui agrowisata. Agrowisata merupakan pengembangan pariwisata dengan menjadikan pertanian sebagai tujuan utama. Dengan memaksimalkan budaya lokal, agrowisata juga mampu meningkatkan pendapatan petani dan menjaga lingkungan sekitar dengan kondisi alam yang ada. Selain itu, argowisata juga bertujuan untuk mengedukasi atau memperluas wawasan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengenai tanaman pangan, horikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang ada di DKI Jakarta.



Gambar 3.90. Luas Agrowisata (m²) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Agrowisata DI DKI Jakarta dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman ini mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam memperbanyak bibit tanaman buah-buahan dan sayuran hidroponik, melayani pengambilan tanaman, serta melayani mahasiswa untuk praktik kerja lapangan dan kunjungan belajar. Fasilitas yang tersedia di agrowisata meliputi kantor kebun, *green house*, *cold storage*, gudang, sarana bermain anak-anak, spot foto, danau, gazebo, dan kolamancing. Data dari DKPKP Provinsi DKI Jakarta menunjukkan jumlah luas agrowisata pada tahun 2020 yaitu 470.352 m² dengan Agrowisata Cilangkap yang berlokasi di Jalan Raya Cilangkap di Jakarta Timur sebagai agrowisata terluas dibandingkan dengan Agrowisata Ciganjur, Cibubur, dan Kamal.



Gambar 3.91. Luas Kebun Bibit (m²) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Selain agrowisata, DKI Jakarta juga mempunyai kebun bibit yang digunakan sebagai tempat pengembangan benih dan proteksi tanaman. Kebun bibit mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam memperbanyak bibit tanaman, melayani pengambilan tanaman, dan melayani mahasiswa untuk praktik kerja lapangan serta kunjungan belajar. Adapun tanaman yang diperbanyak seperti anggrek, pisang, salak, dukuh, obat-obatan, dan lain-lain. Gambar di atas menunjukkan bahwa Kebun Bibit Cengkareng yang berlokasi di Jalan Lingkar Luar Barat di Jakarta Barat mempunyai lahan yang paling luas yaitu 94.000 m², sedangkan Kebun Condet yang berlokasi di Jalan Batu Bulat Nomor 21 di Jakarta Timur mempunyai lahan yang paling sempit yaitu 1.620m².

3.10. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu sektor yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. Lingkungan hidup pun, tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, namun masyarakat juga perlu ikut serta berperan dalam menjaga lingkungan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 Ayat (2) bahwa upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kebijakan ini didukung oleh Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca.

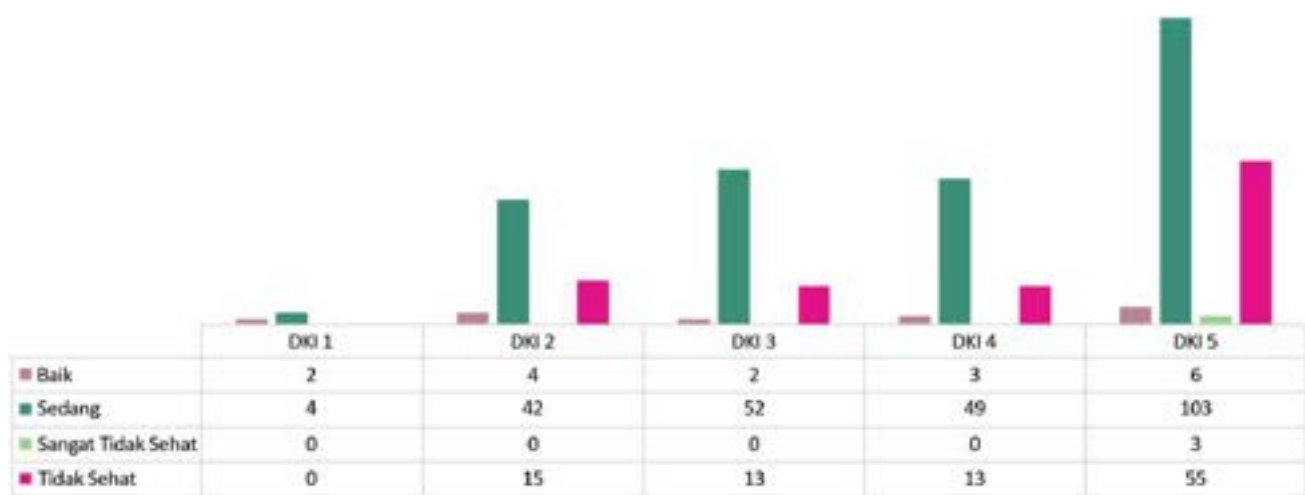
3.10.1. Kualitas Udara

Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) mobile yang dioperasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas memantau kualitas udara di DKI Jakarta berdasarkan lima titik. Kelima titik tersebut adalah DKI1 (Bundaran HI di Jakarta Pusat), DKI2 (Kelapa Gading di Jakarta Utara), DKI3 (Jagakarsa di Jakarta Selatan), DKI4 (Lubang Buaya di Jakarta Timur), dan DKI5 (Kebon Jeruk di Jakarta Barat). Partikel Debu (PM₁₀), Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Dioksida (NO₂), dan Permukaan Ozon (O₃) merupakan parameter senyawa pencemar yang dihasilkan oleh SPKU mobile. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta merupakan unit yang bertugas mengolah data senyawa pencemar yang akan dipublikasikan sebagai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). ISPU merupakan standar kualitas udara yang digunakan oleh Indonesia sejak tahun 1997. ISPU adalah angka yang menggambarkan kondisi kualitas udara di suatu daerah. Berikut ini tabel ISPU berdasarkan tingkat pencemaran udara, dampak kesehatan bagi manusia, dan kualitas udara di DKI Jakarta pada tahun 2020.



Tabel 3.1. ISPU Berdasarkan Tingkat Pencemaran Udara dan Dampak Kesehatan Bagi Manusia
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia

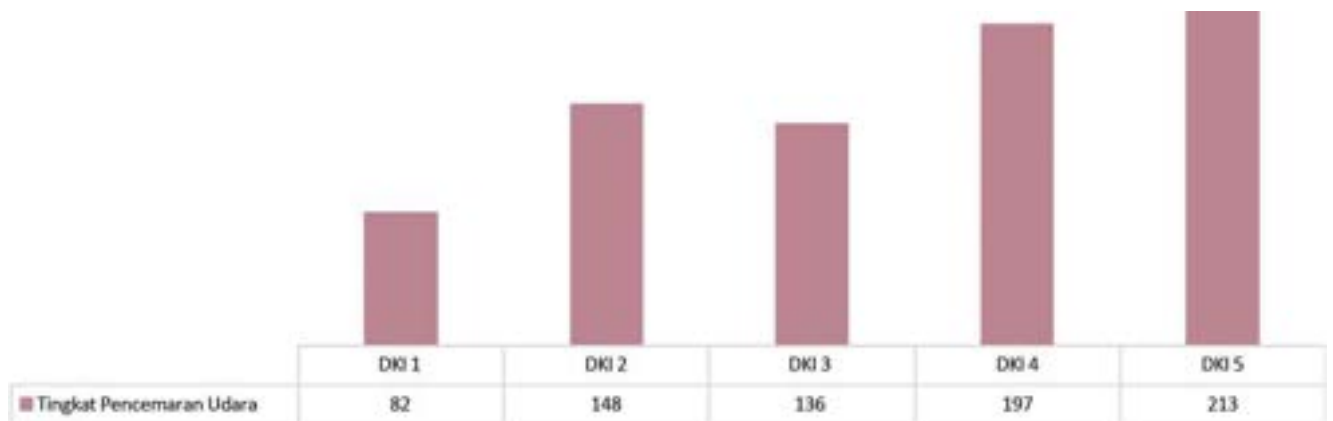
ISPU	Tingkat Pencemaran Udara	Dampak Kesehatan
0–50	Baik	Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.
51–100	Sedang	Kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika.
101–199	Tidak Sehat	Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.
200–299	Sangat Tidak Sehat	Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
300–500	Berbahaya	Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.



Gambar 3.92. Kualitas Udara Berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara di DKI Jakarta Menurut Banyaknya Hari Tahun 2020
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2020, kualitas udara di DKI Jakarta dinilai cukup aman. Sebesar 72,95% atau sebanyak 267 hari sepanjang tahun 2020 memiliki kualitas udara yang aman (baik dan sedang). Sedangkan, sebanyak 96 hari udara di DKI Jakarta berkualitas tidak sehat dan tiga hari berkualitas sangat tidak sehat. Kualitas udara sangat tidak sehat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai delapan hari. Kualitas udara di titik DKI 5 sangat tidak sehat pada tahun 2019 maupun 2020. Titik DKI 5 adalah wilayah dengan kualitas udara sangat tidak sehat yang dapat dilihat dari banyaknya hari dengan kualitas ISPU sangat tidak sehat dan tidak sehat. Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya pabrik sebagai penyumbang terbesar polusi udara.





Gambar 3.93. Tingkat Pencemaran Udara di DKI Jakarta Menurut Nilai Ukur Paling Tinggi Tahun 2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Ozon (O_3) adalah unsur yang dijadikan sebagai parameter paling tinggi yang didapatkan dari hasil pengukuran paling tinggi/critical. Gambar di atas menunjukkan tingkat pencemaran udara berdasarkan nilai ukur paling tinggi dari seluruh parameter yang diukur dalam waktu yang sama (maksimal) pada tahun 2020. Berdasarkan nilai maksimal pengukuran parameter, wilayah yang tingkat pencemaran udara dengan kategori sangat tidak sehat berada di titik DKI 5 (Kebon Jeruk di Jakarta Barat) yaitu 213. Jumlah ini menurun jika dibandingkan nilai maksimal dari tahun 2019 yaitu 243.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4963/AJ.402/DRJD/2018 tentang Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang pada Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa uji emisi gas buang merupakan salah satu pengajuan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pasal 3 Ayat 1 bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan uji emisi gas buang dan memenuhi ambang batas emisi. Uji emisi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kadar zat berbahaya dari gas buang kendaraan.

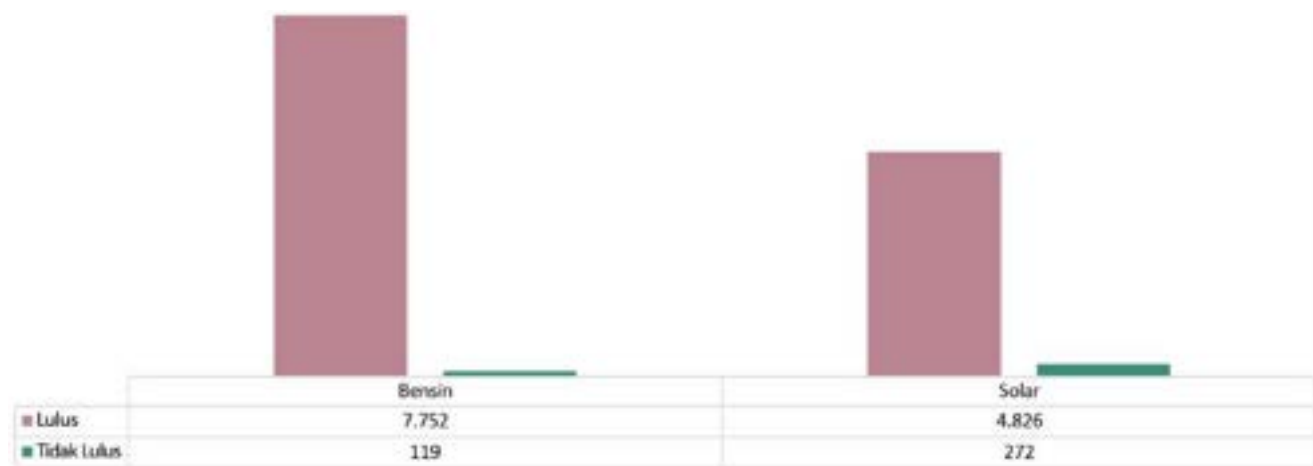
Pencemaran udara di DKI Jakarta tentu menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah agar kualitas udaranya menjadi semakin baik. Kebijakan pemerintah seperti pembangunan ruang terbuka hijau dan pengoptimalan transportasi massal tentu juga harus diiringi dengan kerja sama dari masyarakat dengan cara mendukung kebijakan tersebut dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti menjaga kebersihan rumah, jalan, lingkungan hingga hemat energi.



Gambar 3.94. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melakukan Uji Emisi di DKI Jakarta Menurut Hasil Uji Tahun 2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil uji emisi kendaraan yang diadakan pada tahun 2020, total kendaraan yang diuji sebanyak 12.969 kendaraan. Tren kenaikan paling tinggi jumlah kendaraan yang melakukan uji emisi terjadi pada bulan Juni sampai dengan Juli sebanyak 884 kendaraan, sedangkan tren turun paling drastis terjadi pada bulan Juli sampai dengan Agustus sebanyak 1.161 kendaraan. Dari jumlah tersebut sebanyak 12.578 atau sebesar 96,99% kendaraan memiliki hasil lulus uji emisi dan sisanya tidak lulus. Uji emisi kendaraan terbanyak yaitu pada bulan Desember sebanyak 2.346 kendaraan, sedangkan yang paling sedikit berada pada bulan Mei yaitu 171 kendaraan. Tingginya angka uji emisi kendaraan pada bulan Juni dapat disebabkan karena bulan ini merupakan bulan terakhir pada tahap pertama uji emisi setiap tahunnya dan sanksi yang cukup berat akan diberikan apabila kendaraan tidak lulus emisi. Selain itu, banyaknya kendaraan yang dilakukan uji emisi pada bulan Juli setiap tahunnya dapat disebabkan karena bulan ini merupakan tahap kedua uji emisi setiap tahunnya. Secara keseluruhan persentase kendaraan yang lulus uji emisi hampir mencapai 100%, namun pada bulan Juli persentase uji emisi tidak lulus mencapai 9,89%.



Gambar 3.95. Hasil Uji Emisi Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Menurut Bahan Bakar Tahun 2020

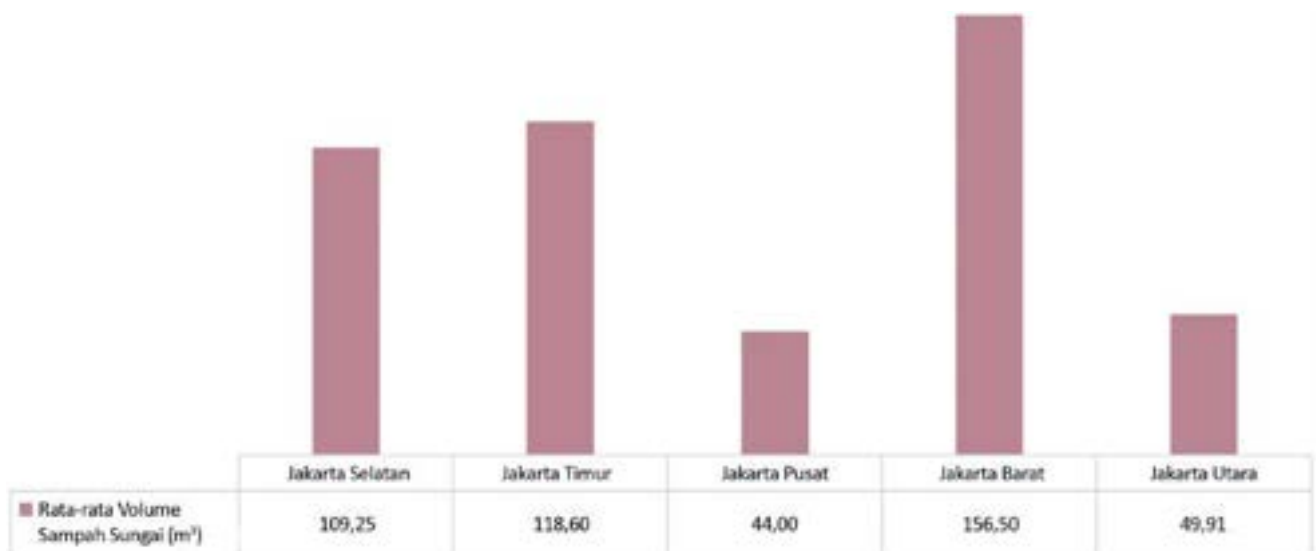
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, kendaraan yang berbahan bakar bensin lebih banyak dilakukan uji emisi dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar solar, yaitu masing-masing sebanyak 7.871 dan 5.098 kendaraan. Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar solar biasanya diperuntukkan bagi kendaraan bermesin diesel. Kendaraan jenis ini biasanya dipergunakan untuk mengangkut barang-barang produksi yang bermuatan besar seperti hasil alam, pabrik, kayu, perikanan, dan lain-lain. Dari sebanyak 7.871 kendaraan berbahan bakar bensin, sebesar 98,49% atau sebanyak 7.752 kendaraan dinyatakan lulus uji emisi, sedangkan sebanyak 119 kendaraan berbahan bakar bensin tidak lulus uji emisi. Pada tahun yang sama, kendaraan berbahan bakar solar yang diuji sebanyak 4.826 kendaraan yang dinyatakan lulus uji emisi, sementara 272 kendaraan dinyatakan tidak lulus uji emisi.

Selain untuk mengetahui zat berbahaya pada saluran gas kendaraan bermotor, uji emisi juga berguna untuk mengetahui efektivitas pembakaran dan kondisi kendaraan bermotor. Pemerintah juga menetapkan standar uji emisi yang berbeda-beda tergantung jenis dari kendaraan bermotor. Misalnya standar uji emisi pada kendaraan bermotor dengan mesin dua tak akan berbeda dengan mesin empat tak.

3.10.2. Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sisa-sisa yang dibuang dari produksi sebuah rumah tangga maupun industri. Sebagai upaya terciptanya lingkungan bersih dan sehat untuk masyarakat DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dalam meningkatkan kebersihan lingkungan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kebersihan lingkungan, di antaranya melalui pengelolaan sampah sungai dan tempat penampungan sementara (TPS) sampah. TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut untuk dibawa ke tempat pengolahan atau daur ulang sampah.

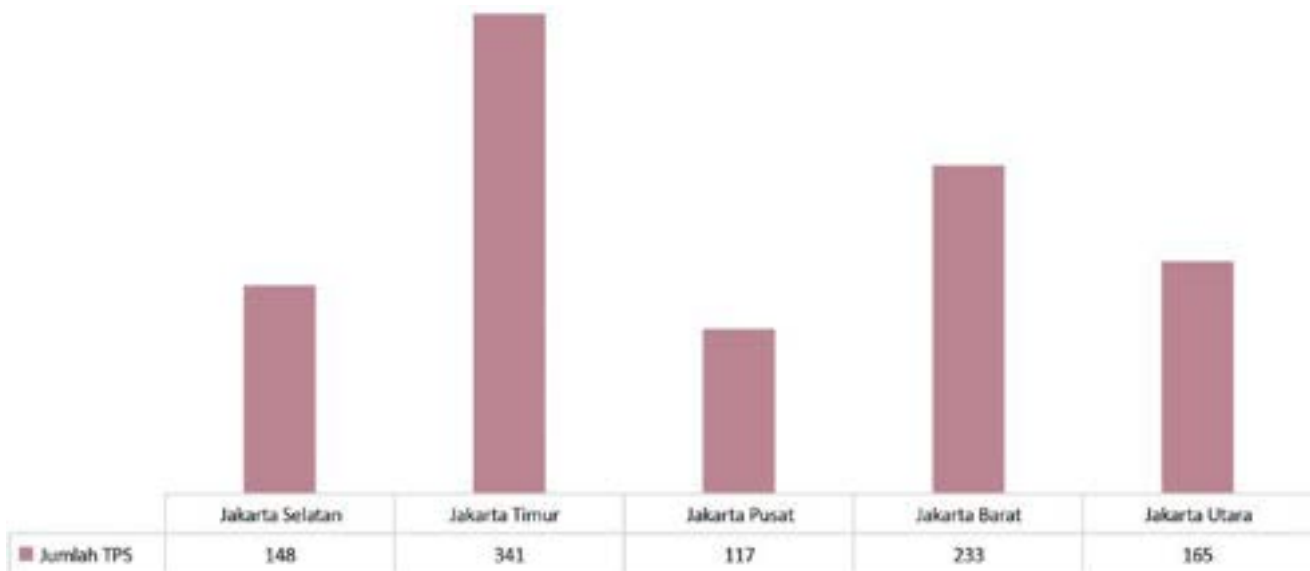


Gambar 3.96. Rata-Rata Volume Sampah Sungai (m³) di DKI Jakarta Menurut Kota Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

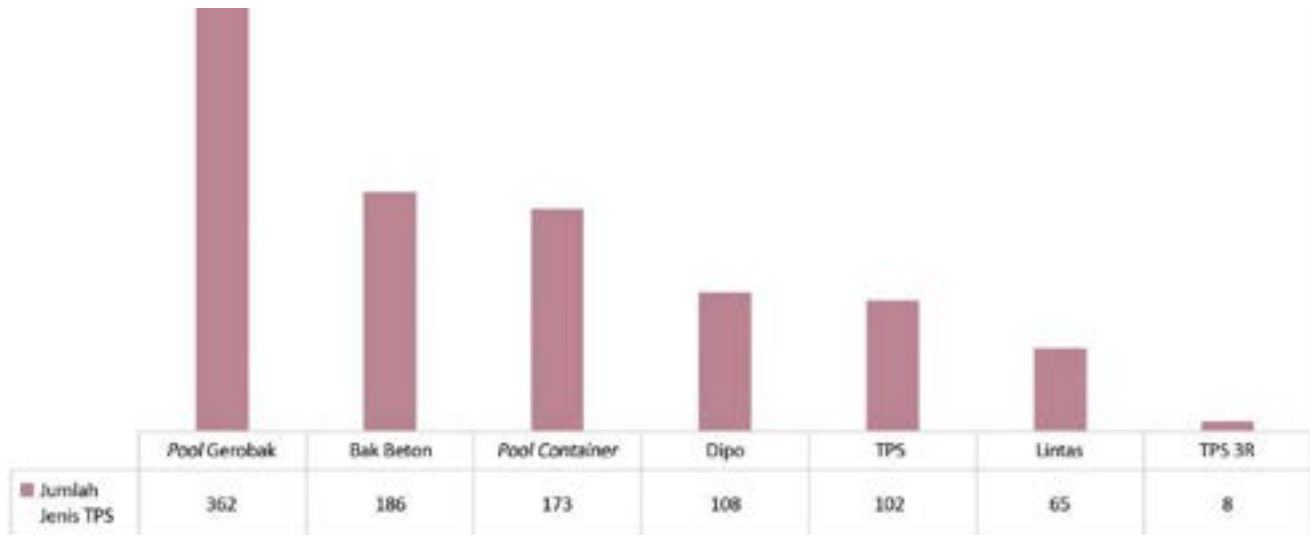
Lokasi penyaringan sampah di DKI Jakarta tersebar di lima kota administrasi sebanyak 28 sungai. Penyaringan sampah tersebut sudah menggunakan *mechanical electrical hydraulic* (ME-H). Mesin ini mengubah tenaga air menjadi tenaga listrik yang akan digunakan untuk menggerakkan *trash rake* atau saringan sampah. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa volume sampah yang tersaring di lima kota administrasi di DKI Jakarta berbeda-beda. Volume sampah paling banyak berada di Jakarta Barat yaitu 156,50 m³ dari rata-rata enam sungai. Sedangkan, volume paling sedikit berada di Jakarta Pusat sebanyak 44 m³ dari rata-rata dua sungai. Meskipun jumlah sungai di Jakarta Utara paling banyak jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, tetapi rata-rata volume sampah yang tersaring lebih sedikit jika dibandingkan dengan empat wilayah lainnya setelah Jakarta Pusat.





Gambar 3.97. Jumlah Tempat Pembuangan Sementara di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Selain pengelolaan sampah sungai melalui ME-H, terdapat juga pengelolaan sampah melalui TPS sampah. Sebelum sampah dari warga DKI Jakarta diangkut truk sampah untuk didistribusikan ke tempat pembuangan akhir atau ke tempat pengelolaan sampah lainnya, sampah tersebut ditampung terlebih dahulu di TPS. Pada tahun 2020, jumlah TPS sampah di DKI Jakarta mencapai 1.004 TPS yang tersebar di lima kota administrasi. Jumlah TPS paling banyak berada di Jakarta Timur yaitu 341 TPS, sedangkan jumlah TPS paling sedikit berada di Jakarta Pusat yaitu 117 TPS. Banyaknya jumlah TPS di Jakarta Timur berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk di wilayah ini.



Gambar 3.98. Jenis Tempat Pembuangan Sementara di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari DLH Provinsi DKI Jakarta, status kepemilikan lahan TPS tidak hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah pusat saja. Faktanya, beberapa lahan TPS dimiliki oleh perusahaan swasta, perumahan, dan warga pribadi. Berdasarkan jenis TPS, DKI Jakarta memiliki tujuh jenis TPS yang terdiri dari bak beton, dipo, lintas, *pool container*, *pool gerobak*, TPS, dan TPS *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Jenis TPS paling banyak adalah *pool gerobak* sebanyak 362 TPS dan jenis TPS paling sedikit adalah TPS 3R sebanyak delapan TPS. Walaupun TPS 3R mempunyai jumlah paling sedikit jika dibandingkan dengan jenis TPS lainnya, namun pada umumnya TPS 3R mempunyai

wilayah yang lebih luas jika dibandingkan dengan jenis TPS lainnya. Hal ini disebabkan karena proses TPS 3R lebih panjang dan lama dibandingkan dengan TPS yang lain. Terdapat beberapa proses yang dilakukan di TPS 3R, salah satunya adalah memilah. Proses pemilahan sampah ini juga bergantung dengan luas TPS 3R yang ada. Sebagai contoh TPS 3R dengan luas kurang dari 200 m² disarankan untuk menampung sampah yang tercampur sebesar 20,00% dan sampah yang sudah terpilah sebesar 80,00%.

Tanpa disadari, semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivitas, semakin banyak juga sampah atau sisa-sisa dari aktivitas tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dalam meningkatkan kebersihan lingkungan sebagai upaya terciptanya lingkungan bersih dan sehat untuk masyarakatnya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kebersihan lingkungan. Setiap TPS sampah yang telah disediakan ini sebaiknya dapat digunakan dengan baik agar lingkungan tempat tinggal masyarakat dapat terjaga kebersihannya.

3.11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penertiban dan penataan data kependudukan dan dokumen yang berupa penertiban atau perubahan kartu keluarga (KK), KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan. Surat keterangan kependudukan ini berupa kepergian, kedatangan, perubahan alamat, tinggal sementara, perubahan status orang asing, dan/atau pernikahan. Oleh sebab itu, ada banyak faktor yang memengaruhi data pencatatan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

3.11.1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran digunakan sebagai salah satu dokumen atau bukti legal mengenai identitas seseorang termasuk bayi yang baru lahir. Akta kelahiran juga menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tua kandungnya. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen persyaratan yang digunakan dalam pembuatan kartu keluarga dan nomor induk kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan kelahiran bayi yang sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa telah berubah menjadi domisili.





Gambar 3.99. Jumlah Pencatatan Akta Kelahiran di DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

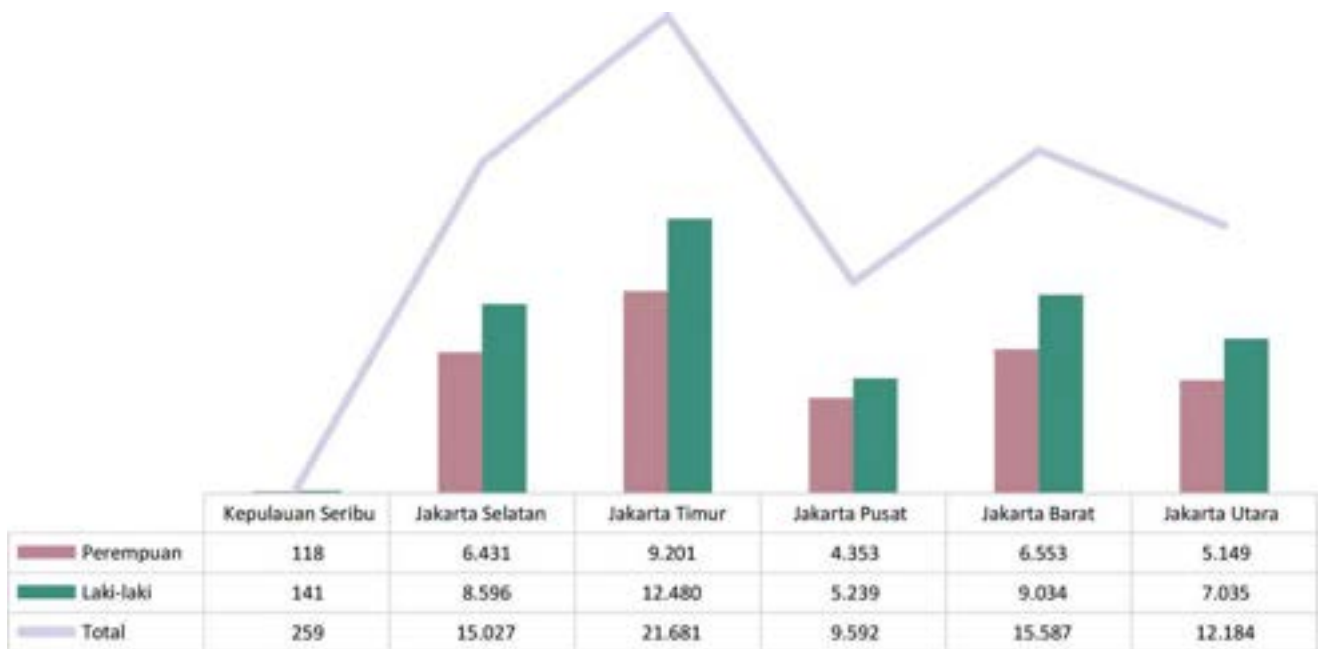
Sepanjang tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 269.628 akta kelahiran. Jumlah pencatatan akta kelahiran paling tinggi berada di Jakarta Timur sebanyak 76.753 akta yang terdiri dari 38.016 perempuan dan 38.737 laki-laki. Sedangkan, jumlah pencatatan akta paling sedikit berada di Kepulauan Seribu sebanyak 810 akta yang terdiri dari 379 perempuan dan 431 laki-laki. Jika dilihat secara keseluruhan, pencatatan akta kelahiran didominasi oleh laki-laki sebesar 50,87% atau sebanyak 137.166 orang.

3.11.2. Akta Kematian

Semua makhluk hidup pasti akan mengalami kematian walaupun waktunya masih menjadi misteri. Tidak hanya mencatat jumlah kelahiran penduduknya, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta juga bertanggungjawab secara berkala mencatat jumlah registrasi kematian sepanjang tahun 2020. Terbitnya akta kematian berfungsi sebagai bukti hukum atau legalitas bahwa seseorang benar telah meninggal dunia dan mendapat pengakuan negara dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berupa akta kematian. Pemberian akta kematian kepada penduduk yang sudah meninggal pada dasarnya merupakan sebuah bentuk penghargaan dan penghormatan terakhir yang diberikan oleh negara kepada penduduknya²².



²² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2020), "Ini Nilai Penting Akta Kematian Bagi Ahli Waris", <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/597/ini-nilai-penting-akta-kematian-bagi-ahli-waris>, diakses pada 12 Juli 2021.



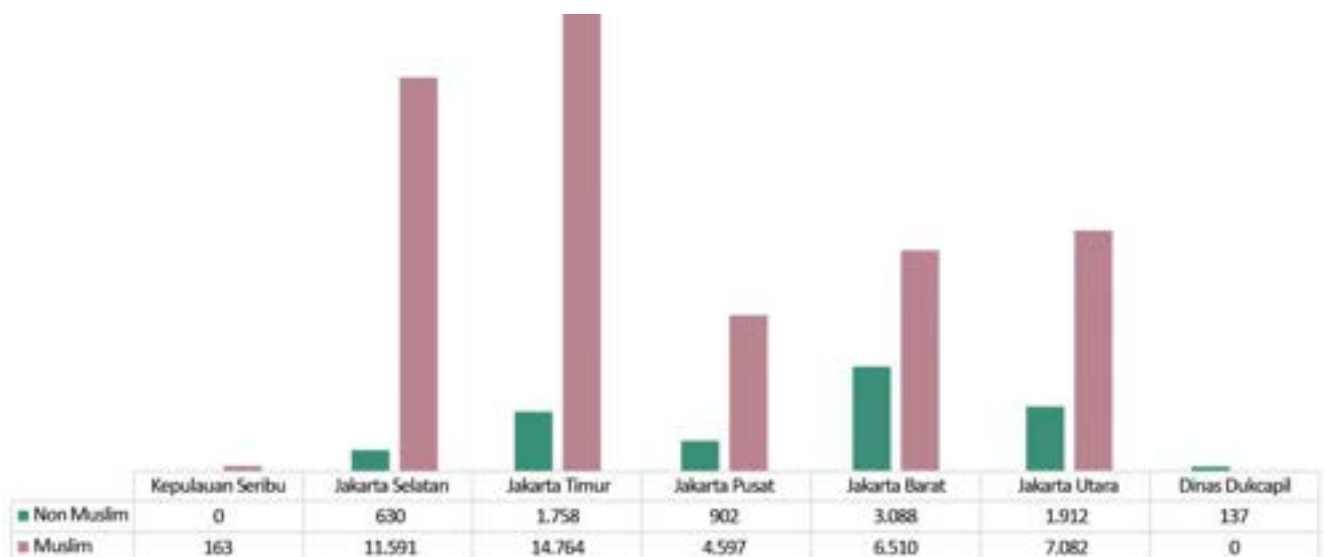
Gambar 3.100. Jumlah Pencatatan Akta Kematian di DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Secara keseluruhan, total akta kematian yang telah dicatat pada tahun 2020 sebanyak 74.330 akta. Jumlah pencatatan akta kematian paling tinggi berada di Jakarta Timur sebanyak 21.681 akta yang terdiri dari 9.201 perempuan dan 12.480 laki-laki. Sedangkan, jumlah yang paling sedikit di Kepulauan Seribu sebanyak 259 akta yang terdiri dari 118 perempuan dan 141 laki-laki. Jika dibandingkan secara keseluruhan, pencatatan akta kematian laki-laki sebesar 57,21% atau sebanyak 42.525 akta.

3.11.3. Akta Perkawinan dan Perceraian

Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan istri, serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Sedangkan, akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusnya sebuah perkawinan. Disdukcapil dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi DKI Jakarta) telah mencatat jumlah akta perkawinan dan perceraian selama tahun 2020.



Gambar 3.101. Jumlah Pencatatan Akta Perkawinan di DKI Jakarta Menurut Agama dan Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Provinsi DKI Jakarta

Jumlah akta perkawinan secara keseluruhan adalah 52.971 akta yang terdiri dari 8.427 non-muslim dan 44.544 muslim. Akta perkawinan paling banyak tercatat di Jakarta Timur, yaitu sebanyak 16.522 akta. Sedangkan, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga pemerintah yang mencatat akta perkawinan paling sedikit yaitu 137 akta. Menurut agama, akta perkawinan muslim paling banyak tercatat di Jakarta Timur yaitu 14.764 akta. Sedangkan, non-muslim di Jakarta Barat sebanyak 3.088 akta. Dari gambar di atas, terlihat tidak adanya akta perkawinan non-muslim di Kepulauan Seribu, hal ini dapat disebabkan karena sedikitnya penduduk di Kepulauan Seribu yang memeluk agama non-islam.



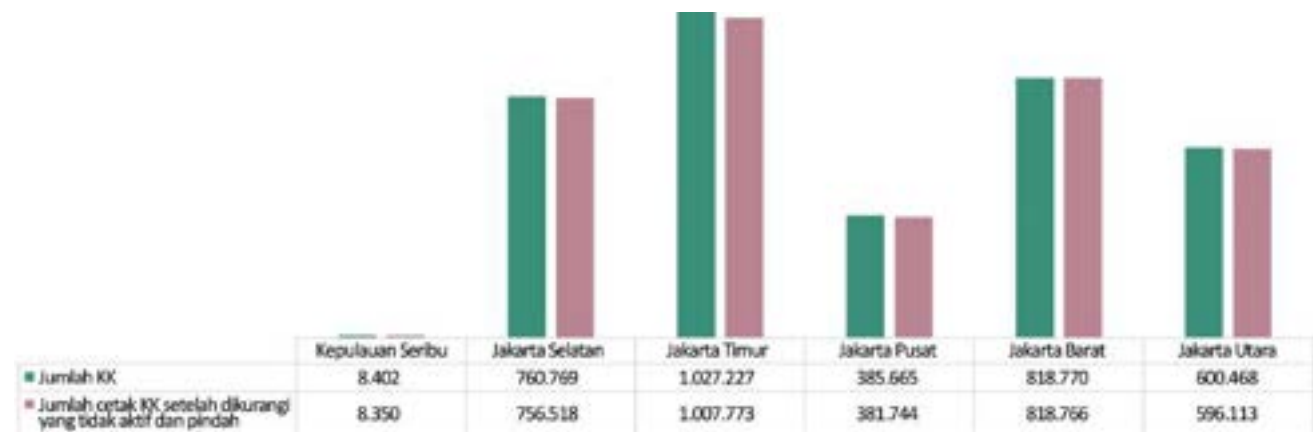
Gambar 3.102. Jumlah Pencatatan Akta Perceraian di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi DKI Jakarta

Jumlah akta perceraian secara keseluruhan sebanyak 16.325 akta yang terdiri dari 1.558 akta yang tercatat di Disdukcapil dan sebanyak 14.767 di pengadilan tinggi agama. Akta perceraian paling banyak tercatat di Jakarta Timur sebanyak 4.539 akta. Sedangkan, yang paling sedikit tercatat di Kepulauan Seribu yaitu 39 akta.

3.11.4. Kartu Keluarga

Kartu keluarga adalah kartu identitas yang menampilkan data mengenai susunan, jumlah, dan hubungan sebuah keluarga. Kartu keluarga menjadi salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki karena dokumen ini menjadi salah satu persyaratan dalam pembuatan dokumen lain, salah satunya adalah dalam pembuatan KTP. Bahkan, dalam beberapa tahun belakangan, KK menjadi salah satu persyaratan untuk mendaftarkan nomor telepon seluler sampai dengan pendaftaran asuransi kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.



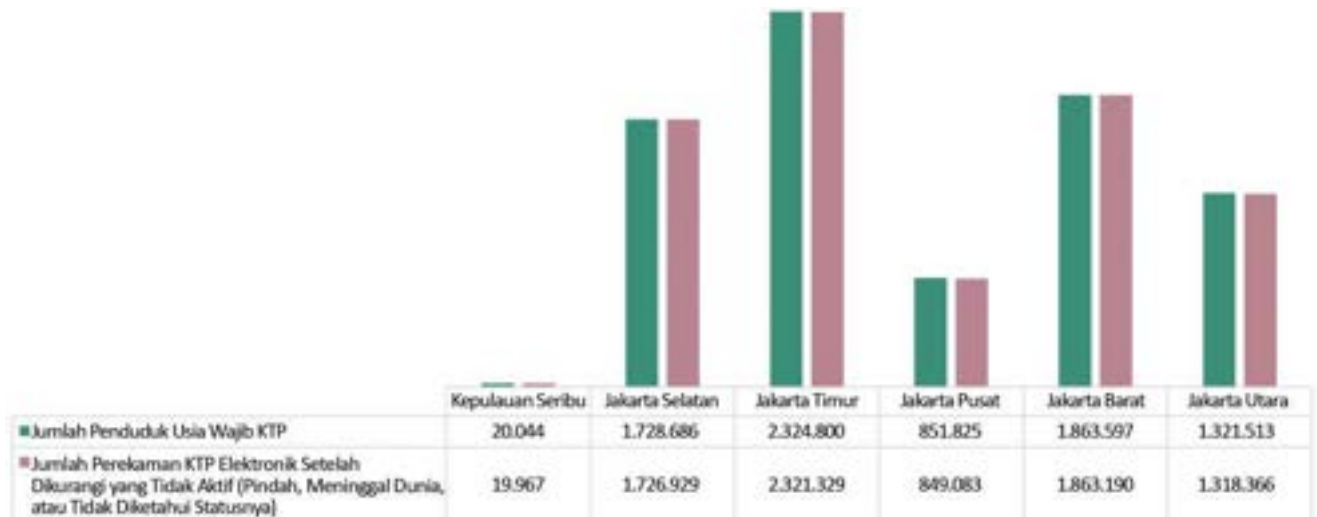
Gambar 3.103. Jumlah Kartu Keluarga di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Selama tahun 2020, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta telah mencatat sebanyak 3.601.301 KK. Setelah dikurangi dengan KK yang tidak aktif dan pindah sebanyak 32.037 KK, maka jumlah KK tercatat sebanyak 3.569.264 KK atau sebesar 99,11% dari total KK tercatat. Persentase paling besar dari jumlah KK tercatat dengan KK tercatat berada di Jakarta Barat hampir mencapai 100%. Selanjutnya jumlah ini disusul oleh Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu dengan persentase masing-masing sebesar 99,44% dan 99,38%.

3.11.5. Kartu Tanda Penduduk

Kartu tanda penduduk merupakan salah satu contoh kartu identitas resmi penduduk yang wajib dimiliki oleh seluruh WNI yang berusia minimal 17 tahun. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 8.110.465 penduduk usia wajib KTP di DKI Jakarta. Kini, KTP dikembangkan menjadi KTP elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.



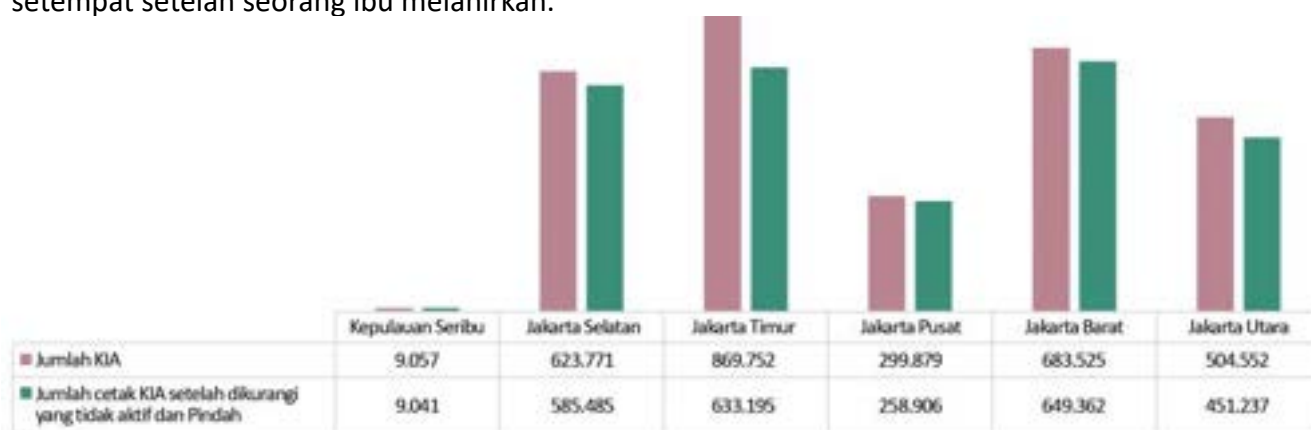
Gambar 3.104. Jumlah Pemilik Wajib Kartu Tanda Penduduk di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan, jumlah perekaman KTP elektronik yang telah dikurangi dengan yang tidak aktif karena pindah, meninggal dunia, atau tidak diketahui statusnya tercatat sebesar 99,86% atau sebanyak 8.098.864 pemilik wajib KTP. Maka, masih terdapat sebanyak 11.601 jumlah penduduk usia wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Persentase paling besar dari jumlah penduduk usia wajib KTP dengan perekaman KTP elektronik berada di Jakarta Barat sebesar 99,98%. Selanjutnya jumlah ini disusul oleh Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang memiliki persentase masing-masing sebesar 99,90% dan 99,85%.

Kartu identitas anak (KIA) yang mulai direncanakan sejak tahun 2016 merupakan sebuah identitas sah yang dapat dimiliki oleh anak berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil setempat²³. Kartu ini dibuat agar anak yang berusia dibawah 17 tahun

²³ Portal Informasi Indonesia (2020), "Cara Membuat KTP Anak atau Kartu Identitas Anak (KIA)", <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/964/cara-membuat-ktp-anak-atau-kartu-identitas-anak-kia>, diakses pada 12 Juni 2021.

bisa mendapat akses pelayanan dan tercatat setiap kegiatannya. Kartu ini diterbitkan oleh Disdukcapil setempat setelah seorang ibu melahirkan.



Gambar 3.105. Jumlah Pemilik Kartu Identitas Anak di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Selama tahun 2020, Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 2.990.536 KIA. Setelah dikurangi dengan KIA yang tidak aktif dan pindah sebanyak 376.310 KIA, maka jumlah KIA tercetak sebesar 87,42% atau sebanyak 2.614.226 KIA. Dari enam wilayah administrasi di DKI Jakarta, jumlah kepemilikan KIA setelah dikurangi yang tidak aktif dan pindah terbanyak tercatat berada di Jakarta Timur yaitu 236.557 KIA. Persentase paling besar dari jumlah KIA tercetak dengan KIA tercatat berada terjadi di Kepulauan Seribu yaitu 99,82%. Selanjutnya jumlah ini disusul oleh Jakarta Pusat dan Jakarta Barat masing-masing sebesar 95,34% dan 95,00%.

KK, KTP maupun KIA tidak hanya memiliki fungsi sebagai kartu identitas saja, namun dokumen-dokumen ini berguna juga sebagai kartu akses untuk mendapat pelayanan dari negara. Dokumen ini merupakan syarat sah yang dibutuhkan seseorang untuk melanjutkan pendidikan, berobat ke rumah sakit hingga mengurus pernikahan, membutuhkan dokumen ini untuk melakukannya. Dari sisi pemerintah, kartu ini berguna sebagai bukti legal dari setiap pencatatan kependudukan yang akan mengikat masyarakat dan pemerintah secara hukum.

3.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dalam rangka membangun hingga timbulnya kesadaran terhadap potensi yang dimiliki oleh individu yang dapat dianalogikan sebagai sebuah cara dalam meningkatkan kekuatan baik individu maupun lembaga²⁴. Salah satu usaha pemberdayaan masyarakat dan desa dapat melalui program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang secara program dilaksanakan oleh tim penggerak PKK (TPPKK).

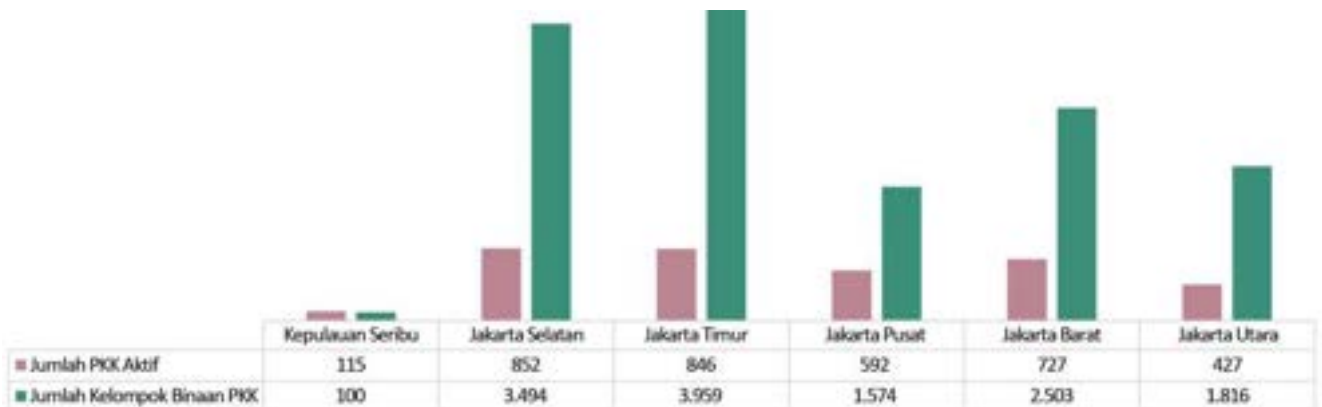
TPPKK mempunyai peran dalam menjalankan program pokok PKK yang diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Sepuluh program pokok PKK yang dapat diintegrasikan pada pos pelayanan

²⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia (n.d.), "Pemberdayaan", https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf, diakses pada 12 Juli 2021.

terpadu tersebut meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila; gotong royong; pangan; sandang; perumahan dan tata laksana rumah tangga; pendidikan dan keterampilan; kesehatan; pengembangan kehidupan berkooperasi; kelestarian lingkungan hidup; dan perencanaan sehat.

3.12.1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Kemasyarakatan

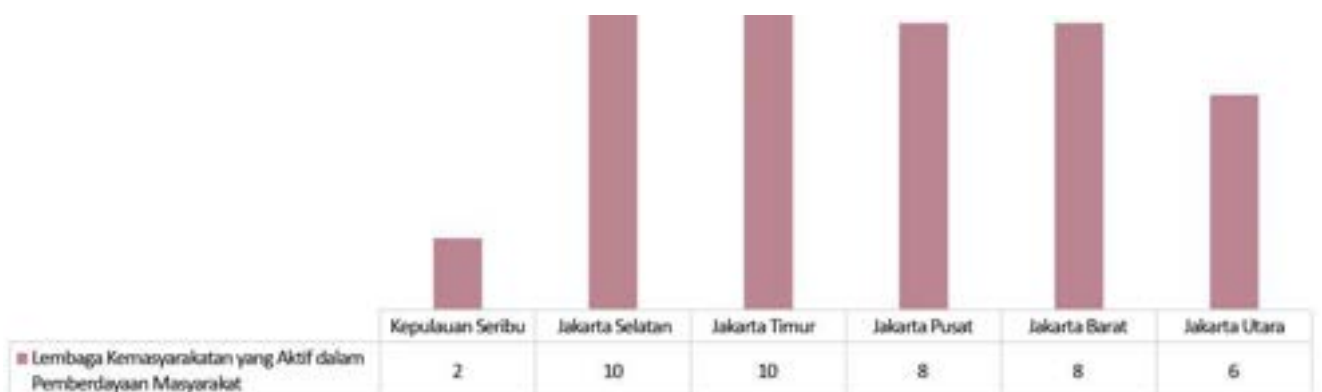
Sama seperti yang Abraham Lincoln katakan mengenai demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitu pula dengan PKK, salah satu bidang pemberdayaan keluarga dan pembangunan masyarakat yang dikelola dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, PKK tidak hanya sebuah gerakan dalam bidang pemberdayaan, namun juga berperan dalam menciptakan ekosistem baru. Sehubungan dengan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung ekosistem baru dengan meluncurkan aplikasi Carik Jakarta. Aplikasi ini bertujuan untuk pendataan keluarga terpadu yang dilakukan langsung oleh anggota PKK secara digital.



Gambar 3.106. Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Aktif dan Kelompok Binaan di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, jumlah PKK aktif di DKI Jakarta sebanyak 3.559 PKK. Jumlah PKK aktif paling banyak berada di Jakarta Selatan yaitu 852 PKK yang tersebar di 60 kelurahan dan 10 kecamatan. Sedangkan, jumlah PKK aktif paling sedikit berada di Kepulauan Seribu yaitu 115 PKK. Jumlah kelompok binaan PKK paling banyak berada di Jakarta Timur yaitu 3.959 kelompok dan yang paling sedikit di Kepulauan Seribu yaitu 100 kelompok. Kelompok PKK ini berdasarkan jumlah PKK di tingkat RT dan RW sehingga jumlah PKK di suatu wilayah sebanding dengan kelompok binaan.



Gambar 3.107. Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta Tahun 2020

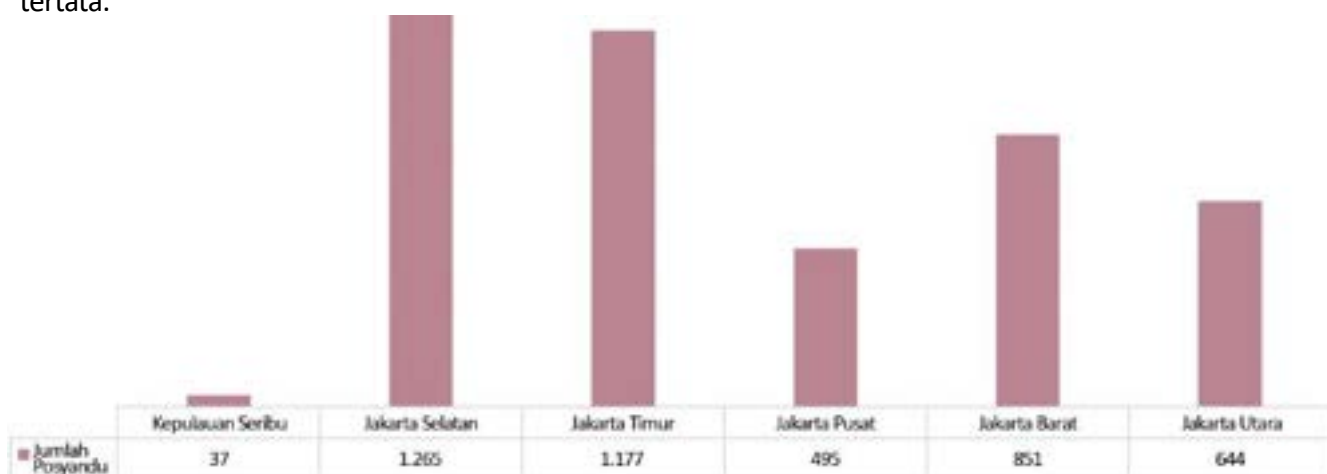
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta sebanyak 44 lembaga. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif di DKI Jakarta paling banyak berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yaitu 10 lembaga, sedangkan jumlah lembaga

kemasyarakatan yang aktif paling sedikit berada di Kepulauan Seribu yaitu dua lembaga. Adapun beberapa contoh lembaga kemasyarakatan di DKI Jakarta seperti Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi), Forum Komunikasi Betawi (Forkabi), karang taruna, Forum Betawi Rempug (FBR), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMDK), dan lain-lain.

3.12.2. Pos Layanan Terpadu

Kesehatan ibu dan anak menjadi pilar penting dalam keluarga. Oleh sebab itu, pemerintah sangat memerhatikannya melalui Pos Pelayanan Terpadu (posyandu). Melalui posyandu, penduduk tidak hanya mendapatkan informasi perihal KIA namun juga program lanjut usia (lansia). Pemberian informasi dari posyandu ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta masih dilakukan secara manual, sehingga perlu adanya pembaharuan sistem. Posyandu merupakan salah satu terobosan dari pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di posyandu yang semula dilaksanakan secara manual menjadi digital yang lebih tertata.



Gambar 3.108. Jumlah Pos Layanan Terpadu di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 4.469 layanan posyandu di DKI Jakarta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi pengurangan satu layanan dari tahun 2019 sebanyak 4.470 layanan. Jakarta Selatan merupakan wilayah administrasi dengan jumlah layanan posyandu terbanyak yaitu 1.265 layanan sepanjang tahun 2020, jumlah ini meningkat sebanyak dua layanan dari tahun sebelumnya. Jumlah posyandu paling banyak berkurang yaitu di Jakarta Pusat yaitu 14 layanan. Pengurangan layanan posyandu yang terjadi pada tahun 2020 dapat disebabkan karena ditutupnya posyandu akibat pandemi Covid-19.

3.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

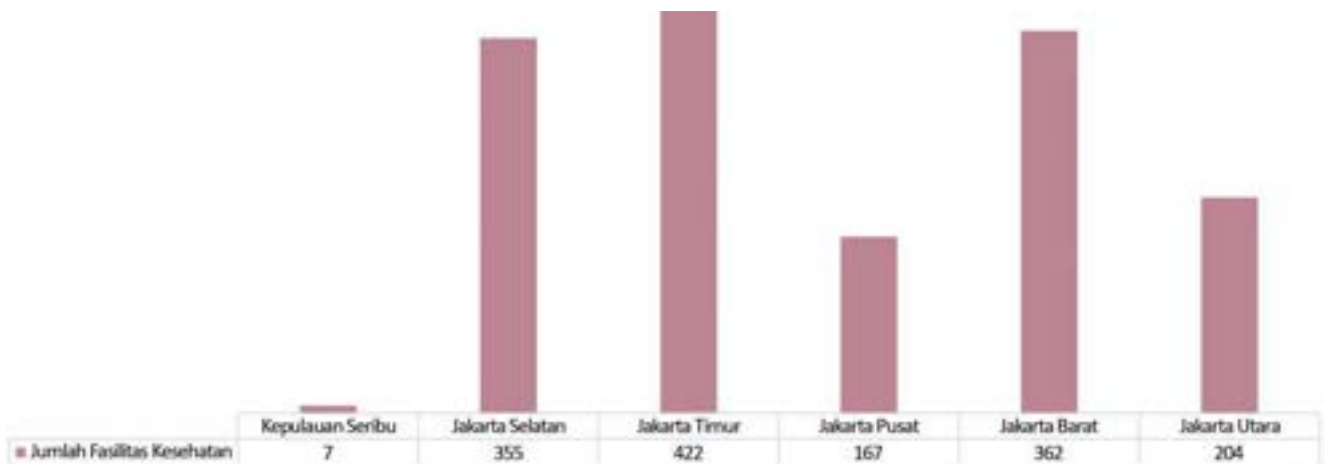
Jumlah penduduk yang besar dan tidak terkontrol akan berpotensi untuk memunculkan berbagai masalah baru. Masalah-masalah ini bisa berupa kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menurun, meningkatnya angka pengangguran, memperlambat laju ekonomi, bahkan meningkatkan angka kriminalitas. Sehingga, pemerintah berusaha mengatasi permasalahan ini dengan melakukan langkah preventif melalui program keluarga berencana (KB). KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas²⁵. Program KB

²⁵ Presiden Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

di Indonesia diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

3.13.1. Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana

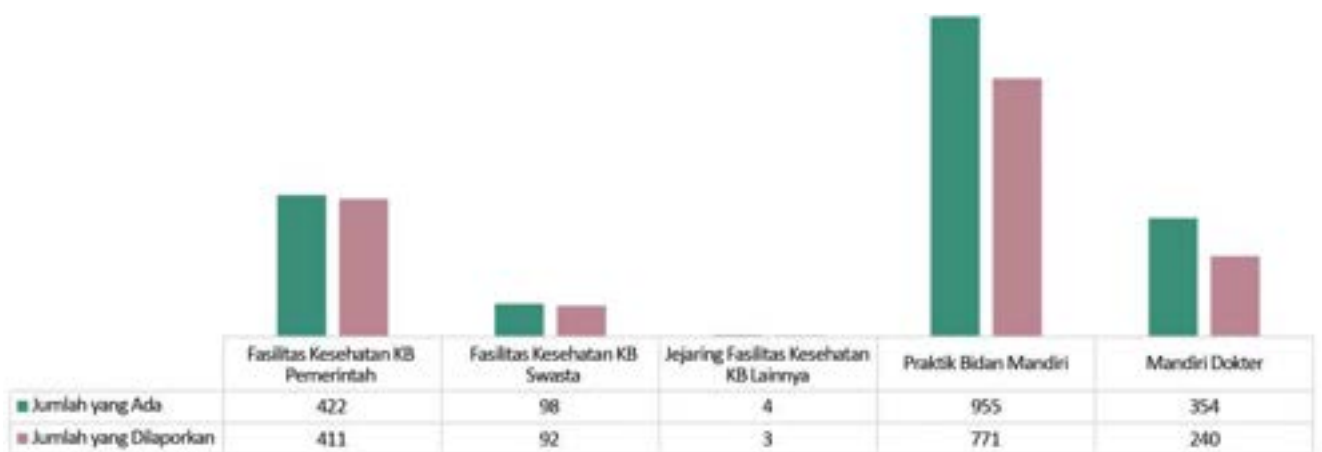
Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kini fasilitas kesehatan (faskes) juga ikut melayani program KB. Ini juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana. Program ini juga didukung pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan guna menekan laju kelahiran yang tidak terkontrol di Indonesia.



Gambar 3.109. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.517 unit faskes yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada, Jakarta Timur mempunyai faskes terbanyak yaitu 422 unit. Banyaknya faskes di wilayah ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan fasilitas terbaik kepada warganya mengingat penduduk di Jakarta Timur merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya.

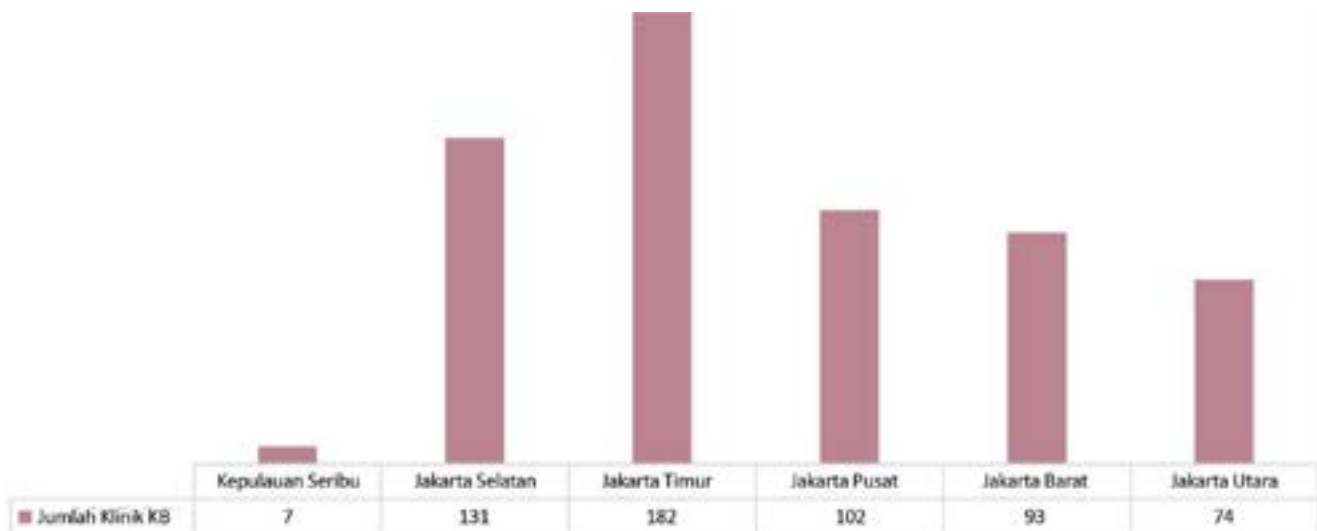


Gambar 3.110. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melayani KB di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, DPPAPP Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.833 unit faskes yang ada, namun sebanyak 82,76% atau sebanyak 1.517 unit faskes yang dilaporkan. Dalam hal ini, unit faskes yang dilaporkan adalah faskes yang sudah resmi dan terverifikasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang dimiliki BKKBN.

Untuk mencapai target dan tujuan dari program KB, perlu adanya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara masif dan dilakukan di segala lini. Sehingga, klinik KB menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk dapat merangkul banyak kalangan di berbagai wilayah. Selain sebagai proses pendekatan yang dapat mensosialisasikan program KB kepada penduduk, klinik KB juga dirancang mampu mengontrol laju peningkatan penduduk.



Gambar 3.111. Jumlah Klinik Keluarga Berencana di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

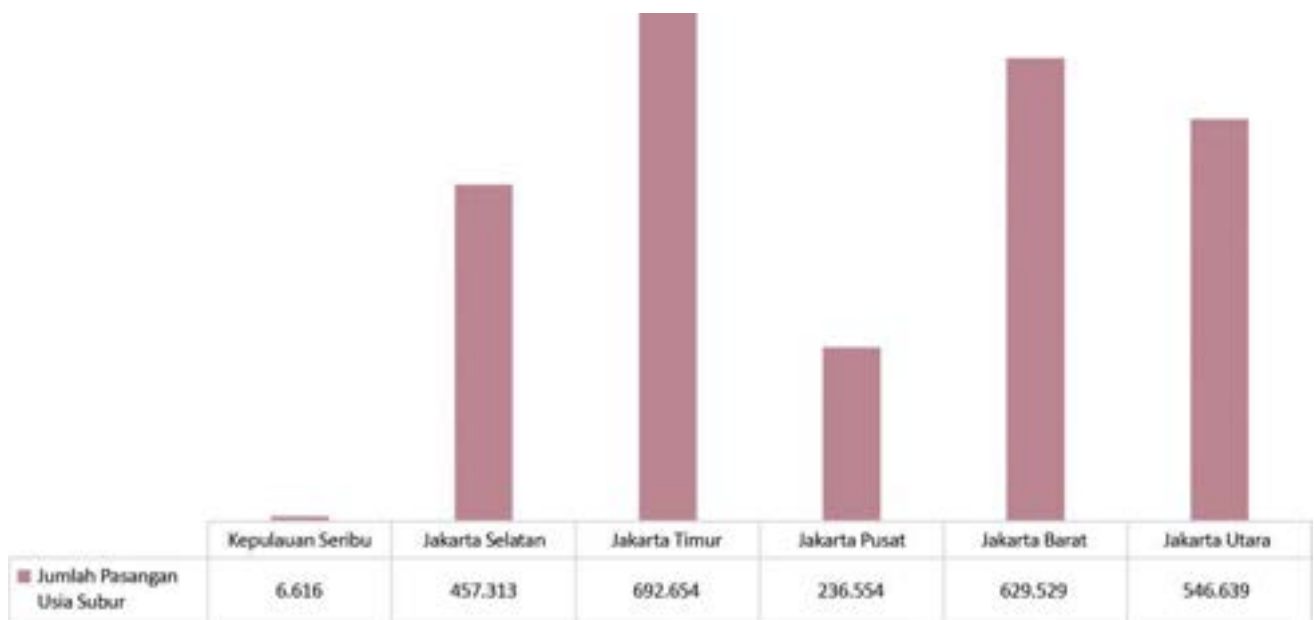
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) di DKI Jakarta pada tahun 2020 sebanyak 589 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah KKB pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebanyak 67 unit. Jumlah penambahan paling banyak terjadi di Jakarta Timur sebesar 34,81% atau sebanyak 47 unit. Sedangkan, terdapat dua wilayah yang tidak memiliki perubahan unit klinik dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu Kepulauan Seribu sebanyak tujuh unit dan Jakarta Barat sebanyak 93 unit.

3.13.3. Peserta Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaannya, sasaran pelaksanaan program KB yaitu pasangan usia subur (PUS). PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, biasanya peserta berumur 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB dibagi menjadi dua kategori yaitu peserta KB aktif dan peserta KB baru. Peserta KB aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Sedangkan, peserta KB baru adalah PUS yang baru pertama kali menggunakan alat atau cara kontrasepsi dan/atau PUS yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran. Salah satu tujuan dari program KB adalah mengatur angka kelahiran guna meningkatkan kesejahteraan berkeluarga. Sehingga, sasaran dari program KB adalah istri yang masih dalam usia produktif. Dengan fokus pada PUS, diharapkan program KB ini mampu dijalankan sesuai target dan efisien.

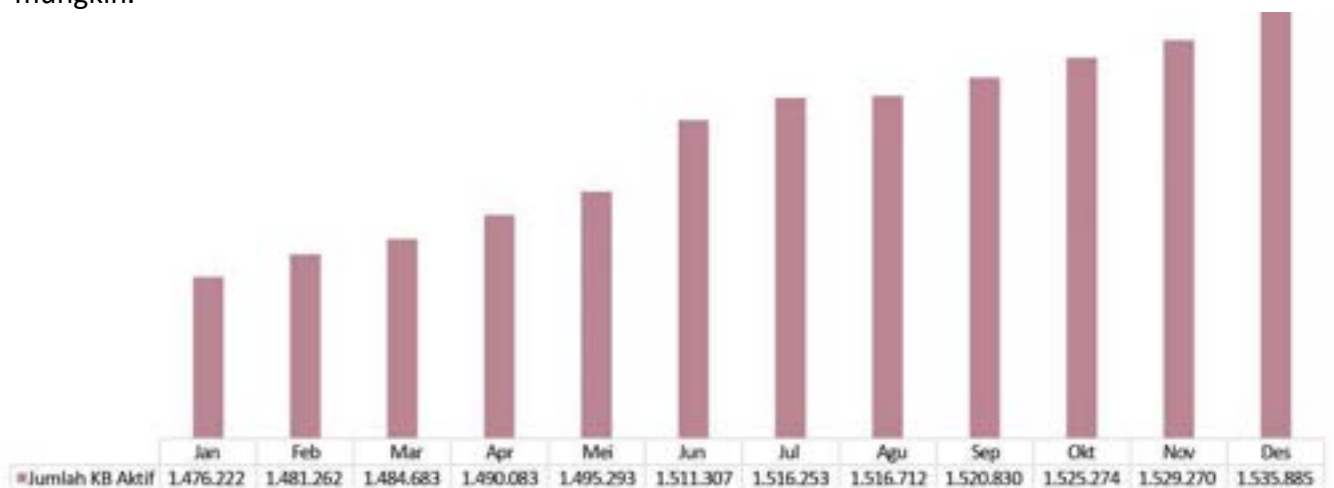




Gambar 3.112. Jumlah Pasangan Usia Subur Menurut Wilayah Administrasi di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

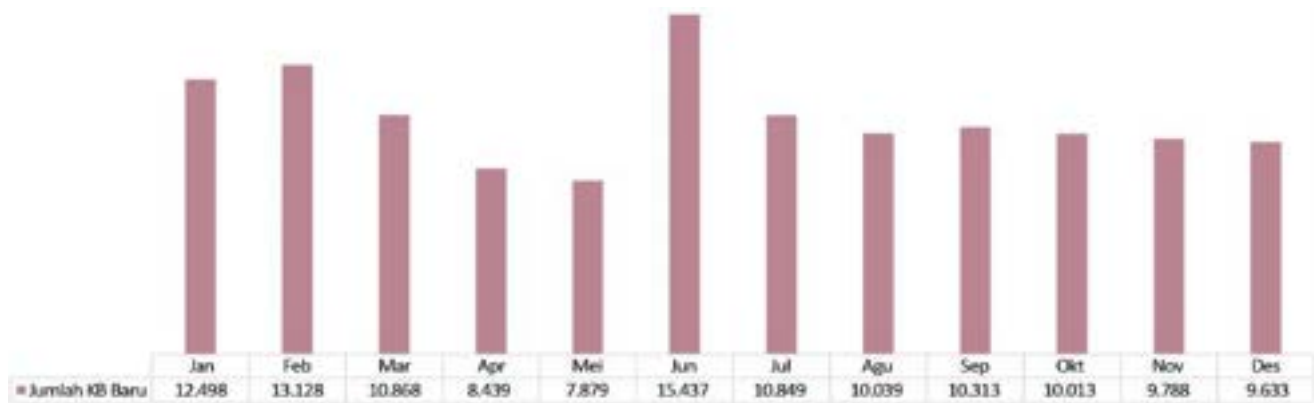
Berdasarkan data dari DPPAPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, jumlah PUS di DKI Jakarta sebanyak 2.569.305 pasangan. Jumlah ini meningkat 35.450 pasangan dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2019. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya karena PUS berhubungan dengan meningkatnya jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk yang datang dan pergi menuju dan dari DKI Jakarta.

Meskipun memiliki banyak tantangan dalam menjalankan program KB di DKI Jakarta, namun bukan berarti program KB tidak dijalankan. Salah satu alasan program KB perlu dijalankan dan diterapkan secara maksimal kepada penduduk adalah persiapan menghadapi bonus demografi. Bonus demografi yang diprediksi oleh BPS akan memuncak pada tahun 2030 ini, perlu dikontrol sedini mungkin.



Gambar 3.113. Jumlah Keluarga Berencana Aktif di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

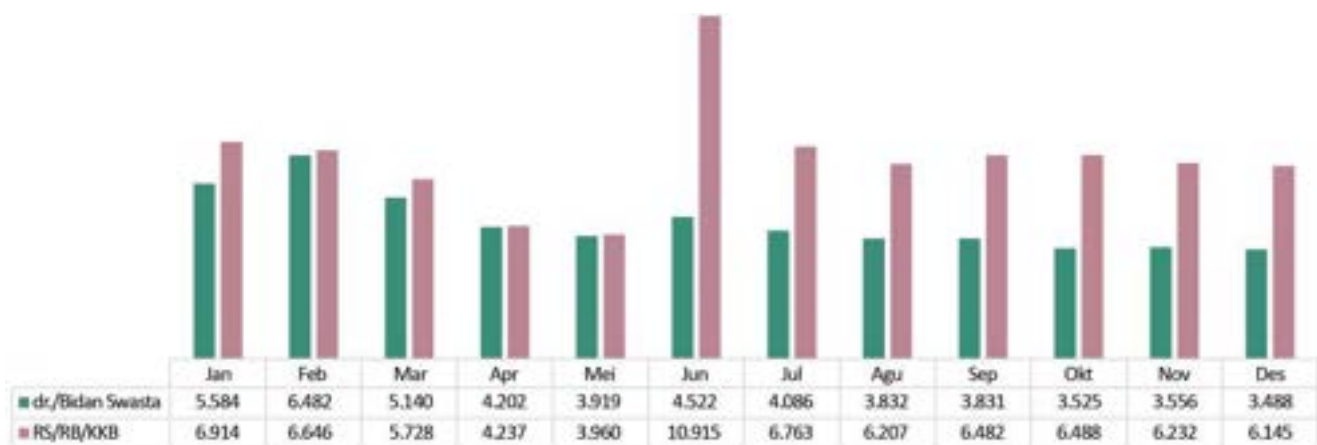
Jumlah peserta KB aktif di DKI Jakarta pada tahun 2019 sebanyak 17.616.695 orang. Sedangkan, pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 2,64% atau sebanyak 466.379 peserta menjadi 18.083.074 peserta. Jumlah paling banyak pada tahun 2020 terdapat pada bulan Desember sebanyak 1.535.885 peserta.



Gambar 3.114. Jumlah Keluarga Berencana Baru Selama di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Untuk peserta KB baru pada tahun 2019 sebanyak 171.353 peserta, sedangkan pada tahun 2020 jumlah ini menurun sebesar 24,79% atau sebanyak 42.469 peserta. Jumlah paling sedikit yang mengikuti KB baru pada tahun 2020 terdapat pada bulan Mei sebanyak 7.879 peserta. Sedangkan, jumlah peserta KB baru paling banyak tercatat pada bulan Juni yaitu 15.437 peserta.



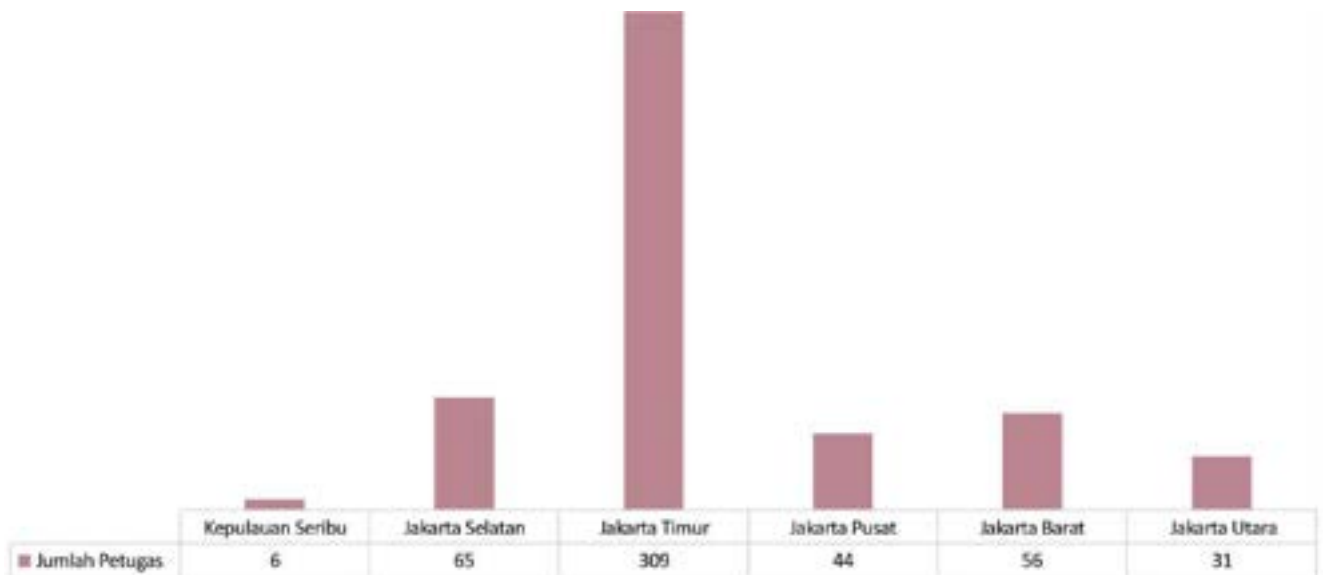
Gambar 3.115. Jumlah Peserta Keluarga Berencana Baru di DKI Jakarta Menurut Metode Penanganan Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Di DKI Jakarta metode penanganan KB dilakukan oleh lembaga mandiri dan pemerintah. Metode penanganan KB di lembaga mandiri biasanya ditangani oleh dokter atau bidan swasta, sedangkan metode penanganan KB di pemerintah ditangani oleh rumah sakit, rumah bersalin, atau klinik KB. Sepanjang tahun 2020, tercatat jumlah penanganan KB paling banyak ditangani oleh rumah sakit, rumah bersalin, atau klinik KB sebanyak 76.717 orang. Jumlah paling banyak terjadi pada bulan Juni yaitu 10.915 orang dan paling sedikit terjadi pada bulan Mei yaitu 3.960 orang. Sedangkan, untuk penanganan KB oleh dokter/bidan swasta sebanyak 52.167 orang. Jumlah paling banyak terjadi pada bulan Februari yaitu 6.482 orang dan paling sedikit terjadi pada bulan Desember yaitu 3.488 orang.

3.13.3. Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa

Sebagai bagian yang turun langsung ke lapangan, petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD) berperan penting dalam menentukan visi, misi, dan strategi besar untuk program KB nasional. PPKBD adalah petugas yang berasal dari daerah setempat, sehingga proses sosialisasi dan penyuluhan diharapkan mampu tepat sasaran dan efisien dalam penerapan ke masyarakat setempat.



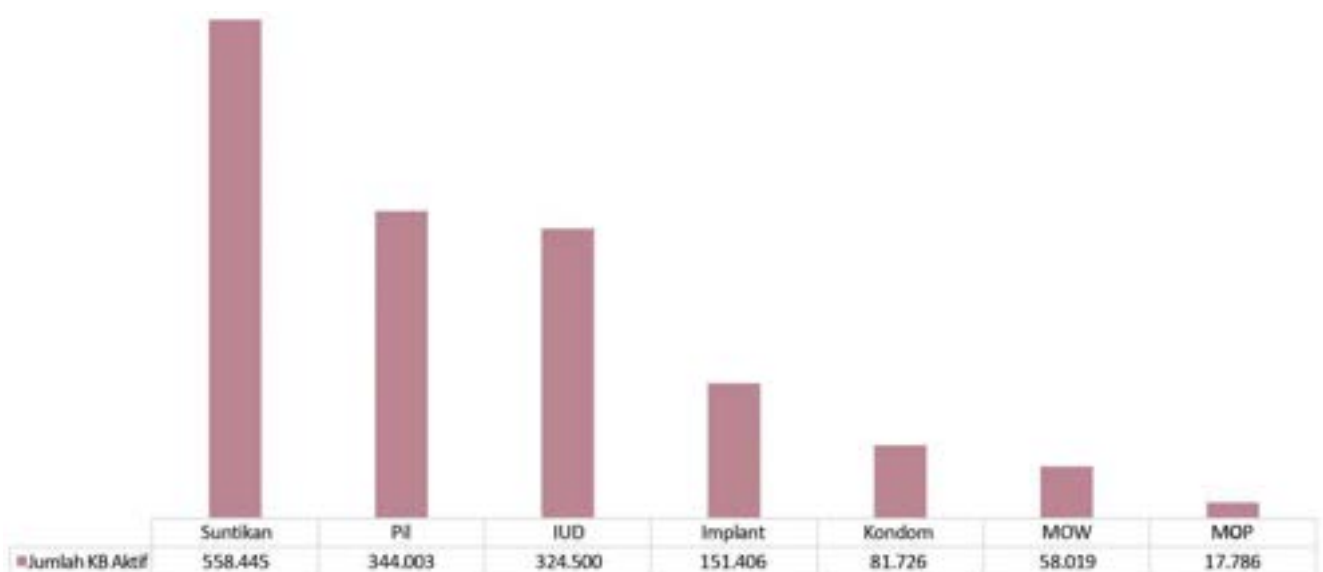
Gambar 3.116. Jumlah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa Berencana di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, jumlah petugas PPKBD di DKI Jakarta sebanyak 511 orang. Jumlah ini menurun signifikan jika dibandingkan dengan jumlah petugas pada tahun sebelumnya sebesar 80,59% dengan selisih sebanyak 2.123 orang. Penurunan yang signifikan ini disebabkan oleh perubahan definisi operasional PPKBD. Pada tahun 2020, PPKBD berdasarkan aturan sejumlah kelurahan di DKI Jakarta, kecuali wilayah Jakarta Timur yang masih menggunakan data sebelum perubahan, sedangkan pada tahun 2019 jumlah PPKBD berdasarkan jumlah RW yang ada.

3.13.4. Metode Kontrasepsi

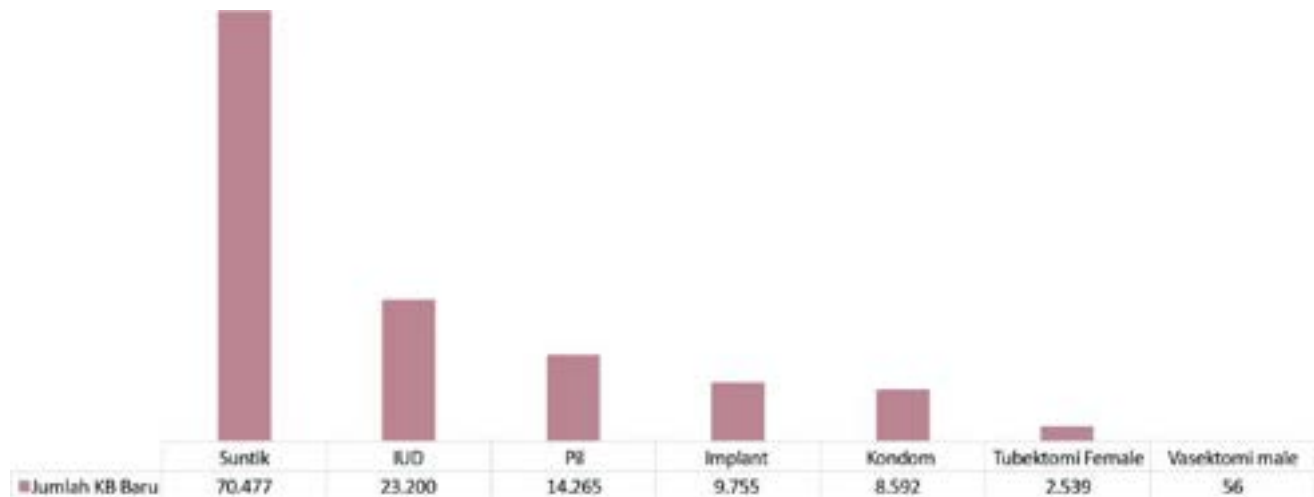
Terdapat beberapa macam metode kontrasepsi yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri pada usia produktif untuk menunda kehamilan. Namun, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga, setiap PUS perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih kontrasepsi yang paling efektif dan cocok untuk menunda kehamilannya.



Gambar 3.117. Jumlah Keluarga Berencana Aktif di DKI Jakarta Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pemakaian alat kontrasepsi yang diperuntukkan untuk menunda atau mencegah kehamilan merupakan wujud dari pelaksanaan program KB. Alat kontrasepsi yang digunakan oleh KB aktif di DKI Jakarta adalah implant, IUD, kondom, metode operasi pria (MOP), metode operasi wanita (MOW), pil, dan suntikan. Pada tahun 2020, alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh KB aktif adalah suntikan yaitu 558.445 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 5,32% atau sebanyak 28.188 orang. Sedangkan, jumlah penggunaan MOP paling rendah jika dibandingkan dengan metode lainnya yaitu 17.786 orang.



Gambar 3.118. Jumlah Keluarga Berencana Baru di DKI Jakarta Menurut Metode Kontrasepsi Tahun 2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, jumlah KB baru menurut metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh penduduk DKI Jakarta adalah suntikan sebanyak 70.477 orang. Pada tahun 2020, metode suntikan yang digunakan oleh peserta KB baru mengalami penurunan sebesar 25,9% atau sebanyak 24.667 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di urutan kedua, yang paling banyak digunakan sebagai alat kontrasepsi adalah metode IUD sebanyak 23.200 orang. Sedangkan, metode yang paling sedikit digunakan oleh para peserta KB baru pada tahun 2020 adalah vasektomi male yaitu 56 orang. Secara keseluruhan, terjadi penurunan jumlah pelaporan dari peserta KB pada semua metode kontrasepsi. Jumlah pelaporan peserta KB dari tahun 2019 ke tahun 2020 menurun sebesar 24,78% atau sebanyak 42.469 orang.

3.14. Perhubungan

Tingkat kemacetan di DKI Jakarta pada tahun 2017 menempati peringkat keempat sebagai kota termacet di dunia. Walau tingkat kemacetan pada tahun 2017 dinilai sangat tinggi, justru angka ini menurun signifikan sampai dengan tahun 2020. Penurunan yang signifikan ini membawa kota ini berada pada peringkat ke-31 sebagai kota termacet di dunia. Beberapa faktor yang membuat DKI Jakarta bisa menurunkan 25 poin hingga keluar dari peringkat 30 besar sebagai kota termacet di dunia seperti terintegrasinya angkutan umum yang memfasilitasi mobilitas penduduknya dan adanya peraturan yang membatasi penggunaan kendaraan bermotor seperti aturan ganjil genap. Aturan ganjil genap diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap.

3.14.1. Angkutan Umum

Kemacetan di DKI Jakarta merupakan fenomena yang dihadapi penduduk sehari-hari dan menjadi salah satu masalah yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan adalah dengan memperbaiki fasilitas angkutan umum sehingga penduduk DKI Jakarta mulai mempertimbangkan angkutan umum sebagai salah satu pilihan moda transportasi sehari-hari. Angkutan umum yang terintegrasi akan memangkas waktu transportasi dan biaya. Kenyamanan dan keamanan menjadi faktor pendukung yang mendorong penduduk untuk menggunakan angkutan umum.



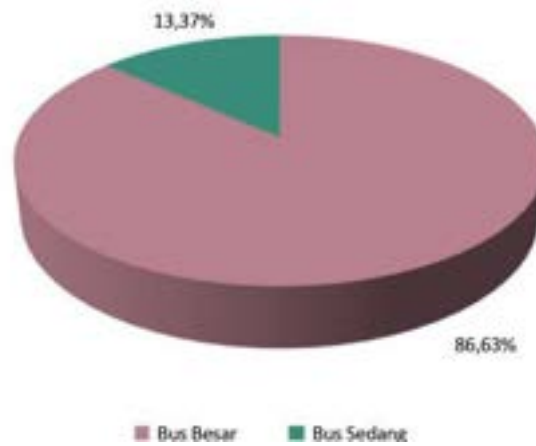
Gambar 3.119. Armada Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Armada angkutan umum yang beroperasi di DKI Jakarta dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bus kecil, bus sedang, dan bus besar. Bus kecil meliputi mikrolet, APB, dan KWK, sedangkan metromini masuk dalam kategori bus sedang. Jumlah bus kecil pada tahun 2020 sebanyak 3.830 unit yang kemudian dibagi menjadi tiga kategori lagi berdasarkan jenis angkutan yaitu 2.605 unit mikrolet, 577 unit angkutan pengganti bemo (APB), dan 648 koperasi wahana kalpika (KWK). Jumlah armada bus sedang pada tahun 2020 hanya terdapat tujuh unit saja untuk kategori metromini. Sedangkan, sudah tidak ada lagi kategori bus besar yang beroperasi di DKI Jakarta. Tidak adanya kategori bus jenis ini dapat disebabkan karena adanya peremajaan menjadi bus Transjakarta guna meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan pelayanan terhadap penumpang.

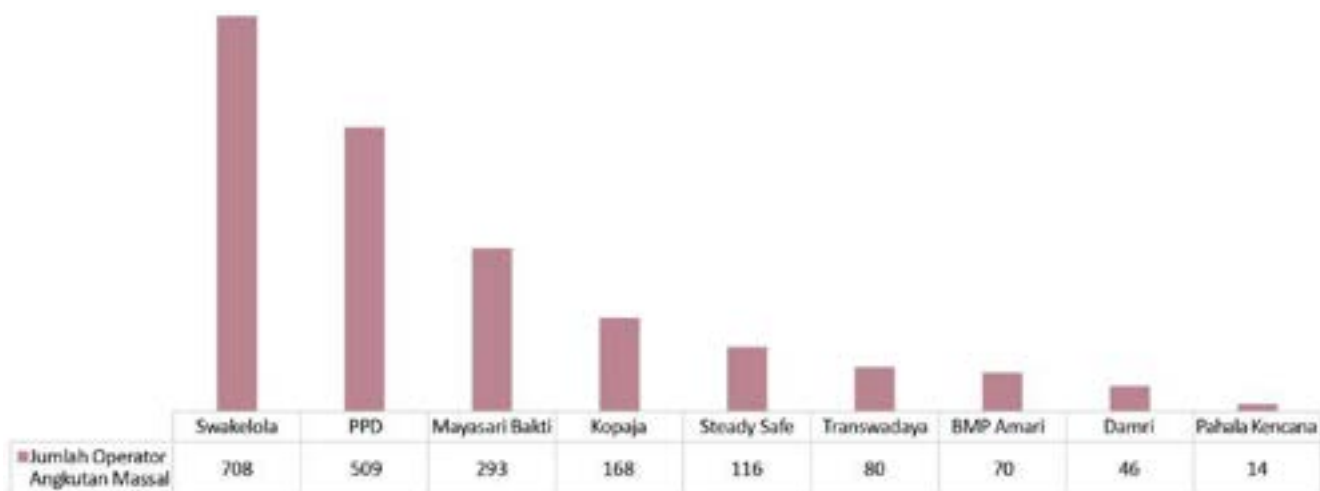
Jika dibandingkan dengan jumlah armada angkutan umum pada tahun 2019, terjadi penurunan jumlah armada khususnya di kategori bus kecil dan besar masing-masing sebanyak 2.547 dan 12 unit. Sementara, kategori bus sedang tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak tujuh unit.





Gambar 3.120. Jenis Bus Transjakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Menurut ukurannya, bus Transjakarta dibagi menjadi dua kategori yaitu bus besar dan bus sedang. Jumlah bus Transjakarta berukuran besar mendominasi dengan persentase sebesar 86,63%. Banyaknya jumlah Transjakarta kategori bus besar di DKI Jakarta adalah salah satu bentuk realisasi target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu capaian rata-rata satu juta penumpang Transjakarta per hari. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak trayek, armada, dan kapasitas angkut bus Transjakarta.



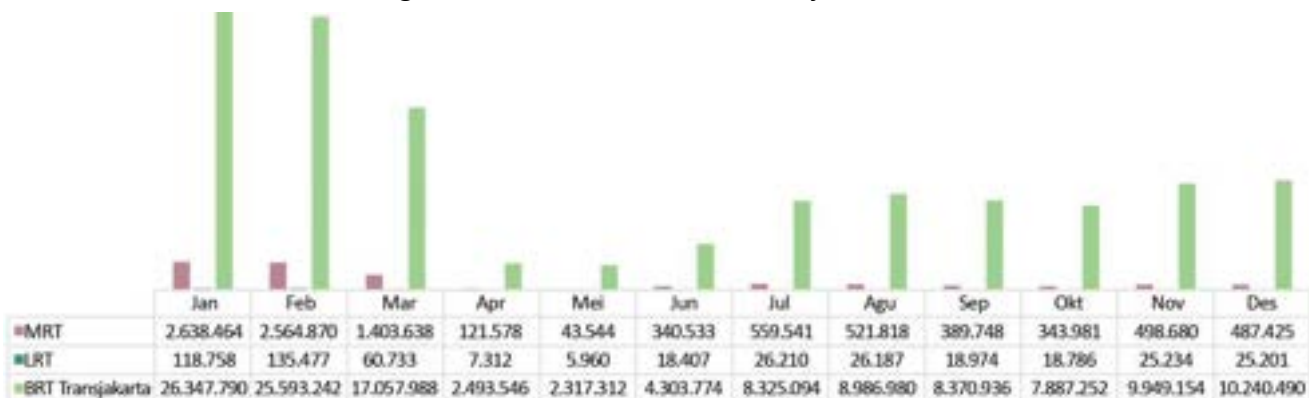
Gambar 3.121. Operator/Perusahaan Angkutan Massal Transjakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transjakarta-Busway Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa Badan Pengelola Transjakarta adalah lembaga non struktural pemerintah daerah di bidang pengelolaan angkutan umum busway yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah serta mempunyai tanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2020, terdapat sembilan operator yang mengoperasikan unit-unit bus yang dimiliki oleh Transjakarta meliputi Swakelola, PPD, Mayasari Bakti, Kopaja, Steady Safe, Transwadaya, BMP Amari, Damri, dan Pahala Kencana. Operator atau perusahaan yang paling banyak mengoperasikan angkutan massal di DKI Jakarta adalah Swakelola sebanyak 708 unit dan jumlah paling sedikit Pahala Kencana hanya 14 unit.



Gambar 3.122. Jumlah Angkutan Umum yang Telah Terintegrasi dengan JakLingko di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Jumlah angkutan umum yang sudah terintegrasi dengan JakLingko sebanyak 29.867 unit yang terdiri dari bus kecil (mikrotrans), bus sedang (minitrans), bus besar (Transjakarta), dan Transjakarta Cares yang dapat di akses di 12 rute. Jumlah yang paling banyak di antara empat jenis angkutan umum tersebut yaitu bus kecil dan besar masing-masing sebanyak 14.050 dan 13.319 unit. Rute paling banyak untuk jumlah angkutan umum yaitu rute B01 tujuan Cengkareng sebanyak 3.019 unit angkutan umum yang melalui 41 pemberhentian. Jumlah armada ini terdiri dari 1.755 bus kecil, 360 bus sedang, 1.782 bus besar, dan 22 Tansjakarta Cares. Kemudian untuk rute B02 tujuan Cikokol sebanyak 4.009 unit angkutan umum yang melalui sebanyak 32 pemberhentian. Jumlah armada pada rute B02 terdiri dari 1.845 bus kecil, 360 bus sedang, 1.782 bus besar, dan 22 Transjakarta Cares.

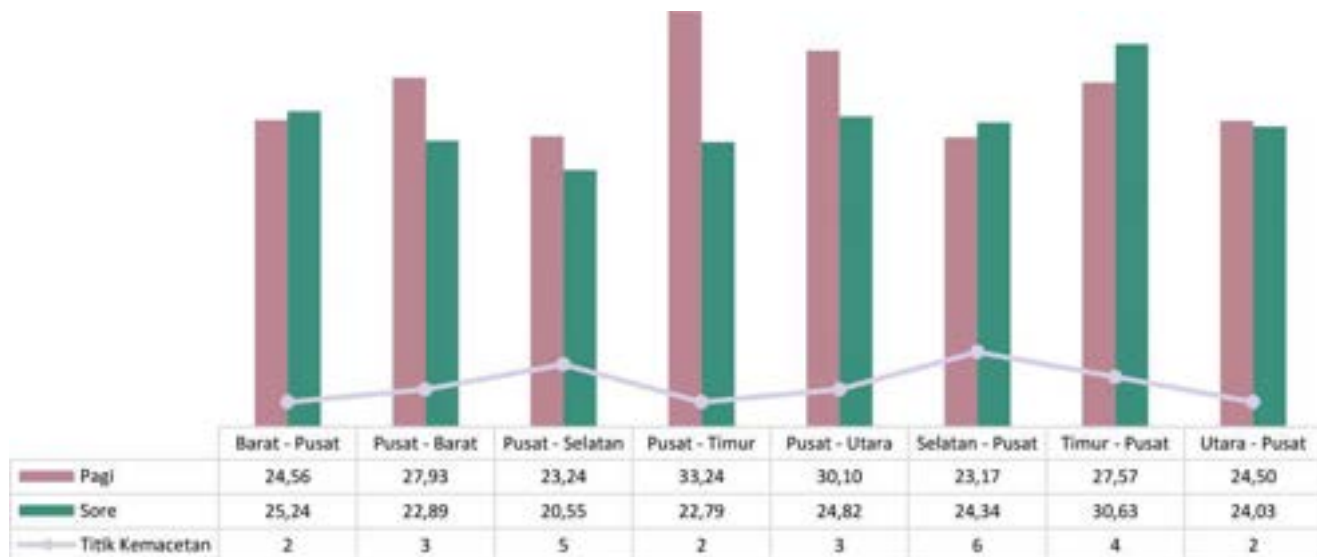


Gambar 3.123. Jumlah Penumpang Mass Rapid Transit, Light Rail Transit, dan Bus Rapid Transit Transjakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Media angkutan umum di DKI Jakarta tahun 2020 meliputi mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan bus rapid transit (BRT). Sepanjang tahun 2020, ketiga angkutan umum tersebut telah memfasilitasi mobilitas penumpang sebanyak 142.274.618 penumpang masing-masing sebanyak 131.873.559 penumpang BRT Transjakarta, 9.913.820 penumpang MRT, dan 487.239 penumpang LRT. Dari ketiga jenis moda transportasi tersebut, dapat dilihat bahwa moda transportasi yang paling banyak digunakan adalah BRT Transjakarta yang mencapai 92,68%.

Sebagaimana diketahui bahwa BRT Transjakarta merupakan moda transportasi bus pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan, sampai dengan September 2020 terdapat 13 koridor dengan panjang rute 251,20 kilometer yang dilengkapi dengan 260 halte²⁶. Pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2020, jumlah penumpang dari ketiga jenis transportasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan April sampai dengan akhir tahun 2020. Penurunan jumlah penumpang ini disebabkan oleh pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka memutus mata rantai Covid-19 di DKI Jakarta.

²⁶ PT Transportasi Jakarta (2016), "Layanan Bus", <https://transjakarta.co.id/produk-dan-layanan/layanan-bus/transjakarta/>, diakses pada 13 Juli 2021.



Gambar 3.124. Rekapitulasi Kecepatan Rata-Rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

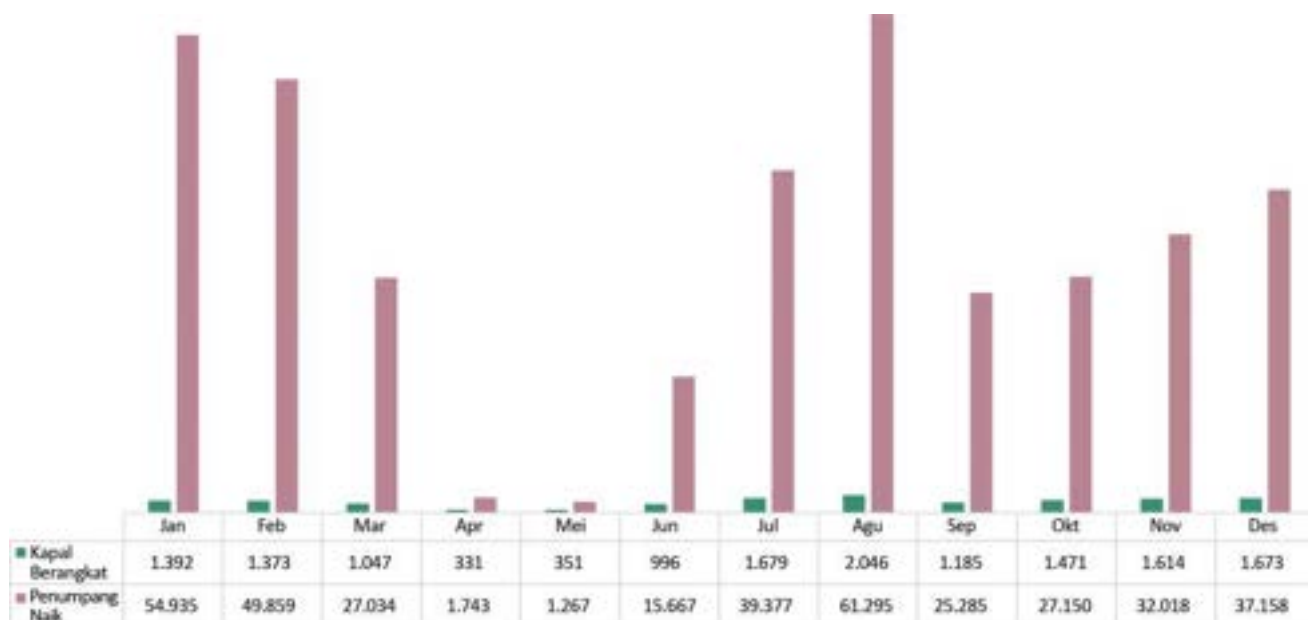
Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 41 koridor bus di DKI Jakarta. Laju bus pada koridor tersebut melambat terutama pada jam puncak kemacetan yaitu pagi dan sore hari. Kemacetan ini berada pada 27 titik yang tersebar di delapan titik koridor perjalanan bus. Titik kemacetan paling banyak berada dari arah Jakarta Selatan menuju Jakarta Pusat yaitu di Jalan Prof. Dr. Supomo, H.O.S. Cokroaminoto, Prapanca Raya, Fatmawati, Penjernihan 1, dan Asia Afrika dengan rata-rata kecepatan kendaraan pada pagi hari yaitu 23,17 km/jam dan sore hari yaitu 24,34 km/jam. Begitu juga dengan arah sebaliknya dari Jakarta Pusat menuju Jakarta Selatan yang terdapat lima titik kemacetan yaitu di Ciledug Raya, Iskandarsyah Raya, Panglima Polim, Pattimura, dan Menteng Raya dengan kecepatan rata-rata pada pagi hari yaitu 23,24 km/jam dan sore hari yaitu 20,55 km/jam.

Banyak manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat apabila memilih angkutan umum sebagai kendaraan untuk mobilitas sehari-hari. Penggunaan angkutan massal dapat mengurangi kemacetan, menekan polusi udara hingga menghemat pengeluaran biaya transportasi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus gencar melaksanakan pembangunan mode transportasi seperti penambahan Bus Transjakarta, pembangunan MRT, dan LRT. Dengan banyaknya pembangunan sarana transportasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diharapkan nantinya masyarakat akan lebih memilih angkutan umum daripada kendaraan pribadi.

3.14.2. Angkutan Perairan

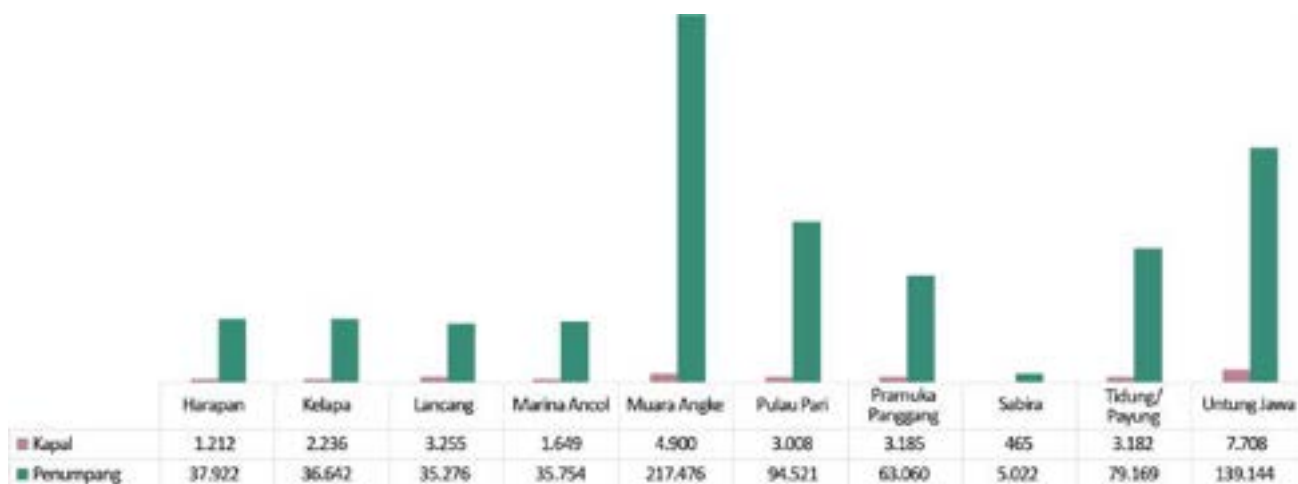
Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia masih mempertahankan dan mengembangkan moda transportasi air. Hal ini tercermin dengan pembangunan infrastruktur baik transportasi darat, udara, dan/atau air yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ketujuh yaitu Bapak Joko Widodo. Pada tahun 2020, melalui kebijakan yang dibuat oleh Bapak Joko Widodo, telah terbangun pelabuhan multifungsi pertama di Indonesia yang betrlokasi di Nusa Tenggara Timur. Selain sebagai tempat kapal ditambatkan, pelabuhan dan dermaga juga dapat membantu meningkatkan pariwisata di suatu daerah termasuk Kepulauan Seribu.





Gambar 3.125. Jumlah Kapal Berangkat dan Penumpang Naik ke Kepulauan Seribu Tahun 2020
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penumpang kapal yang menuju Kepulauan Seribu selama tahun 2020 sebanyak 372.788 orang dan kapal yang berangkat sebanyak 15.158 kapal. Jumlah penumpang paling banyak berada pada bulan Januari yaitu 54.935 orang dan bulan Agustus yaitu 61.295 orang. Melonjaknya jumlah penumpang yang terjadi pada bulan Januari dan Agustus disebabkan oleh libur panjang sekolah dan perguruan tinggi. Sehingga, masyarakat memanfaatkan libur panjang sebagai momen terbaik untuk pergi menuju Kepulauan Seribu.



Gambar 3.126. Jumlah Penumpang Kapal di Kepulauan Seribu Berdasarkan Tujuan Pulau yang Dikunjungi Tahun 2020
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Muara Angke menjadi destinasi favorit yang paling banyak dikunjungi dengan 217.476 penumpang atau setara dengan 4.900 kapal. Pulau Muara Angke sendiri merupakan titik poin untuk menuju pulau-pulau kecil yang berada di Kepulauan Seribu seperti Pulau Harapan dan Tidung. Sedangkan, pulau kedua yang paling banyak dikunjungi yaitu Pulau Untung Jawa sebanyak 139.144 orang dengan jumlah kapal yang mengangkut penumpang sebanyak 7.708 kapal.



Gambar 3.127. Jumlah Kapal Tiba dan Berangkat di Kepulauan Seribu Tahun 2020

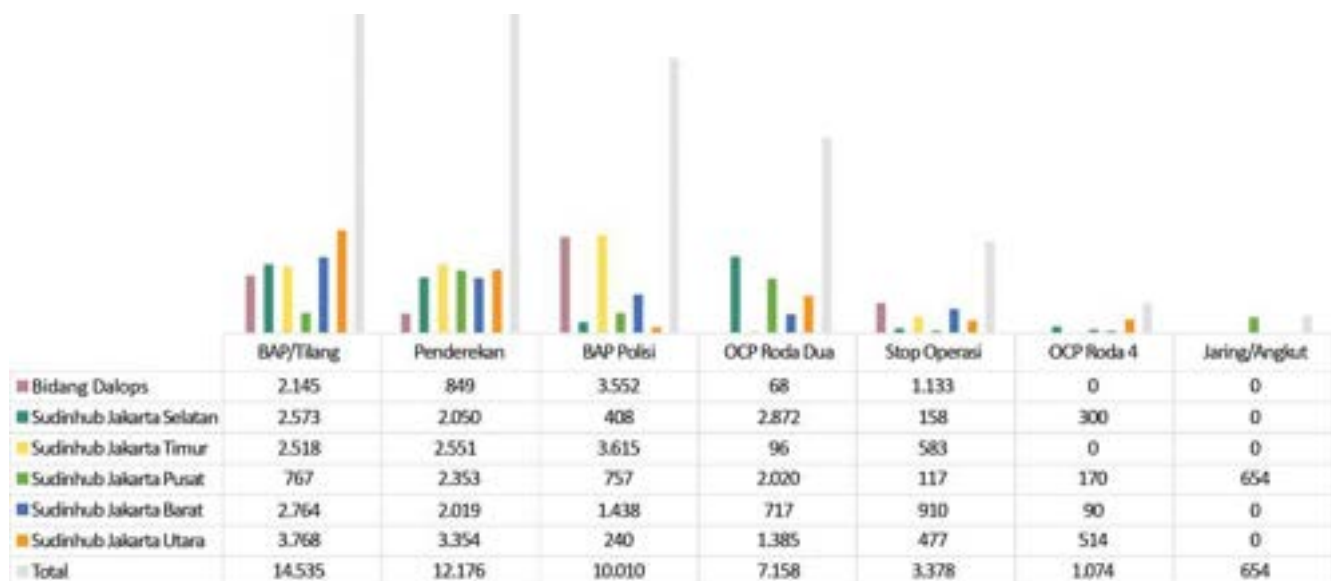
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Kapal kedatangan dan keberangkatan memiliki jumlah yang berbeda. Pada tahun 2020, jumlah kapal berangkat sebanyak 15.158 dan kapal tiba sebanyak 15.642. Walau memiliki selisih sebanyak 484, hal ini dinilai wajar karena dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah mengambil penumpang dari beberapa pulau dan diangkut dalam satu unit kapal.

Dari tahun ke tahun, wisata kepulauan seribu masih menjadi salah satu favorit masyarakat ibu kota. Oleh karena itu, kebutuhan akan moda transportasi air juga akan meningkat. Lalu, demi terwujudnya keselarasan antar semua wilayah di Provinsi DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus meningkatkan sarana dan prasarana transportasi air, salah satunya adalah dengan menambahkan kapal di Kepulauan Seribu. Penambahan kapal bertujuan agar mobilitas masyarakat dari dan ke Kepulauan Seribu tetap berjalan dengan lancar.

3.14.3. Penindakan Penegakan Hukum terhadap Kendaraan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi bahwa pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan serta penegakkan hukum terhadap kendaraan yang berlalu lintas di DKI Jakarta. Adapun penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dapat dilakukan seperti penguncian ban kendaraan, pemindahan kendaraan, dan pencabutan pentil kendaraan.



Gambar 3.128. Bentuk Penindakan Penegakan Hukum terhadap Kendaraan di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Hasil Penertiban Lintas Jaya Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta yang dimulai dari 2 Januari 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 tercatat sebanyak 48.985 pelanggaran yang ditindaklanjuti baik oleh Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Provinsi DKI Jakarta di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Bidang Pengendalian Operasional (Dalops). Ada sebanyak delapan bentuk penindakan penegakan hukum yang dilakukan yaitu berita acara pemeriksaan (BAP) atau tilang, penderekan, BAP Polisi, operasi cabut pentil (OCP) roda 2, stop operasi, OCP roda 4, jaring/angkut, dan stop operasi Polisi (tidak ada jumlah kasus). Jumlah penindakan paling banyak yaitu BAP/tilang dengan 14.535 kasus oleh Sudinhub Jakarta Utara sebanyak 3.768 kasus. Penanganan kasus pelanggaran paling banyak dilakukan oleh Sudinhub Jakarta Timur sebanyak 9.363 kasus, sedangkan total kasus pelanggaran paling sedikit dilakukan oleh Sudinhub Jakarta Pusat sebanyak 6.838 kasus.

3.15. Komunikasi dan Informatika

Semakin berjalannya waktu, teknologi juga semakin maju. Sehingga, fenomena ini memaksa orang-orang untuk ikut belajar mengikuti kemajuan teknologi. Komunikasi kepada orang yang jauh awalnya dilakukan menggunakan surat menyurat. Semakin berkembangnya zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi, komunikasi antar manusia dilakukan menggunakan telepon, sms, dan internet. Walau demikian, terdapat beberapa lembaga, instansi ataupun perusahaan tidak serta merta meninggalkan metode komunikasi melalui surat menyurat seperti yang dilakukan dalam lembaga pemerintahan.

3.15.1. Kantor Pos Indonesia

Pada saat Belanda masih menjajah Indonesia, perihal surat menyurat penduduk maupun informasi penting untuk dan dari Belanda dilakukan melalui Pos Indonesia. Pada 26 Agustus 1746, Jenderal G.W Baron van Imhoff mendirikan Kantor Pos Indonesia di Batavia atau yang kini dikenal dengan sebutan Jakarta²⁷. Pada awalnya, tugas dari Kantor Pos Indonesia adalah menjamin keamanan dalam pengiriman surat saja, namun seiring dengan berjalannya waktu Kantor Pos Indonesia juga berkembang mengikuti kebutuhan rakyat Indonesia. Kini tidak hanya mengantarkan surat-surat berperangko saja, Kantor Pos Indonesia juga melayani berbagai keperluan seperti pengiriman barang, uang, dan pembayaran tagihan.



²⁷ PT. Pos Indonesia (n.d.), "Sejarah Pos", <https://www.posindonesia.co.id/en/content/sejarah-pos>, diakses pada 13 Juli 2021.



Gambar 3.129. Jumlah Kantor Pos Pembantu di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

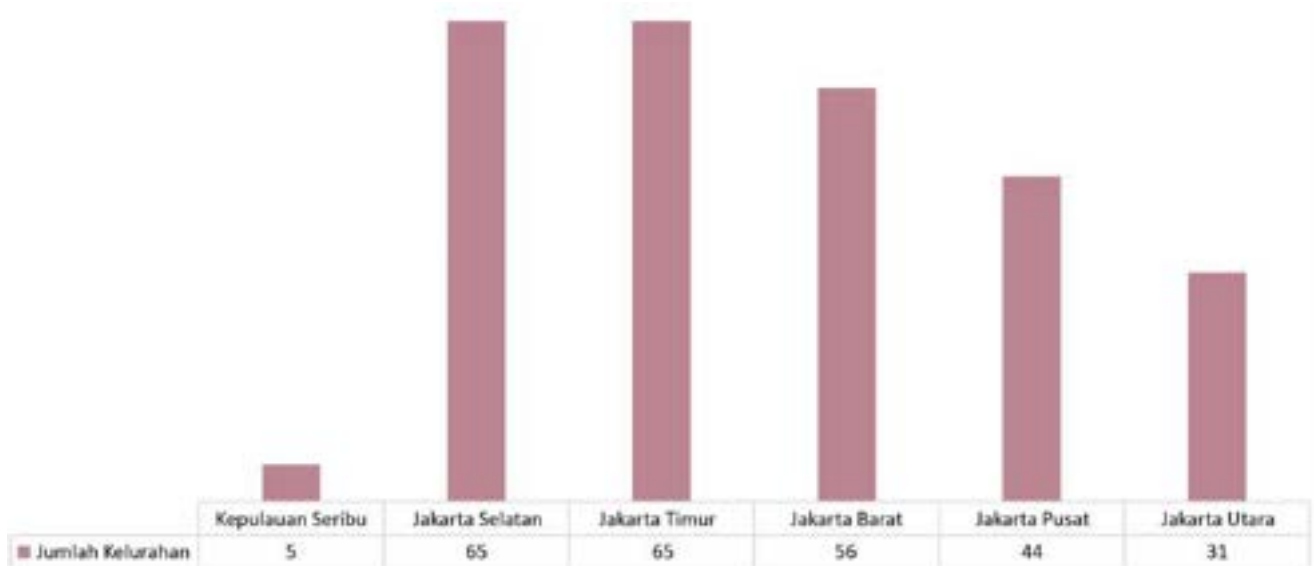
Sumber: PT Pos Indonesia

Kantor Pos Regional IV merupakan kantor pos yang berada di DKI Jakarta. Kantor ini berlokasi di Jalan Kesenian Nomor 2, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10004. Pada tahun 2020, PT Pos Indonesia mencatat bahwa DKI Jakarta memiliki lima kantor pos besar yang berfungsi sebagai kantor pos pemeriksa di masing-masing wilayah, kecuali Kepulauan Seribu. Sementara itu, kantor pos di DKI Jakarta untuk kategori golongan atau pembantu di setiap wilayah berjumlah 155 kantor. Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat merupakan wilayah administrasi dengan kantor golongan/pembantu terbanyak yaitu 36 kantor, sebaliknya Jakarta Utara merupakan wilayah administrasi dengan jumlah kantor golongan/pembantu paling sedikit di DKI Jakarta yaitu 18 kantor.

3.15.2. Sambungan Telepon, Internet, dan Telepon Seluler

Pada tahun 2020, industri telekomunikasi sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pelanggan dan pengguna internet. Berkomunikasi melalui telepon dan media jejaring sosial dengan internet sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat khususnya di DKI Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika hampir semua kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta sebagai penerima sinyal internet telepon seluler.





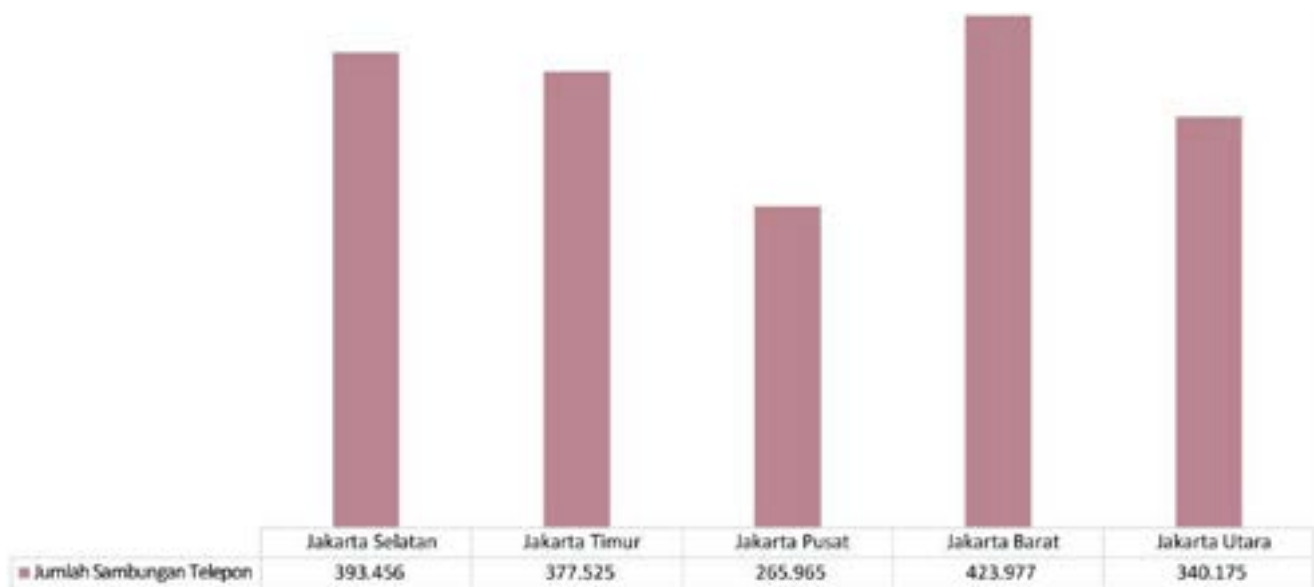
Gambar 3.130. Jumlah Kelurahan di DKI Jakarta Penerima Sinyal Internet Telepon Seluler Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, data dari Pendataan Potensi Desa oleh BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sebanyak 266 kelurahan sudah dapat mengakses sinyal internet dan telepon seluler. Data ini berkurang satu kelurahan yang tidak mendapatkan sinyal internet yaitu di Kepulauan Seribu. Hal ini dapat disebabkan karena letak geografis yang kurang mendukung. Jika melihat data dari pendataan potensi desa BPS Provinsi DKI Jakarta, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh kelurahan di DKI Jakarta kecuali satu kelurahan di Kepulauan Seribu sudah mendapatkan sinyal internet dan telepon seluler.



Gambar 3.131. Jenis Sinyal Internet Telepon Seluler di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jenis jaringan internet yang banyak digunakan pada 2020 adalah 4G/LTE, 3G/H/H+/EVDO, dan 2,5G/E/GPRS. Sebanyak 264 kelurahan di DKI Jakarta sudah mendapatkan dan mengakses sinyal 4G/LTE. Sedangkan, hanya dua kelurahan yang masih menggunakan sinyal jaringan 3G/H/H+/EVDO dan 2,5G/E/GPRS, kedua kelurahan tersebut berada di Jakarta Timur. Di DKI Jakarta, jangkauan sinyal internet telepon seluler semakin meluas dan merata. Hal ini dapat dilihat dari pengguna jaringan 3G/H/H+/EVDO yang berkurang sebanyak 14 kelurahan dari tahun 2019. Hal ini didukung dengan bertambahnya pengguna jaringan 4G/LTE yang bertambah sebanyak 12 kelurahan pada tahun 2020.

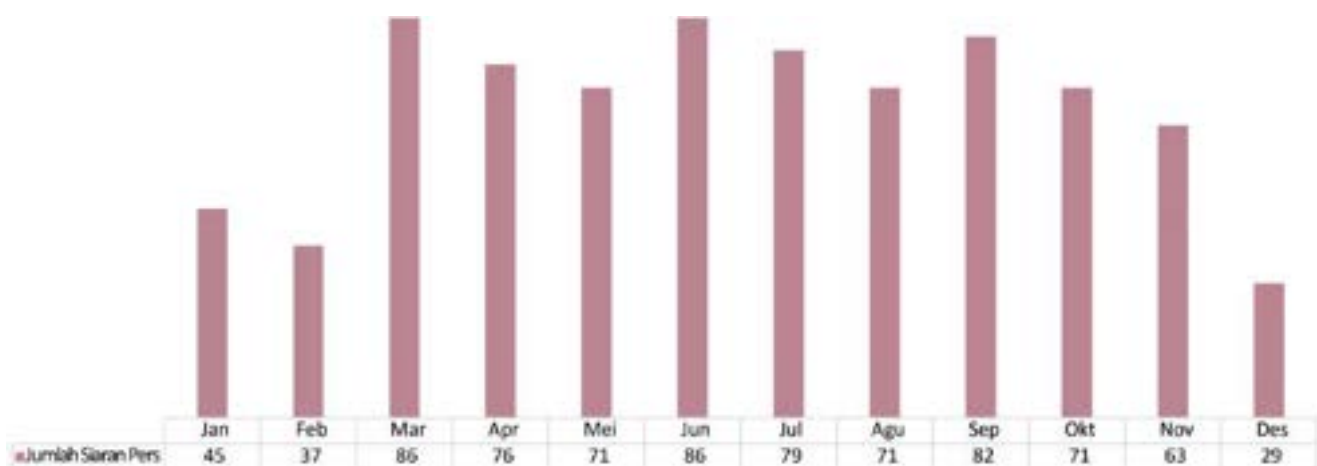


Gambar 3.132. Jumlah Sambungan Telepon di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Divisi Telkom Barat

Jumlah pelanggan telepon seluler di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berdampak pada pelanggan telepon tetap nirkabel yang mengalami penurunan pada tahun 2020. Data dari PT Telkom tahun 2020 menunjukkan penurunan pengguna layanan telepon tetap nirkabel sebanyak 102.000 pengguna dari tahun sebelumnya. Penurunan pelanggan layanan sambungan telepon tetap nirkabel paling banyak berada di Jakarta Selatan yaitu 32.668 pengguna dan paling sedikit berada di Jakarta Timur yaitu 3.110 pengguna.

3.15.3. Siaran Pers

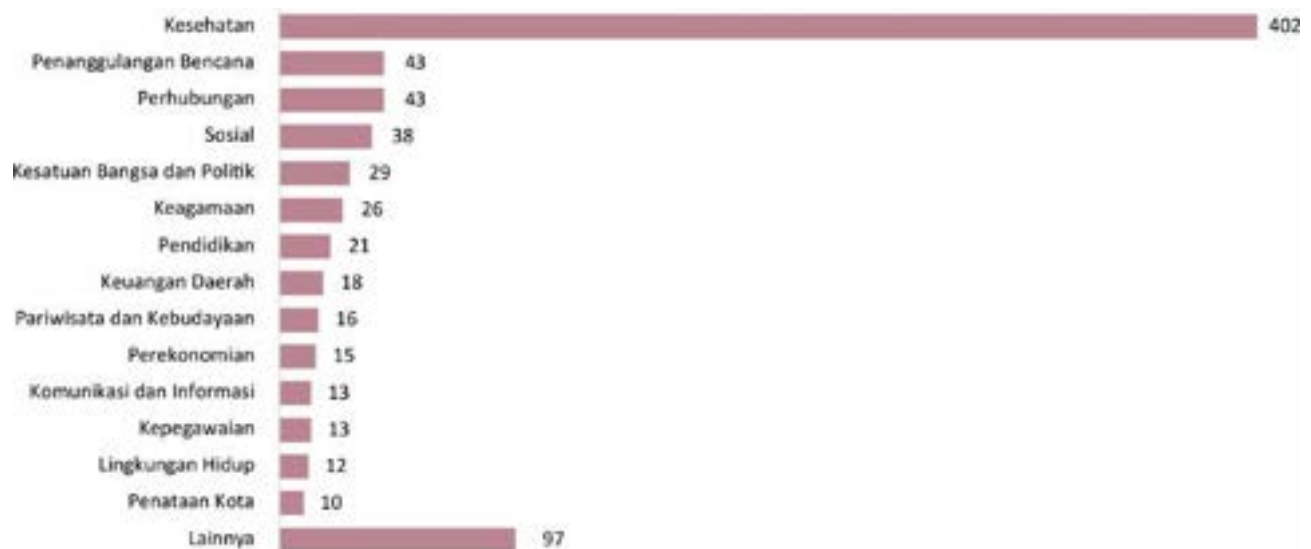
Siaran pers (*press conference*) adalah kegiatan penyampaian informasi tentang suatu peristiwa melalui media kepada publik. Disrupsi digital yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 pada Maret 2020 telah mengubah cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyampaikan informasi kepada publik. Siaran pers yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka (*offline*) kini menggunakan media sosial sebagai salah satu platform penyampaian informasi kepada masyarakat.



Gambar 3.133. Jumlah Siaran Pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2020 melaksanakan sebanyak 796 siaran pers. Siaran pers paling sering dilakukan pada bulan Maret dan Juni 2020 yaitu sebanyak 86 siaran pers. Siaran pers

pada kedua bulan ini banyak membahas topik yang berkaitan dengan kesehatan dan penanggulangan bencana. Adapun siaran pers pada Maret 2020 mengenai topik kesehatan seperti pembentukan tim tanggap Covid-19. Judul siaran pers yang berhubungan dengan Covid-19 ini berkaitan erat dengan masuknya Covid-19 di DKI Jakarta. Selain itu, judul siaran pers dengan topik penanggulangan bencana seperti rekapitulasi wilayah terdampak genangan, pompa air, dan kebutuhan bahan pokok selama terjadi bencana. Sedangkan, siaran pers paling sedikit berada pada Desember 2020 yaitu 29 siaran pers. Pada bulan Desember, siaran pers kebanyakan membahas tentang topik kesehatan seperti berita terkait konfirmasi kasus positif dan perkembangan Covid-19 di DKI Jakarta.



Gambar 3.134. Topik Siaran Pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Diskominfo DKI Jakarta mencatat sejak pertama kali pengumuman terkait masuknya pandemi Covid-19, sebesar 50,50% dari siaran pers yang dilaksanakan membahas topik mengenai kesehatan. Topik pembahasan siaran pers tentang kesehatan meliputi penanggulangan, antisipasi, dan informasi yang terkait pandemi. Jumlah siaran pers tentang kesehatan disusul oleh topik tentang penanggulangan bencana dan perhubungan sebanyak 43 siaran. Pada tahun 2020, siaran pers dengan topik bencana alam seperti curah hujan yang ekstrem yang membutuhkan penanganan khusus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun yang sama, siaran pers dengan topik perhubungan membahas tentang himbauan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan masker di transportasi umum.

3.15.4. Jakwifi

Jakwifi adalah program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan Wi-Fi gratis di wilayah-wilayah DKI Jakarta yang padat penduduk dan tidak terjangkau oleh layanan internet. JakWifi merupakan langkah awal untuk menjawab permasalahan akses internet di DKI Jakarta. JakWifi berupaya dalam menyelesaikan kesenjangan infrastruktur digital yang ditujukan khusus pada warga DKI Jakarta yang tidak mampu dan bermukim di wilayah padat. Program ini dijalankan melalui tiga cara yaitu pengadaan jaringan internet, pembangunan titik akses layanan internet gratis dengan mengajak lembaga swasta dalam program *corporate social responsibility* (CSR), dan kolaborasi dengan penyedia akses internet gratis.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk DKI Jakarta pada Maret 2020 telah mengubah pola hidup masyarakat pada umumnya. Berbagai kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk interaksi langsung, kini dibatasi atau bahkan dialihkan melalui dalam jaringan (daring). Salah satu contoh adaptasi yang dilakukan di dunia pekerjaan adalah *work from home* (WFH) atau bekerja dari rumah. Selain itu juga, dunia pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang mengharuskan siswa dan mahasiswa belajar dari rumah, dan tidak melakukan kegiatan belajar di sekolah dan kampus. Perubahan dari interaksi langsung menjadi daring melahirkan masalah baru, yaitu ketidakmerataan dan tingginya penggunaan akses internet. Banyak masyarakat yang belum memiliki akses internet yang merata dan memadai, sehingga pekerjaan maupun pendidikan yang dilakukan secara daring tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon kondisi ini dengan meluncurkan akses internet gratis yang disebut JakWifi.

Walaupun pengguna internet didominasi oleh pelajar dan pekerja, namun target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih dari itu. Digital advance city atau kota maju berbasis digital adalah target jangka panjang yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Target kota maju berbasis digital ini memacu warga DKI Jakarta untuk mulai beradaptasi dengan cara mengubah gaya berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain menggunakan internet. Dengan JakWifi sebagai langkah awal dari digital advance city, akses internet akan membantu lebih dari satu juta siswa, 30 ribu guru, usaha rumahan berbasis e-commerce, akses menuju layanan pemerintah provinsi untuk lebih dari 10 juta warga, dan media komunikasi warga. Hal ini berkaitan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait perencanaan transformasi digital yang disampaikan pada 3 Agustus 2020. Adapun lima poin yang disampaikan yaitu perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, persiapan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital, dan regulasi serta skema-skema pendanaan transformasi digital yang perlu dipersiapkan.



Gambar 3.135. JakWifi di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, jumlah lokasi JakWifi sebanyak 2.061 lokasi di DKI Jakarta. Dilihat menurut wilayah administrasi, JakWifi paling banyak berada di Jakarta Selatan yaitu 531 titik, sedangkan JakWifi paling sedikit berada di Kepulauan Seribu yaitu 26 titik.



Gambar 3.136. JakWifi di DKI Jakarta Menurut Gedung Tahun 2020

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta

Ketersediaan JakWifi di DKI Jakarta dapat berada di sekolah, RPTRA, taman, kantor walikota, Kepulauan Seribu, kecamatan, kelurahan, dan kawasan permukiman terpadu. Dari berbagai lokasi yang ada, JakWifi paling banyak tersedia di kawasan permukiman terpadu yaitu 1.183 titik, sedangkan kantor walikota merupakan lokasi dengan JakWifi paling sedikit yaitu 14 titik.

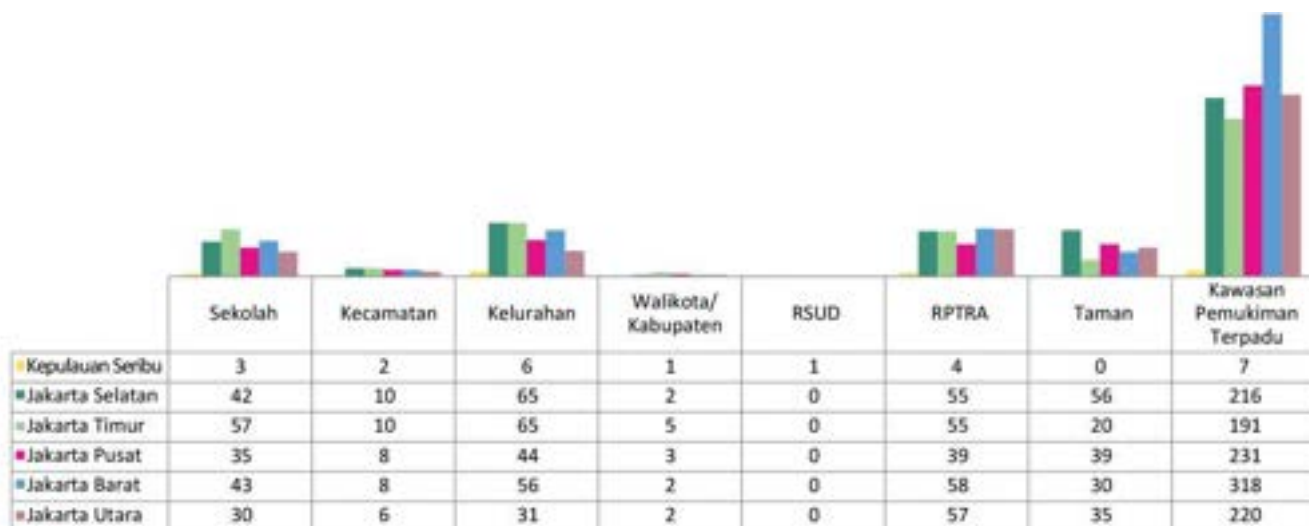


Gambar 3.137. Titik Akses JakWifi di DKI Jakarta Menurut Skema Penyediaan Tahun 2020

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta

Jumlah titik akses JakWifi di DKI Jakarta yaitu 6.230 titik. Sebesar 58,59% atau sebanyak 3.650 titik akses adalah JakWifi kolaborasi, nilai ini disusul oleh JakWifi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan CSR masing-masing sebanyak 2.168 dan 412 titik akses JakWifi.





Gambar 3.138. Titik Akses JakWifi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta

Jumlah titik akses JakWifi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2.168 titik. Titik akses JakWifi Pemprov DKI Jakarta paling banyak berada di kawasan permukiman terpadu yaitu 1.183 titik. Menurut wilayah administrasi, JakWifi Pemprov DKI Jakarta di kawasan permukiman terpadu paling banyak berada di Jakarta Barat yaitu 318 titik dan titik JakWifi paling sedikit berada di Kepulauan Seribu yaitu tujuh titik.



Gambar 3.139. Titik Akses JakWifi *Corporate Social Responsibility* di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta

Jumlah titik akses JakWifi CSR di DKI Jakarta sebanyak 412 titik. Dilihat menurut wilayah administrasi, titik akses JakWifi CSR paling banyak berada di Jakarta Barat yaitu 121 titik, sedangkan titik akses JakWifi CSR paling sedikit berada di Kepulauan Seribu yaitu 17 titik.





Gambar 3.140. Titik Akses JakWifi Kolaborasi di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta

Jumlah titik akses JakWifi Kolaborasi di DKI Jakarta sebanyak 3.650 titik. Dilihat menurut wilayah administrasi, titik akses JakWifi Kolaborasi paling banyak berada di Jakarta Pusat yaitu 1.332 titik, sedangkan tidak ada satupun titik akses JakWifi Kolaborasi di Kepulauan Seribu.

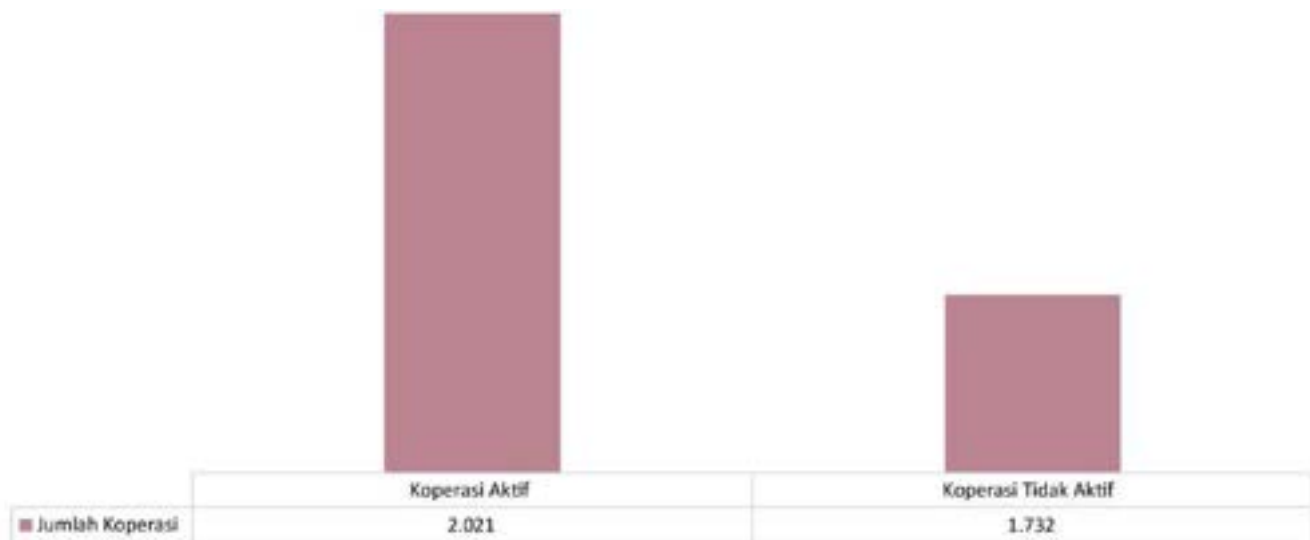
3.16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu fungsi dari koperasi adalah keikutsertaan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, Jakpreneur yang menjadi salah satu kegiatan strategis daerah (KSD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta muncul sebagai salah satu poros baru dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Berbeda dengan koperasi, Jakpreneur fokus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sedang mengembangkan bisnisnya secara mandiri. Sehingga, dengan adanya bantuan dari pemerintah diharapkan roda perekonomian dari sektor UMKM dapat berputar lebih cepat.

3.16.1. Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi menjelaskan bahwa koperasi aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Sedangkan, koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan RAT dalam tiga tahun berturut-turut dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.





Gambar 3.141. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Jumlah koperasi binaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin bertambah jika dilihat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, koperasi di DKI Jakarta berjumlah 3.465 unit dengan koperasi aktif sebanyak 2.411 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 1.054 unit. Kemudian pada tahun 2019, jumlah koperasi aktif menurun sebanyak 402 unit, sedangkan jumlah koperasi tidak aktif meningkat sebanyak 635 unit. Pada tahun 2020, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 3.753 koperasi di DKI Jakarta dengan koperasi aktif sebanyak 2.021 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 1.732 unit. Pada tahun yang sama, baik koperasi aktif maupun tidak aktif mengalami peningkatan masing-masing sebanyak 12 dan 43 koperasi.



Gambar 3.142. Jumlah Koperasi di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 3.755 koperasi pada tahun 2020. Jumlah koperasi di DKI Jakarta paling banyak berada di Jakarta Selatan yaitu 1.017 unit dan paling sedikit berada di Kepulauan Seribu yaitu 31 unit. Koperasi aktif paling banyak berada di Jakarta Selatan yaitu 634 unit, sedangkan koperasi tidak aktif paling banyak berada di Jakarta Timur yaitu 429 unit koperasi.



3.16.2. Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi dimana keanggotaannya dicatat dalam buku daftar anggota²⁸. Koperasi dapat digunakan sebagai wadah bagi anggotanya untuk mengembangkan potensi dan ekonomi. Menjadi anggota koperasi merupakan keinginan individu tanpa paksaan dikarenakan keterbukaan adalah asas yang mendasari koperasi.

Seiring bertambahnya jumlah koperasi di DKI Jakarta dalam tiga tahun terakhir, hal tersebut berdampak langsung pada jumlah anggota koperasi yang terdaftar. Kesadaran masyarakat untuk melatih diri akan ilmu berorganisasi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya jumlah masyarakat yang mendaftar sebagai anggota koperasi. Selain itu, koperasi sebagai lembaga simpan pinjam dengan bunga pinjaman rendah juga memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan koperasi. Pada tahun 2018, jumlah anggota koperasi di DKI Jakarta sebanyak 304.592 anggota, jumlah ini bertambah sebesar 14,44% atau sebanyak 44.006 anggota pada tahun 2019. Pertambahan jumlah anggota koperasi juga terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 23,13% atau sebanyak 80.645 anggota. Jika dilihat dalam rentang tiga tahun ini, terjadi penambahan jumlah anggota koperasi sebesar 40,93% atau sebanyak 124.651 anggota.



Gambar 3.143. Jumlah Anggota Koperasi di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Melihat persebaran anggota koperasi di DKI Jakarta pada tahun 2020, Jakarta Timur merupakan wilayah administrasi dengan anggota koperasi paling banyak yaitu 88.792 orang. Jumlah ini disusul oleh Jakarta Selatan dengan anggota koperasi sebanyak 71.425 orang. Pada tahun yang sama, Kepulauan Seribu memiliki 31 unit koperasi namun tidak memiliki anggota koperasi.

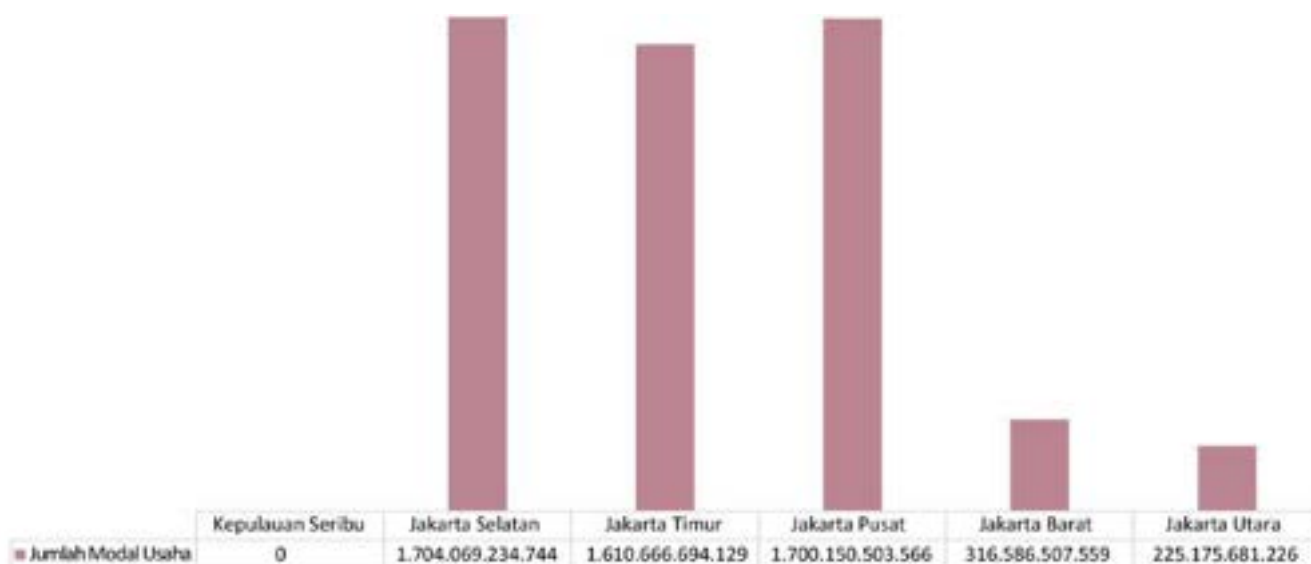
Koperasi memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu koperasi juga dapat menjadi wadah untuk masyarakat bersosialisasi. Gotong royong yang menjadi landasan koperasi merupakan salah satu tiang yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga berperan aktif dalam memajukan koperasi, salah satunya menggalakkan melek teknologi terhadap koperasi agar dapat melakukan semua kegiatan berbasis daring.



²⁸ Presiden Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

3.16.3. Modal Usaha, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha

Modal usaha merupakan dana awal yang diperuntukkan dalam menjalankan suatu usaha atau pun kegiatan. Modal usaha memainkan peran yang sangat krusial bagi para pelaku usaha sebelum memperhitungkan segala kemungkinan risiko yang akan terjadi. Volume usaha adalah akumulasi dari hasil penjualan barang/jasa pada kurun waktu tertentu. Sisa hasil usaha dapat didefinisikan sebagai keuntungan dari penyelenggaraan usaha yang didapatkan dari pengurangan biaya operasional dalam suatu usaha. Dalam pelaksanaan kegiatan di koperasi, modal usaha, volume usaha, dan sisa hasil usaha saling memengaruhi satu sama lain.



Gambar 3.144. Jumlah Modal Usaha di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, jumlah modal usaha di DKI Jakarta sebesar 5,56 triliun rupiah. Jumlah ini lebih besar 19,45 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Modal usaha tertinggi berasal dari Jakarta Timur sebanyak 1,61 triliun rupiah, sedangkan jumlah Kepulauan Seribu tidak mempunyai modal usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah modal usaha koperasi di DKI Jakarta meningkat sebesar 291,21 miliar rupiah.



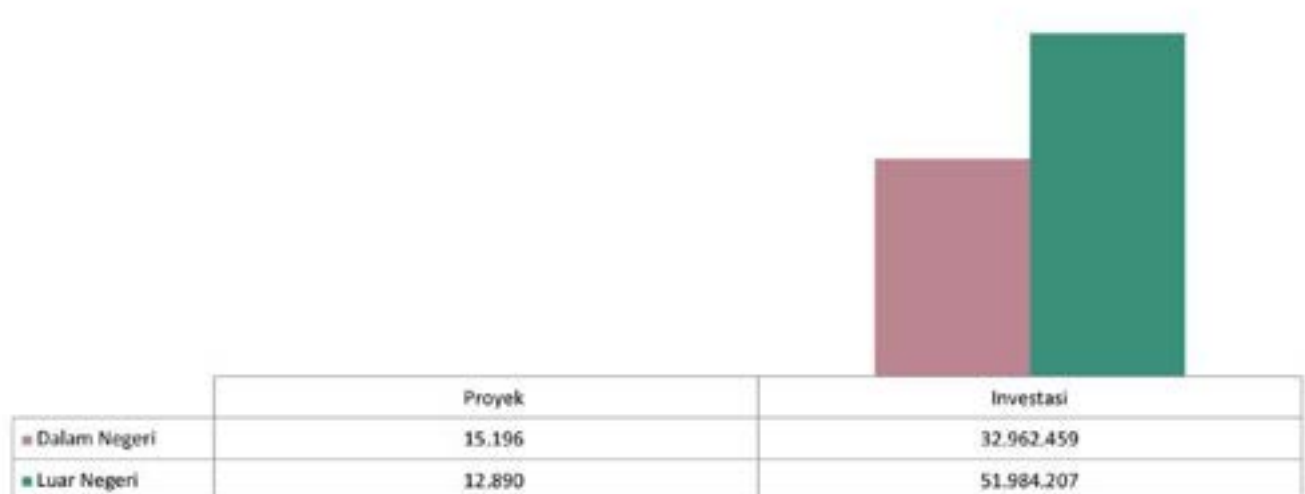
Gambar 3.145. Jumlah Volume Usaha di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Jumlah volume usaha di DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 3,39 triliun rupiah. Jumlah ini lebih besar sebanyak 84,91 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah volume usaha tertinggi berasal dari Jakarta Selatan sebanyak 928,96 miliar rupiah, sedangkan Kepulauan Seribu tidak mempunyai volume usaha. Terdapat dua kejadian menarik yaitu penurunan jumlah volume usaha di Jakarta Pusat dan kenaikan jumlah volume usaha secara signifikan di Jakarta Barat. Pertama, pada tahun 2019 jumlah volume usaha di Jakarta Pusat sebesar 1,41 triliun sekaligus menjadi terbesar pada tahun tersebut, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan jumlah volume usaha sebesar 244,62 miliar rupiah. Kedua, jumlah volume usaha di Jakarta Barat sebanyak 738,04 miliar rupiah pada tahun 2019, kemudian nilai ini naik drastis pada tahun 2020 menjadi 811,77 miliar rupiah.

3.17. Penanaman Modal

Secara umum penanaman modal adalah kondisi seseorang atau lembaga dalam melakukan kegiatan menanam modal pada sektor-sektor usaha yang ada di Indonesia. Penanam modal ini bisa dari asing dan dalam negeri sendiri. Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan memajukan sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman baik modal dalam negeri maupun asing. Penanaman modal dinilai penting dalam berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.



Gambar 3.146. Proyek dan Investasi Dalam dan Luar Negeri di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, nilai investasi yang direalisasikan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) di DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 32.962,459 miliar rupiah. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa nilai investasi mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2019, namun nilai investasi ini mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 46,92%. Penurunan nilai investasi yang signifikan ini merupakan salah satu dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Berbeda dengan nilai investasi yang mengalami penurunan, proyek yang direalisasikan dari PMDN pada tahun 2020 mencapai 15.196 proyek. Jumlah tersebut mengalami peningkatan lebih dari tiga kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah proyek pada tahun 2019. Penurunan ini kembali dapat disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, nilai investasi penanaman modal asing (PMA) di DKI Jakarta mencapai 51.984,2 juta US dollar. Nilai mata uang luar negeri yang berbeda menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nilai investasi PMA lebih besar daripada nilai investasi PMDN. Nilai investasi PMA pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15,94% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk jumlah proyek terealisasi dari PMA pada tahun 2020 sebanyak 12.890 proyek, jumlah ini naik sebesar 59,29% jika dibandingkan dengan proyek terealisasi pada tahun sebelumnya.

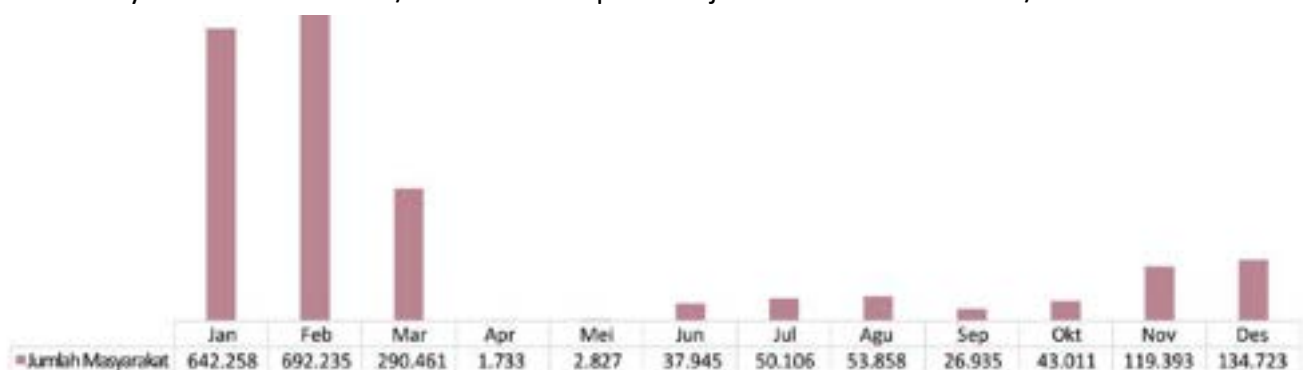
Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, DKI Jakarta menjadi magnet tersendiri bagi penanam modal untuk melakukan investasi. Kuantitas masyarakat DKI Jakarta juga menjadi nilai tambah bagi penanam modal untuk berinvestasi. Investasi yang dilakukan penanam modal ini juga dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk. Meskipun banyak pihak yang ingin melakukan investasi di DKI Jakarta, pemerintah tentu tetap menyaring berbagai lembaga yang dapat dan tidak dapat memajukan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat.

3.18. Kepemudaan dan Olahraga

Olahraga adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyehatkan jasmani dan rohani agar dapat terhindar dari beragam macam penyakit. Tidak hanya menyehatkan, olahraga juga dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh serta meningkatkan kebugaran. Kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu fokus pemerintah dalam rangka memberdayakan pemuda yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tidak hanya dalam pembangunan, potensi para pemuda dapat ditunjukkan dengan turut berpartisipasi dalam ajang olahraga pada tingkat nasional maupun internasional. Pekan Olahraga Nasional (PON) menjadi tempat bagi para pemuda sebagai ajang unjuk prestasi pada tingkat nasional, sedangkan Sea Games merupakan salah satu contoh ajang kompetisi pada tingkat internasional yang melibatkan para pemuda.

3.18.1. Aktivitas Berolahraga Masyarakat

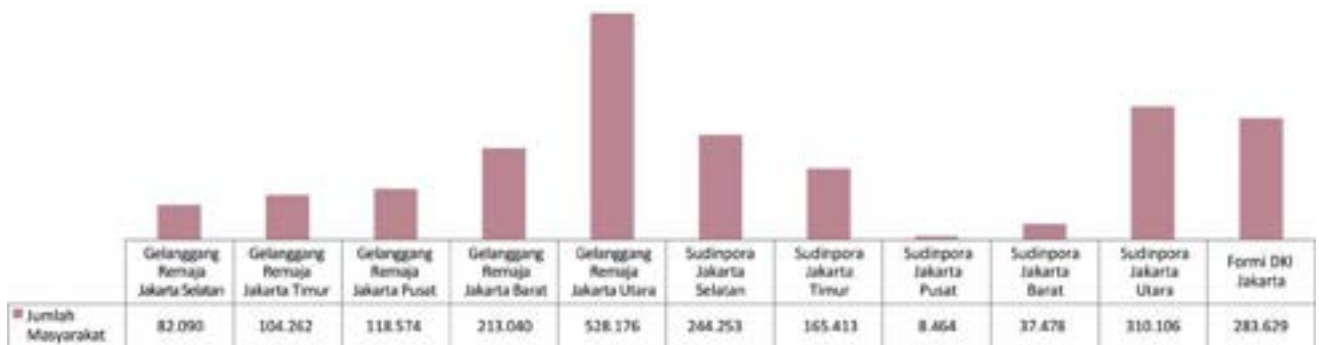
Olahraga adalah sebuah kegiatan yang telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyehatkan secara jasmani dan rohani. Sepanjang tahun 2020, kegiatan olahraga menurun drastis selama masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Pandemi ini membatasi pergerakan penduduk untuk berkegiatan di luar rumah sebagai upaya untuk menghindari serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dari pembatasan yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, banyak penduduk yang mengalihkan kegiatan olahraganya yang sebelumnya di luar rumah dan/atau berkelompok menjadi di dalam rumah dan/atau sendiri.



Gambar 3.147. Jumlah Masyarakat Aktif Berolahraga di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 2.095.485 orang yang melakukan aktivitas olahraga selama tahun 2020. Jumlah ini menurun sebesar 78.94% atau sebanyak 7.852.351 orang. Dapat dilihat dari gambar di atas, terjadi penurunan jumlah penduduk yang aktif berolahraga dan jumlah tersebut tidak menembus angka di atas 100.000 orang. Penyebab utamanya dikarenakan pembatasan aktivitas di luar rumah yang diterapkan di DKI Jakarta selama masa pandemi, selain itu juga banyak fasilitas olahraga yang ditutup dalam kurun waktu tersebut. Jumlah masyarakat yang aktif berolahraga turun drastis terhitung dari bulan Maret. Jumlah masyarakat yang aktif berolahraga di luar rumah menurun signifikan dari bulan Maret ke April dengan persentase sebesar 99,40%.



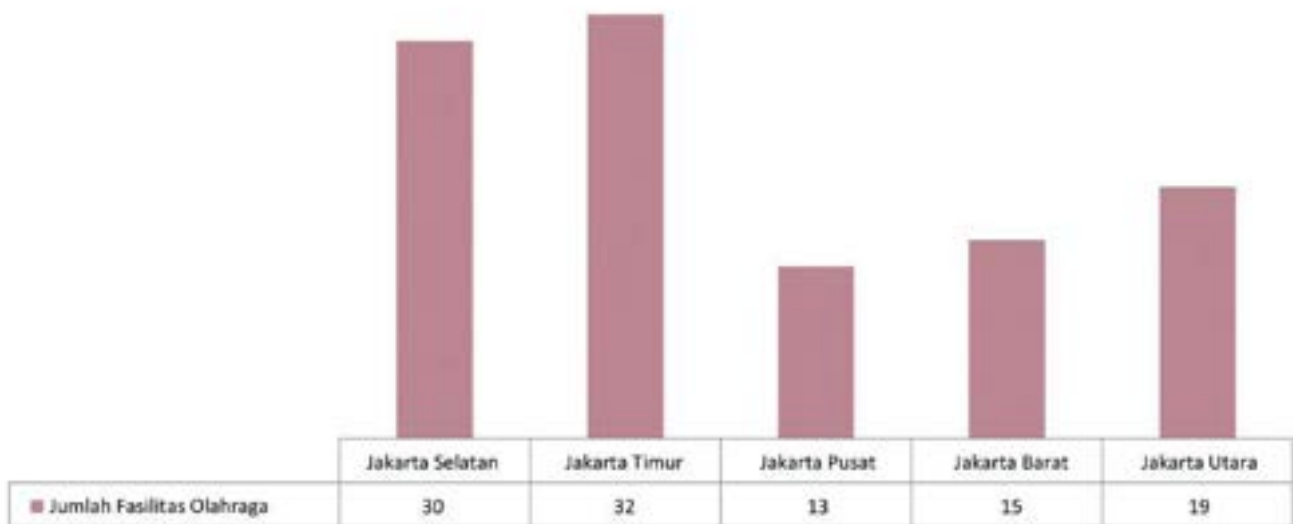
Gambar 3.148. Jumlah Masyarakat Aktif Berolahraga di DKI Jakarta Menurut Lokasi Kegiatan Tahun 2020
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Sebagian besar masyarakat memilih berolahraga di Gelanggang Remaja yang ada di masing-masing kota administrasi sebanyak 1.046.142 orang atau sebesar 49,92% dari jumlah masyarakat yang aktif berolahraga sepanjang tahun 2020. Gelanggang Remaja Jakarta Utara merupakan fasilitas yang paling banyak dikunjungi sebanyak 528.176 orang. Sisanya, sebanyak 765.714 orang memilih berkegiatan di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga (Sudinpora) masing-masing kota administrasi dan 283.629 orang berkegiatan di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi) DKI Jakarta.

3.18.2. Fasilitas Olahraga

Dalam rangka memfasilitasi penduduknya, Dispora Provinsi DKI Jakarta menyediakan berbagai fasilitas olahraga yang dapat digunakan seperti lapangan sepak bola, kolam renang, gedung olahraga (GOR), dan lain-lain. Setiap fasilitas olahraga yang disediakan oleh pemerintah didukung dengan sarana dan prasarana seperti lapangan sepak bola yang dilengkapi dengan kursi penonton sesuai standar nasional, lampu stadion, tempat istirahat pemain, dan berbagai sarana pendukung lainnya.

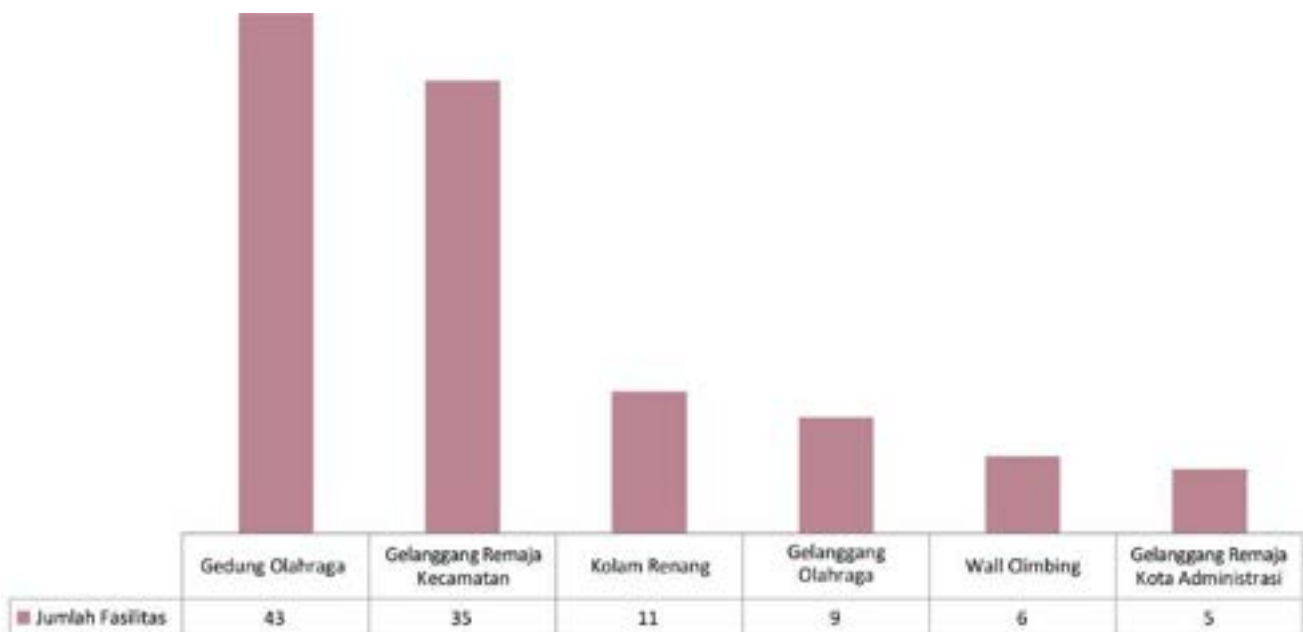




Gambar 3.149. Jumlah Fasilitas Olahraga di DKI Jakarta Menurut Kota Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Dispora Provinsi DKI Jakarta turut mengawasi berbagai fasilitas olahraga yang berada di DKI Jakarta. Tercatat sebanyak 109 fasilitas olahraga yang tersebar di lima wilayah administrasi. Di Jakarta Timur, terdapat sebanyak 32 fasilitas olahraga, jumlah ini berbeda sedikit dengan Jakarta Selatan yang memiliki sebanyak 30 fasilitas olahraga.



Gambar 3.150. Jumlah Fasilitas Olahraga di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020

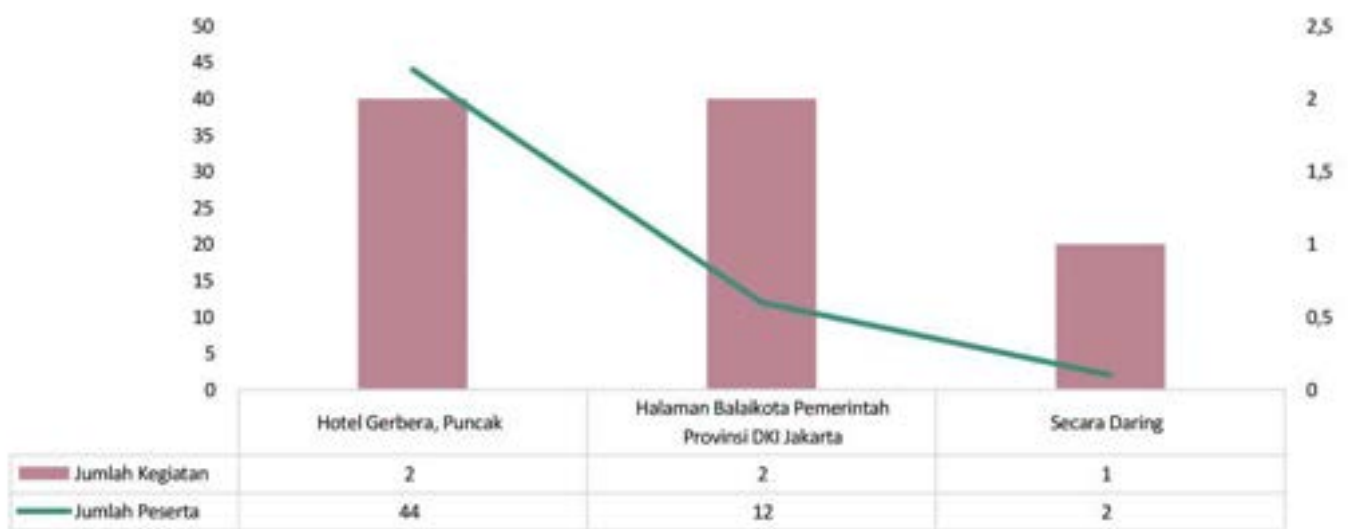
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Apabila dilihat berdasarkan jenis fasilitasnya, tercatat fasilitas olahraga terbanyak adalah GOR. Di DKI Jakarta tercatat sebanyak 43 GOR, jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan fasilitas olahraga lainnya dikarenakan gedung ini sering difungsikan sebagai tempat perlombaan olahraga di berbagai tingkat seperti kelurahan sampai dengan nasional. Pada umumnya, setiap gelanggang remaja memiliki beberapa fasilitas seperti auditorium, gedung olahraga multifungsi, kolam renang, masjid, dan lain-lain.

Hiruk pikuk DKI Jakarta menjadi salah satu alasan banyak masyarakat menjadikan olahraga sebagai pilihan untuk menyegarkan kembali kondisi tubuh. Meskipun masih dalam keadaan pandemi, masyarakat masih menyempatkan diri untuk melakukan olahraga dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bentuk dukungan pemerintah dalam hal olahraga salah satunya adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas seperti gedung olahraga, trek sepeda dan lain-lain.

3.18.3. Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan yang dilakukan di DKI Jakarta meliputi kegiatan seleksi anggota, pemusatan latihan, pembekalan kegiatan, dan lain-lain. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di GOR saja, namun dapat juga dilakukan di Hotel Gerbera, halaman Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga bisa secara daring. Pembekalan materi olahraga dan training camp merupakan beberapa kegiatan kepemudaan yang biasanya dilaksanakan di suatu tempat seperti hotel atau fasilitas olahraga.



Gambar 3.151. Jumlah Kegiatan Kepemudaan di DKI Jakarta Menurut Lokasi dan Jumlah Peserta Tahun 2020
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Meski dalam kondisi pandemi, Dispora Provinsi DKI Jakarta tetap berusaha beradaptasi dengan kondisi pandemi dengan melakukan berbagai kegiatan terkait dengan kepemudaan dan olahraga. Dari gambar di atas, Hotel Gerbera yang berada di Puncak Bogor melaksanakan sebanyak dua kegiatan dengan 44 peserta sepanjang tahun 2020. Di hotel ini, kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan seperti seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan pembekalan JPI Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun yang sama, terdapat dua kegiatan kepemudaan yang berlangsung di halaman Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) tingkat provinsi dalam rangka pengibaran bendera hari-hari besar nasional dan pemusatan latihan dan pengukuhan paskibraka tingkat provinsi.

3.18.4. Peserta Kegiatan Olahraga

Dispora Provinsi DKI Jakarta memfokuskan kepemudaan menjadi dua bagian yaitu kegiatan olahraga dan pelatihan. Kegiatan olahraga ditujukan pada para atlet yang berpotensi mengikuti perlombaan pada tingkat nasional maupun internasional, sedangkan kegiatan pelatihan ditujukan kepada pemuda dalam rangka pembinaan berbagai kegiatan olahraga maupun peringatan hari besar nasional.



Gambar 3.152. Jumlah Peserta Kegiatan Olahraga di DKI Jakarta Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Selain kegiatan kepemudaan, Dispora Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk olahraga dan pelatihan yang masing-masing diikuti oleh 749 dan 195 peserta. Bentuk kegiatan olahraga biasa dilakukan di Gelanggang Olahraga Rawamangun, Kolam Renang Jakarta Pusat, dan kelurahan di lima wilayah kota administrasi.

3.19. Kebudayaan

Indonesia sebagai negara dengan beranekaragam budaya dan tradisi mempunyai daya tarik sendiri bagi wisatawan mancanegara. Hal ini tercermin dari tingkat kunjungan wisatawan luar negeri yang tinggi menuju Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Walau DKI Jakarta terkenal sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, namun wilayah ini juga mempunyai daya tarik sendiri untuk dikunjungi.

3.19.1. Organisasi Kesenian

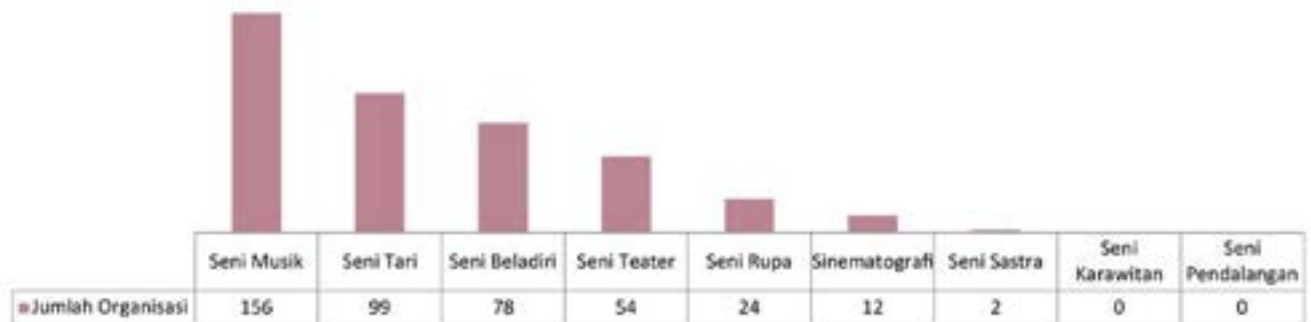
Selain memiliki daya tarik dari sisi sejarah, DKI Jakarta juga memiliki sisi lain yang menjadi daya tarik tersendiri. Sebagai kota metropolitan, DKI Jakarta tetap menjaga dan melestarikan budaya yang dapat dilihat dari keberadaan organisasi kesenian. Beberapa ragam seni yang ada di DKI Jakarta seperti teater, tari, musik, dan beberapa ragam seni lainnya.



Gambar 3.153. Jumlah Organisasi Kesenian di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam mengisi kebudayaan untuk masyarakat. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 425 organisasi kesenian yang dibina. Jakarta Timur merupakan wilayah yang memiliki organisasi kesenian terbanyak dengan 150 organisasi. Organisasi-organisasi kesenian yang ada di Jakarta Timur didominasi oleh seni musik dan seni tari. Jumlah ini disusul oleh Jakarta Selatan dengan 92 organisasi.



Gambar 3.154. Ragam Organisasi Kesenian di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Organisasi kesenian musik mendominasi organisasi kesenian lainnya dengan persentase sebesar 36,70% atau sebanyak 156 organisasi. Seni tari berada pada peringkat kedua dengan jumlah organisasi terbanyak dengan 99 organisasi. Tidak heran jika seni tari masih banyak diminati oleh warga DKI Jakarta dikarenakan keinginan untuk tetap melestarikan budaya leluhur dan seni tari tradisional. Beberapa tarian yang berasal dari DKI Jakarta adalah Lenggo Jingke, Sirih Kuning, Lenggang Nyai, dan lain-lain.

3.19.2. Patung dan Museum

Kesenian menjadi representasi dari semangat sebuah zaman yang dapat berupa dokumen dan monumen. Patung merupakan salah satu saksi sejarah bagi ikon suatu tempat, ada cerita dan sejarah dari awal terbentuknya patung. Biasanya patung di DKI Jakarta disimpan di beberapa monumen dan museum sejarah yang diletakkan di tempat yang aman dan dijaga oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta turut mengambil peran untuk melestarikannya. Selain patung, museum-museum yang ada di DKI Jakarta juga turut diawasi dalam upaya untuk menjaga aset-aset tangible (fisik) yang memiliki nilai sejarah.





Gambar 3.155. Jumlah Patung dan Museum di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Sampai dengan tahun 2020, tercatat sebanyak 44 patung dan museum yang diawasi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar aset yang diawasi berada di Jakarta Pusat sebesar 68,18%, sedangkan Kepulauan Seribu tidak memiliki aset yang diawasi. Sisanya, sebanyak 14 aset tersebar di wilayah administrasi lainnya di DKI Jakarta.

3.20. Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan sebagai tempat yang disediakan untuk berbagai koleksi buku mempunyai peran yang penting sebagai ruang dalam menggali informasi dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan merupakan salah satu tempat sumber ilmu yang berisikan berbagai koleksi buku, majalah, koran, dan lain-lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki perpustakaan berbasis teknologi informasi yang berjumlah tujuh buah. Perpustakaan tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu perpustakaan umum tingkat provinsi dan perpustakaan umum tingkat kota. Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi ini tidak hanya menyediakan koleksinya dalam bentuk cetak, namun juga dalam bentuk digital.

Perpustakaan sebagai ruang yang menyimpan berbagai koleksi buku, majalah, dan bahan kepustakaan lain untuk dibaca, dipelajari, dan juga dibicarakan oleh para pembacanya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Provinsi DKI Jakarta senantiasa berusaha menjaga dan menambah koleksinya.



Gambar 3.156. Jumlah Koleksi Buku, Kunjungan ke Perpustakaan, dan Anggota Perpustakaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

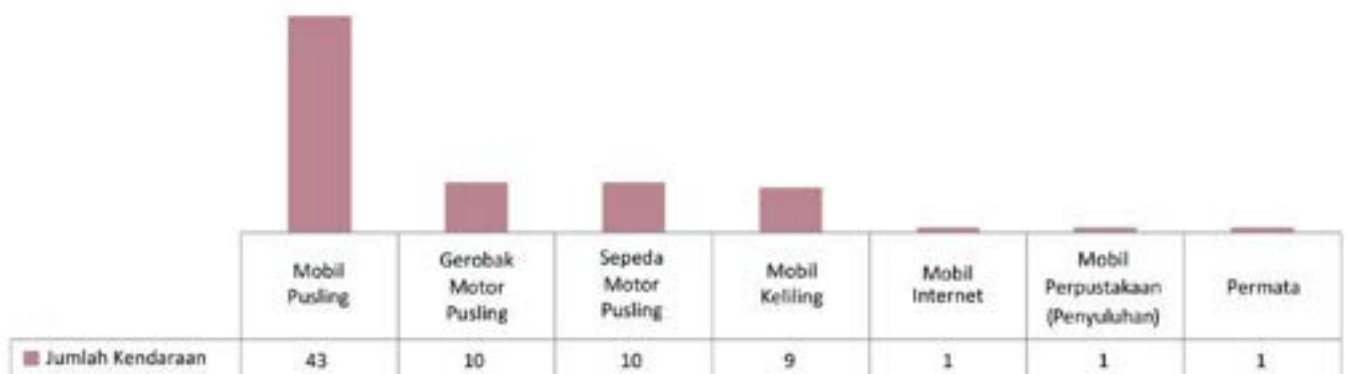
Sampai dengan tahun 2020, tercatat sebanyak 1.692.998 koleksi buku yang berada di perpustakaan yang dikelola oleh Dispusip Provinsi DKI Jakarta. Jumlah ini meningkat sebesar 34,01% atau sebanyak 429.741 buku sejak tahun 2016. Terdapat pengurangan jumlah koleksi buku dari tahun 2016 sampai dengan 2017 dikarenakan Dispusip Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan stok pendataan (opname) guna menginventaris koleksi-koleksi yang ada. Tahun 2017 merupakan tahun dengan jumlah koleksi buku paling sedikit di DKI Jakarta dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Perpustakaan mempunyai peran sebagai agen perubahan dalam kehidupan karena tempat ini merupakan sumber informasi. Di balik bertambahnya koleksi buku Perpustakaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rupanya tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang datang langsung ke perpustakaan.

Dispusip Provinsi DKI Jakarta mencatat adanya pengurangan jumlah pengunjung sejak tahun 2018. Data menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah kunjungan ke Perpustakaan dari tahun 2016 ke tahun 2018 sebanyak 2.349.516 pengunjung. Namun, terjadi penurunan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 2.741.967 pengunjung. Namun, penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 sebanyak 1.894.556 pengunjung. Penurunan jumlah pengunjung ke perpustakaan sejak tahun 2018 dapat disebabkan karena digitalisasi perpustakaan yang memungkinkan orang-orang dapat mengakses sumber informasi seperti buku, majalah, dan/atau jurnal secara daring.

Namun disela-sela penurunan tersebut rupanya terdapat kenaikan dari jumlah anggota perpustakaan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 52,46% atau sebanyak 14.436 anggota. Masyarakat yang ingin mendaftar keanggotaan Perpustakaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini sudah dapat mendaftar secara daring. Selain untuk pendataan, kartu keanggotaan ini juga berfungsi untuk memungkinkan masyarakat dalam meminjam koleksi perpustakaan secara cetak maupun mengakses secara digital.

Dalam usaha untuk memfasilitasi dan membuat minat baca masyarakat, Dispusip Provinsi DKI Jakarta juga turut menyediakan perpustakaan keliling (pusling). Perpustakaan keliling merupakan perpustakaan dengan titik lokasi yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk menjangkau pemustaka. Perpustakaan keliling digunakan sebagai salah satu alternatif layanan yang menyediakan koleksi bahan pustaka kepada masyarakat di ruang terbuka.



Gambar 3.157. Jumlah Kendaraan Perpustakaan Keliling di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Kendaraan pusling di DKI Jakarta terbagi menjadi empat jenis kendaraan yaitu gerobak motor, mobil, truk kontainer, dan sepeda motor dengan rincian jenis kendaraan yang meliputi gerobak motor, mobil internet, mobil keliling, mobil perpustakaan (penyuluhan), mobil pusling, truk kontainer permata, dan sepeda motor. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan perpustakaan keliling mencapai 75 kendaraan yang terbagi dalam tiga kondisi yaitu baik sebanyak 69 kendaraan, rusak sedang sebanyak 2 kendaraan, dan rusak berat (proses hapus) sebanyak 4 kendaraan. Mobil pusling merupakan jenis kendaraan pusling paling banyak jika dibandingkan dengan jenis kendaraan pusling lainnya. Mobil pusling dikelola oleh lima suku dinas (sudin) di DKI Jakarta yaitu Sudin Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Sedangkan, hanya ada satu mobil internet yang dikelola oleh Sudin Jakarta Utara, satu mobil perpustakaan (penyuluhan) yang dikelola oleh Sudin Jakarta Selatan, dan truk kontainer permata yang dikelola oleh Dispusip Provinsi DKI Jakarta.

Sejak tahun 2016, pengguna jasa perpustakaan keliling ini menunjukkan peningkatan. Namun, pengguna jasa perpustakaan keliling ini menurun drastis saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 292.217 pengguna jasa perpustakaan keliling di DKI Jakarta. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 70,80% atau sebanyak 708.383 pengguna. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020, Dispusip Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi dan perencanaan strategi baru dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan jumlah armada dan titik lokasi perpustakaan keliling yang strategis. Perpustakaan merupakan wadah untuk melihat dunia lebih jauh. Banyak ilmu yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui perpustakaan. Meskipun di era digital membuat peminat perpustakaan berpaling ke media elektronik, namun pesona akan perpustakaan masih tetap terasa. Sensasi yang khas di setiap perpustakaan tetap menjadi salah satu alasan pengguna perpustakaan selalu ada.

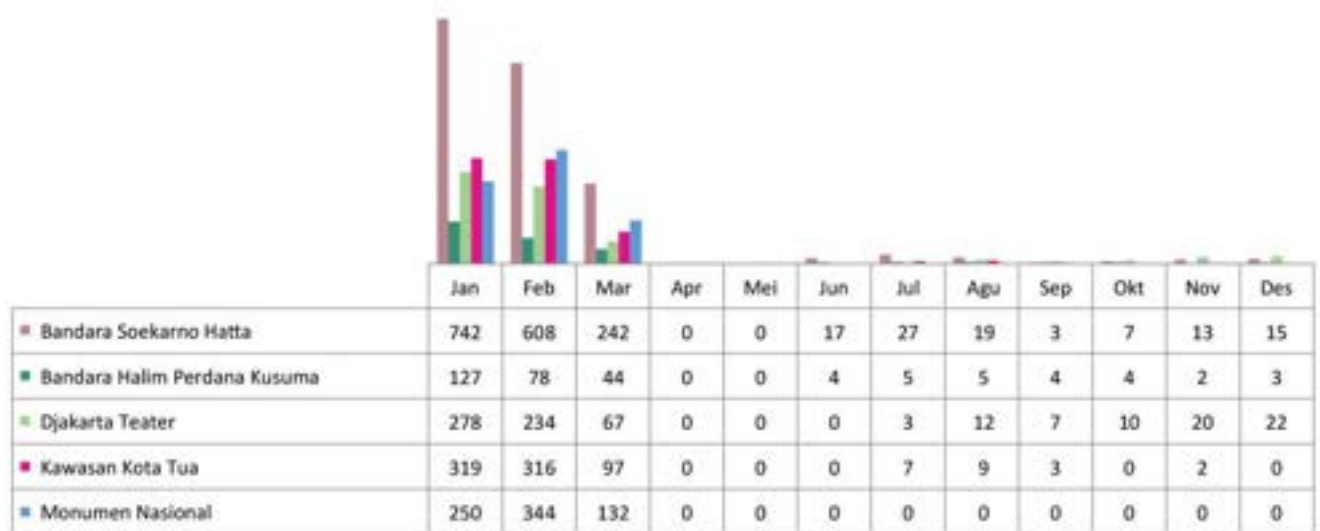
3.21. Pariwisata

Menurut buku saku Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada tahun 2016, kontribusi di sektor pariwisata pada tahun 2014 mencapai 946,09 triliun rupiah²⁹. Ini memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang. Tahun 2020 merupakan tahun lesunya geliat pariwisata mancanegara di DKI Jakarta dikarenakan pandemi Covid-19. Terlebih ketika pada Maret 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman resmi terkait masuknya pandemi ini ke Indonesia dengan DKI Jakarta dan kota-kota satelit di sekelilingnya sebagai episentrum utama penyebaran Covid-19.

3.21.1. Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia mempunyai daya tarik sendiri bagi para wisatawan, baik itu wisatawan nusantara maupun mancanegara. Berbagai tujuan wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan mulai dari museum, monumen nasional, taman bermain, dan lain-lain.

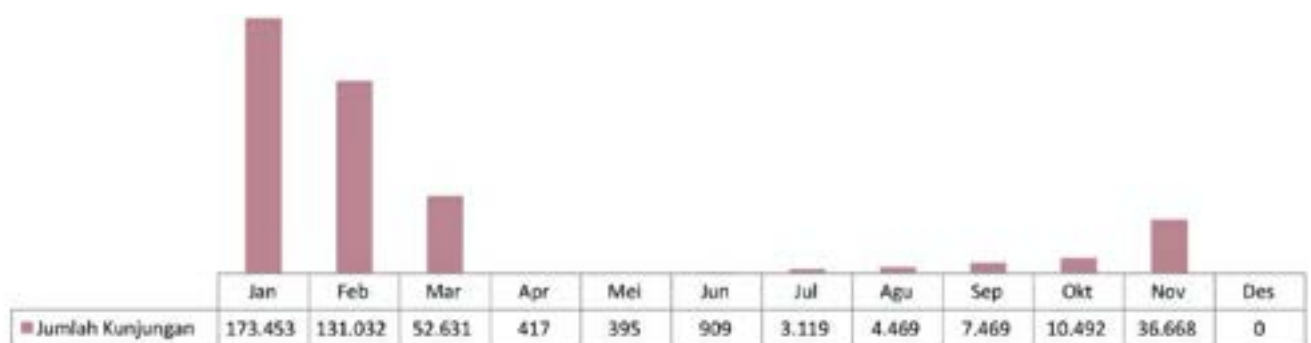
²⁹ Universitas Indonesia (2018), "Laporan Akhir: Kajian Dampak Sektro Pariwisata Perekonomian Indonesia", https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1554437393_Laporan_Akhir.pdf, diakses pada 14 Juli 2021.



Gambar 3.158. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Tourist Information Center di DKI Jakarta Menurut Tempat Kunjungan Tahun 2020

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Pada gambar di atas, dapat dilihat turunnya tren kunjungan wisatawan mancanegara ke Tourist Information Center (TIC) DKI Jakarta. TIC adalah salah satu fasilitas yang ada di tempat wisata yang berfungsi untuk membantu menyampaikan informasi tentang berbagai kegiatan sampai dengan pelayanan yang tersedia bagi wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke TIC mengalami penurunan secara signifikan dimulai sejak April. Hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Pada April dan Mei 2020, kebijakan PSBB mulai diterapkan, sehingga tidak ada satupun wisatawan mancanegara yang datang ke TIC DKI Jakarta. Walaupun bulan-bulan selanjutnya terlihat mulai ada kenaikan, namun kenaikan tersebut relatif tidak signifikan apabila dibandingkan dengan bulan Januari dan Februari.

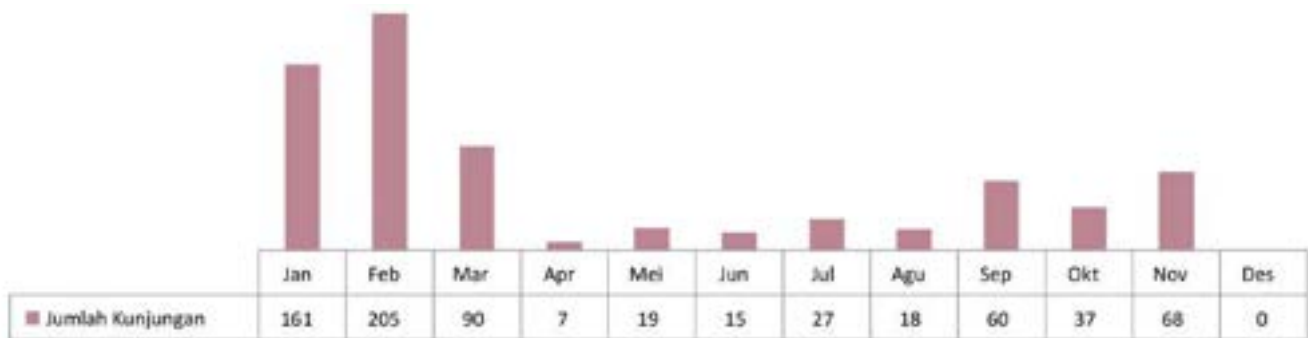


Gambar 3.159. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Masuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tahun 2020

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma menjadi pintu masuk dan keluar wisatawan mancanegara yang datang ke DKI Jakarta. Pada tahun 2019, terdapat sebanyak 2.419.196 wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan rata-rata sebanyak 201.600 wisatawan mancanegara setiap bulannya. Pada tahun yang sama, Bandara Halim Perdana Kusuma mencatat sebanyak 1.928 wisatawan mancanegara yang masuk ke DKI Jakarta dengan rata-rata sebanyak 161 wisatawan setiap bulannya.

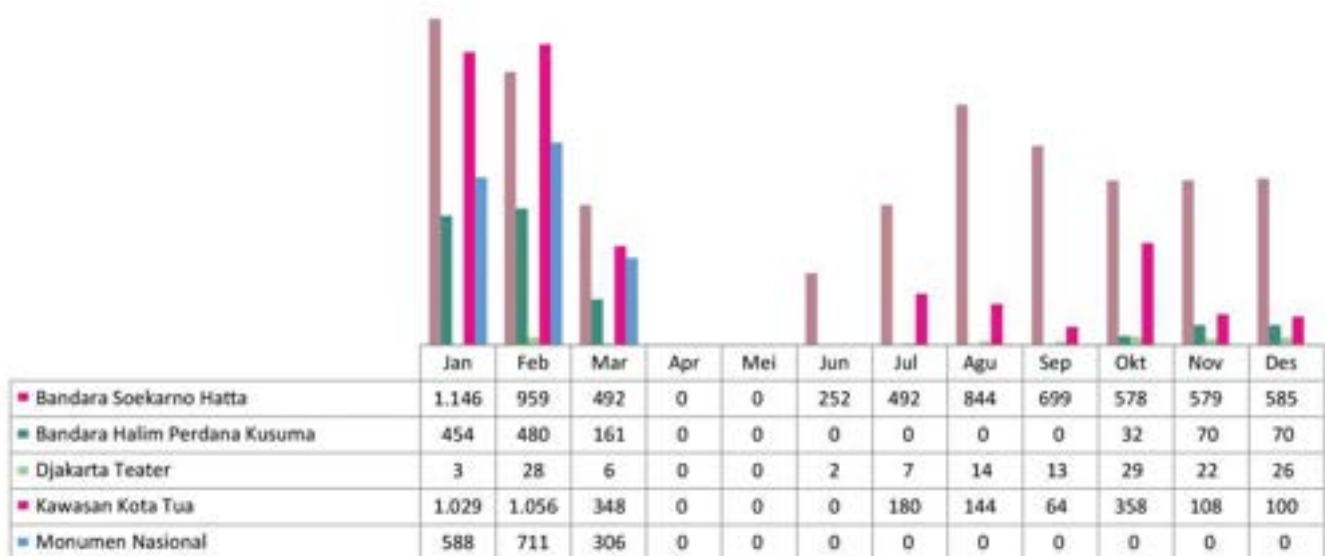
Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 421.053 orang dengan jumlah kunjungan paling banyak berada pada bulan Januari sebanyak 173.453 orang. Di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, penurunan jumlah wisatawan mancanegara juga terjadi hingga mencapai 82,60% atau sebanyak 166.512 orang.



Gambar 3.160. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara melalui Pintu Masuk Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma Tahun 2020

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

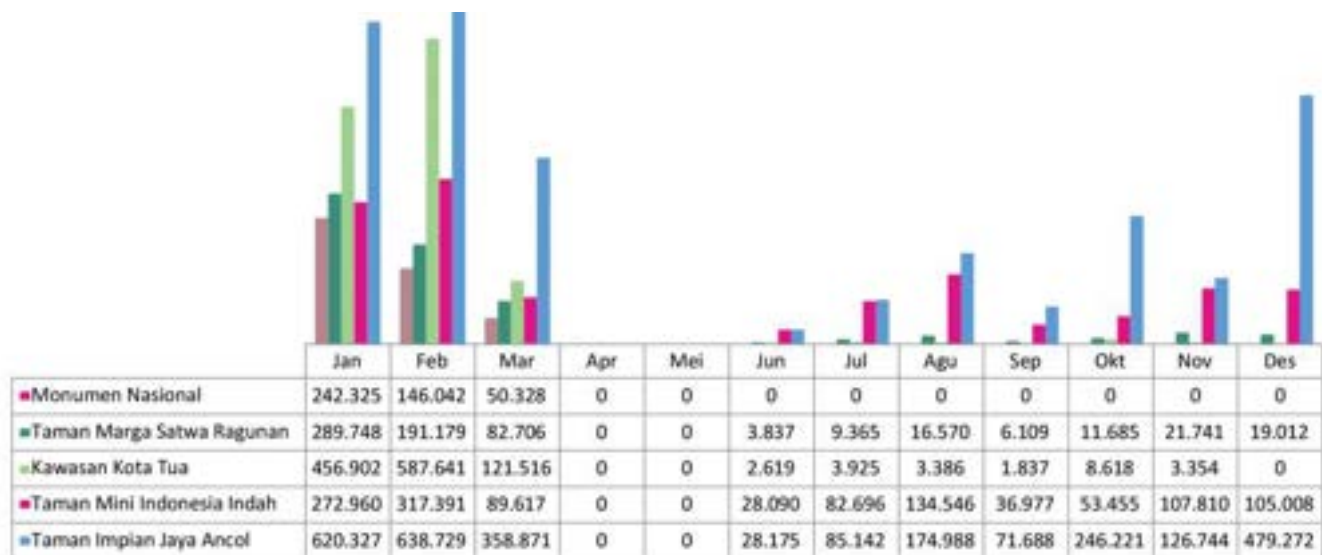
Kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memengaruhi intensitas kedatangan wisatawan mancanegara di kedua bandara. Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke DKI Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sebesar 63,33% atau sebanyak 1.221 orang dari tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan paling banyak melalui Bandara Halim Perdana Kusuma ini berada pada bulan Februari yaitu 205 orang.



Gambar 3.161. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Tourist Information Center DKI Jakarta Menurut Tempat Kunjungan Tahun 2020

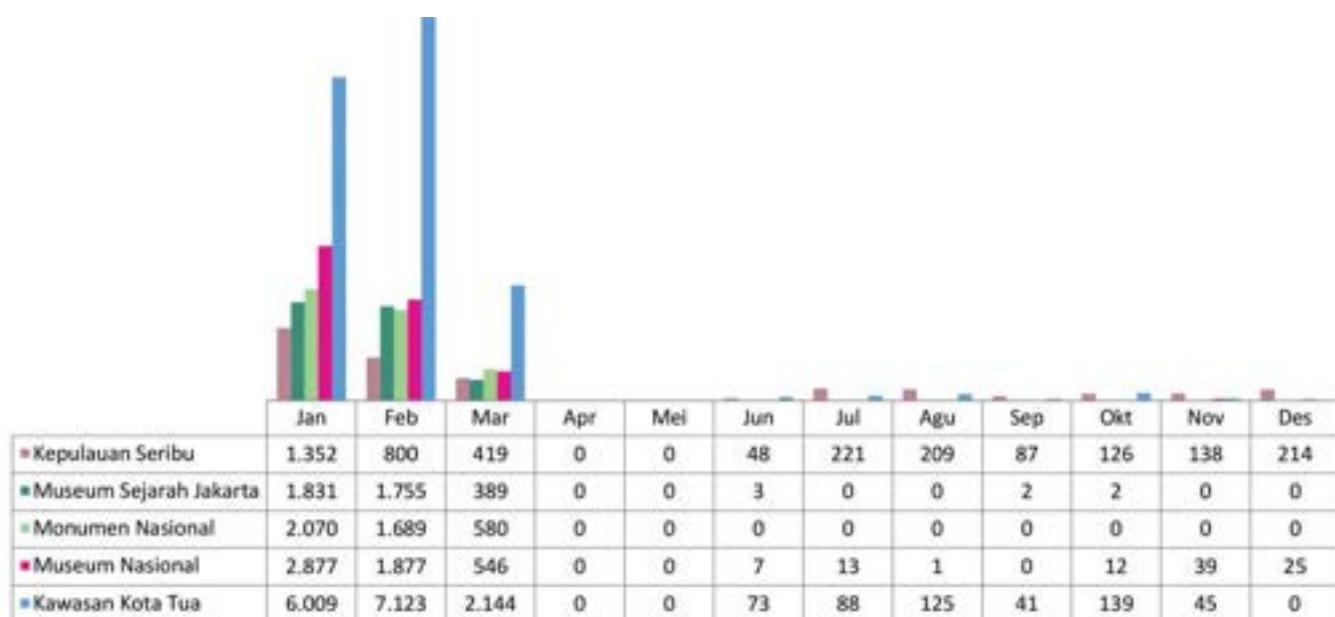
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Penurunan jumlah wisatawan domestik pada tahun 2020 tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19, penurunan tren kunjungan tetap terjadi dari Januari sampai dengan Maret. Tren kunjungan wisatawan nusantara ke *tourist information center* (TIC) mulai menunjukkan kenaikan dari bulan Juni. Hal ini berhubungan dengan kenaikan jumlah wisatawan yang datang melalui pintu Bandara Soekarno-Hatta semenjak ditutupnya pada bulan April dan Mei akibat pandemi Covid-19.



Gambar 3.162. Jumlah Pengunjung Nusantara di DKI Jakarta Menurut Lima Destinasi Wisata Unggulan Tahun 2020
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan peraturan tersebut di DKI Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menutup destinasi wisata di DKI Jakarta. Walaupun pada bulan Juni beberapa destinasi wisata sudah mulai dibuka, namun diberlakukan peraturan baru yang sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut. Sehingga, jumlah wisatawan sejak bulan Juni tidak sebanyak jika dibandingkan dengan bulan-bulan pada triwulan pertama tahun 2020. Bagi wisatawan domestik, Taman Impian Jaya Ancol menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi selama tahun 2020 dengan jumlah 2.830.157 pengunjung. Selanjutnya, Taman Mini Indonesia Indah sebanyak 1.228.550 pengunjung, Kawasan Kota Tua sebanyak 1.189.798 pengunjung, Taman Margasatwa Ragunan sebanyak 651.952 pengunjung, dan Monumen Nasional (Monas) sebanyak 438.695 pengunjung.



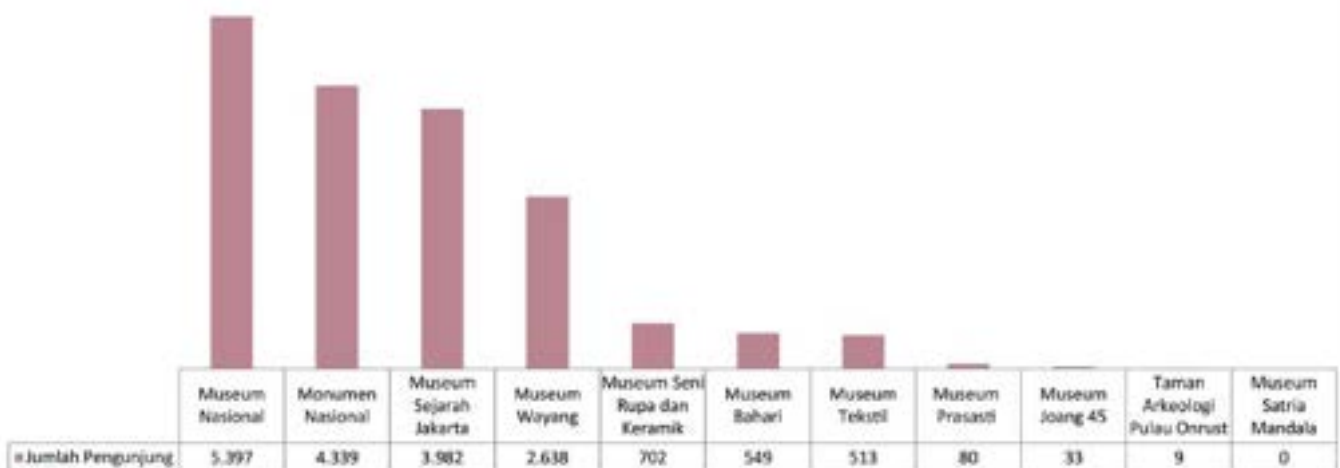
Gambar 3.163. Jumlah Pengunjung Mancanegara di DKI Jakarta Menurut Lima Destinasi Wisata Unggulan Tahun 2020
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Bagi wisatawan mancanegara, Kawasan Kota Tua menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi. Faktor nilai sejarah dan budaya menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kawasan Kota Tua. Jumlah ini kemudian disusul oleh pengunjung Museum Nasional sebanyak 5.397 pengunjung, Monumen Nasional sebanyak 4.339 pengunjung, Museum Sejarah Jakarta sebanyak 3.982 pengunjung, dan Kepulauan Seribu sebanyak 3.614 pengunjung.



Gambar 3.164. Jumlah Pengunjung Nusantara Museum di DKI Jakarta Menurut Jenis Museum Tahun 2020
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Beberapa museum yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Monas, Museum Sejarah Jakarta, dan Museum Nasional adalah destinasi favorit pengunjung nusantara. Pada tahun 2020, Monas adalah museum yang memiliki daya tarik paling tinggi sebanyak 438.695 pengunjung. Selain dapat mengabadikan momen di pelataran puncak, para pengunjung dapat belajar tentang sejarah Indonesia melalui ruang kemerdekaan di Monas.



Gambar 3.165. Jumlah Pengunjung Mancanegara Museum di DKI Jakarta Menurut Jenis Museum Tahun 2020
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Intensitas kunjungan baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik terhadap museum-museum di DKI Jakarta memiliki kesamaan pada lima besar destinasi. Selain menjadi ikon Jakarta, Monas memiliki daya tarik lain dari sisi sejarah. Nilai inilah yang menjadi alasan para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke tempat ini. Selain memberikan wawasan tentang sejarah, lokasi yang saling berdekatan satu sama lain meningkatkan keinginan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke museum lainnya.

3.21.2. Akomodasi

Wisatawan nusantara dan mancanegara tidak hanya berkontribusi pada sektor pariwisata, namun memberikan dampak pada sektor jasa dan akomodasi. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel mendefinisikan usaha hotel sebagai usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.



Gambar 3.166. Jumlah Kamar yang Tersedia di Hotel Bintang di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2020, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat sebanyak 39.480 kamar hotel berbintang di DKI Jakarta. Dapat dilihat dari gambar di atas sebesar 48,68% atau sebanyak 19.219 kamar hotel berbintang berada di Jakarta Pusat. Sedangkan, hanya terdapat 3,43% kamar hotel berbintang yang berada di Jakarta Timur. Banyaknya kamar hotel di wilayah ini berbanding lurus dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung di berbagai tempat wisata yang terletak di Jakarta Pusat seperti Museum Monumen Nasional, Museum Nasional Indonesia, Museum Prasasti, dan Museum Joang 45.

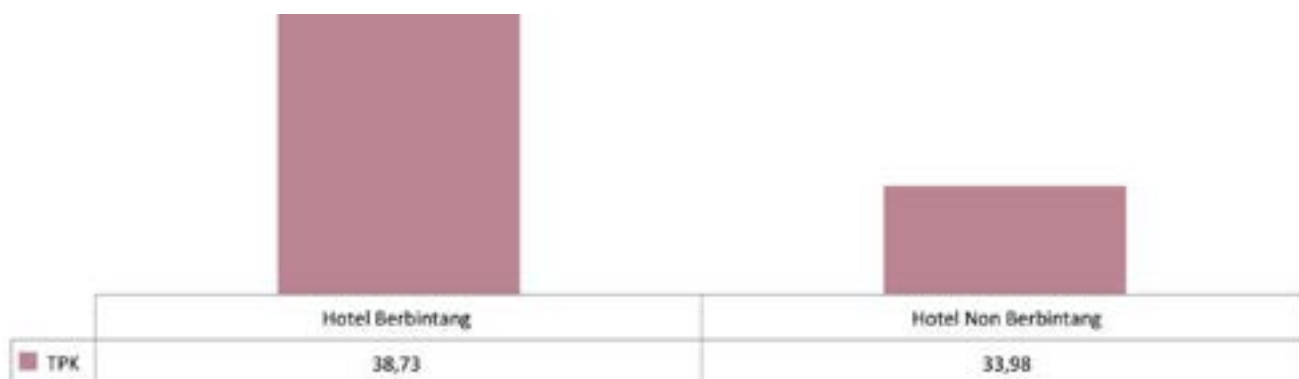




Gambar 3.167. Jumlah Kamar yang Tersedia pada Hotel Non Bintang di DKI Jakarta
Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

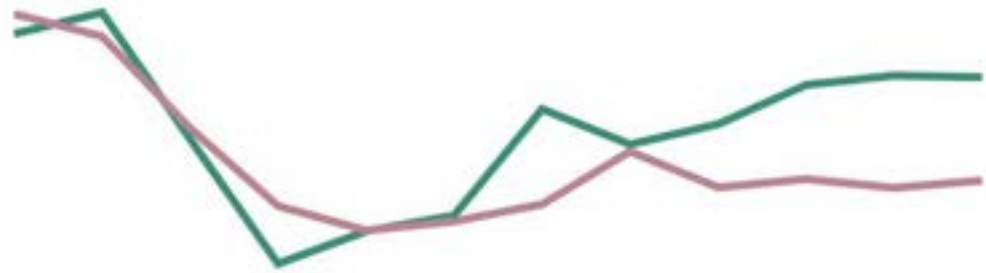
Pada tahun 2020, Disparekraf Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat 15.548 kamar dari hotel non bintang yang tersebar luas di DKI Jakarta. Berbeda dengan jumlah kamar hotel berbintang yang paling banyak tersedia di Jakarta Pusat, jumlah kamar pada hotel non bintang terbanyak berada di Jakarta Selatan yaitu 4.601 kamar. Sementara jumlah kamar pada hotel non bintang paling sedikit yaitu sebanyak 859 berada di Jakarta Timur.



Gambar 3.168. Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Berbintang di DKI Jakarta
Menurut Jenis Hotel Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tingkat Penghunian kamar (TPK) adalah perbandingan banyaknya kamar yang terpakai dengan jumlah kamar yang tersedia di hotel bintang maupun non bintang. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat terjadi penurunan tren TPK hotel bintang dan non bintang dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Namun dalam kurun tiga tahun terakhir ini, TPK baik pada hotel bintang maupun non-bintang turun signifikan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar masing-masing 21,79 poin untuk hotel bintang dan 26,76 poin untuk hotel non bintang. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan TPK pada tahun 2019 ke 2020 adalah PSBB yang membatasi masuknya penduduk dari luar DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur mengenai pembatasan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menyebabkan kerumunan orang dalam area hotel serta pelarangan tamu yang sakit atau suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak napas untuk masuk hotel.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
— Hotel Berbintang	51,37	54,28	36,93	19,84	24,32	26,47	41,03	36,18	38,96	44,33	45,63	45,40
— Hotel Non Bintang	54,07	51,00	38,41	27,75	24,39	25,63	28,01	35,23	30,30	31,44	30,28	31,24

Gambar 3.169. Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang dan Non Bintang di DKI Jakarta Menurut Jenis Hotel dan Bulan Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan penurunan rata-rata TPK baik di hotel bintang maupun non bintang dari Januari sampai Mei mengalami penurunan yang signifikan. Walaupun pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta mulai diberlakukan sejak 16 Maret 2020, namun persentase rata-rata TPK sudah mengalami penurunan sejak bulan Februari ke Maret. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan wisatawan yang datang ke DKI Jakarta sejak bulan Februari sebesar 24,46% atau sebanyak 42.421 wisatawan mancanegara. Penurunan ini berkaitan dengan pembatasan mobilitas dari berbagai negara yang sudah mulai diperketat sejak bulan Februari, bahkan World Health Organization (WHO) sudah mengeluarkan peringatan perjalanan dan perdagangan internasional sejak minggu kedua Januari dikarenakan mulai menyebarnya Covid-19 dari Kota Wuhan di Republik Rakyat Cina.



Gambar 3.170. Persentase Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang di DKI Jakarta Menurut Bulan (Hari) dan Kategori Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

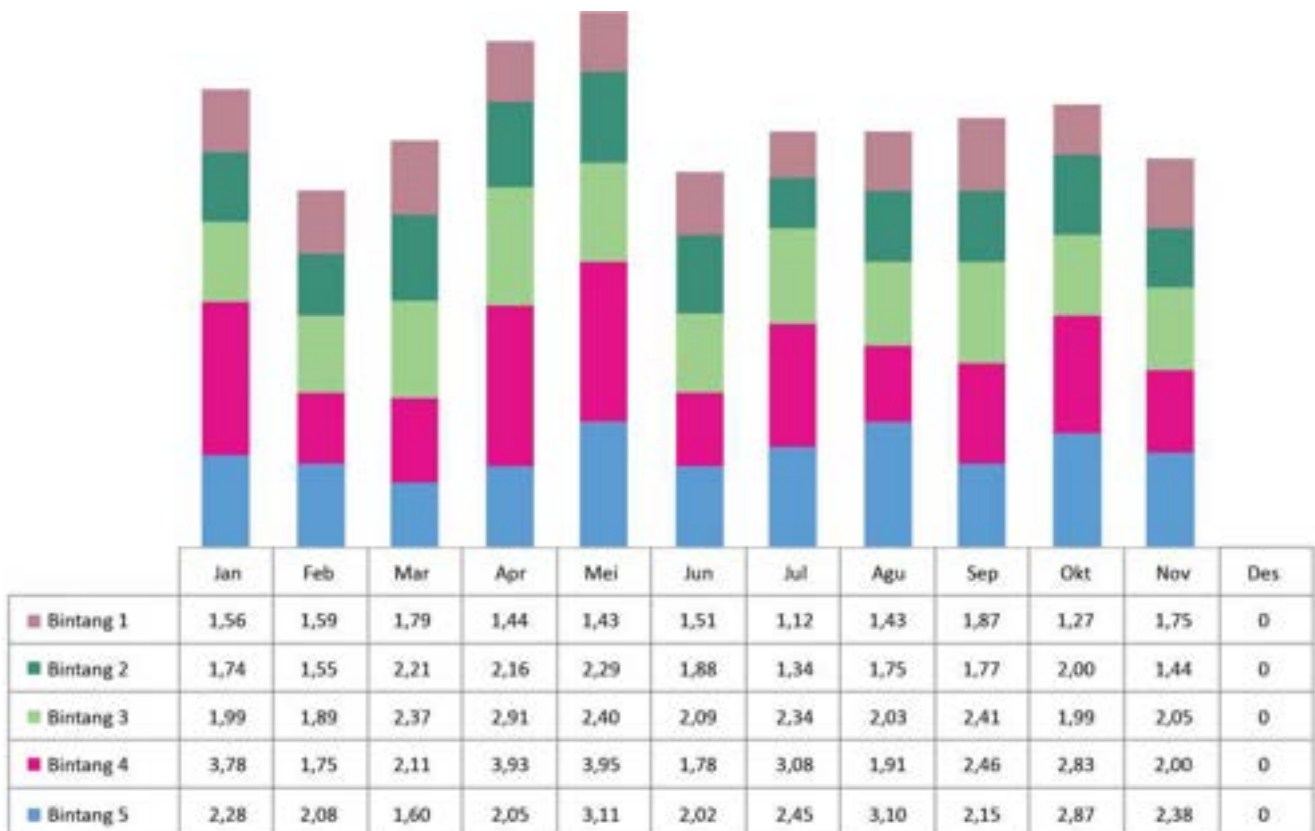
Pada tahun 2020, TPK pada hotel berbintang di DKI Jakarta berada pada rentang 10,83% yang terjadi pada bulan April di hotel berbintang satu sampai dengan 63,73% yang terjadi pada bulan Februari di hotel berbintang dua. Jika dilihat menurut bulan, rata-rata TPK pada bulan Januari dan Februari merupakan rata-rata TPK tertinggi masing-masing sebesar 51,37% dan 54,28%. Hal ini sehubungan dengan belum diberlakukannya PSBB dikarenakan pandemi Covid-19. Rata-rata TPK terendah berada pada bulan April dengan persentase sebesar 19,84%.



Gambar 3.171. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara pada Hotel Berbintang di DKI Jakarta Menurut Bulan (Hari) dan Kategori Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara pada hotel berbintang di DKI Jakarta berada pada rentang 0 yang berada pada bulan April, Mei, dan Juli di hotel berbintang satu sampai dengan 10 hari yang berada pada bulan Mei di hotel berbintang lima. Rata-rata menginap wisatawan mancanegara paling lama berada pada bulan April yaitu delapan hari, sedangkan paling sedikit berada pada bulan Oktober yaitu dua hari.





Gambar 3.172. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Nusantara di Hotel Berbintang di DKI Jakarta Menurut Bulan (Hari) Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

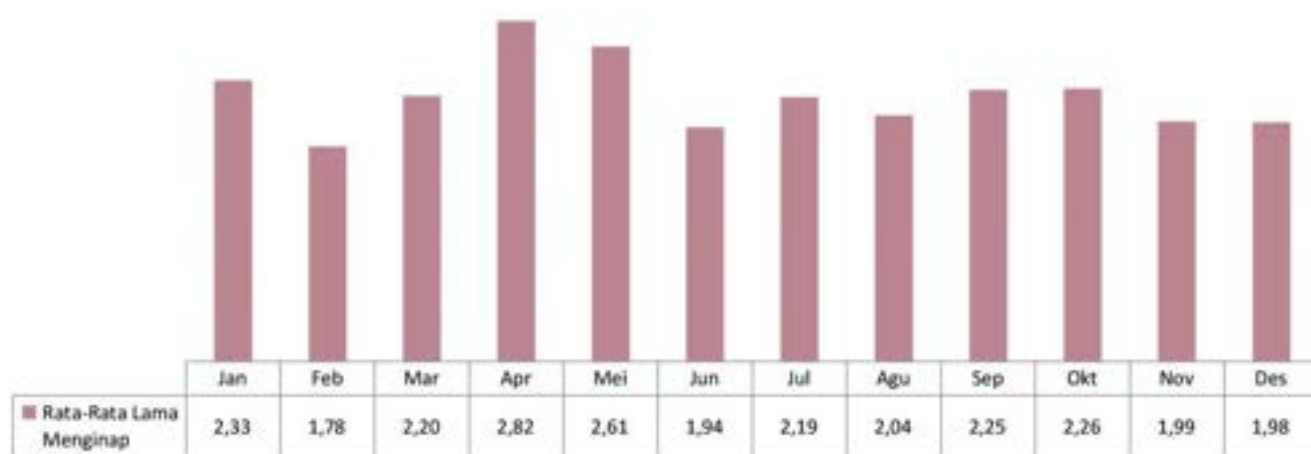
Berbeda dengan rata-rata lama menginap wisatawan domestik pada tahun 2020 cenderung lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara. Rata-rata lama menginap wisatawan domestik pada hotel berbintang di DKI Jakarta berada pada rentang 0 sampai dengan 3 hari.



Gambar 3.173. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara di Hotel Berbintang di DKI Jakarta Menurut Bulan (Hari) Tahun 2020
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, wisatawan mancanegara rata-rata menginap selama tiga sampai dengan empat hari di hotel berbintang di DKI Jakarta. Nilai rata-rata ini meningkat pada bulan Maret sampai dengan Juli yaitu di atas empat hari. Lamanya rata-rata menginap wisatawan mancanegara di hotel berbintang pada rentang waktu tersebut dapat disebabkan oleh peraturan pemerintah yang

menginstruksikan hotel untuk menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri. Instruksi ini diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



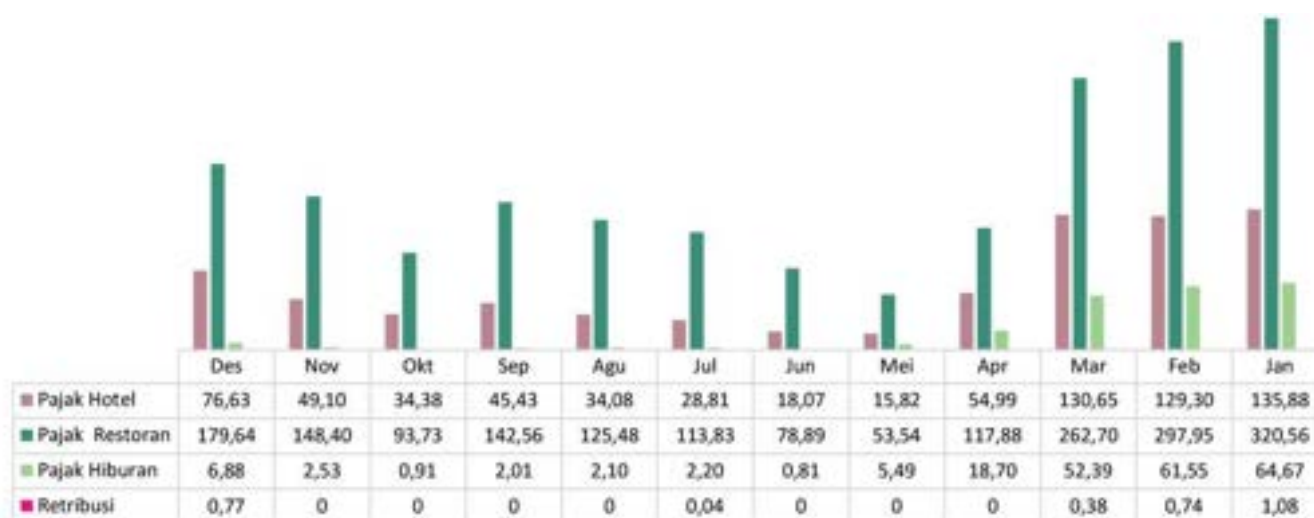
Gambar 3.174. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Nusantara di Hotel Berbintang di DKI Jakarta Menurut Bulan (Hari) Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berbeda dengan rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara, rata-rata lama menginap wisatawan nusantara lebih rendah yaitu dua sampai dengan tiga hari. Jika dibandingkan dalam tiga tahun terakhir, nilai rata-rata lama menginap wisatawan nusantara pada hotel berbintang berada pada rentang dua sampai dengan tiga hari.

3.21.3. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Adanya aktivitas wisata di DKI Jakarta turut berperan serta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Baik wisatawan mancanegara maupun domestik berkontribusi pada PAD di DKI Jakarta yang didapatkan dari berbagai pajak seperti hotel, restoran, hiburan, dan retribusi.



Gambar 3.175. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2020

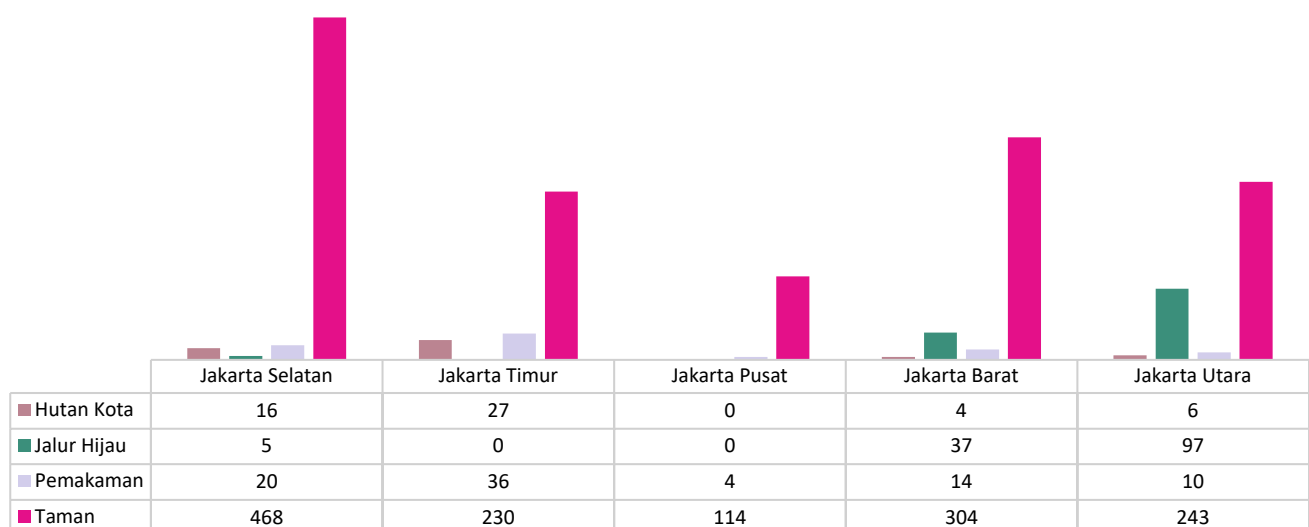
Sumber: Pusat Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Jumlah PAD DKI Jakarta pada tahun 2020 sebanyak 2,91 triliun rupiah. Pajak restoran menyumbang kontribusi terbesar pada PAD di DKI Jakarta sebanyak 320 miliar rupiah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan retribusi daerah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tidak adanya PAD dari retribusi pada bulan April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, dan November disebabkan karena Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, penduduk DKI Jakarta diberikan keringanan/penghapusan sanksi administrasi.

PAD pada tahun 2020 sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan total PAD tahun 2019, PAD pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 53,56% atau sebanyak 3,36 triliun rupiah. Pergerakan tren PAD 2019 juga relatif stabil dibandingkan dengan PAD pada tahun 2020, dapat dilihat dari gambar di atas pada bulan April dan Mei saat kebijakan PSBB berlangsung menjadi awal titik penurunan tren PAD DKI Jakarta.

3.22. Kehutanan

Ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) sebagai konsep ruang terbuka hijau (RTH) didefinisikan menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagai tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan sepuluh program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan program kota layak anak. RTH taman yang dapat berupa hutan kota, jalur hijau, dan taman dapat dimanfaatkan oleh warga untuk bermain, berolahraga, berkreaitivitas, bersosialisasi, dan media ekspresi.

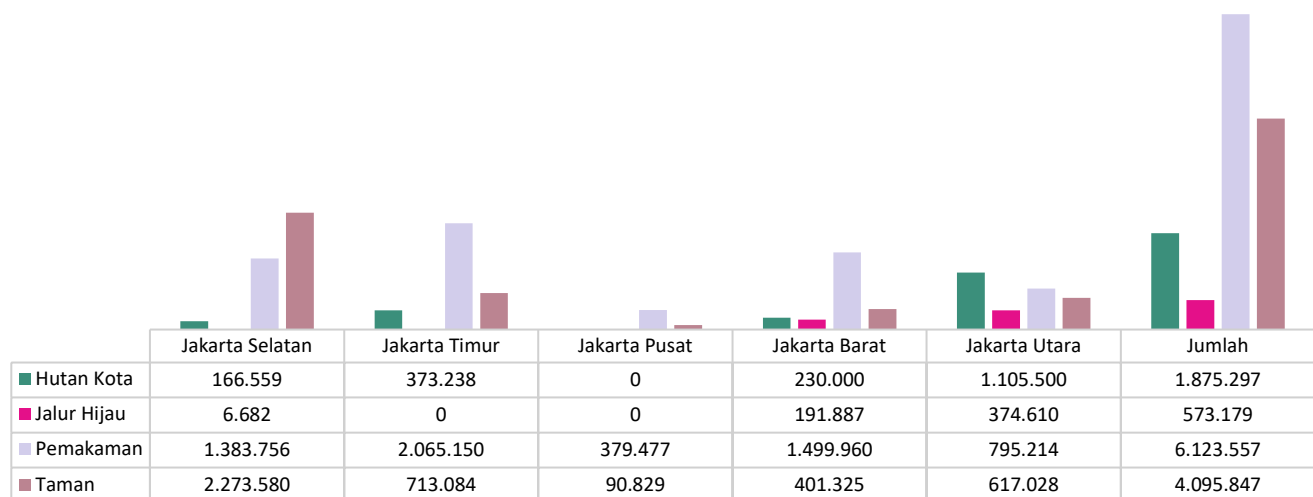


Gambar 3.176. Jumlah Titik Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Menurut Kota Administrasi Tahun 2020

Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.635 titik RTH yang tersebar di DKI Jakarta. Di antara titik-titik tersebut, bentuk RTH yang paling banyak berada di DKI Jakarta adalah taman dengan jumlah 1.359 titik. Sedangkan, bentuk RTH yang paling sedikit adalah hutan kota dengan jumlah 53 titik. Berdasarkan penyebarannya, Jakarta Selatan memiliki RTH terbanyak dengan 509 titik. Sedangkan, wilayah administrasi dengan RTH paling sedikit adalah Jakarta Pusat dengan 118 titik. Selain itu, Jakarta Pusat juga menjadi satu-satunya kota administrasi yang tidak memiliki hutan kota. Dua kota administrasi yang tidak mempunyai jalur hijau adalah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Berdasarkan data di atas juga dapat terlihat tidak adanya Hutan Kota di Jakarta Pusat, hal ini dapat disebabkan karena wilayah ini yang lebih diperuntukkan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

Berbagai cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan hutan kota seperti pengembangan jalur hijau sepanjang jalan raya dan penanaman pohon-pohon di wilayah pemakaman. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Republik Indonesia Nomor P.71 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota menjelaskan bahwa penyelenggaraan hutan kota meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan, dan pengelolaan. Dalam Permenhut Republik Indonesia Nomor P.71 ini dijelaskan bahwa khusus untuk DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta mempunyai wewenang dalam penunjukan lokasi dan luas hutan kota berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka memperluas kawasan RTH dan kota di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penutupan berbagai usaha yang terletak di kawasan hijau, penertiban bangunan liar di sempadan sungai, dan pembangunan hutan kota skala kecil dengan membeli lahan menggunakan dana APBD.



Gambar 3.177. Luas Ruang Terbuka Hijau (m²) di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Pertamanan dan Hutan Provinsi DKI Jakarta

Luas dari RTH yang ada di DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah 12.667.879 m². Data dari Distamhut Provinsi DKI Jakarta menunjukkan walaupun taman merupakan bentuk RTH terbanyak di DKI Jakarta, namun ternyata secara luas masih menempati urutan kedua setelah pemakaman dengan luas yang mencapai 4.095.847 m². Berdasarkan total luas di masing-masing kota administrasi di DKI Jakarta, Jakarta Selatan masih menjadi kota administrasi yang memiliki RTH terluas sebesar 3.830.577 m². Namun, Jakarta Pusat masih menjadi kota administrasi dengan RTH tersempit dengan luas 470.306 m². Hal ini berbanding lurus dengan kuantitas RTH yang paling sedikit di wilayah ini.

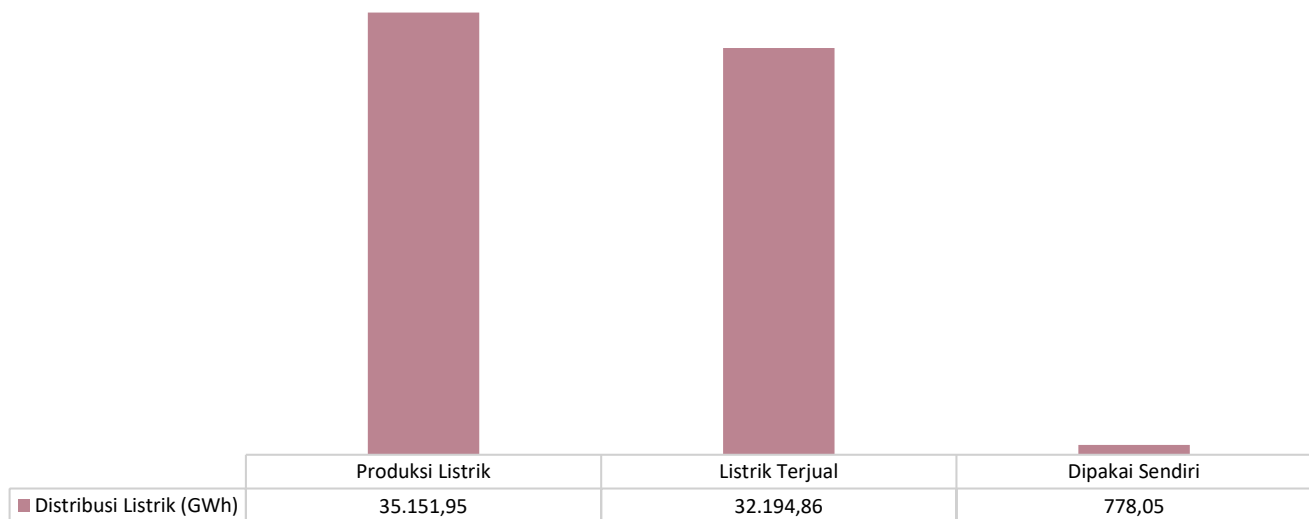
Jakarta Utara merupakan wilayah administrasi yang memiliki kawasan hutan terluas di DKI Jakarta. Sebesar 99,96% atau seluas 162.527,10 hektare kawasan hutan dan perairan di DKI Jakarta diperuntukkan sebagai hutan produksi terbatas. Selain itu, seluas 44,76 hektare dan 25,02 hektare diperuntukkan bagi hutan lindung dan suaka alam dan pelestarian alam. RTH merupakan salah satu program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan rekreasi. RTH di DKI Jakarta dikelola oleh para pengelola taman Distamhut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Bidang Jalur Hijau, Bidang Kehutanan, Bidang Taman Kota, dan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan. Selain berbagai bidang dan unit pengelola taman, terdapat juga suku dinas kota di DKI Jakarta yang turut serta mengelola ruang terbuka hijau. Fasilitas yang ada di setiap RTH mendukung masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti olahraga, rekreasi, berkumpul bersama keluarga, dan lain-lain. Oleh karena itu, masyarakat DKI Jakarta diharapkan dapat memanfaatkan RTH ini dengan baik agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.

3.23. Energi dan Sumber Daya Mineral

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi kota dengan banyak kegiatan, mulai dari kegiatan rumah tangga sampai dengan kegiatan bisnis dan ekonomi. Salah satu sumber daya yang digunakan untuk menopang berbagai kegiatan tersebut adalah tenaga listrik. Jumlah rumah tangga, perkantoran, tempat ibadah, dan berbagai kegiatan lainnya yang banyak di DKI Jakarta menyebabkan jumlah pelanggan dan pemakaian listrik di DKI Jakarta sangat tinggi.

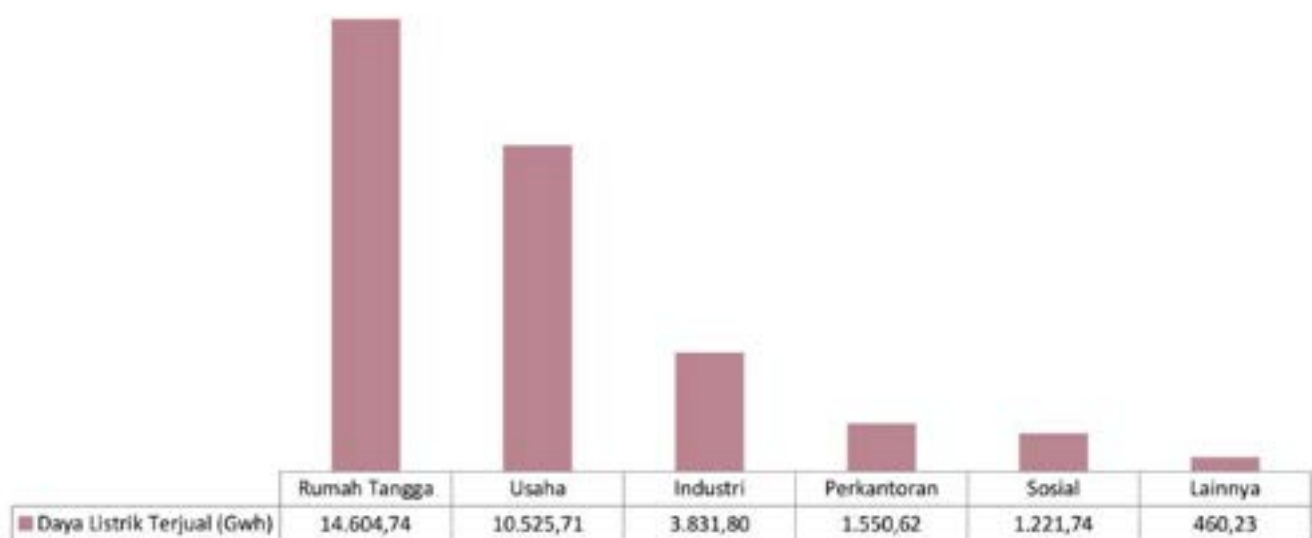
Listrik merupakan salah satu kebutuhan wajib masyarakat. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang sebagian besar menggunakan listrik. Mulai dari memasak, mandi, hingga bekerja membutuhkan listrik. Distribusi listrik dapat didefinisikan sebagai suatu tenaga listrik yang menyalurkan tegangan ke penduduk agar penduduk bisa mendapatkan akses listrik. Di era digital ini, kebutuhan masyarakat akan akses listrik semakin menjadi esensial. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah pelanggan listrik di DKI Jakarta sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun ini, jumlah pelanggan listrik di DKI Jakarta meningkat sebesar 18,75% atau sebanyak 750 ribu pelanggan. Namun, terjadi penurunan jumlah pelanggan listrik di DKI Jakarta dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 1,17 juta. Penurunan jumlah pelanggan listrik yang terjadi pada kurun waktu tersebut dapat disebabkan karena penambahan jumlah penerima subsidi listrik, sehingga tidak dihitung sebagai penambahan jumlah pelanggan.





Gambar 3.178. Distribusi Listrik PT PLN pada Golongan/Ranting PLN (GWh) di DKI Jakarta Menurut Unit Pelayanan Pelanggan Tahun 2020 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Jika dilihat dari distribusi listrik menurut Unit Pelayanan Pelanggan PT PLN dari tahun 2018 sampai dengan 2020, jumlah produksi listrik di DKI Jakarta mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan. Dalam rentang tiga tahun terakhir ini, tahun 2018 merupakan tahun dengan distribusi listrik untuk dipakai sendiri paling sedikit yaitu 123,24 Gigawatt hour (GWh). Produksi dan penjualan listrik PT PLN mengalami penurunan masing-masing sebanyak 2.361,37 dan 1.913,11 GWh pada tahun 2020. Penurunan nilai produksi listrik dan listrik yang terjual pada tahun 2020 tidak berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah pelanggan yang terjadi pada tahun 2020.



Gambar 3.179. Jumlah Daya Terjual (GWh) di DKI Jakarta Menurut golongan Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Penurunan produksi listrik pada tahun 2020 berbanding lurus dengan jumlah listrik yang terjual. Dapat terlihat dari gambar di atas bahwa jumlah daya listrik terjual mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, hanya golongan rumah tangga yang mengalami kenaikan jumlah daya listrik terjual sebesar 4,35% atau sebanyak 609,25 GWh. Meningkatnya jumlah daya listrik terjual pada kategori ini dapat disebabkan karena peralihan tempat kerja dari kantor ke rumah masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, pemberlakuan pembelajaran dari rumah menjadi faktor yang

menyebabkan meningkatnya jumlah daya listrik terjual pada golongan rumah tangga. Ditutupnya kegiatan operasional dari berbagai usaha pada kategori non esensial selama penerapan PSBB di DKI Jakarta juga berdampak pada berkurangnya jumlah daya terjual pada golongan usaha.



Gambar 3.180. Jumlah Pelanggan Listrik (Ribuan) di DKI Jakarta Menurut Golongan Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, kelompok industri dan perkantoran mengalami penurunan pelanggan listrik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan listrik menurut golongan di DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan pada golongan sosial sebesar 1,24 ribu, golongan rumah tangga sebesar 162,52 ribu, golongan usaha sebesar 7,32 ribu, dan golongan lainnya sebesar 970 ribu. Dari keenam golongan pelanggan listrik di DKI Jakarta pada tahun 2020, rumah tangga adalah golongan yang mengalami kenaikan jumlah pelanggan listrik paling tinggi sebanyak 162,52 ribu. Hal ini masih bisa dikaitkan dengan himbauan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama pandemi Covid-19 yang menyebabkan perkantoran dan industri tidak didatangi terlalu banyak orang atau bahkan tidak sama sekali didatangi sehingga adanya pengurangan jumlah pelanggan listrik, berbanding terbalik dengan kelompok rumah tangga yang mengalami kenaikan jumlah pelanggan.

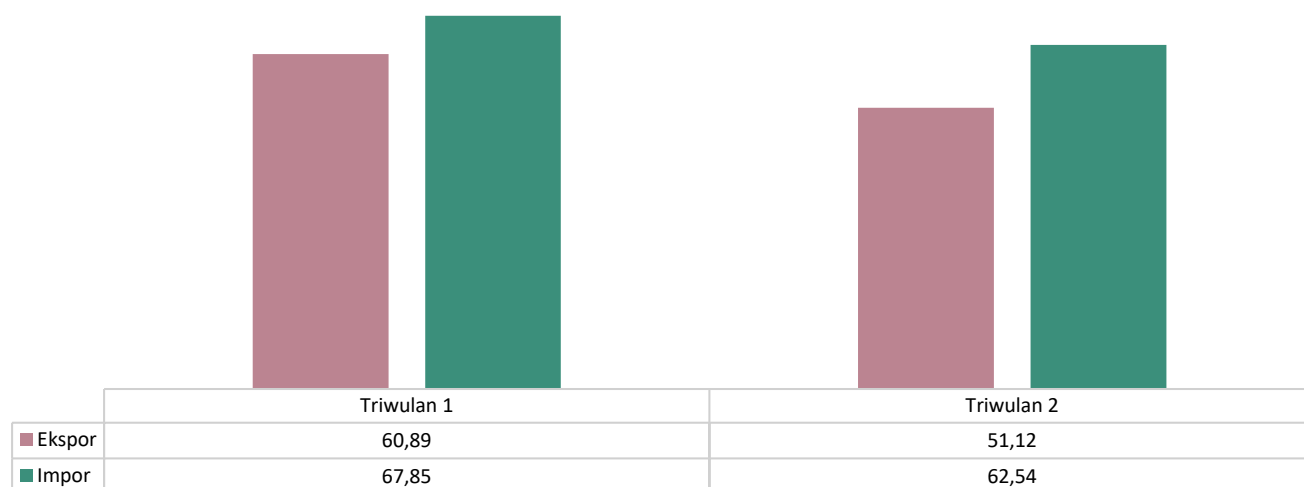
Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo mengenai pembebasan biaya tarif listrik pelanggan 450 Volt Ampere (VA) serta pemberian keringanan tagihan sebesar 50% kepada pelanggan listrik bersubsidi 900 VA, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, pemerintah menetapkan mekanisme penyelenggaraan pemberian stimulus tarif listrik kepada para pelanggan dalam kategori tersebut melalui Siaran Pers Kementerian ESDM Republik Indonesia Nomor 141.Pers/04/SJI/2020 pada 1 April 2020. Dalam siaran pers tersebut dijelaskan bahwa keringanan listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA bagi pelanggan regular maupun paskabayar dibebaskan dari biaya pemakaian dan beban.

3.24. Perdagangan

Setelah Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk melakukan PSBB guna memutus rantai Covid-19, laju perekonomian di Republik Indonesia pun terkena dampaknya. Dengan ditutupnya beberapa jalur menuju dan keluar DKI Jakarta diperkirakan dapat mengganggu alur pengantaran barang-barang untuk ekspor dan impor. Salah satu yang diwaspadai adalah terganggunya neraca perdagangan di DKI Jakarta. Neraca perdagangan adalah indikator yang digunakan untuk transaksi internasional didapatkan dari pengurangan nilai ekspor terhadap nilai impor dalam kurun waktu tertentu.

3.24.1. Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Selain nilai konsumsi penduduk, investasi, dan pengeluaran pemerintah, nilai ekspor dan impor juga merupakan komponen yang berkontribusi terhadap meningkatnya nilai PDRB.



Gambar 3.181. Rasio Ekspor Impor dalam Struktur Produk Domestik Regional Bruto di DKI Jakarta
Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada triwulan pertama tahun 2020, rasio impor DKI Jakarta mencapai 60,89%. Nilai ini meningkat sebesar 2,43 poin dari triwulan pertama tahun sebelumnya. Sedangkan, rasio impor pada triwulan kedua tahun 2020 menurun sebesar 2,73 poin jika dibandingkan dengan rasio impor pada triwulan kedua tahun sebelumnya. Rasio ekspor DKI Jakarta menyentuh angka 60,89% pada triwulan pertama, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,43 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Pada triwulan kedua tahun 2020, rasio ekspor DKI Jakarta turun sebesar 9,77 poin jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2020. Jumlah tersebut juga menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 pada periode yang sama. Penurunan nilai ekspor DKI Jakarta ini merupakan dampak dari Covid-19 yang melemahkan perekonomian secara global dan menurunnya aktivitas ekonomi domestik yang disebabkan oleh kebijakan PSBB yang berlaku di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah kegiatan ekspor dan impor. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki pelabuhan untuk melakukan ekspor dan impor yaitu Tanjung Priok. BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat beberapa komoditas ekspor yaitu kendaraan, perhiasan, karet, barang-barang rajutan, dan lain-lain. Selain sebagai tempat ekspor, Pelabuhan Tanjung Priok juga menerima komoditas dari luar Indonesia seperti plastik, kendaraan, besi, baja, perangkat optik, dan lain-lain. Ekspor barang asal DKI Jakarta adalah ekspor barang-barang yang secara administrasi tercatat sebagai barang yang berasal dari DKI Jakarta, termasuk barang yang diproduksi di DKI Jakarta maupun barang produksi dari wilayah lain yang disimpan di DKI Jakarta.

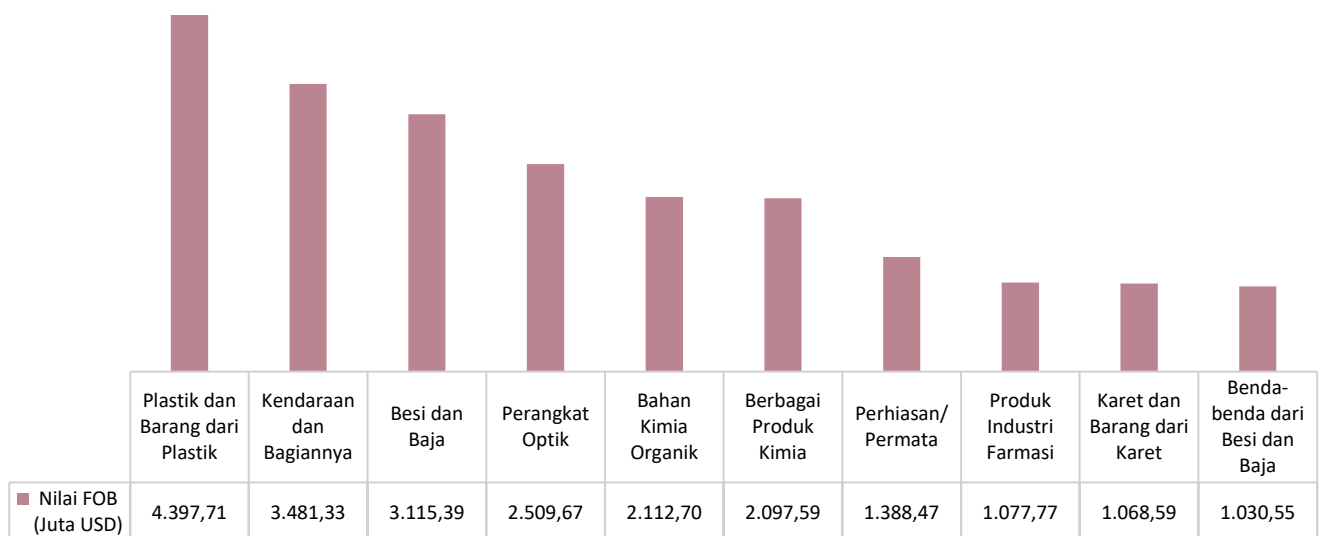




Gambar 3.182. Sepuluh Komoditas Utama Ekspor dengan Nilai *Free on Board* Tertinggi (Juta USD) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Free on board (FOB) diketahui sebagai proses penyerahan barang antara importir dan eksportir bersamaan dengan kesepakatan harga yang dihitung dari harga barang dan semua biaya sampai barang berada di atas kapal. Dari FOB tersebut, kendaraan dan bagiannya, serta perhiasan/permata mendominasi ekspor di DKI Jakarta sebesar 40,53% atau senilai 11.635,39 juta USD. Adapun kendaraan yang diekspor dari DKI Jakarta seperti komponen kendaraan yang diperuntukkan ke pabrik mobil atau *original equipment manufacturer*.

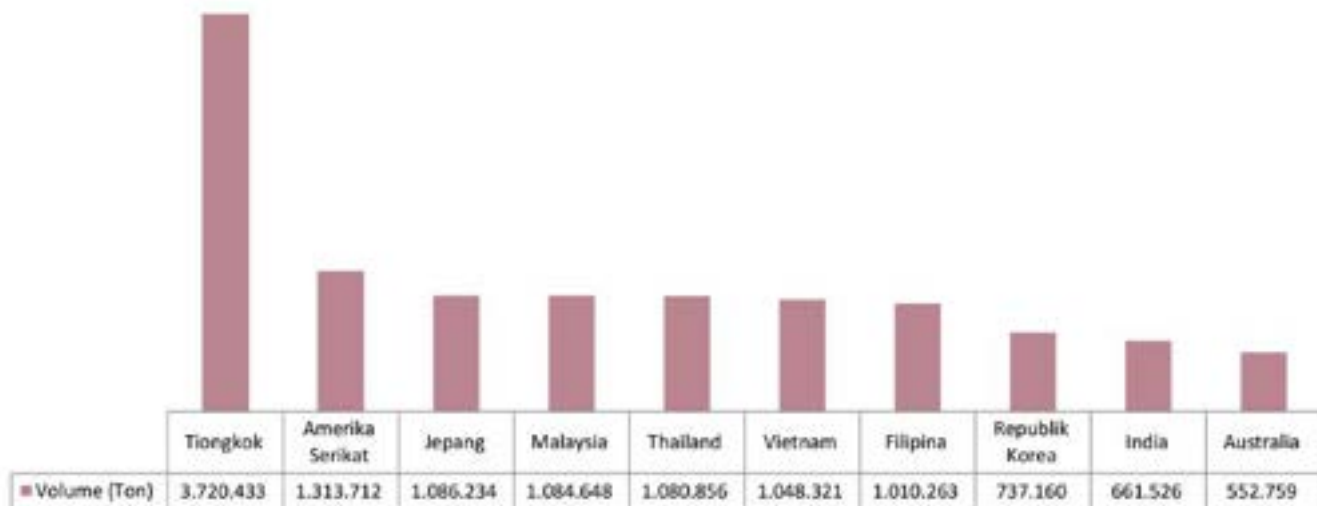


Gambar 3.183. Sepuluh Komoditas Utama Impor dengan Nilai *Free on Board* Tertinggi (Juta USD) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

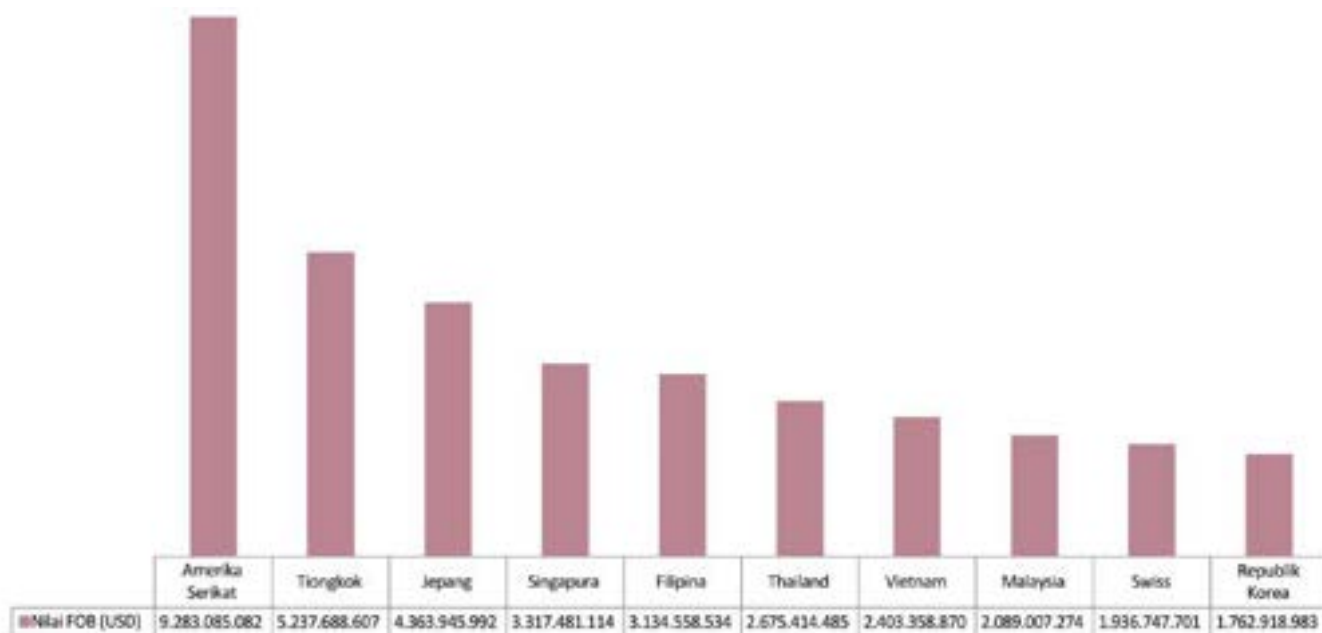
Berbeda dengan ekspor, nilai FOB impor tertinggi didominasi oleh komoditas plastik dan barang sebesar 19,74% atau senilai 4.397,71 juta USD. Indonesia secara umum mengimpor komoditas plastik dalam jumlah yang besar dikarenakan tingginya permintaan akan plastik untuk menopang proses produksi di berbagai sektor industri di tanah air seperti makanan, minuman, farmasi, elektronik, dan kosmetik.





Gambar 3.184. Sepuluh Negara Tujuan Ekspor Terbesar (Ton) di DKI Jakarta Menurut Volume Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

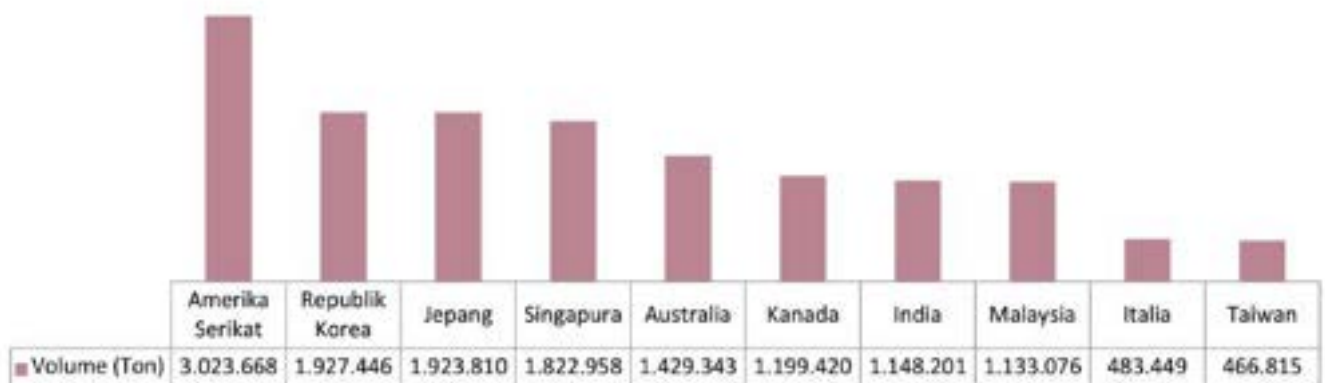
Pada tahun 2020, Tiongkok menjadi tujuan ekspor terbesar berdasarkan volumenya dengan persentase sebesar 30,35% atau sebanyak 3.720.433 ton. Angka ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan tujuan ekspor lainnya seperti Amerika Serikat yang berada pada peringkat kedua dengan 1.313.712 ton.



Gambar 3.185. Sepuluh Negara Tujuan Ekspor Terbesar dari DKI Jakarta Menurut Nilai Free on Board (USD) Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

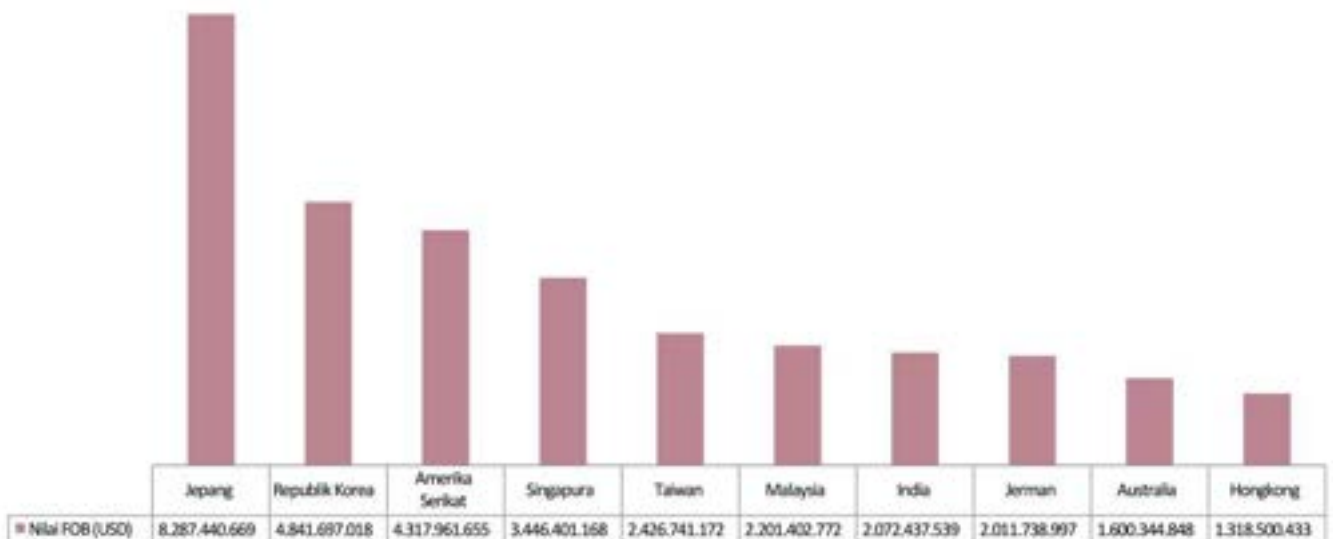
Walaupun Tiongkok berada di peringkat pertama tujuan ekspor berdasarkan volumenya, namun Amerika Serikat paling tinggi berdasarkan nilai FOB. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa selisih nilai ekspor menurut nilai FOB antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebesar 4.045 juta USD. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan barang ekspor antara kedua negara ini. Jika dilihat dari volumenya, ekspor menuju Tiongkok cenderung barang seperti besi dan baja. Sedangkan, komoditas ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat seperti kendaraan dan perhiasan.





Gambar 3.186. Sepuluh Negara Pengimpor Terbesar ke DKI Jakarta Menurut Volume (Ton) Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

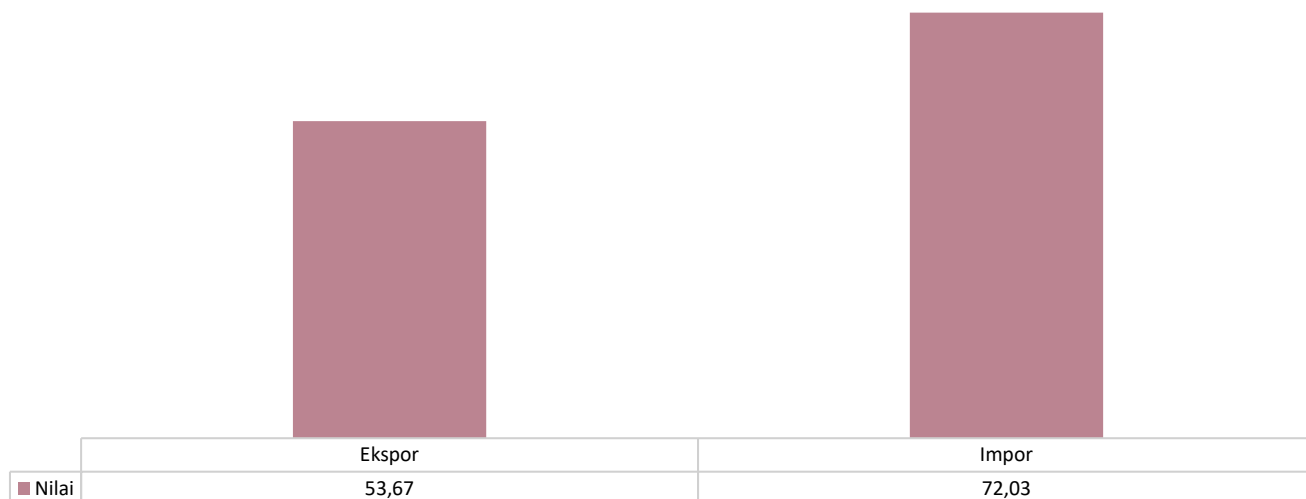
Pada tahun 2020, negara pengimpor terbesar ke DKI Jakarta menurut volume (ton) adalah Amerika Serikat sebanyak 3.023.668 ton. Adapun komoditas impor dari Amerika Serikat seperti kedelai, daging jenis lembu, dan susu. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa Tiongkok tidak masuk dalam sepuluh negara pengimpor terbesar ke DKI Jakarta menurut volume pada tahun 2020.



Gambar 3.187. Sepuluh Negara Pengimpor Terbesar Menurut Nilai *Free on Board* (USD) Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

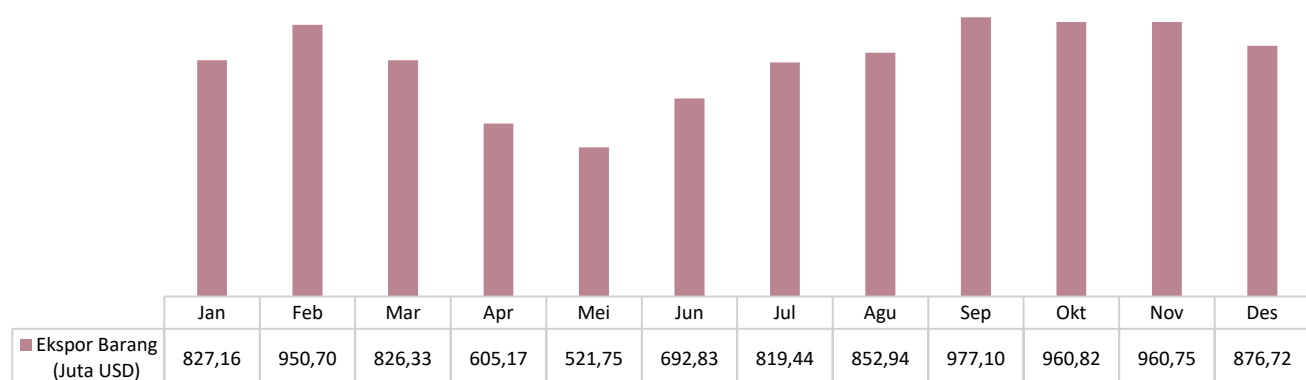
Jika dilihat dari nilai FOB pada negara pengimpor di DKI Jakarta terbesar adalah Jepang. Negeri sakura ini menempati urutan pertama dengan nilai FOB sebesar 8.287.440 juta USD. Nilai ini disusul oleh Republik Korea pada urutan kedua dengan nilai 4.841.697 juta USD.





Gambar 3.188. Ekspor dan Impor Melalui DKI Jakarta (Miliar USD) Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Peningkatan ekspor dari tahun 2010 sampai dengan 2020 sebesar 48,71% atau 17,58 miliar USD. Dalam 10 tahun terakhir, nilai ekspor di DKI Jakarta mencapai 510,83 miliar USD. Angka ini jauh dari yang diharapkan karena neraca perdagangan DKI Jakarta bernilai -398,44 miliar USD. Dalam rentang waktu ini, neraca perdagangan paling rendah berada pada tahun 2012 dengan nilai -57,28 miliar USD. Nilai ini menunjukkan bahwa kebijakan internasional lebih berdampak kepada nilai impor dibandingkan dengan nilai ekspor.



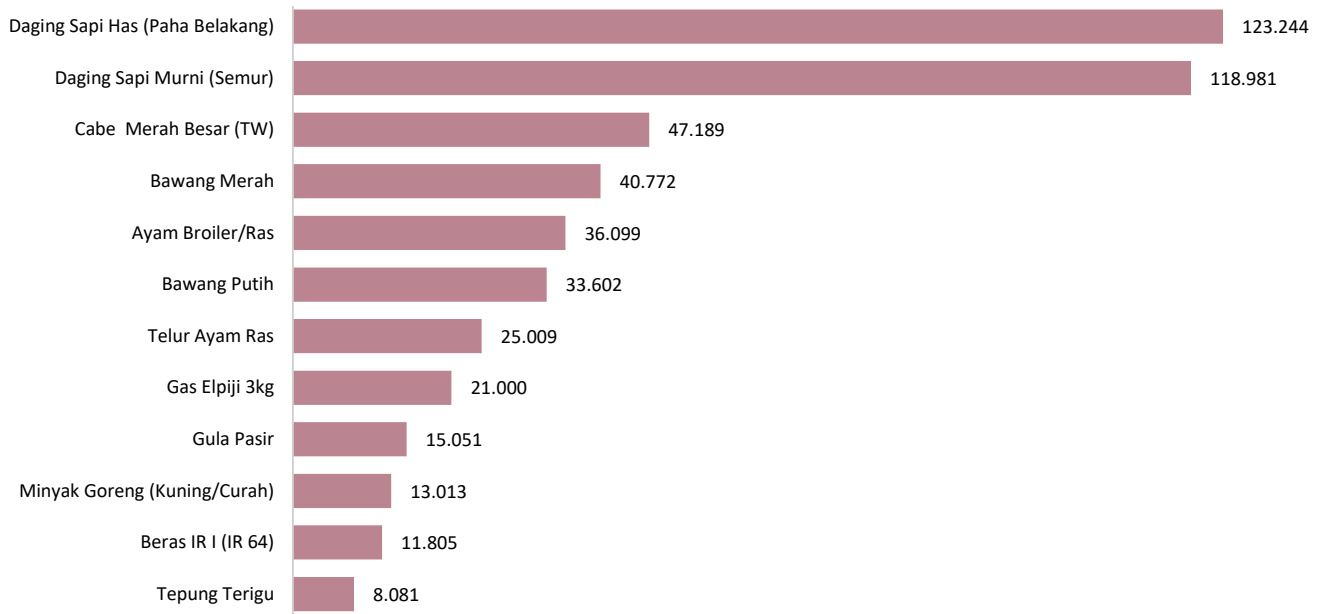
Gambar 3.189. Ekspor Barang Asal DKI Jakarta (Juta USD) Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Nilai ekspor di DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 5,86% atau senilai 613,94 juta USD. Walaupun salah satu penyebabnya adalah faktor PSBB sehingga terjadi pembatasan dan penutupan akses baik ke luar maupun ke dalam DKI Jakarta, nilai ekspor tiga bulan paska pengumuman PSBB bukanlah nilai yang buruk. Terdapat empat bulan dengan nilai ekspor yang berada di bawah rata-rata nilai ekspor barang pada tahun 2020 yaitu pada bulan April sampai dengan Juli yang berada di bawah 822,64 juta USD.



3.24.2. Komoditas Pangan

Komoditas pangan menjadi salah satu sektor yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan selain menjadi bahan pokok primer di kalangan masyarakat, harga yang tidak stabil dan ketersediaan komoditas pangan yang menipis bisa menjadi permasalahan baru di masyarakat. Dapat dilihat pada bulan Februari 2020, harga cabai merah sempat menembus angka Rp.85.483,00 per kilogram. Ketika persediaan menipis dan permintaan masyarakat meningkat, maka tidak menutup kemungkinan harga komoditas pangan akan meningkat.

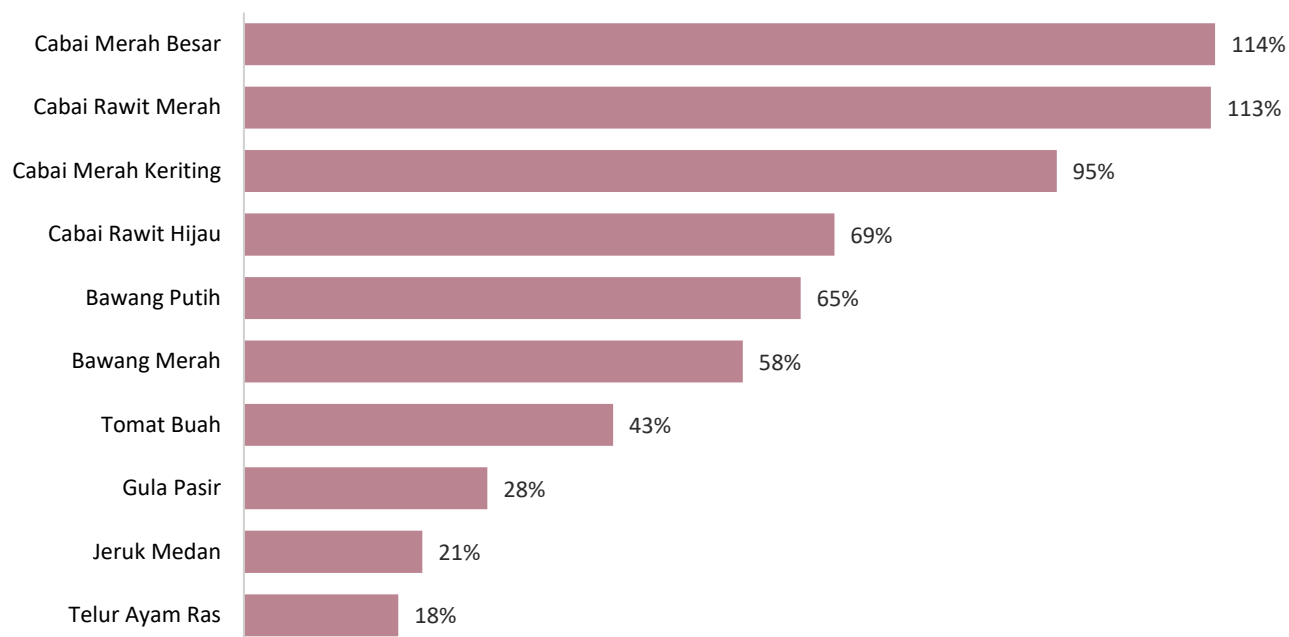


Gambar 3.190. Harga Rata-Rata Bahan Pangan Utama (Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Infopanganjakarta.go.id, data diolah

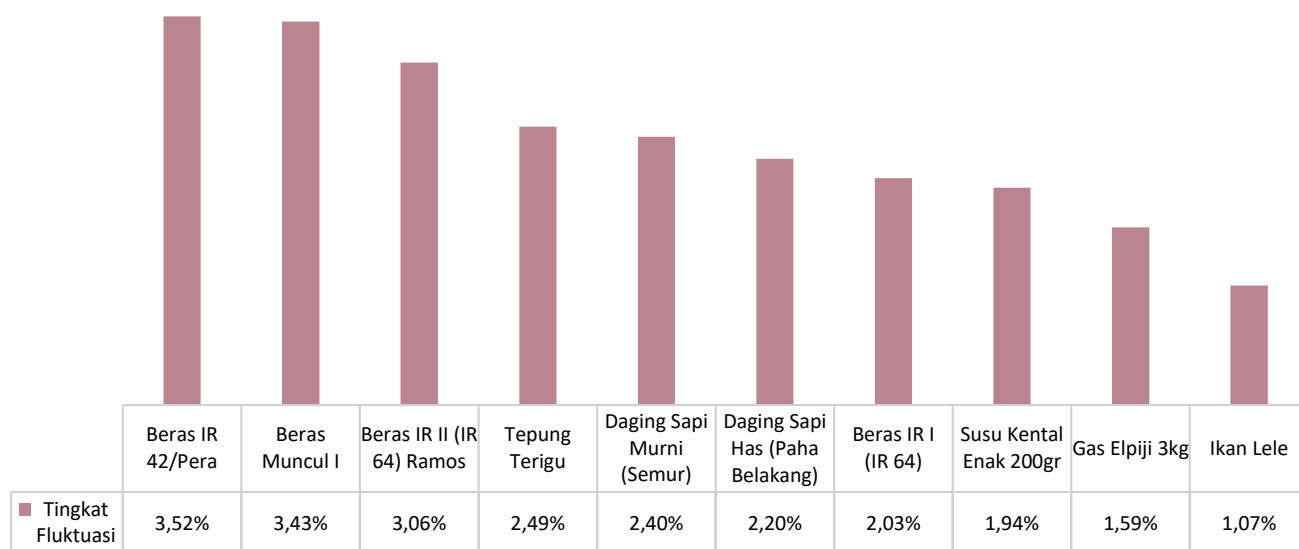
Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa tidak ada perubahan atau perbedaan harga rata-rata bahan pangan utama yang signifikan dari tahun 2019 ke 2020. Dimulainya pembatasan di beberapa wilayah sejak Maret 2020 yang diiringi dengan banyaknya penduduk yang diputuskan hubungan kerja, namun hal tersebut tidak memengaruhi kenaikan harga rata-rata kebutuhan pangan secara signifikan di DKI Jakarta. Rata-rata harga bahan pangan utama yang tidak mengalami kenaikan pada tahun 2020 adalah cabai merah dan daging sapi has (paha belakang).





Gambar 3.191. Sepuluh Komoditas Pangan dengan Tingkat Fluktuasi Harga Tertinggi (persen) di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Infopanganjakarta.go.id, data diolah

Varian cabai yang meliputi cabai merah besar, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan cabai rawit hijau mendominasi lima besar komoditas pangan dengan tingkat fluktuasi harga tertinggi pada tahun 2020. Selain cabai, bawang putih dan bawang merah termasuk dalam tingkat fluktuasi harga tertinggi walau tidak mencapai 100%. Tingginya tingkat fluktuasi disebabkan karena dua hal yaitu tingginya kebutuhan pasar dan faktor cuaca yang menyebabkan turunnya produksi komoditas pangan.



Gambar 3.192. Sepuluh Komoditas Pangan dengan Tingkat Fluktuasi Harga Terendah (persen) di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Infopanganjakarta.go.id, data diolah

Berbeda dengan komoditas pangan sebagai kebutuhan pokok yang paling sering digunakan, ikan lele menjadi komoditas pangan dengan tingkat fluktuasi harga terendah yaitu 1,07%. Hal ini dapat disebabkan karena ikan lele selalu memenuhi kebutuhan pasar. Gas elpiji merupakan salah satu komoditas pangan dengan tingkat fluktuasi harga terendah setelah ikan lele. Walau gas elpiji dibutuhkan dan memiliki tingkat pembelian yang cukup tinggi, namun stok gas elpiji selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



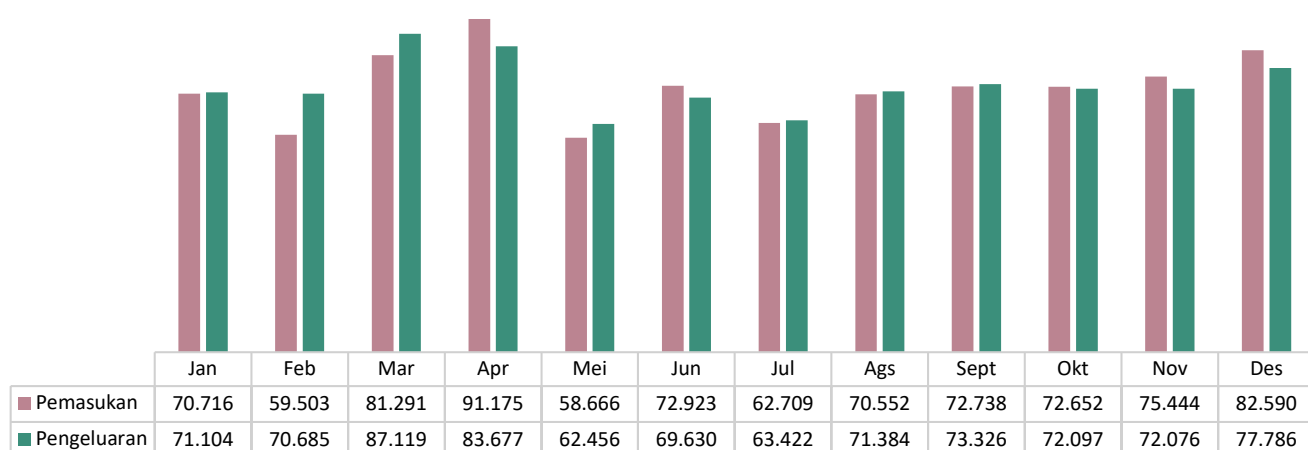
	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agu-20	Sep-20	Okt-20	Nov-20	Des-20
Beras IR III (IR 64)	9.853	9.780	9.866	10.200	9.909	9.848	9.846	9.807	9.739	9.710	9.734	9.724
Beras Setra I/Premium	12.298	12.451	12.772	12.757	12.716	12.710	12.674	12.556	12.534	12.422	12.487	12.417
Beras IR 42/Pera	12.214	12.471	12.499	12.652	12.544	12.516	12.510	12.505	12.416	12.321	12.332	12.321
Beras Muncul I	12.462	12.593	12.857	12.726	12.798	12.767	12.692	12.703	12.633	12.485	12.451	12.424
Beras IR II (IR 64) Ramos	10.903	10.884	10.979	11.107	10.977	10.929	10.865	10.807	10.813	10.784	10.796	10.774
Beras IR I (IR 64)	11.797	11.825	11.916	11.919	11.835	11.827	11.834	11.748	11.815	11.713	11.749	11.680

Gambar 3.193. Tren Harga Beras (Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: infopanganjakarta.go.id, data diolah

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa sepanjang tahun 2020, harga beras dari berbagai jenis mengalami fluktuasi. Terdapat kenaikan harga pada beberapa jenis beras seperti Beras IR III (IR64) yang mengalami kenaikan sebesar Rp334,00 pada bulan April, Beras Setra I/Premium dan Beras Muncul I yang mengalami kenaikan pada bulan Maret masing-masing sebesar Rp321,00 dan Rp264,00. Berdasarkan gambar tren harga beras dapat terlihat juga bahwa kenaikan harga beras banyak terjadi pada Maret dan April 2020. Hal ini dapat disebabkan karena pada bulan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO) atau yang sering disebut Organisasi Pangan dan Pertanian, Indonesia berada pada peringkat ketiga sebagai negara penghasil padi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 54,65 juta ton pada tahun 2020. Hal ini menjadi kabar baik karena dengan tingginya hasil produksi beras, diharapkan harga beras di seluruh daerah bisa stabil dan merata bahkan di beberapa kesempatan seperti hari-hari besar nasional.

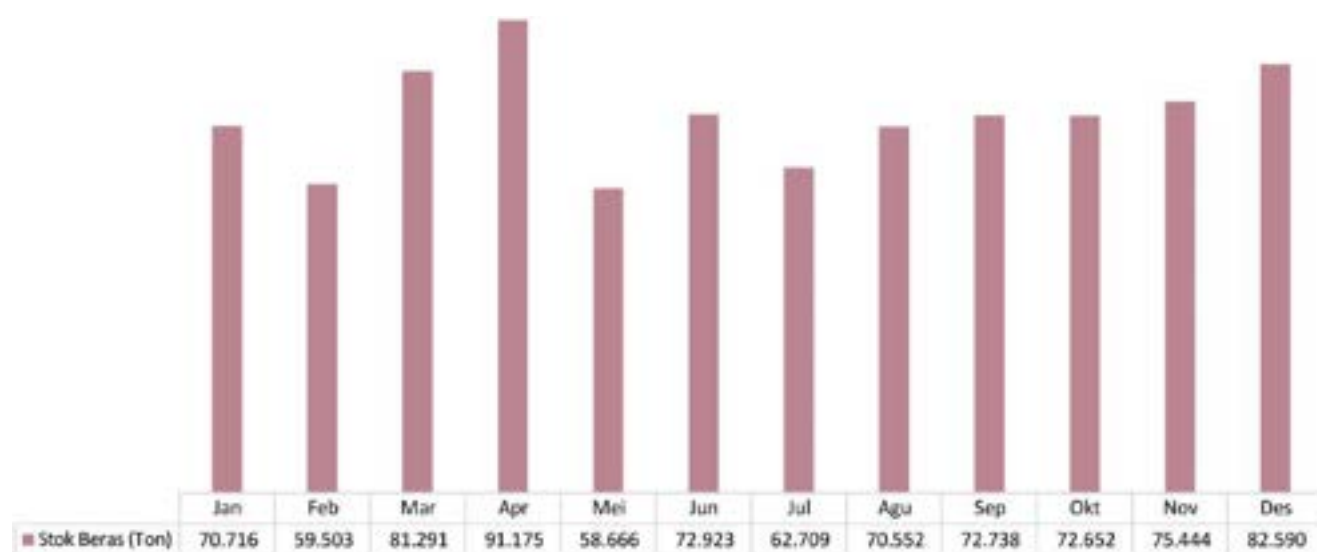


Gambar 3.194. Pemasukan dan Pengeluaran Stok Beras (Ton) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: PT Food Station Tjipinang Jaya, data diolah

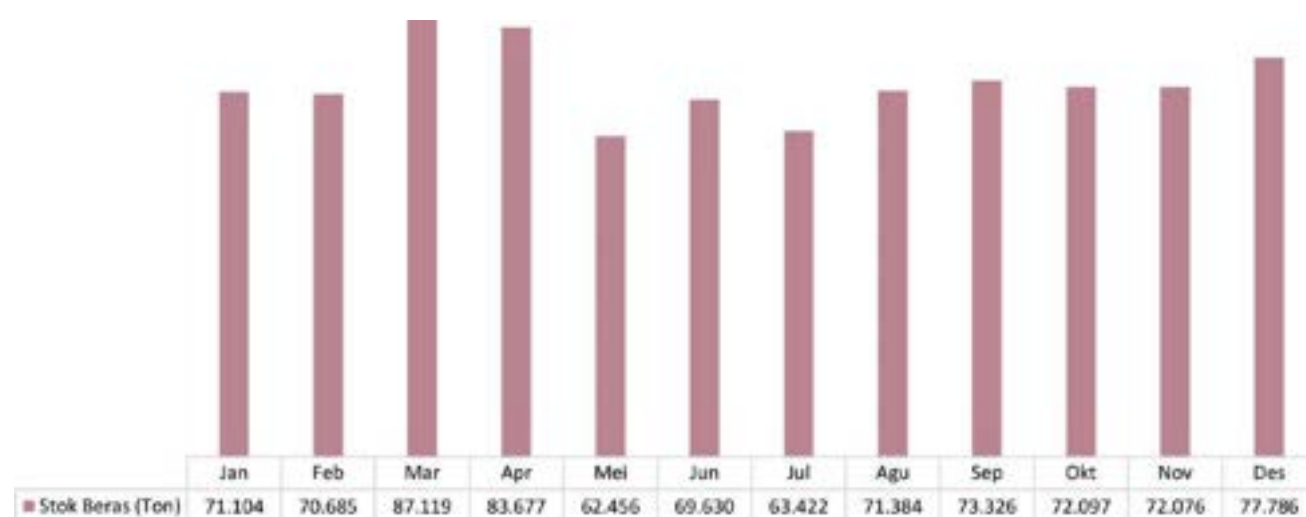
Beras adalah bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Kebutuhan akan beras sangat tinggi karena hampir setiap penduduk menjadikan beras sebagai kebutuhan pokok. Untuk menjaga gudang beras di DKI Jakarta tetap terisi, perlu adanya pemasukan dan pengeluaran kebutuhan. Pada tahun 2020,

pemasukan stok beras di DKI Jakarta mencapai 870.959 ton dan pengeluaran stok beras mencapai 874.762 ton. Walaupun terjadi defisit sebesar 3.803 ton beras, hal ini tidak akan menjadi masalah jika stok beras nasional masih mencukupi dan adanya kebijakan impor untuk menjaga kestabilan harga beras.



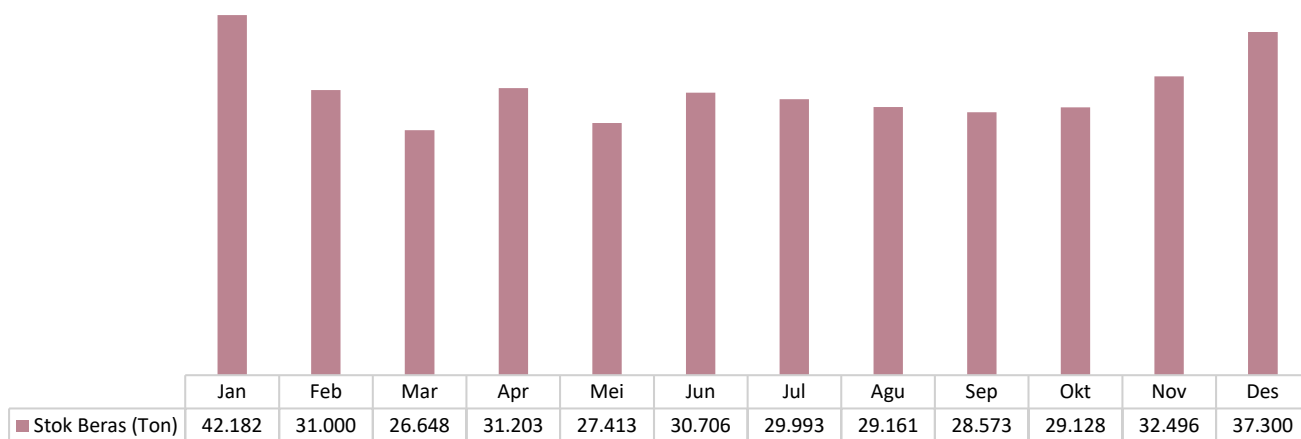
Gambar 3.195. Pemasukan Stok Beras (Ton) di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: PT Food Station Tjipinang Jaya, data diolah

Selama dua tahun terakhir, pemasukan stok beras mengalami penurunan sebesar 1,44% atau sebanyak 12.716 ton. Walau mengalami penurunan, strategi menjaga kestabilan pangan di DKI Jakarta tetap menjadi yang utama. Terjadi peningkatan pemasokan dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2019 yang disebabkan dalam rangka menjaga kestabilan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri pada Juni 2019. Begitu juga untuk Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2020 yang jatuh pada bulan Mei, terdapat peningkatan yang sama dalam tiga bulan sebelum lebaran.



Gambar 3.196. Pengeluaran Stok Beras (Ton) di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: PT Food Station Tjipinang Jaya, data diolah

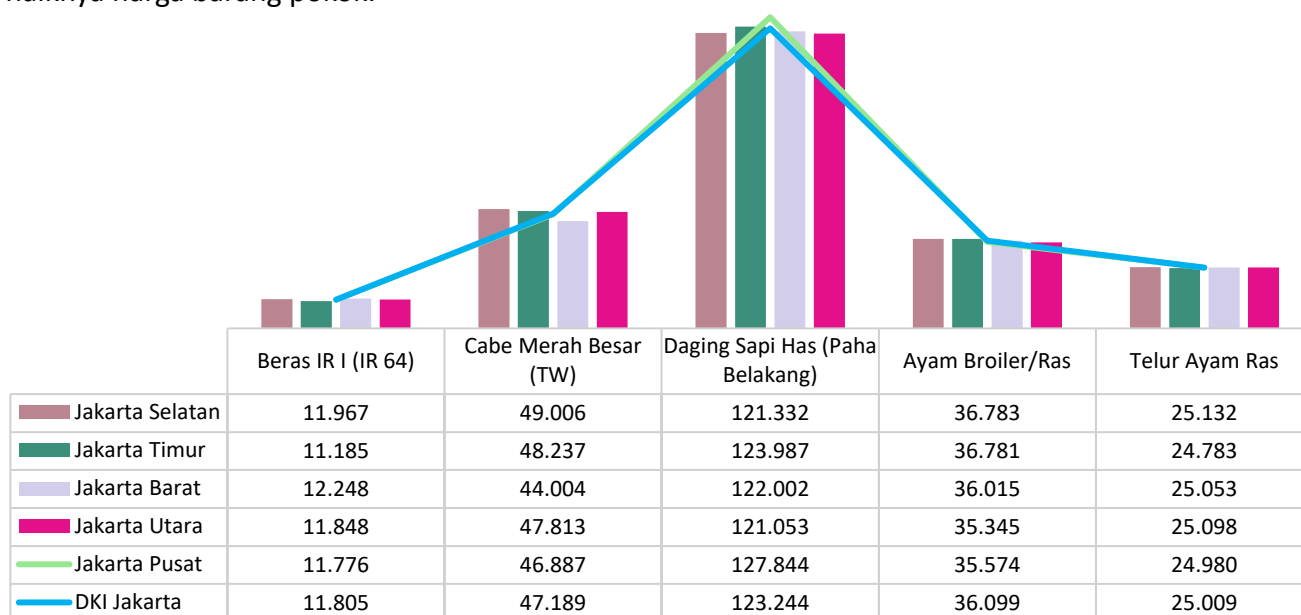
Pada tahun 2019, kebutuhan pangan di DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari pemasukan stok beras yang lebih banyak sebesar 12.716 ton dan pengeluaran stok beras yang lebih banyak sebesar 17.158 ton beras pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2020.



Gambar 3.197. Stok Beras Periode Tiap Akhir Bulan (Ton) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: PT Food Station Tjipinang Jaya, data diolah

Stok beras merupakan salah satu strategi dari pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di masyarakat. Sehingga, stok pada setiap bulan dan tahun dapat mempunyai angka yang berbeda-beda bergantung dengan kebutuhan dan ketersediaan stok. Ketika kebutuhan pasar sangat tinggi dan stok menipis, ketidakstabilan harga selalu menjadi permasalahan. Terjadi peningkatan stok beras dalam satu bulan sebelum pada Hari Raya Idul Fitri. Dengan stok sebanyak 56.200 ton, pemerintah berharap mampu menstabilkan harga beras khususnya ketika bulan suci ramadhan yang selalu diikuti dengan naiknya harga barang pokok.



Gambar 3.198. Perbandingan Harga Rata-Rata Bahan Pangan (Rupiah) di DKI Jakarta

Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020

Sumber: infopanganjakarta.go.id, data diolah

Walaupun Maret 2020 mulai diterapkannya PSBB di DKI Jakarta, namun harga rata-rata bahan pangan masih cukup terkontrol. Hal ini dapat dilihat dari selisih harga bahan pangan antar wilayah administrasi yang tidak signifikan. Selisih harga rata-rata bahan pangan paling tinggi yaitu bahan pangan daging sapi di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara sebesar Rp6.552,00. Berbeda dengan harga rata-rata bahan pangan di wilayah administrasi lainnya, bahan pangan daging sapi has (paha belakang) di Jakarta Pusat memiliki nilai paling tinggi yaitu Rp127.844,00/kg dibandingkan dengan harga daging sapi has (paha belakang) di Jakarta Utara yaitu Rp121.332,00/kg. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tidak adanya perbedaan harga yang sangat signifikan pada masing-masing bahan pangan di DKI Jakarta.

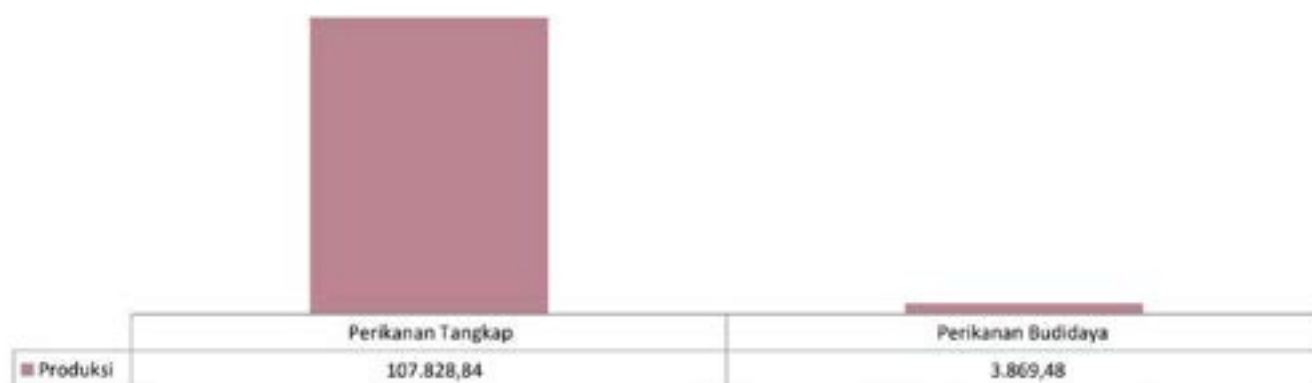
3.25. Kelautan dan Perikanan

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 81.000 km garis pantai. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia. Adapun hasil laut di Indonesia seperti Tuna, Tongkol, Cakalang, Pari, Layur, Kembung, dan lain-lain. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2020, jumlah konsumsi ikan di Indonesia mencapai 56,39 kg/kapita/tahun dan ditargetkan akan menjadi 62,50 kg/kapita/tahun pada tahun 2021³⁰.

3.25.1. Produksi Perikanan

Perikanan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan mulai dari produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Ikan merupakan salah satu asupan makanan yang kaya akan protein sebagai sumber nutrisi penting bagi manusia. Sektor perikanan merupakan sektor yang sangat menjanjikan mengingat Indonesia merupakan negara maritim.

DKI Jakarta juga memiliki laut yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan ikan. Sektor perikanan di DKI Jakarta mempunyai kontribusi dalam pengadaaan hasil perikanan. Tidak hanya hasil perikanan tangkap, DKI Jakarta juga memberikan kontribusi pada hasil perikanan budidaya. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 316 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan menjelaskan bahwa terdapat Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan, dan Pemasaran yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan kegiatan produksi, inspeksi, dan sertifikasi hasil perikanan. Dalam peraturan yang sama diatur tugas dari pusat produksi meliputi uji coba dan percontohan budidaya, penilaian mutu benih dan induk, pembenihan, penanganan hama penyakit, serta penggunaan obat ikan dan pemantauan kesehatan ikan.

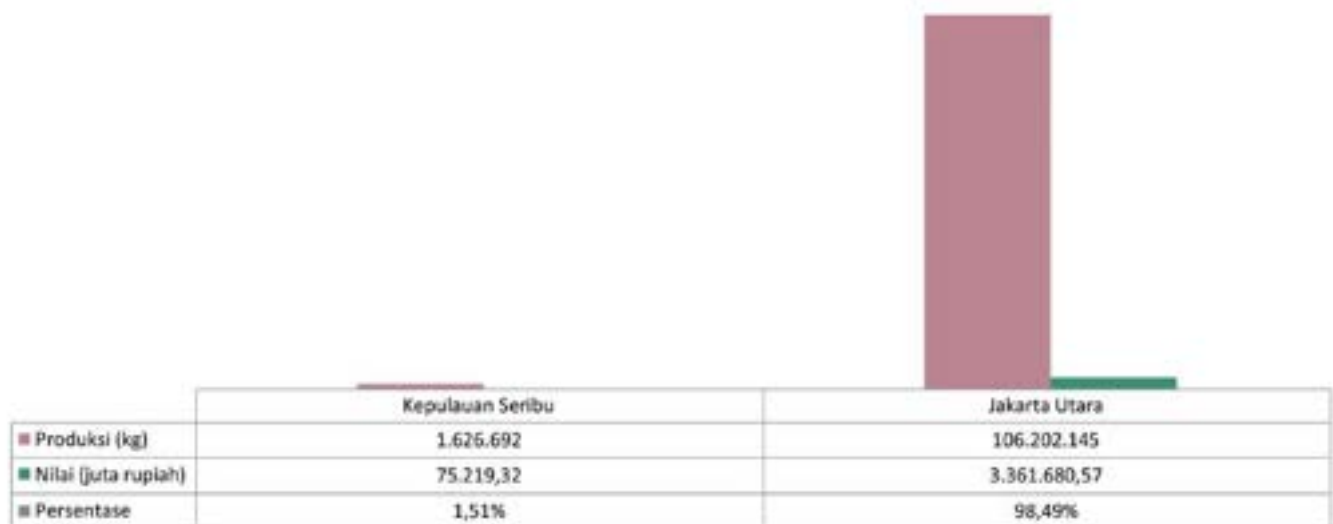


Gambar 3.199. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton) di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Produksi ikan tangkap di DKI Jakarta berasal dari Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Di Jakarta Utara, penangkapan ikan berada di Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan Nizam Zachman Jakarta. Ikan yang ditangkap di DKI Jakarta seperti ikan Bawal, Cakalang, Hiu, Layur, Lemadang, Lemuru, Lencam, Pari Kekeh, Selanget, Sotong, Tenggiri, Teri, Tongkol, Tuna, dan lain-lain. Pada tahun 2020, DKPKP Provinsi DKI Jakarta mencatat produksi perikanan tangkap sebanyak 107.828,84 ton. Jumlah produksi ini menurun sebanyak 101,18 ton dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2016 sampai dengan

³⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2020), "2020, KKP Targetkan Konsumsi Ikan 56,39 Kg", <https://kkp.go.id/artikel/16451-2020-kkp->, diakses pada 29 Juni 2021.

2020, jumlah produksi perikanan tangkap mengalami fluktuasi dengan jumlah produksi terbanyak yang terjadi pada tahun 2016 yaitu 143.894,00 ton. Namun, nilai ini turun sampai dengan tahun 2018 dan kemudian mulai naik kembali pada tahun 2019. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi perikanan tangkap sejak tahun 2017 adalah faktor alam seperti hujan lebat sepanjang tahun yang membuat keadaan laut tidak cocok untuk ikan bereproduksi dan kapal nelayan lokal yang tidak cukup besar untuk menangkap ikan lebih dalam dan dengan jumlah yang banyak. Karena sejatinya produksi ikan sangat bergantung dengan keadaan cuaca.



Gambar 3.200. Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Produksi ikan tangkap yang bersumber dari laut DKI Jakarta hanya dapat ditemui di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara karena wilayah tersebut masih dekat dengan laut. Jumlah nilai produksi perikanan tangkap tertinggi berasal dari Jakarta Utara sebesar 98,49% dengan nilai produksi perikanan tangkap dari Pelabuhan Perikanan Muara Angke sebanyak 1,94 triliun rupiah dan Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta sebanyak 1,42 triliun rupiah.



Gambar 3.201. Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

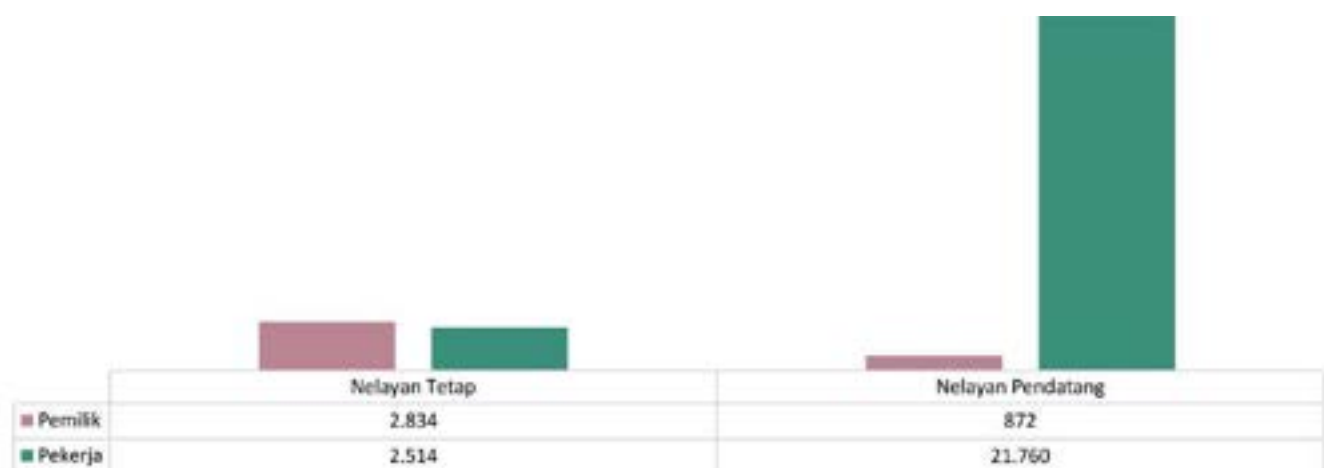
Berbeda dengan produksi ikan tangkap, produksi ikan budidaya justru dapat ditemui di seluruh wilayah DKI Jakarta. Meskipun demikian, Jakarta Utara tetap menjadi wilayah dengan jumlah perikanan budidaya terbanyak sebesar 34,74%, sedangkan Jakarta Pusat menjadi perikanan produksi

dengan jumlah produksi paling sedikit sebesar 0,08%. Produksi ikan di Jakarta Pusat menjadi yang paling sedikit dikarenakan wilayah ini merupakan pusat perkantoran yang didominasi oleh gedung-gedung tinggi, sehingga mayoritas penduduknya didominasi oleh karyawan kantor. Adapun ikan yang dibudidaya di DKI Jakarta seperti ikan Bandeng, Bawal Bintang, Gurame, Kakap Merah, Kakap Putih, Kerapu Lumpur, Lele, Mas, Mujair, Nila, Patin, Sepat Siam, dan Tawes. Pada tahun 2020, DKPKP Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 3.869,48 ton produksi ikan budidaya. Produksi perikanan budidaya di DKI Jakarta cukup fluktuatif. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, produksi perikanan budidaya mengalami penurunan produksi, penurunan produksi perikanan budidaya yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu 1.531,62 ton. Namun, produksi perikanan ini meningkat cukup signifikan pada tahun berikutnya yaitu 1.588,90 ton.

Saat ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sektor perikanan belum dimanfaatkan secara maksimal. Cuaca merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi dan budidaya ikan. Namun, hal tersebut tidak berarti selalu menjadi masalah di masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentu telah menyiapkan banyak kebijakan untuk menyiasati pemanfaatan perikanan yang belum maksimal ini. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan sektor perikanan seperti pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya ikan, pemberian sosialisasi tentang perikanan mulai dari pemeliharaan, produksi sampai dengan pemasaran, dan penambahan serta perbaikan sarana dan prasarana dalam penangkapan, budidaya, dan pemasaran ikan.

3.25.2. Nelayan

Nelayan di DKI Jakarta terbagi atas dua kategori yaitu nelayan tetap dan nelayan pendatang. Masing-masing kategori tersebut memiliki sub kategori yaitu sebagai pemilik dan pekerja. Data yang berhasil dihimpun oleh DKPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 menunjukkan jumlah nelayan tetap di DKI Jakarta pada masing-masing sub kategori mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 3.202. Jumlah Nelayan di DKI Jakarta Menurut Jenis dan Status Tahun 2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, nelayan tetap dengan sub kategori pemilik berjumlah 2.834 orang atau naik sebanyak 558 orang, namun nelayan tetap dengan sub kategori pekerja berjumlah 2.514 atau turun sebanyak 511 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berbeda dengan nelayan tetap sub

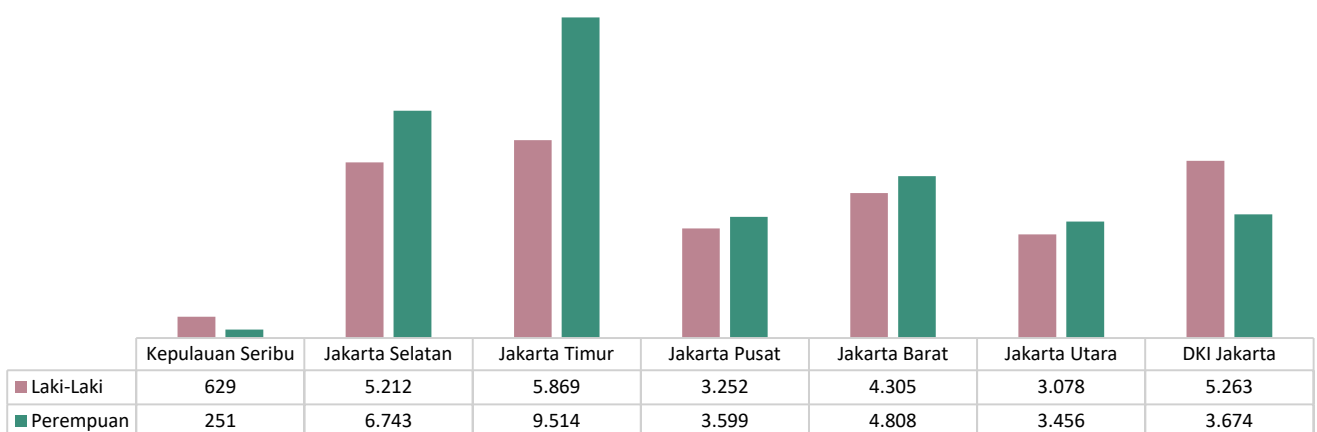
kategori pekerja, nelayan pendatang sub kategori pekerja di DKI Jakarta justru mengalami penurunan pada tahun 2020. Jika dilihat dari tren nelayan pendatang, jumlah pada sub kategori pemilik dan pekerja pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2020 justru jumlah kedua sub kategori nelayan pendatang mengalami penurunan. Pada tahun 2020, nelayan pendatang dengan sub kategori pemilik berjumlah 872 orang atau berkurang 7 orang dari tahun sebelumnya, sedangkan nelayan pendatang sub kategori pekerja sebanyak 21.760 orang atau berkurang 633 orang. Menurunnya jumlah nelayan pendatang pada tahun 2020 di DKI Jakarta dapat disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan nelayan pendatang lebih membatasi mobilitasnya dalam menjalankan profesinya sebagai nelayan. Selain itu, ketatnya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengurangi angka penyebaran kasus Covid 19 juga menjadi salah satu faktor berkurangnya nelayan yang datang ke wilayah perairan di DKI Jakarta.

3.26. Kepegawaian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sampai saat ini, profesi ini masih menjadi salah satu profesi yang diminati oleh banyak orang di Republik Indonesia termasuk di DKI Jakarta.

3.26.1. Pegawai Negeri Sipil

Banyaknya keuntungan yang didapatkan sebagai PNS seperti dana pensiun, jaminan kesehatan, dan berbagai tunjangan lainnya membuat profesi PNS masih diminati dan diidamkan oleh banyak warga negara Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, terdapat banyak kantor pemerintahan yang terletak di DKI Jakarta seperti kementerian, badan, dan lembaga pemerintahan lainnya.



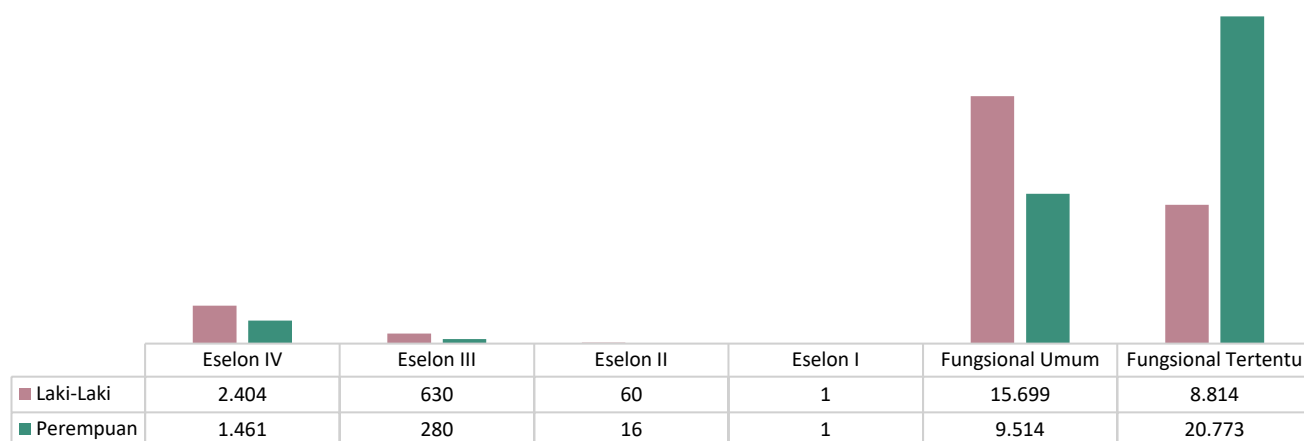
Gambar 3.203. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 berjumlah 59.653 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh perempuan sebesar 53,71% atau sebanyak 32.045 perempuan. Jakarta Timur menjadi wilayah PNS terbanyak yaitu 15.383 orang yang terdiri dari 5.869 laki-laki dan 9.514 perempuan. Sedangkan, Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan jumlah PNS paling sedikit yaitu 880 orang yang terdiri dari 629 laki-laki dan 251 perempuan.

Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Jumlah PNS pada tahun 2018 mencapai 65.444 orang, lalu menurun pada tahun 2019 menjadi 64.167 orang, dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 59.653 orang. Jika dilihat dari tahun 2018 sampai dengan 2020, terjadi penurunan jumlah PNS di DKI Jakarta sebesar 8,85% atau sebanyak 5.791 orang. Penurunan jumlah PNS dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya PNS yang sudah memasuki masa purna bakti, dipindah tugaskan, pengunduran diri, dan meninggal dunia.

3.26.2. Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Sedangkan, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.



Gambar 3.204. Rekapitulasi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan bahwa PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 paling banyak menempati jabatan fungsional tertentu dengan jumlah 29.587 orang, lalu urutan kedua adalah jabatan fungsional umum sebanyak 25.213 orang. Jabatan fungsional umum sendiri sekarang diubah menjadi jabatan pelaksana melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jabatan pelaksana mempunyai fungsi dan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu seperti guru, penguji kendaraan bermotor, diplomat, dan lain-lain.



BAB IV

DAYA SAING DAERAH

Daya Saing Daerah

DKI Jakarta pada Tahun 2020

4,46

Poin penurunan ekspor maupun impor di DKI Jakarta dari triwulan pertama ke triwulan kedua tahun 2020.



61,16%

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta pada triwulan pertama.

3,23

Poin peningkatan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta pada triwulan kedua.

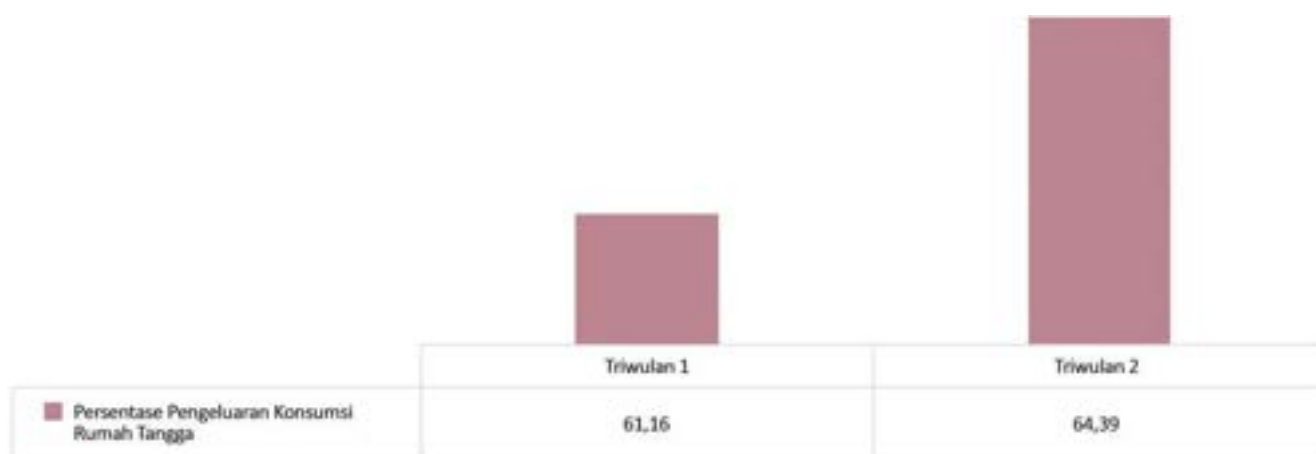


IV. Daya Saing Daerah

4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Untuk dapat melihat daya saing daerah, dalam hal ini DKI Jakarta secara garis besar dapat memperhatikan data-data mengenai kemampuan ekonomi daerah serta sumber daya manusia. Data mengenai kemampuan ekonomi daerah antara lain terkait dengan ekspor impor serta pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu indikator penilaian penting yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi dalam wilayah dan kurun waktu tertentu³¹. Komponen yang memengaruhi PDRB di antaranya adalah ekspor dan impor.

Covid-19 merupakan wabah global dan memengaruhi seluruh laju aktivitas perekonomian dunia tidak terkecuali Indonesia. Jakarta yang merupakan ibukota Republik Indonesia juga merupakan pusat penyebaran Covid-19 dengan total kasus mencapai 12.974 kasus per hari.



Gambar 4.1. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dalam Struktur Produk Domestik Regional Bruto (Persen) di DKI Jakarta Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada triwulan pertama tahun 2020, tercatat pengeluaran konsumsi rumah tangga DKI Jakarta sebesar 61,16%. Nilai ini meningkat sebesar 3,23 poin pada triwulan kedua pada tahun yang sama. Pada triwulan pertama tahun 2019 tercatat pengeluaran konsumsi rumah tangga berada pada angka 60,65%, nilai ini lebih kecil sebesar 0,51 poin dibandingkan dengan tahun 2020 pada periode yang sama. Pada triwulan kedua tahun 2019 terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi 60,99%, namun jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 di periode yang sama. Kenaikan dari triwulan pertama ke triwulan kedua pada tahun 2019 juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 2020 ketika pandemi merambah Indonesia dengan selisih kenaikan mencapai 2,72 poin.



³¹ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021), "Pengertian Pendapatan Nasional", <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>, diakses pada 18 Juli 2021.

4.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen ekosistem ekonomi yang berlaku di suatu wilayah. SDM berperan mengatur dan mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang kemudian menjadi bahan konsumsi dan menggerakkan roda perekonomian.

4.2.1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan penduduk di suatu wilayah memengaruhi tingkat perekonomiannya. *Programme for International Student Assessment* (PISA) adalah organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan anak berusia 15 tahun dalam mata pelajaran matematika, sains, membaca, dan kemampuan untuk menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2018, organisasi ini mencatat Singapura menempati urutan kedua dengan skor 556,30 di bawah Republik Rakyat Cina yang menduduki posisi pertama dengan 578,70 poin, sedangkan Indonesia berada pada peringkat 74 atau 6 peringkat dari bawah dengan skor 396. Dari nilai tersebut, dapat dilihat hubungan antara pendidikan penduduk dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah.



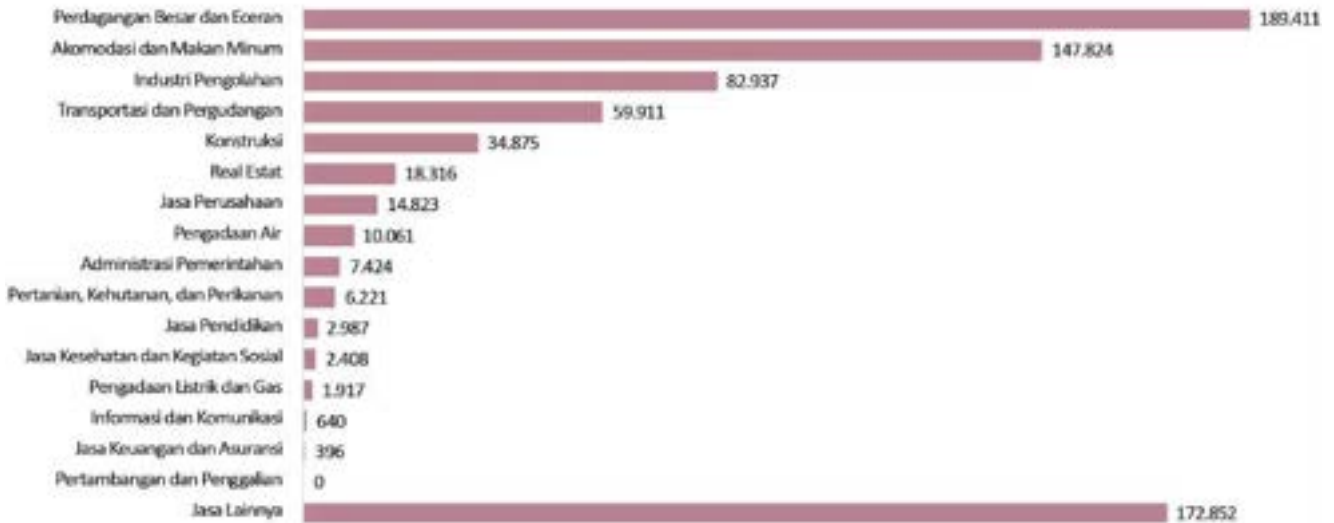
Gambar 4.2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Data BPS Provinsi DKI Jakarta tentang penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta yang bekerja sesuai kategori tersebut paling banyak memiliki pendidikan tertinggi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2.192.580 orang, dan penduduk dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi yang paling sedikit sebanyak 738.873 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah penduduk DKI Jakarta yang bekerja pada tahun 2020 menurun pada berbagai tingkat pendidikan. Penurunan terbesar terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi dengan penurunan sebanyak 61.106 orang, disusul oleh tingkat pendidikan SMP sebanyak 55.293 orang, SMA sebanyak 48.571 orang, dan SD sebanyak 12.756 orang.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan perguruan tinggi juga mengalami penurunan. Penurunan cukup signifikan terjadi pada jumlah penduduk yang bekerja pada tingkat pendidikan perguruan tinggi, yaitu sejumlah 173.002 orang, sedangkan penduduk bekerja pada tingkat pendidikan SD menurun sejumlah 18.802 orang. Namun, kondisi berbeda terjadi pada tingkat Pendidikan SMP dan SMA. Penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi SMP dan SMA sama-sama mencatat kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 242.109 orang untuk tingkat pendidikan SMA dan 59.893 orang untuk tingkat pendidikan SMP.

4.2.2. Sektor Pekerjaan

Setiap penduduk DKI Jakarta, memiliki pendidikan tertinggi yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai pendidikan tertinggi di bidang keuangan, hukum, pertambangan, dan lain-lain. Lapangan pekerjaan yang tersedia di DKI Jakarta terbagi dalam beberapa sektor seperti pertambangan, keuangan, asuransi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

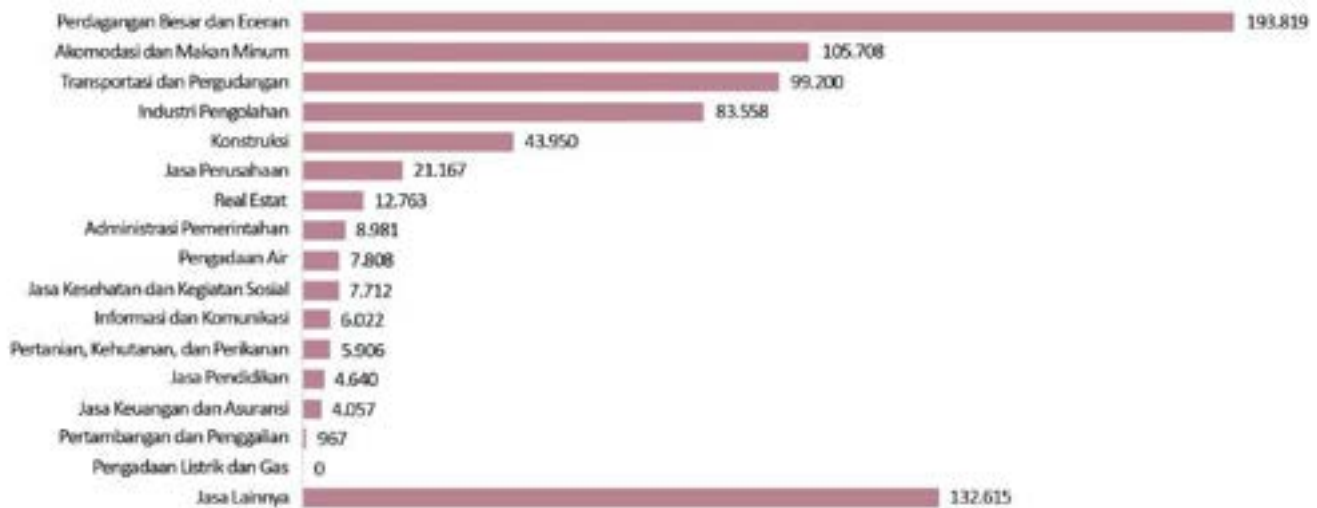


Gambar 4.3. Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di DKI Jakarta dengan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Sekolah Dasar Menurut Sektor Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

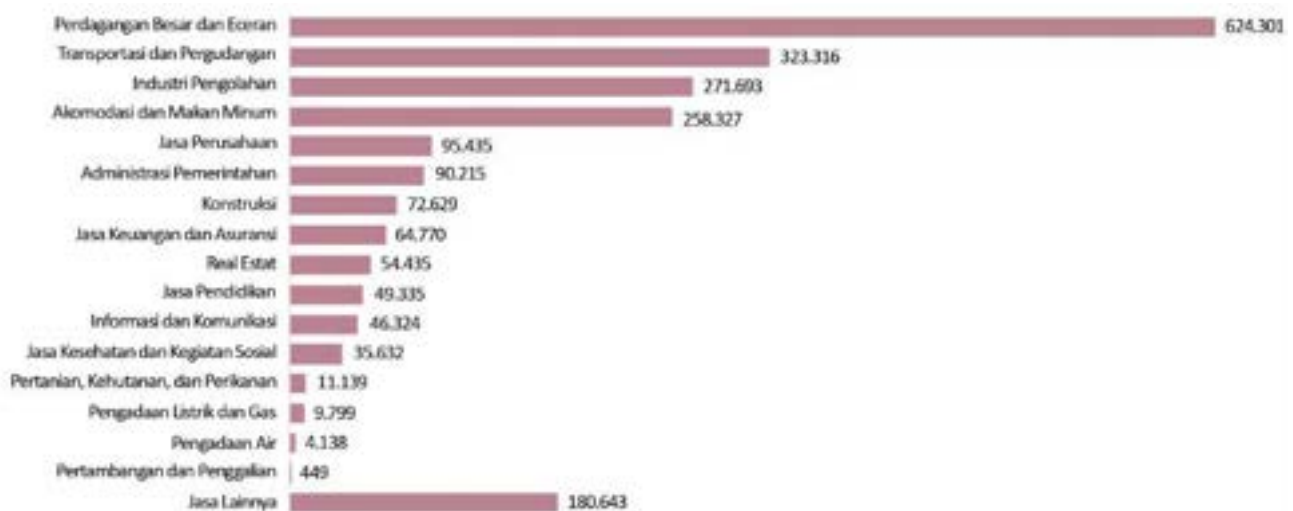
Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SD dapat dilihat bahwa sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang paling banyak digeluti oleh penduduk DKI Jakarta pada tingkat pendidikan tersebut sebanyak 189.411 orang. Namun demikian, di sisi lain tidak ada penduduk dengan tingkat pendidikan SD yang tercatat menggeluti bidang pertambangan dan penggalian.





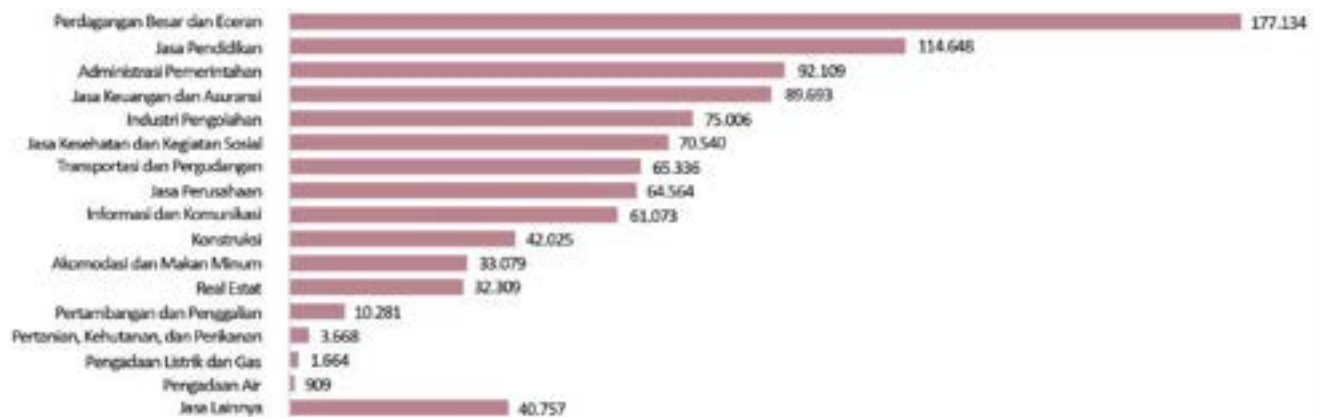
Gambar 4.4. Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di DKI Jakarta dengan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Sekolah Menengah Pertama Menurut Sektor Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tidak jauh berbeda dengan penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD, penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SMP juga paling banyak menggeluti sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 193.819 orang. Sedikit berbeda dengan penduduk dengan tingkat pendidikan SD, terdapat sebanyak 967 orang yang menggeluti sektor pertambangan dan penggalian. Namun demikian, tidak ada satupun penduduk DKI Jakarta dengan Pendidikan tertinggi SMP bekerja dalam sektor pengadaan listrik dan gas.



Gambar 4.5. Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di DKI Jakarta dengan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Sekolah Menengah Atas Menurut Sektor Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Angka pekerja pada tingkat pendidikan SMA cukup besar jika dibandingkan dengan SD dan SMP. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dibagi menjadi dua kategori yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pelajar SMK dipersiapkan untuk langsung bekerja setelah menyelesaikan pendidikannya sehingga dapat mengurangi pengangguran, namun tidak menutup kemungkinan bagi para pelajar SMK untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Hal ini berbanding lurus dengan perbandingan jumlah pekerja jika dibandingkan antara SD, SMP, dan SMA. Terdapat selisih jumlah orang yang bekerja terutama pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan tingkat pendidikan SMP yang cukup signifikan yaitu sebesar 68,95% atau sebanyak 430.482 orang pekerja.



Gambar 4.6. Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Perguruan Tinggi di DKI Jakarta Menurut Sektor Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Penduduk yang bekerja pada tingkat pendidikan perguruan tinggi juga paling banyak bergelut pada sektor perdagangan besar dan eceran, serupa dengan penduduk yang bekerja pada tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Penduduk yang bekerja pada tingkat pendidikan perguruan tinggi yang menggeluti bidang perdagangan besar dan eceran tercatat sebanyak 177.134 orang. Sama seperti penduduk yang bekerja pada tingkat pendidikan SMA, penduduk yang bekerja pada tingkat pendidikan perguruan tinggi juga menggeluti semua sektor yang tercatat dalam pendataan. Sektor yang paling sedikit digeluti oleh penduduk yang bekerja dengan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan perguruan tinggi adalah sektor pengadaan air dengan jumlah 909 orang.





BAB V

EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Ekonomi dan Keuangan Daerah

DKI Jakarta Pada Tahun 2020



Rp3.122,22 triliun

Posisi simpanan masyarakat di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Rp1.726,90 triliun

Posisi simpanan masyarakat di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

143,77 triliun rupiah

Bantuan diberikan kepada UMKM.



1,59%

Inflasi di DKI Jakarta pada tahun 2020 ini menjadi tahun dengan inflasi terendah.

82,20 triliun rupiah

Anggaran pendapatan pada tahun 2020.

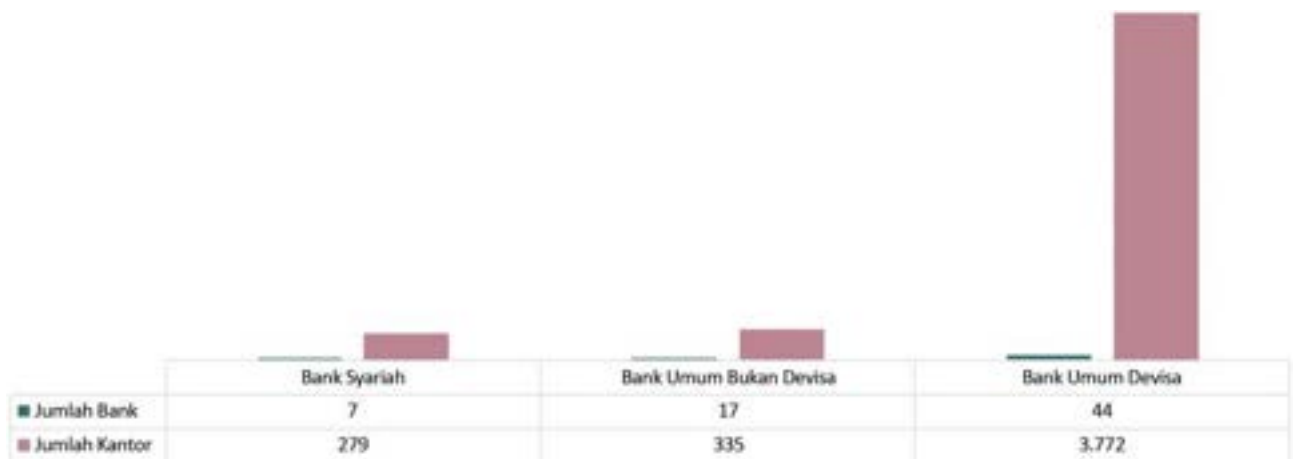


V. Ekonomi dan Keuangan Daerah

5.1. Perbankan

Ekonomi diambil dari bahasa Yunani yang berarti oikos atau oiku dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain, ekonomi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang berhubungan dengan materiel individu, masyarakat, dan negara. Ekonomi negara merupakan suatu kegiatan pengaturan materi pada tingkat nasional dan dibagi serta diurus pada setiap daerah yang dijadikan sebagai keuangan daerah.

Bank adalah sebuah lembaga yang menerima dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup seseorang. Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur keuangannya sendiri dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, sektor keuangan pemerintah daerah dibantu oleh bank yang dibagi menjadi tiga menurut jenisnya yaitu bank umum devisa, bank umum bukan devisa, dan bank syariah.



Gambar 5.1. Jumlah Bank dan Kantor Bank di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020

Sumber: Bank Indonesia

Pada tahun 2020, DKI Jakarta menjadi provinsi tempat beroperasinya 44 bank umum devisa, 17 bank umum bukan devisa, dan 7 bank syariah. Bank-bank tersebut juga mengoperasikan kantor untuk mendukung operasional. Bank umum dibagi menjadi dua yaitu bank umum devisa dan bank umum bukan devisa. Bank umum devisa mencakup bidang yang lebih luas karena dapat melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan valuta asing dan jasa keluar negeri. Indonesia sendiri memiliki beberapa bank umum devisa seperti Bank Central Asia, Mayapada, Permata, dan lain-lain. Bank umum devisa melayani kegiatan transaksi internasional seperti, ekspor impor, jual beli valuta asing, pembayaran surat utang (*letter of credit*), dan sebagainya. Berbeda dengan bank umum devisa, bank umum bukan devisa tidak dapat melayani transaksi internasional karena belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjadi bank umum devisa. Bank Artha Graha, Bank

Jasa Arta, dan Bank Nusantara merupakan beberapa contoh bank umum bukan devisa. Selain bank umum, terdapat jenis bank-bank lain yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam atau yang biasa dikenal dengan Bank Syariah. Badan hukum yang digunakan oleh bank syariah berbeda dengan bank umum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa badan hukum bank syariah berbentuk Perseroan terbatas (PT) sedangkan badan hukum bank umum berbentuk PT, koperasi, dan perusahaan daerah. Bank syariah menggunakan badan hukum yang berbeda dikarenakan sistem bunga pada bank ini merupakan bagi hasil dengan nasabah atas dasar kemitraan. BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri merupakan beberapa contoh bank syariah yang dapat dijumpai di DKI Jakarta.

Pada tahun 2020, jumlah kantor bank di DKI Jakarta tercatat sebanyak 4.386 unit kantor. Bank umum devisa mendominasi jumlah kantor bank sebesar 86,00% dari jumlah kantor bank. Tercatat sebanyak 3.772 unit kantor bank umum devisa di DKI Jakarta. Bank umum bukan devisa menduduki posisi kedua terbanyak setelah bank umum devisa yaitu 335 unit kantor bank. Bank syariah mempunyai jumlah kantor paling sedikit dikarenakan jumlah nasabah yang tidak sebanyak bank umum. Hal ini dapat disebabkan karena sistem yang digunakan oleh bank syariah tidak dapat diimplementasikan ke semua elemen masyarakat, sehingga nasabah dari bank syariah sendiri tidak sebanyak bank umum.

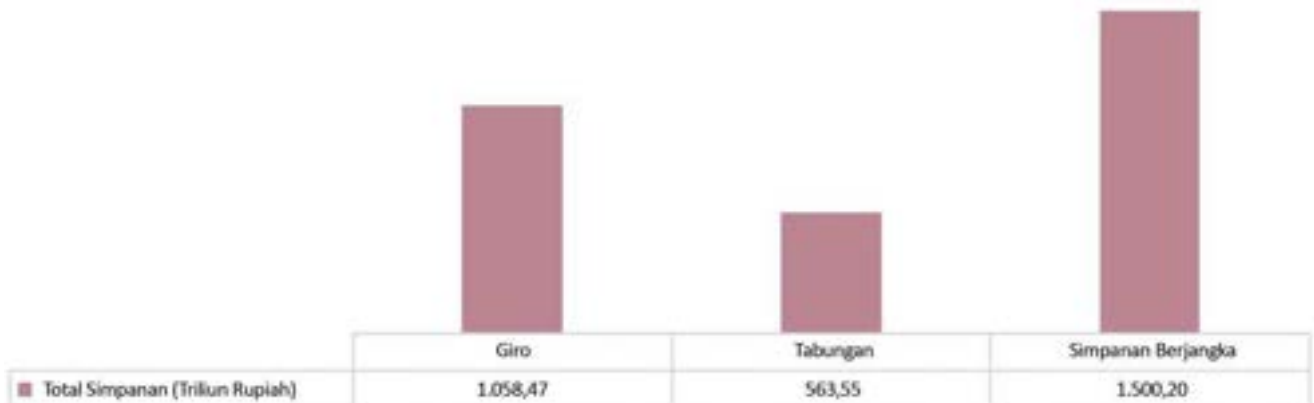
Status kantor-kantor bank yang beroperasi di DKI Jakarta dibagi menjadi empat kategori yaitu kantor pusat, kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas. Data dari Januari sampai dengan November 2020 menunjukkan cabang pembantu menjadi kantor yang paling banyak dioperasikan sebanyak 2.511 unit, bank swasta menjadi bank yang paling banyak mengoperasikan kantor dengan status cabang pembantu sebanyak 1.563 unit. Dari sebanyak 3.772 unit kantor bank umum devisa yang beroperasi di DKI Jakarta pada tahun 2020, sebanyak 1.741 unit di antaranya dioperasikan oleh 25 bank swasta nasional. Jumlah ini menjadi yang terbanyak di antara jenis bank-bank lainnya. Bank DKI merupakan satu-satunya bank pembangunan daerah di DKI Jakarta yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di DKI Jakarta tercatat sebanyak 149 unit kantor pembangunan daerah yang terdiri dari satu kantor pusat, 16 kantor cabang, 30 kantor cabang pembantu, dan 102 kantor kas. Bank umum bukan devisa memiliki 335 unit kantor yang dioperasikan oleh 17 bank, sedangkan bank syariah memiliki 279 unit kantor yang dioperasikan oleh tujuh bank syariah.

Menabung atau menyimpan uang sudah menjadi tradisi dari masyarakat. Tujuan dari menabung ini adalah agar seseorang dapat menyimpan uang dan menggunakan uang tersebut apabila dibutuhkan di kemudian hari. Salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat dalam menabung adalah dengan menggunakan jasa bank. Selain mencari keamanan, fitur-fitur bank seperti kemudahan dalam melakukan transaksi, anjungan tunai mandiri (ATM), hadiah, dan sebagainya menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Untuk dapat menabung di bank pun terbilang mudah, selain itu juga bank terdapat hampir di setiap kelurahan di DKI Jakarta.



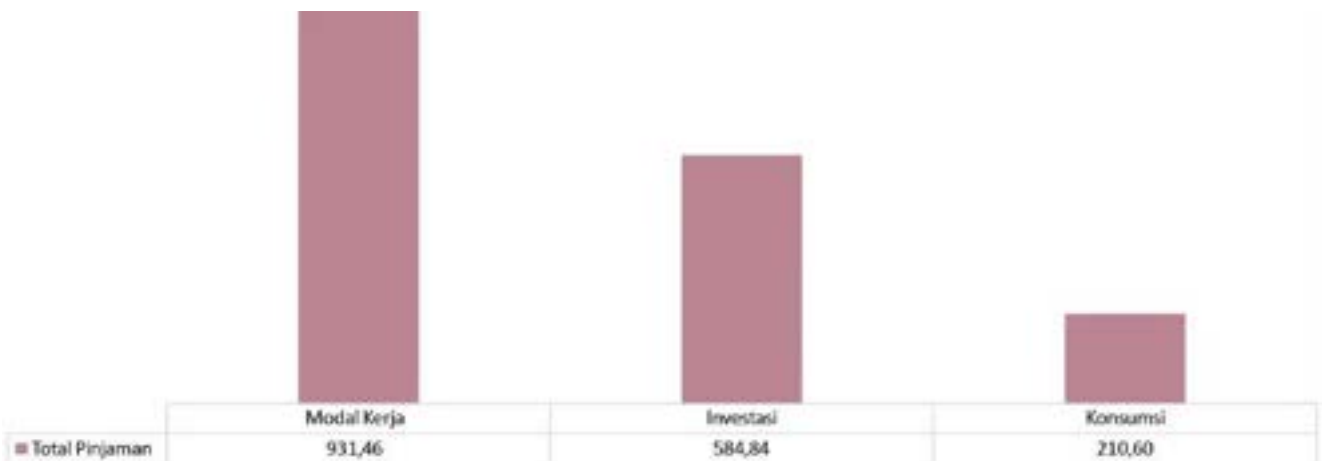
5.2. Transaksi Perbankan

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan seseorang kepada bank. Simpanan dapat berupa suatu nominal atau benda yang disimpan, sedangkan pinjaman merupakan segala jenis utang yang dapat berupa benda atau uang yang disediakan kepada debitur dan diberi bunga. Berbeda dengan pinjaman, kredit UMKM merupakan bentuk bantuan dari debitur kepada UMKM yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Berdasarkan data posisi simpan masyarakat rupiah dan valuta asing di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada tahun 2020, total simpanan masyarakat di DKI Jakarta sebesar 3.122,22 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik sebesar 401,23 triliun rupiah dari tahun sebelumnya.



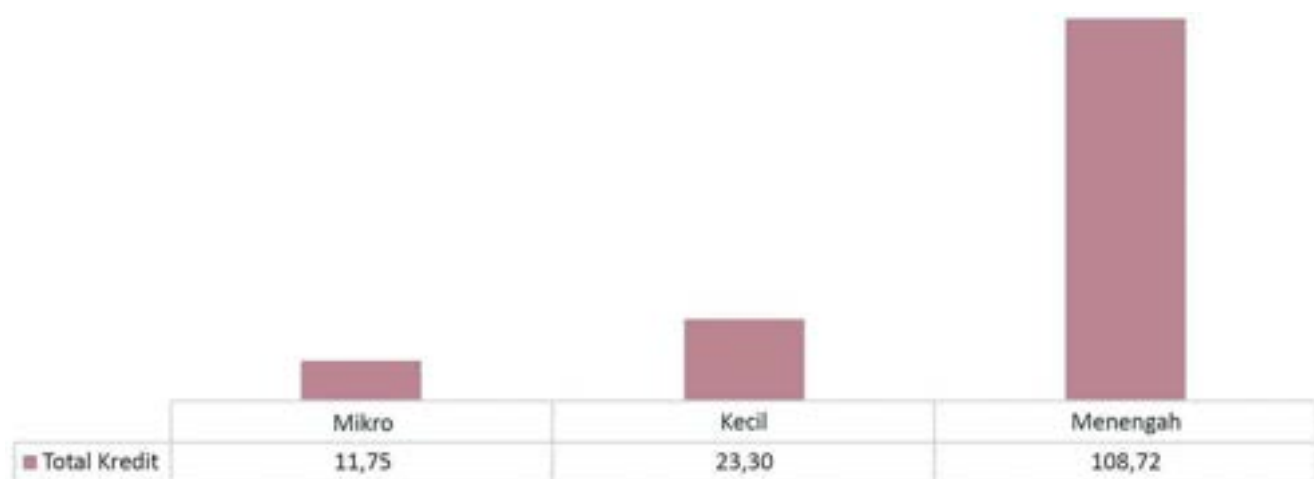
Gambar 5.2. Posisi Simpanan Masyarakat (Rupiah dan Valuta Asing) di Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Bank Indonesia

Dari total 3.122,22 triliun rupiah jumlah simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR yang tercatat pada tahun 2020, sebesar 48,05% di antaranya merupakan simpanan berjangka, kategori ini menjadi proporsi terbesar dibandingkan dengan giro sebesar 33,90% dan sisanya sebesar 17,95% merupakan tabungan. Simpanan berjangka menjadi kategori simpanan yang paling favorit dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Dalam kurun waktu tiga tahun ini, total simpanan meningkat sebanyak 533,43 triliun rupiah. Simpanan berjangka atau yang biasa disebut deposito menjadi produk yang paling diminati nasabah karena risiko kerugian yang paling kecil. Risiko yang kecil dari deposito membuat nasabah lebih percaya dalam menyimpan uangnya.



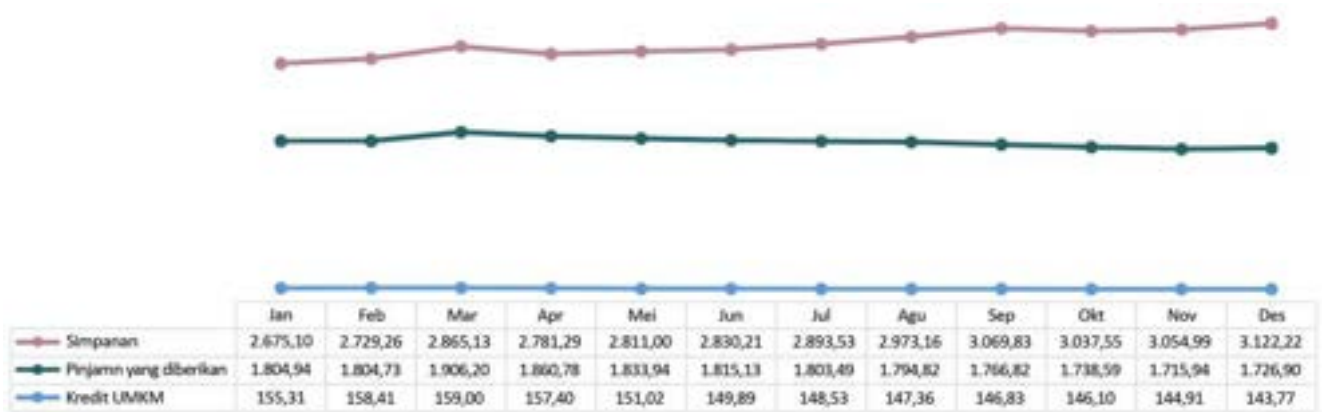
Gambar 5.3. Total Pinjaman yang Diberikan Bank Umum (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Bank Indonesia

Selain sebagai tempat penyimpanan uang, bank juga menyediakan pinjaman kredit UMKM bagi masyarakat yang memiliki usaha. Pada tahun 2020, bank di DKI Jakarta telah mengeluarkan pinjaman sebesar 1.726,90 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 53,94% mengalir ke pos pinjaman modal kerja, sebesar 33,87% ke pos pinjaman investasi, dan sisanya sebesar 12,20% ke pos pinjaman konsumsi. Pinjaman yang keluar pada tahun 2020 jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan sebesar 28,26 triliun rupiah dari tahun sebelumnya terjadi karena permintaan yang rendah dari pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM yang masih menunggu berakhirnya pandemi Covid-19. Selain itu juga, terbatasnya ruang lingkup perbankan untuk melakukan survei dan jemput bola kepada pelaku UMKM juga merupakan beberapa faktor lainnya yang menyebabkan turunnya permintaan kredit UMKM. Dari tahun 2018 sampai dengan 2020, total pinjaman modal kerja merupakan kategori pinjaman dengan jumlah paling tinggi jika dibandingkan dengan kategori pinjaman lainnya seperti investasi dan konsumsi. Pada tahun 2018, total pinjaman modal kerja mencapai 1.704,36 triliun rupiah.



Gambar 5.4. Total Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Diberikan Bank Umum (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Bank Indonesia

Beberapa bank umum juga menyediakan kredit untuk UMKM. Pada tahun 2020, tercatat bank-bank umum telah mengeluarkan kredit sebesar 143,77 triliun rupiah. Jumlah tersebut paling banyak jatuh pada usaha dengan skala menengah sebesar 75,62%. Bank umum lebih cenderung memberikan pinjaman kepada usaha menengah ke atas dikarenakan kategori usaha ini memiliki aset yang cukup sebagai jaminan. Hal ini terlihat dari jumlah pinjaman pada kategori usaha menengah yang paling besar dibandingkan dengan kategori usaha lainnya yaitu 75,62%. Jumlah ini disusul oleh kategori usaha kecil dan mikro masing-masing sebesar 16,20% dan 8,17%. Jumlah kredit yang dikeluarkan pada tahun 2020 turun sebesar 8,87 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari tahun 2018 sampai dengan 2020, total kredit UMKM paling tinggi berada pada tahun 2018 yang mencapai 153,01 triliun rupiah. Dalam kurun tiga tahun terakhir, jumlah kredit untuk UMKM kategori menengah menjadi yang terbanyak setiap tahunnya dengan jumlah kredit tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu 118,32 triliun rupiah.



Gambar 5.5. Posisi Simpanan, Pinjaman yang Diberikan, dan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Menurut Bulan Tahun 2020
Sumber: Bank Indonesia

Simpanan perbankan mengalami kenaikan tertinggi pada Desember 2020 sebesar 3.122,22 triliun rupiah. Berbeda dengan simpanan, pinjaman yang diberikan oleh bank tertinggi berada pada Maret sebesar 1.906,20 triliun rupiah. Akan tetapi, nilai ini terus mengalami penurunan sampai dengan November dan kembali mengalami kenaikan pada Desember. Serupa dengan pinjaman, kredit UMKM tertinggi juga berada pada Maret dengan angka 159 triliun rupiah, setelah itu angka kredit UMKM terus mengalami penurunan sampai dengan bulan Desember.



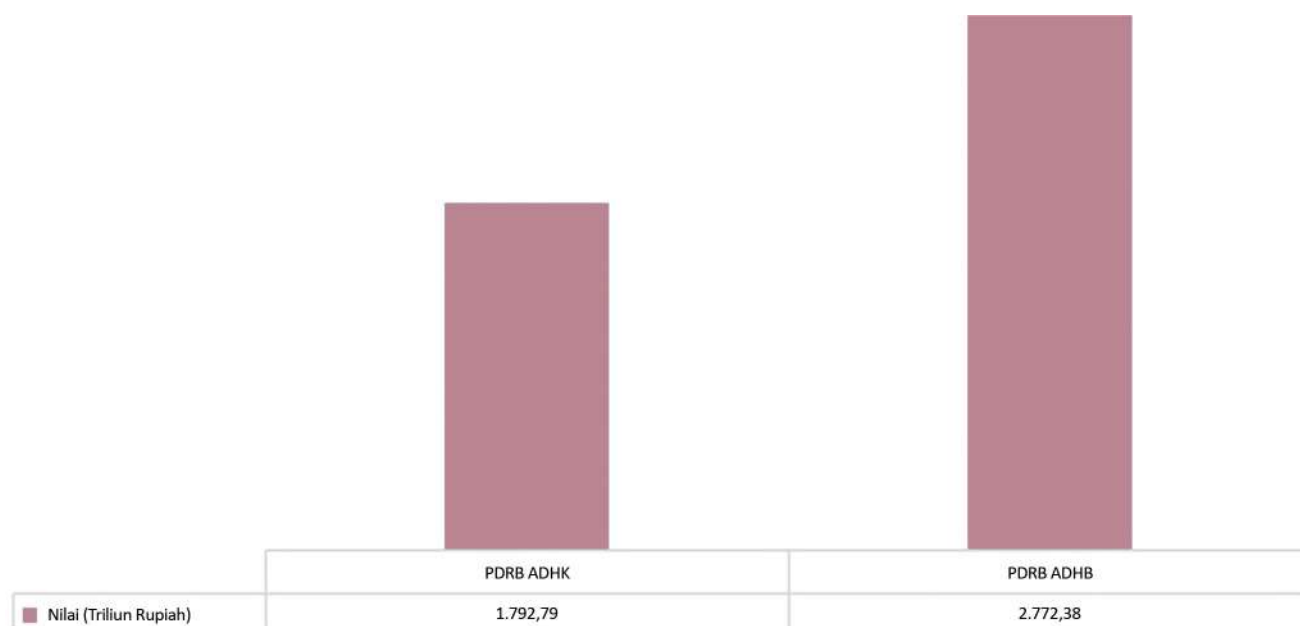
Gambar 5.6. Posisi Simpanan, Pinjaman yang Diberikan, dan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Bank Indonesia

Gambar di atas menunjukkan bahwa nominal simpanan lebih besar daripada pinjaman dan kredit UMKM yang mencapai 3.122,22 triliun rupiah. Lalu jumlah pinjaman dan kredit UMKM yang diberikan oleh bank pada periode yang sama masing-masing berjumlah 1.726,90 dan 143,77 triliun rupiah.

Kredit UMKM merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu pengusaha kecil menengah agar terciptanya lapangan kerja dan memberantas kemiskinan. Bantuan dana dalam usaha tentu sangat membantu percepatan pengembangan usaha tersebut. Hal ini akan mendukung terlaksananya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, untuk mendapatkan kredit UMKM ini masyarakat hanya perlu mengajukan diri ke bank yang telah ditentukan pemerintah dan menyiapkan syarat-syarat tertentu agar pengajuannya dapat diverifikasi dan diterima oleh bank.

5.3. Produk Domestik Regional Bruto

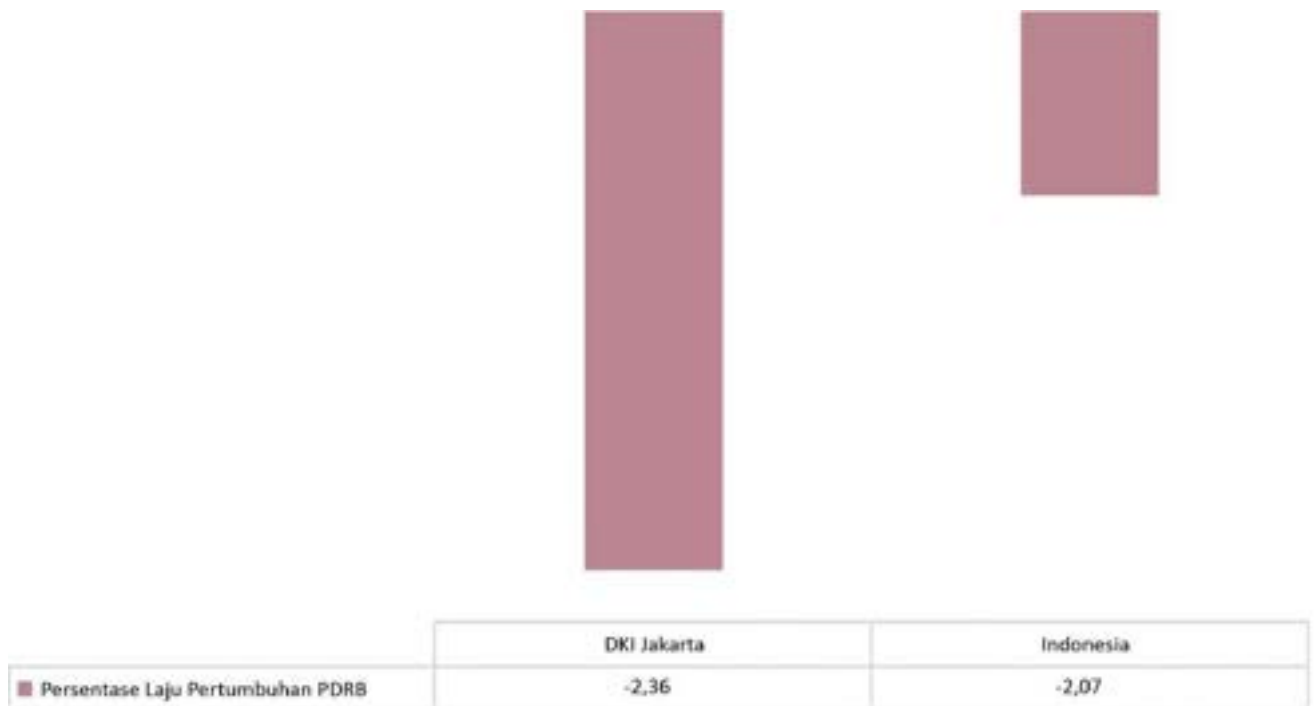
Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga yang berlaku setiap tahunnya, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) juga menggambarkan nilai tambah barang dan jasa namun menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.



Gambar 5.7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

PDRB ADHB DKI Jakarta pada tahun 2020 yaitu 2.772,38 triliun rupiah, angka ini mengalami penurunan sebanyak 44,38 triliun rupiah dari tahun sebelumnya setelah mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Kondisi tersebut juga dialami PDRB ADHK sebesar 1.792,79 triliun rupiah pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebanyak 43,41 triliun rupiah. Pada tahun 2016, PDRB ADHK terus mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 sebesar 1.836,20 triliun rupiah tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020.





Gambar 5.8. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta dan Indonesia (persen) Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sesuai dengan data laju pertumbuhan PDRB, nilai PDRB DKI Jakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,18 poin. Dari gambar di atas, dapat dilihat laju pertumbuhan PDRB di Indonesia pada tahun 2020 berada pada angka -2,07%. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019, PDRB DKI Jakarta selalu berada di atas PDRB Indonesia, dengan puncaknya pada tahun 2017 dengan angka 6,20%. PDRB Indonesia paling tinggi berada pada angka 5,17% yang terjadi pada tahun 2018, lalu menurun sampai dengan tahun 2020.



Gambar 5.9. PDRB ADHB DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi di DKI Jakarta (Miliar Rupiah) Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan persebaran PDRB ADHB DKI Jakarta pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa Jakarta Pusat menjadi wilayah administrasi dengan PDRB terbesar di DKI Jakarta yaitu 701.980 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan Jakarta Pusat sendiri merupakan daerah perkantoran dan pusat sektor perekonomian di DKI Jakarta. Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan PDRB yang paling kecil yaitu 6.347 miliar rupiah.



Gambar 5.10. Sepuluh Lapangan Usaha dengan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Terbesar (Triliun Rupiah) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Nilai PDRB ADHB DKI Jakarta dibentuk oleh berbagai lapangan usaha seperti perdagangan, konstruksi, jasa keuangan, pendidikan, dan lain-lain. Perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menjadi yang terbesar dengan nilai PDRB ADHB sebesar 460,74 triliun rupiah dari sepuluh lapangan usaha dengan PDRB ADHB tertinggi di DKI Jakarta pada tahun 2020.



Gambar 5.11. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen) di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

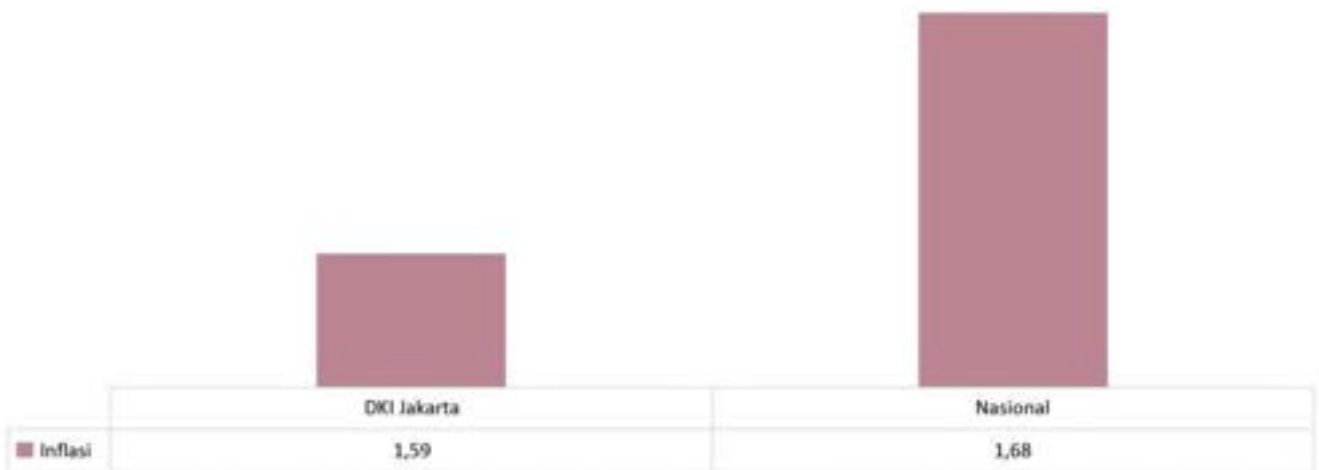
Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB ADHK untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami laju pertumbuhan terbesar yaitu 19,85%. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi. Kebutuhan masyarakat akan alat-alat kesehatan seperti masker, vitamin, dan persediaan obat-obatan meningkat secara signifikan seiring dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19. Kebijakan kesehatan diterapkan hampir di semua sektor usaha masyarakat yang membuat terjadinya pergeseran fungsi di berbagai sektor, salah satunya sektor komunikasi.

Dari gambar di atas, terlihat peningkatan laju pertumbuhan PDRB ADHK berada di posisi kedua terbanyak dengan persentase sebesar 11,12%. Hal ini dikarenakan seluruh aktivitas perkantoran dan pendidikan diubah dalam bentuk daring. Peran jasa telekomunikasi dalam penyediaan internet

menjadi salah satu kebutuhan penting di masa pandemi Covid-19 dikarenakan semua kegiatan dan pertemuan dilakukan secara daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memberikan subsidi kuota internet untuk mendukung jalannya kegiatan belajar mengajar secara daring. Penyediaan akomodasi, makan, dan minum mengalami penurunan jumlah hingga mencapai -16,21% pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan PSBB yang menyebabkan penurunan jumlah pembeli di restoran. Akibatnya, banyak pengusaha warung makan yang tutup dikarenakan perputaran uang yang tidak dapat menutup biaya operasional.

5.4. Inflasi

Inflasi adalah kata yang lazim di dengar dalam kehidupan sehari-hari. Inflasi sendiri merupakan pertambahan nilai barang dan jasa secara umum dan terus menerus yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, jika kenaikan harga barang atau jasa tidak terjadi secara umum maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi. Inflasi juga dapat diartikan sebagai peredaran jumlah uang yang lebih banyak dari jumlah barang yang beredar.

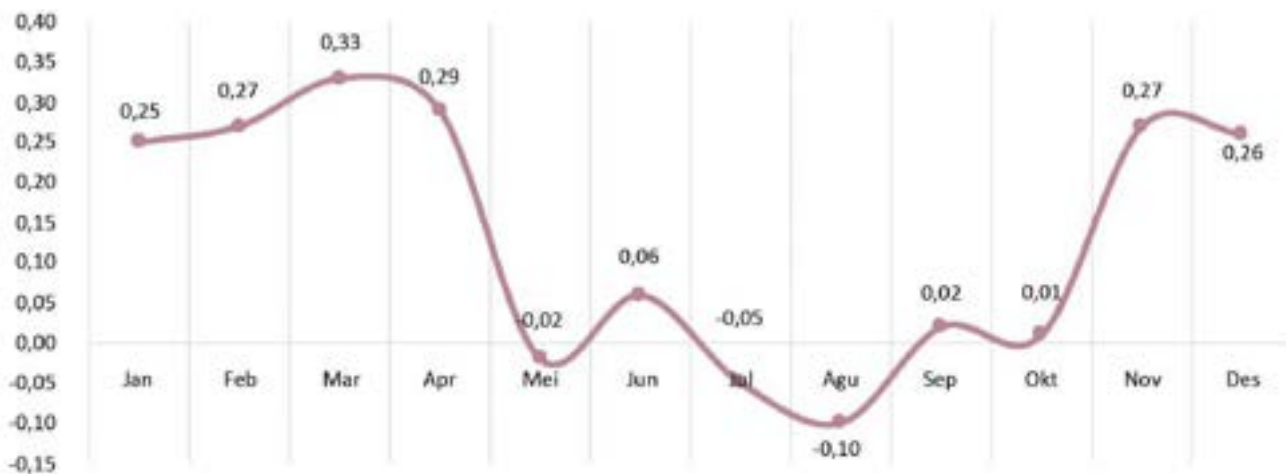


Gambar 5.12. Inflasi Tahunan DKI Jakarta dan Nasional (Persen) Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, inflasi di DKI Jakarta berada pada angka 1,59%. Nilai ini turun sebesar 1,64 poin dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, tahun ini menjadi tahun dengan inflasi terkecil setelah sempat mengalami inflasi yang tinggi pada tahun 2014 pada angka 8,95%. Inflasi tahunan DKI Jakarta pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi dalam skala nasional yang mencapai angka 1,68%. Rendahnya angka inflasi ini berhubungan dengan kemampuan daya beli masyarakat, turunnya produksi, dan stok barang yang masih ada. Bahkan, beberapa golongan masyarakat memutuskan untuk berhemat dan tidak mengeluarkan uangnya.





Gambar 5.13. Inflasi DKI Jakarta per Bulan (Persen) Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan inflasi DKI Jakarta sepanjang tahun 2020 yang mencapai titik terendahnya pada bulan Agustus dengan angka -0,10%, kemudian kembali naik hingga mencapai angka 0,26% pada bulan Desember. Sebelum mencapai titik terendah pada bulan Agustus, inflasi DKI Jakarta pernah mencapai puncaknya pada bulan Maret dengan angka 0,33%. Pembatasan ruang gerak dan kegiatan ekonomi pada tahun 2020 merupakan salah satu faktor menurunnya permintaan dan daya beli masyarakat di Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan PSBB yang diberlakukan dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta sepanjang tahun 2020. Daya beli masyarakat yang menurun selama diberlakukannya PSBB menyebabkan turunnya tingkat inflasi di DKI Jakarta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 5.14. Laju Inflasi Harga Konsumen per Bulan (Persen) di DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Menurut kelompok pengeluaran, penyebab utama inflasi berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,15% serta makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,34%. Inflasi pada tahun 2020 yang bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau berasal dari kenaikan harga komoditas seperti cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng. Sementara itu, terjadi deflasi pada kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar -0,29% dan transportasi sebesar -1,31%.

Pada dasarnya, inflasi merupakan hal yang dihindari karena dapat mengganggu perekonomian negara. Pemerintah tentu berupaya menghindari ini dengan cara seperti mengontrol jumlah uang yang beredar dan membatasi penciptaan uang oleh lembaga keuangan. Kebijakan tersebut dapat membantu menekan angka inflasi dan mendorong perekonomian yang lebih membaik.

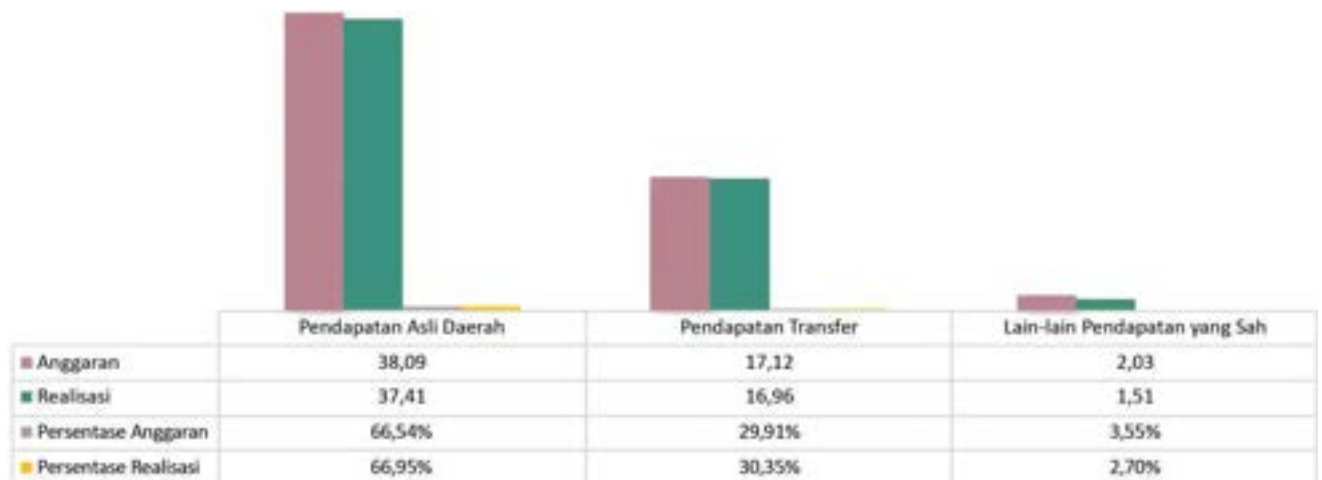
5.5. Indeks Harga Konsumen

Setiap barang dan jasa memiliki harga jual yang berbeda beda, oleh karenanya terdapat Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk mengukur harga rata-rata barang dan jasa tersebut. Pertumbuhan harga yang diukur menggunakan IHK nantinya digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu daerah.

Berkaitan dengan harga konsumen, gambar di atas menggambarkan mengenai IHK DKI Jakarta dalam rentang tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, IHK berada pada angka 104,80 yang menandakan bahwa sejak tahun 2018 indeks harga konsumen telah naik sebesar 4,80 poin. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IHK DKI Jakarta naik sebesar 2,53 poin. Koordinasi yang baik serta langkah-langkah proaktif yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terkendalinya IHK dan menekan angka inflasi di DKI Jakarta pada tahun 2020.

5.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan suatu bentuk penyusunan rincian anggaran yang berisi tentang rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Tiga komponen APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.



Gambar 5.15. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Triliun Rupiah) Tahun 2020

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan jumlah anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020. Jumlah anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan masing-masing sebanyak 57,23 dan 55,89 triliun rupiah. Anggaran realisasi pendapatan pada tahun 2020 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan selisih sebanyak 8,29 triliun rupiah. Penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2020 ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat terjadinya beberapa penyesuaian realisasi dari target awal seperti pengalokasian dana dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.



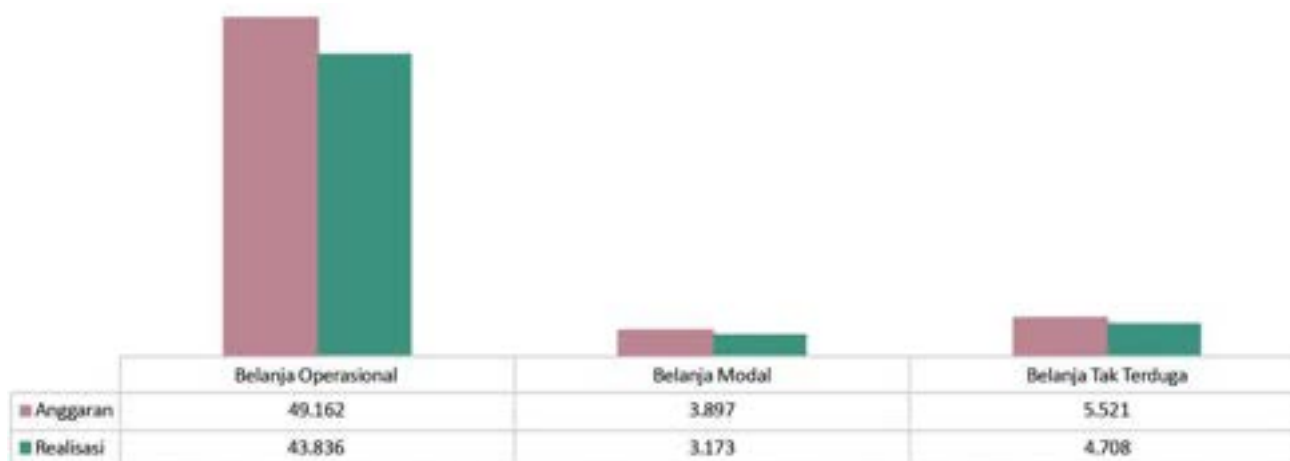
Gambar 5.16. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta (Miliar Rupiah) Tahun 2020
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

PAD di DKI Jakarta meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Persentase anggaran PAD lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah yaitu 66,54% atau sebanyak 38,09 triliun rupiah. Pada tahun 2020, kategori PAD dengan persentase realisasi tertinggi adalah pendapatan retribusi daerah sebesar 105,96% atau sebanyak 496,33 miliar rupiah, sedangkan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi kategori PAD dengan persentase realisasi paling rendah yaitu 79,63% atau sebanyak 171,98 miliar rupiah.



Gambar 5.17. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer di DKI Jakarta (Miliar Rupiah) Tahun 2020
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

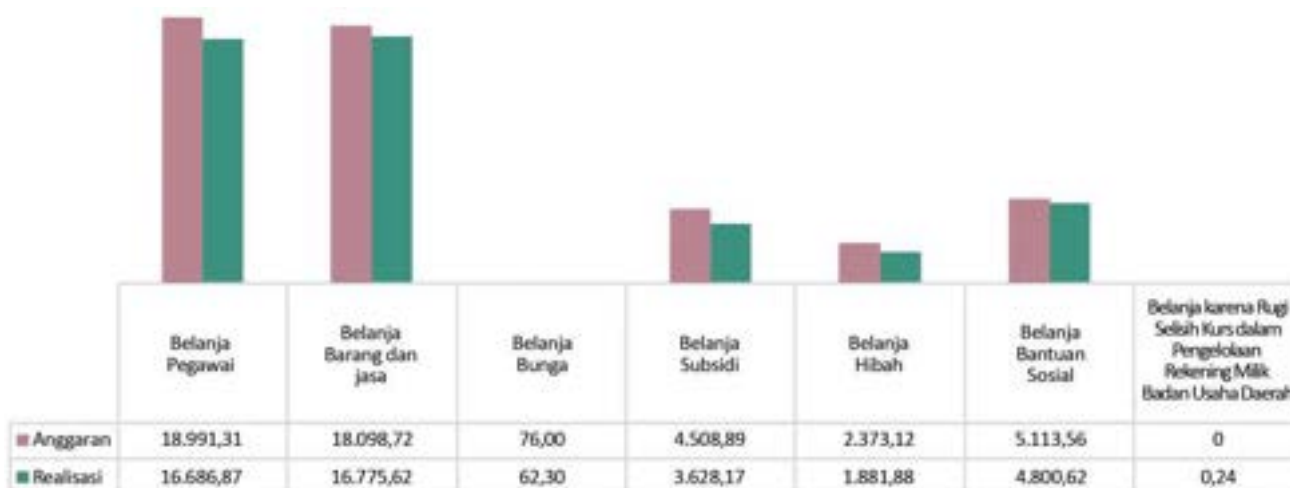
Realisasi pendapatan transfer terbagi menjadi dua kategori yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan dan dana lainnya. Pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana bagi hasil sumber daya alam, dan dana alokasi khusus. Sedangkan, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yaitu dana penyesuaian. Pada tahun 2020, jumlah dana anggaran pendapatan transfer adalah 17,12 triliun rupiah dengan dana anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat dalam kategori dana perimbangan sebanyak 17,05 triliun rupiah dan dana lainnya sebanyak 65,18 miliar rupiah. Selain PAD dan pendapatan transfer, terdapat juga anggaran pendapatan lain-lain yang sah sebanyak 2,03 triliun rupiah dan realisasinya sebanyak 1,51 triliun rupiah.



Gambar 5.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta (Miliar Rupiah) Tahun 2020

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

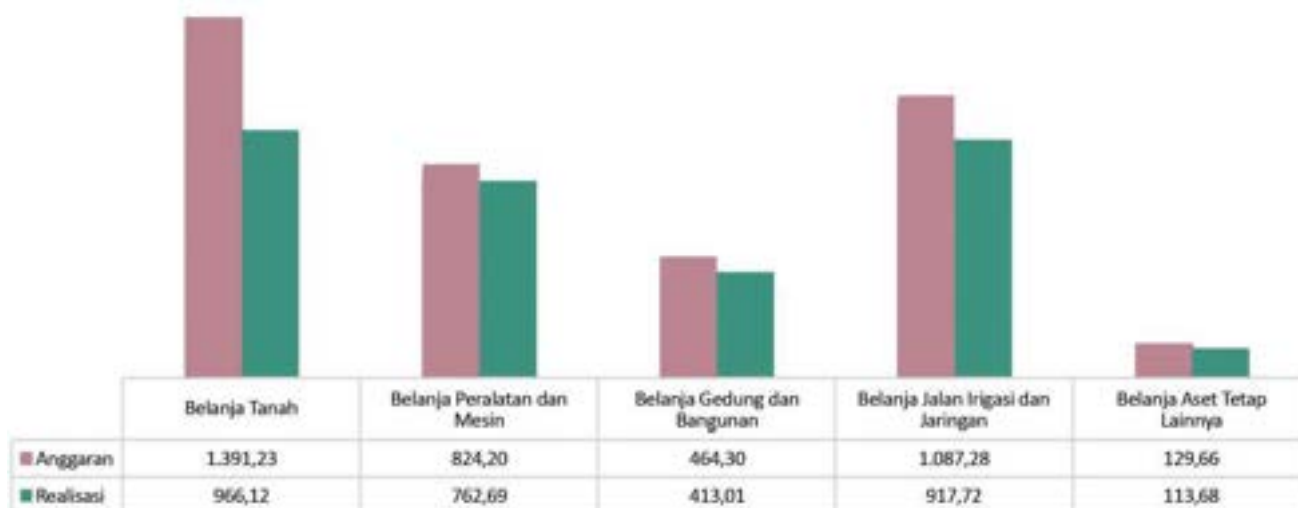
Anggaran belanja daerah di DKI Jakarta terbagi menjadi tiga kategori yaitu belanja operasional, modal, dan tak terduga. Pada tahun 2020, total anggaran dan realisasi belanja DKI Jakarta masing-masing mencapai 58,58 dan 51,72 triliun rupiah. Persentase realisasi belanja DKI Jakarta mencapai 88,28%. Jumlah realisasi belanja daerah pada tahun 2020 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 12,38 triliun.



Gambar 5.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi di DKI Jakarta (Miliar Rupiah) Tahun 2020

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik badan usaha daerah. Pada tahun 2020, jumlah anggaran dan realisasi belanja operasi di DKI Jakarta masing-masing mencapai 49,16 dan 43,84 triliun rupiah. Jumlah realisasi belanja operasi menurun sebanyak 8,71 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data yang berhasil dihimpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 menunjukkan bahwa anggaran belanja pegawai menjadi anggaran belanja operasi dengan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan anggaran belanja lainnya yaitu 18,99 triliun rupiah. Belanja pegawai dapat meliputi pembayaran gaji, tunjangan, dan transportasi PNS. Sedangkan, tidak ada anggaran belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik badan usaha daerah walaupun tercatat realisasi belanja karena rugi selisih kurs ini sebanyak 244,63 juta rupiah. Pada tahun 2020, persentase realisasi belanja bantuan sosial menjadi yang paling tinggi yaitu 93,88%.



Gambar 5.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal di DKI Jakarta (Triliun Rupiah) Tahun 2020
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Belanja modal meliputi belanja tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya. Pada tahun 2020, jumlah anggaran dan realisasi belanja modal di DKI Jakarta masing-masing mencapai 3,90 dan 3,17 triliun rupiah. Jumlah realisasi anggaran ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 8,38 triliun rupiah. Anggaran belanja aset tetap lainnya menjadi anggaran paling sedikit yaitu 129,66 miliar rupiah dengan persentase realisasi belanja sebesar 87,67% atau sebanyak 113,68 miliar rupiah. Selain anggaran belanja operasi dan modal, terdapat juga anggaran belanja tak terduga yang mencapai 5,52 triliun rupiah dengan persentase realisasi anggaran sebesar 88,28% atau sebanyak 51,72 triliun rupiah.





BAB VI

INSIDENSIAL

Corona Virus Disease 19

Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020



46.874

jiwa lonjakan positivity rate paling tinggi yang terjadi pada Desember 2020



5,07%

positivity rate Covid-19 di DKI Jakarta pada akhir tahun 2020.



183.220

jiwa positif terjangkit Covid-19 sejak Maret 2020 sampai dengan Desember 2020.

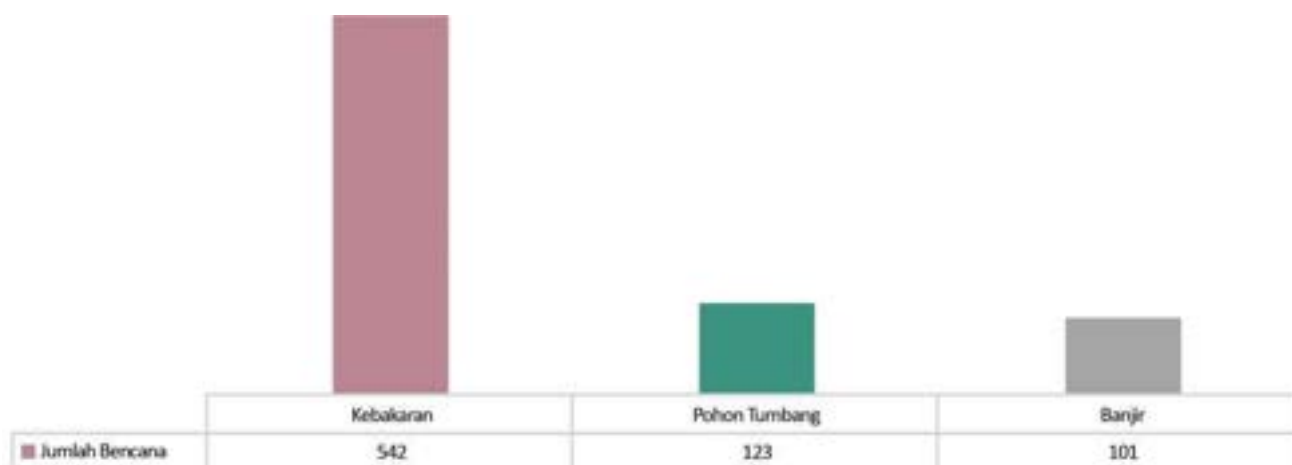
VI. Insidensial

6.1. Bencana Alam

Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, dan lain-lain yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada penduduk. Bencana alam merupakan peristiwa yang cenderung sulit untuk diprediksi. Peristiwa ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun yang diakibatkan oleh peristiwa alam dan umumnya terjadi tanpa ada campur tangan dari manusia secara langsung.

6.1.1. Kejadian Bencana Alam

Kejadian bencana alam di DKI Jakarta yang sering terjadi meliputi kebakaran, pohon tumbang, dan banjir. Bencana alam yang terjadi di DKI Jakarta dapat memberikan kerugian yang berasal dari kerusakan berbagai infrastruktur seperti jalan sampai dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh warga.



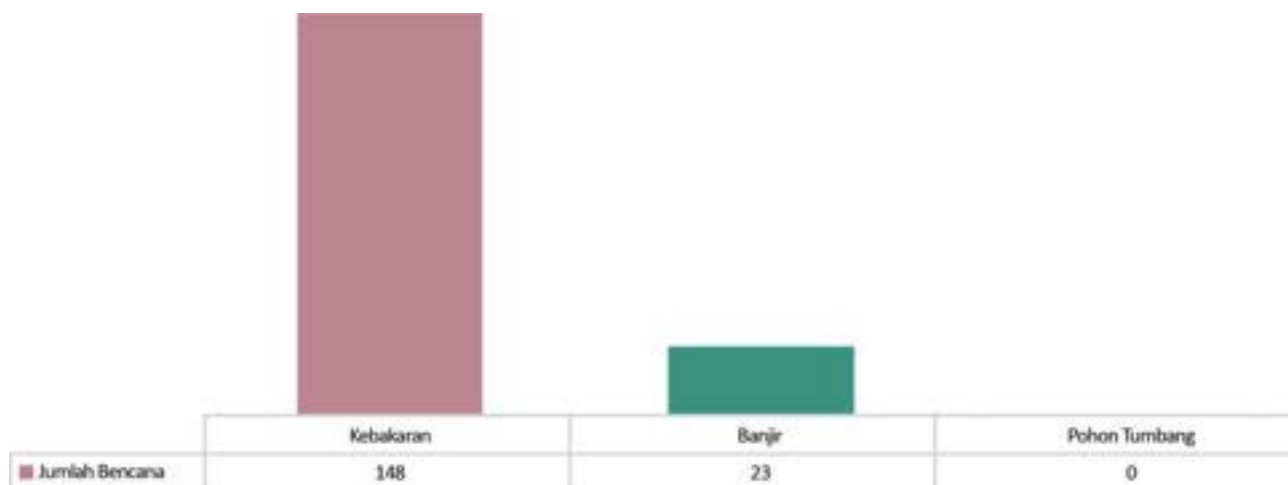
Gambar 6.1. Kebencanaan di DKI Jakarta Menurut Jenis Tahun 2020
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan jumlah kejadian kebencanaan di DKI Jakarta selama tahun 2020. Bencana kebakaran menjadi bencana yang paling sering terjadi, tercatat sebanyak 542 bencana kebakaran sepanjang tahun ini. Dilihat menurut wilayah administrasi, kejadian kebakaran paling banyak terjadi di Jakarta Barat sebanyak 138 bencana kebakaran, disusul oleh Jakarta Timur dan Jakarta Utara masing-masing sebanyak 132 dan 106 bencana kebakaran. Adapun penyebab kebakaran di DKI Jakarta seperti gangguan listrik, kebocoran gas, lilin, puntung rokok, dan lain-lain.

Pada tahun yang sama, bencana terbanyak setelah kebakaran yaitu pohon tumbang sebanyak 123 kejadian. Sebesar 50,41% atau sebanyak 62 kejadian pohon tumbang terjadi di Jakarta Selatan. Jumlah ini disusul oleh Jakarta Pusat dan Jakarta Barat sebanyak 15 kejadian, lalu Jakarta Utara dan Jakarta Timur sebanyak 12 kejadian. Banjir menjadi bencana alam yang paling sedikit terjadi pada tahun ini yaitu 101 kejadian. Dilihat menurut bulan, bencana banjir terjadi paling banyak pada trimester pertama tahun 2020 dengan puncaknya pada bulan Februari yaitu 17 kejadian, sedangkan bencana banjir pada bulan April sebanyak 12 kejadian.

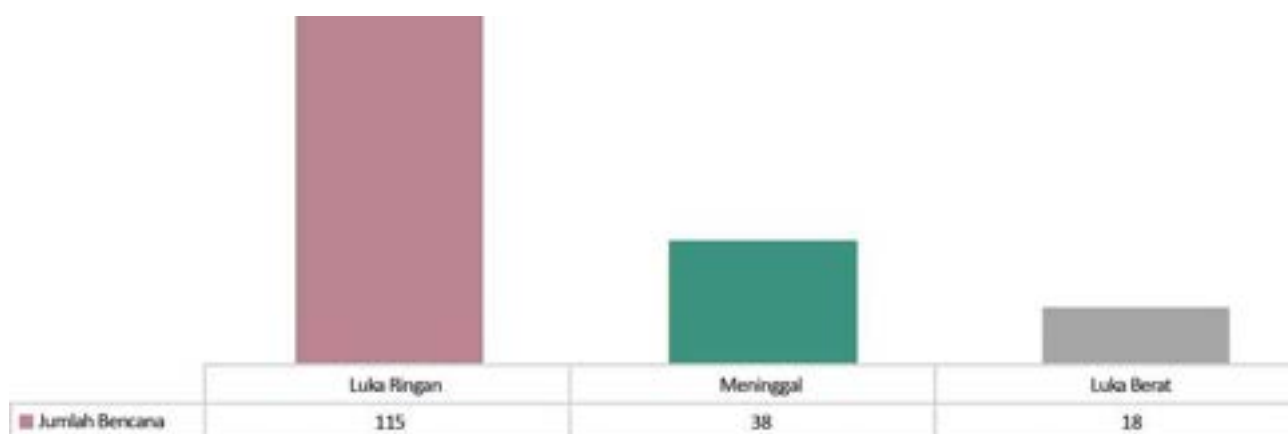
6.1.2. Dampak Bencana Alam

Bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan pohon tumbang yang terjadi di DKI Jakarta tidak hanya menyebabkan kerugian benda, namun juga kerugian non benda. Kerugian non benda yang dialami oleh korban bencana alam mulai dari luka ringan, luka berat sampai dengan kematian. Berbagai bencana yang terjadi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2020 mengakibatkan timbulnya sebanyak 171 korban.



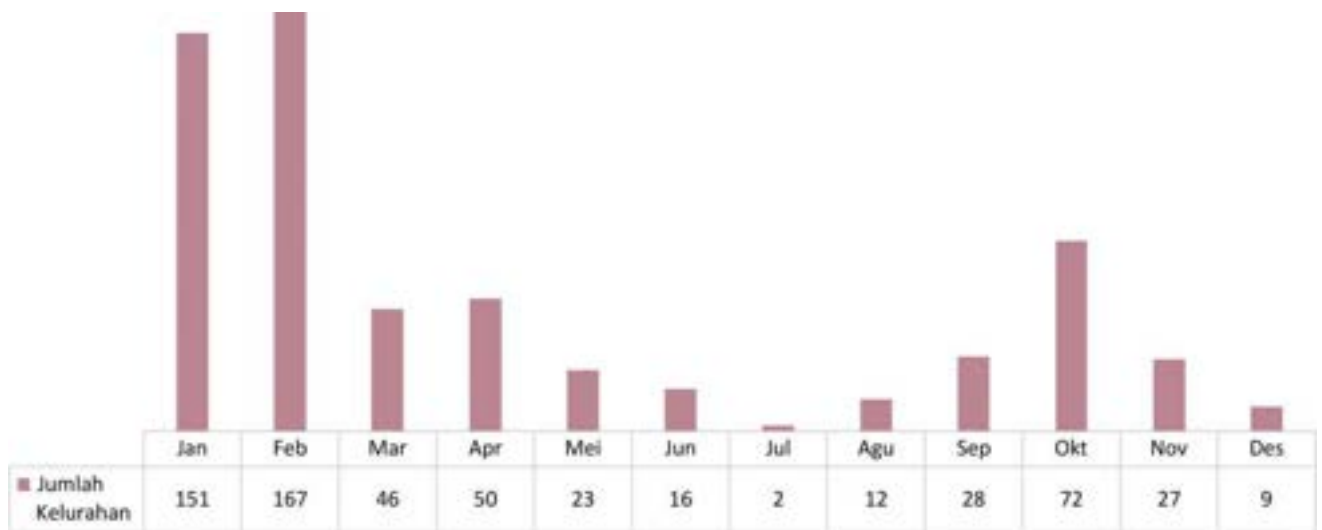
Gambar 6.2. Jumlah Korban Bencana Alam di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 148 korban bencana kebakaran, 23 korban banjir, dan tidak ada satupun korban yang disebabkan oleh pohon tumbang. Banyaknya korban yang ditimbulkan dari bencana kebakaran berbanding lurus dengan jumlah kejadian bencana kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2020 sebesar 70,76%.



Gambar 6.3. Jumlah Korban Bencana Alam di DKI Jakarta Menurut Jenis Korban Tahun 2020
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Jika dilihat dari jenisnya, tercatat sebanyak 115 korban menderita luka ringan, 18 korban menderita luka berat, dan 38 korban meninggal dunia. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering kali terjadi di DKI Jakarta. Keadaan kontur atau garis ketinggian beberapa wilayah di DKI Jakarta yang memiliki ketinggian di bawah permukaan laut menyebabkan ibu kota negara ini tidak luput dari bencana alam ini setiap tahunnya. Curah hujan yang tinggi di DKI Jakarta menyebabkan terjadinya genangan air dalam jumlah yang besar.



Gambar 6.4. Jumlah Kelurahan Terdampak Banjir di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan provinsi yang terletak pada dataran rendah dan berada di utara pulau Jawa. Selain itu juga, DKI Jakarta memiliki Sungai Ciliwung dan beberapa anak sungai lainnya. Jika dihubungkan dengan curah hujan yang cukup tinggi di DKI Jakarta sepanjang tahun 2020, dapat dikatakan bahwa DKI Jakarta memiliki potensi banjir di beberapa titik. Oleh karena itu, penduduk DKI Jakarta diharapkan dapat menjaga lingkungan agar terhindar dari risiko banjir. Gambar di atas menunjukkan banyaknya kelurahan di DKI Jakarta yang terdampak banjir. Tercatat puncaknya berada pada bulan Februari sebanyak 167 kelurahan yang terdampak banjir. Dari sebanyak 267 kelurahan di DKI Jakarta, sebesar 74,53% atau sebanyak 199 kelurahan yang terkena dampak banjir sepanjang tahun 2020. Tidak terlalu banyak kelurahan yang terdampak banjir pada bulan Juli, hal ini dapat disebabkan oleh curah hujan yang rendah dikarenakan musim kemarau.

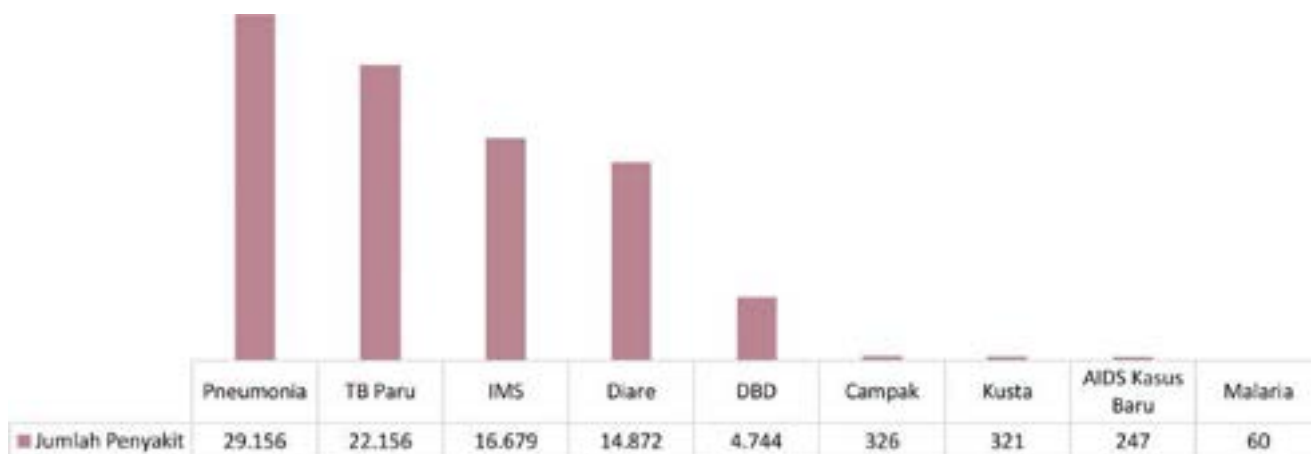
Pada dasarnya bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan tanah longsor merupakan bencana yang dipengaruhi oleh faktor wilayah. Namun, bukan berarti bahwa tidak ada campur tangan manusia dalam bencana tersebut. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak mematikan puntung rokok serta kelalaian-kelalaian lainnya dapat memicu bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjaga lingkungan agar dapat terhindar dari bencana alam.

6.2. Penyakit Menular

Kondisi abnormal yang memengaruhi kinerja tubuh dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu yang dapat menular dan tidak dapat menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar ke manusia dan disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Penyakit menular ini dapat menimbulkan sakit hingga kematian bagi penderitanya. Kepadatan penduduk DKI Jakarta yang mencapai 14.555 jiwa per kilometer dapat memengaruhi laju penyebaran penyakit menular sehingga penduduknya wajib untuk mewaspadai akan penyakit menular yang ada disekitar³².

³² Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2021), "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan 2018-2020", <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/124/1/3-1-1-penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi-kabupaten-kota-kecamatan.html>, diakses pada 25 Juni 2021.

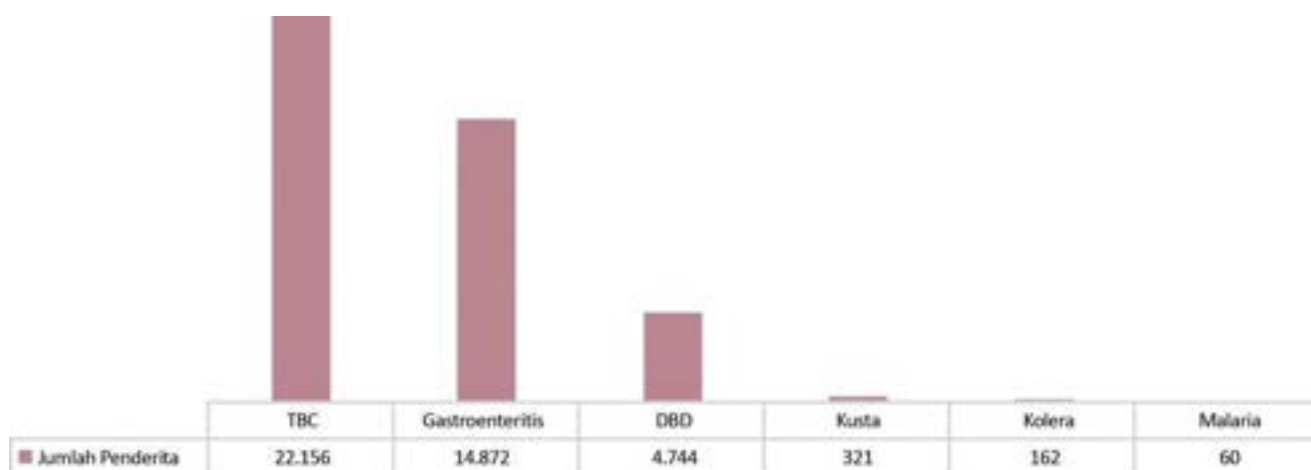
Beberapa penyakit seperti tifus, demam berdarah, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berpotensi muncul saat dan setelah bencana banjir. Penyakit-penyakit tersebut jika tidak ditangani dengan baik akan menjadi masalah baru dengan menularkan kepada pengungsi yang lain. Penyakit menular yang terdeteksi di DKI Jakarta pada tahun 2020 seperti Pneumonia, Tuberkulosis Paru (TB Paru), Infeksi Menular Seksual, Diare, Demam Berdarah Dengue (DBD), Campak, Kusta, AIDS, dan Malaria.



Gambar 6.5. Jumlah Penyakit Menular di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan penyakit-penyakit menular yang dialami warga DKI Jakarta pada tahun 2020. Penyakit pneumonia yang merupakan penyakit peradangan paru-paru yang diakibatkan oleh infeksi bakteri, virus atau jamur menjadi penyakit yang paling banyak menjangkiti penduduk DKI Jakarta. Pada tahun ini, tercatat sebanyak 29.156 kasus pneumonia. Masih berhubungan dengan paru-paru, urutan kedua terbanyak penyakit menular di DKI Jakarta pada tahun yang sama adalah TB Paru dengan jumlah penderita yang mencapai 22.156 jiwa.



Gambar 6.6. Jumlah Penderita Penyakit Menular di DKI Jakarta Tahun 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, jumlah penderita Tuberkulosis (TBC) di DKI Jakarta merupakan jumlah paling banyak jika dibandingkan dengan penderita penyakit menular lainnya seperti Malaria, Gastroenteritis, Kolera, Kusta, dan DBD. Namun, jumlah ini mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 43,87% atau sebanyak 17.314 penderita penyakit TBC.



Gambar 6.7. Tiga Penyakit Menular Terbanyak di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Tahun 2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan Kepulauan Seribu memiliki kasus yang paling sedikit dibandingkan dengan wilayah administrasi lainnya, hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Kepulauan Seribu yang juga berjumlah paling sedikit. Sedangkan, di DKI Jakarta Penyakit TB Paru paling banyak menjangkiti Jakarta Timur sebanyak 6.670 kasus TB Paru pada tahun tersebut. Tidak hanya TB Paru, Jakarta Timur juga memiliki kasus pneumonia terbanyak yaitu 8.553 kasus. Untuk penyakit IMS, paling banyak tercatat di Jakarta Barat sebanyak 5.122 kasus.

Penyakit menular masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehingga perlu adanya tindakan preventif dalam menghadapi penyakit menular. Perilaku hidup sehat seperti rajin mencuci tangan, makan makanan bergizi, rutin berolahraga, dan sebagainya menjadi pilihan bijak bagi masyarakat untuk menghindari penyakit menular. Sementara itu, pemerintah juga gencar menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksin sebagai tindakan pencegahan penyakit menular.

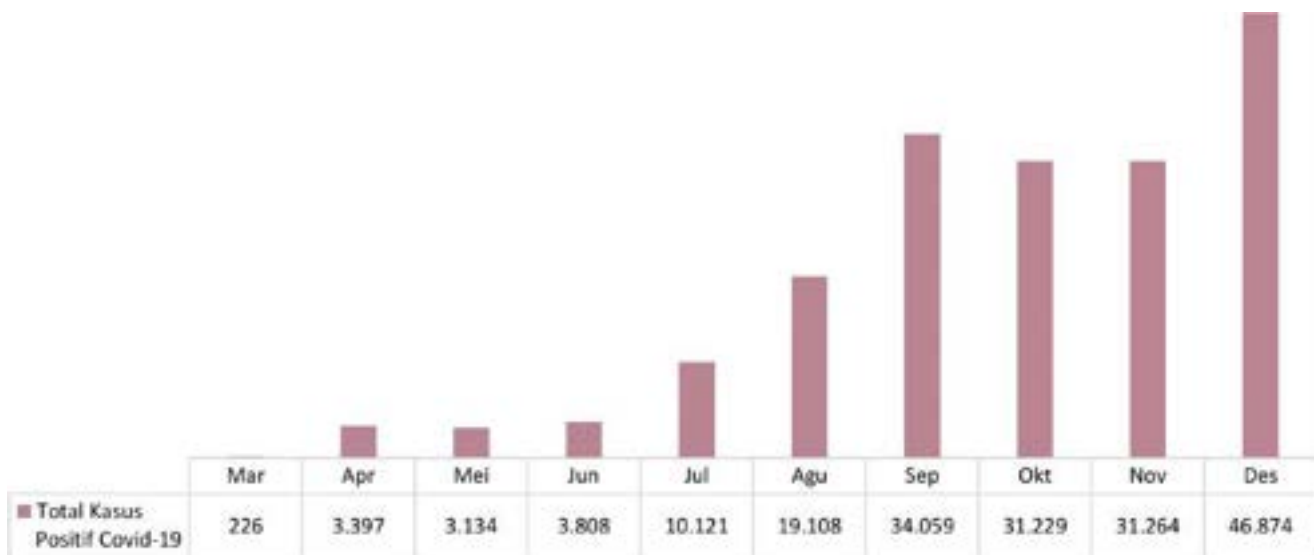
6.3. Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) yang menyerang sistem pernafasan. Indonesia pertama kali mengumumkan kasus Covid-19 ini pada 2 Maret 2020. Saat itu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengumumkan terdapat dua Warga Negara Indonesia dinyatakan positif terjangkit virus ini.

6.3.1. Kasus Covid-19

Selain sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta juga masih menjadi pusat bisnis di Indonesia yang menyebabkan tingginya angka mobilitas penduduk di kota ini. Tingginya mobilitas penduduk di kota-kota besar seperti DKI Jakarta menjadikan ancaman tersendiri dalam peningkatan kasus penyebaran Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta yang terus meningkat dari awal penyebaran pada bulan Maret sampai dengan Desember 2020.

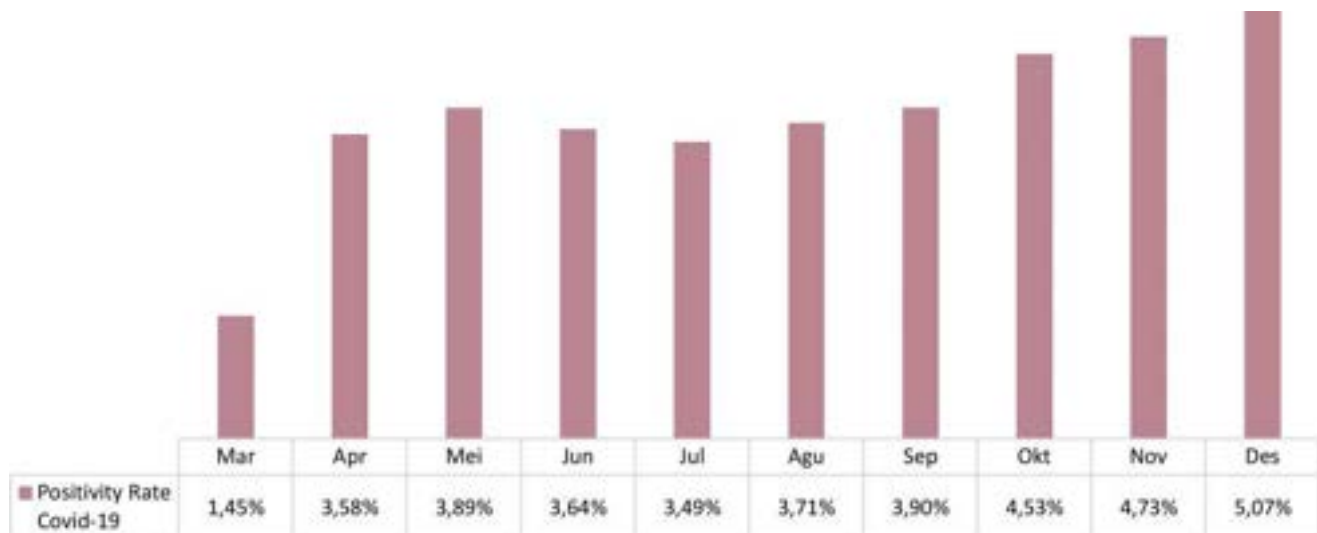




Gambar 6.8. Total Kasus Positif Covid-19 di DKI Jakarta Bulan Maret-Desember Tahun 2020

Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/>

Sejak Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 dengan DKI Jakarta sebagai wilayah pertama terjangkit virus ini. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas, awal pandemi pada bulan Maret tercatat sebanyak 226 kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta. Sejak saat itu, trennya terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember dengan jumlah 46.874 kasus positif. Jika dilihat dari bulan April sampai dengan Juni 2020, jumlah kasus positif Covid-19 mengalami fluktuasi yang tidak begitu signifikan, sedangkan jumlah ini meningkat tajam dari bulan Juni sampai dengan September. Lonjakan pada rentang waktu tersebut dapat disebabkan dari dimulainya pemberlakuan PSBB Transisi sejak 1 Juni 2020.

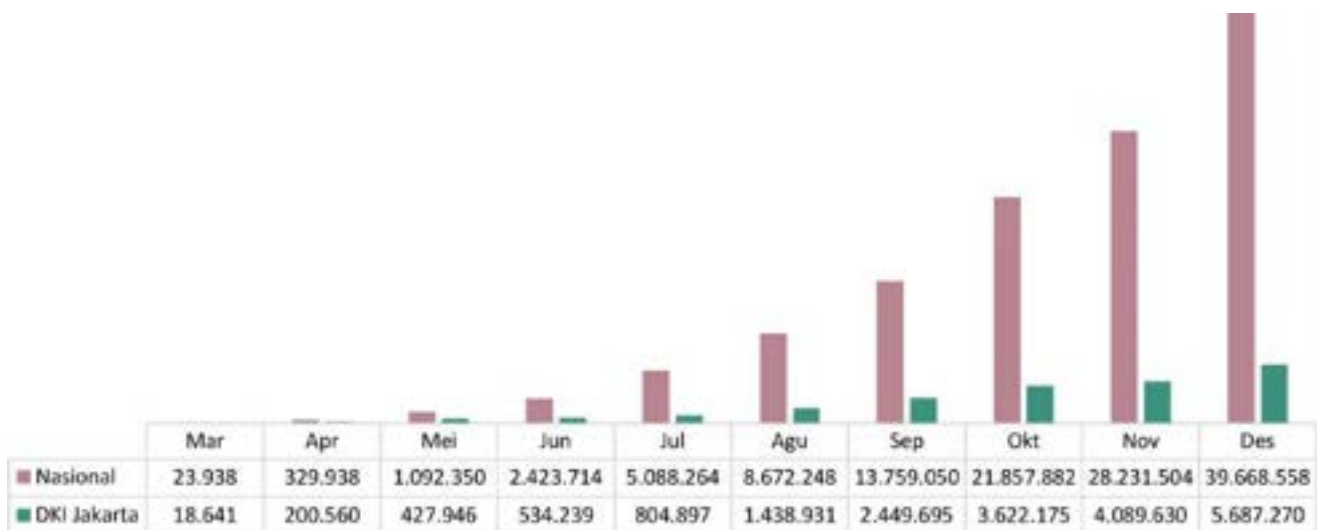


Gambar 6.9 Positivity Rate Covid-19 di DKI Jakarta Bulan Maret-Desember Tahun 2020

Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id>

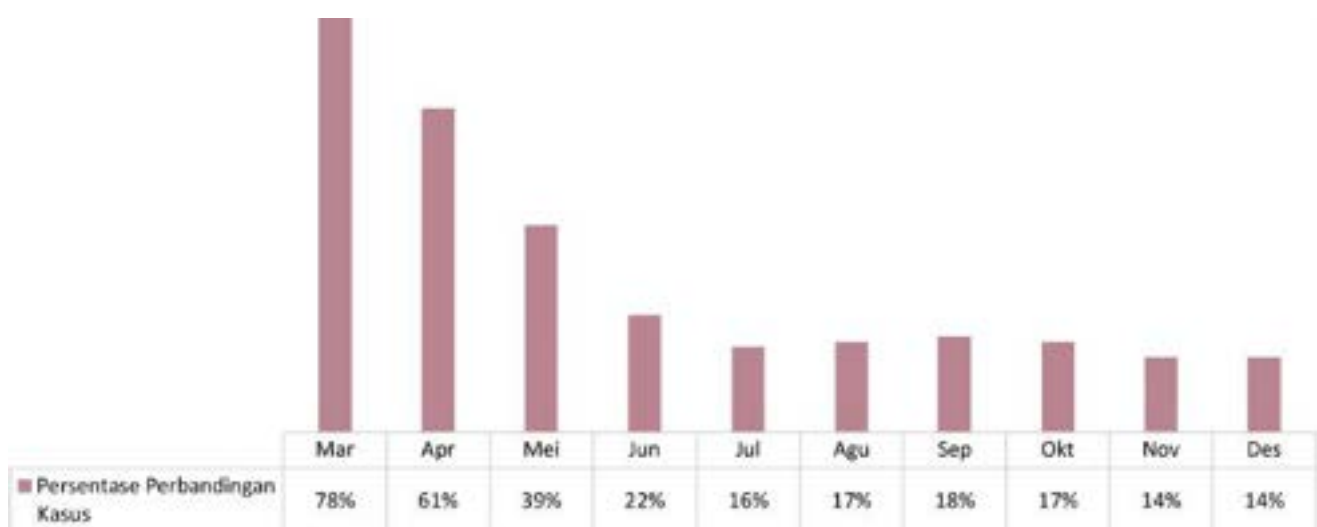
Tren kasus positif Covid-19 pada periode Maret sampai dengan Desember 2020 juga dapat dilihat dari positivity rate seperti gambar di atas. Pada Maret 2020 tercatat positivity rate pada angka 1,45%, kemudian nilai ini meningkat terus hingga akhir tahun yang mencapai 5,07%.





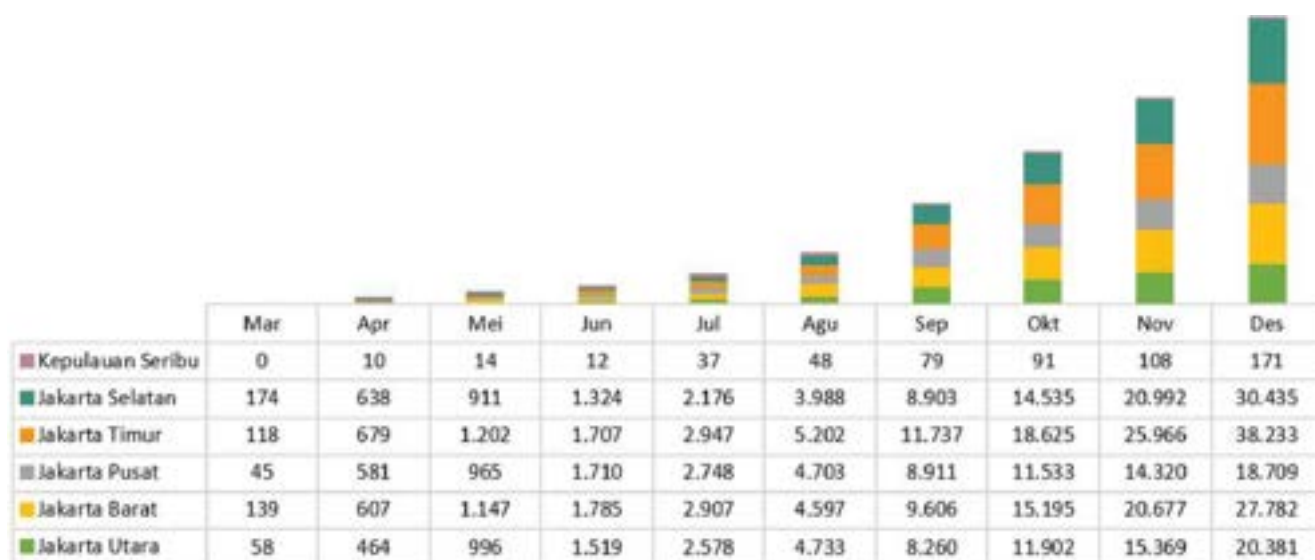
*Total kasus mencakup seluruh kasus, baik yang masih aktif maupun yang sudah sembuh ataupun meninggal
Gambar 6.10. Perbandingan Total Kasus Covid-19 Nasional dengan DKI Jakarta Bulan Maret-Desember Tahun 2020
 Sumber : <https://corona.jakarta.go.id/id>

Tren peningkatan total kasus Covid-19 tidak hanya dialami di DKI Jakarta, namun juga secara nasional. Gambar di atas menunjukkan perbandingan total kasus Covid-19 di DKI Jakarta dan di tingkat nasional. Pada awal pandemi masuk ke Indonesia, tercatat total kasus Covid-19 DKI Jakarta sejumlah 18.641 kasus dan di tingkat nasional mencapai 23.938 kasus. Jumlah tersebut terus meningkat sampai dengan akhir tahun 2020 pada angka 5.687.270 kasus untuk DKI Jakarta dan 39.668.558 kasus untuk tingkat nasional.



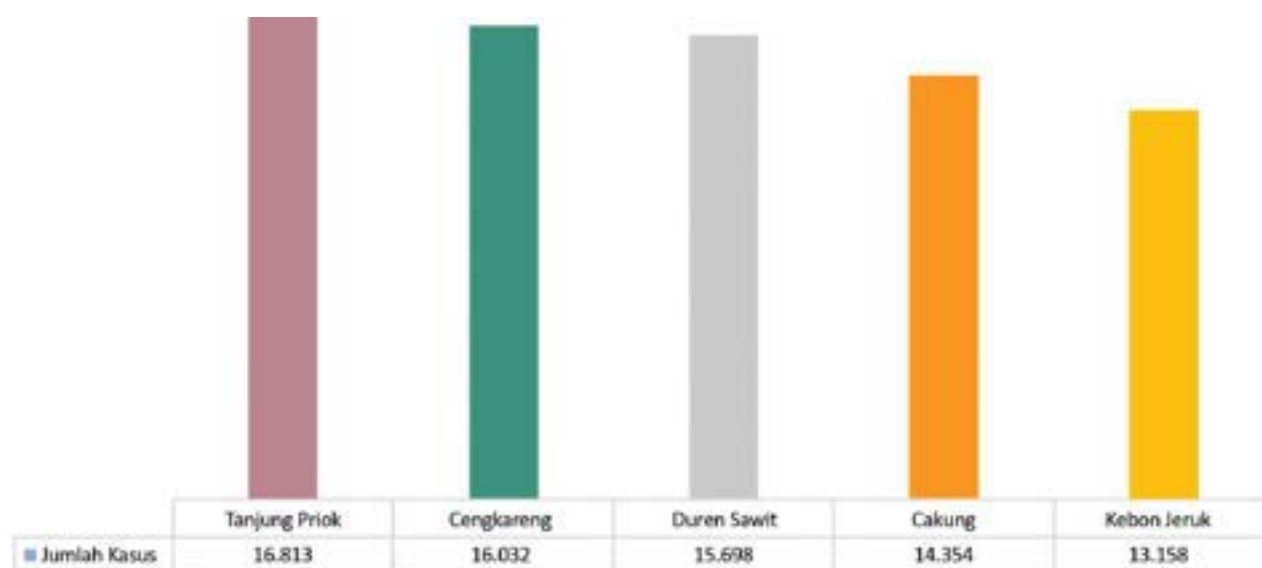
Gambar 6.11. Persentase Perbandingan Kasus di DKI Jakarta dengan Nasional
 Bulan Maret-Desember Tahun 2020
 Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id>

Gambar di atas menggambarkan persentase perbandingan kasus di DKI Jakarta dengan tingkat nasional. Dari Maret sampai dengan Desember 2020, persentase perbandingan kasus di DKI Jakarta dengan tingkat nasional menurun sebesar 64 poin. Persentase yang cukup tinggi di awal penyebaran kasus Covid-19 ini diduga kuat karena pada saat itu banyak kasus positif Covid-19 yang tercatat berasal dari DKI Jakarta dan belum terdeteksi di wilayah lainnya di Indonesia.



Gambar 6.12. Kasus Positif Covid-19 di DKI Jakarta Menurut Wilayah Administrasi Bulan Maret-Desember Tahun 2020
Sumber: JakartaGis/ <https://riwayat-file-covid-19-DKI-jakarta-jakartagis.hub.arcgis.com/>

Gambar di atas menunjukkan kasus positif Covid-19 yang tersebar di enam wilayah administrasi di DKI Jakarta. Seluruh wilayah di DKI Jakarta terkena virus ini tanpa terkecuali. Kepulauan Seribu tidak mempunyai kasus saat awal pandemi ini melanda DKI Jakarta, setelahnya terjadi peningkatan kasus positif, namun demikian jumlahnya menjadi yang paling kecil dibandingkan dengan lima wilayah administrasi lainnya. Hal ini diduga kuat karena jumlah penduduk Kepulauan Seribu yang juga paling sedikit di DKI Jakarta ditambah lagi dengan keterbatasan akses menuju wilayah ini. Jakarta Timur hampir selalu menjadi wilayah dengan kasus positif tertinggi di setiap bulannya. Pada bulan Desember, Jakarta Timur tercatat memiliki kasus positif terbanyak yaitu 38.233 kasus.



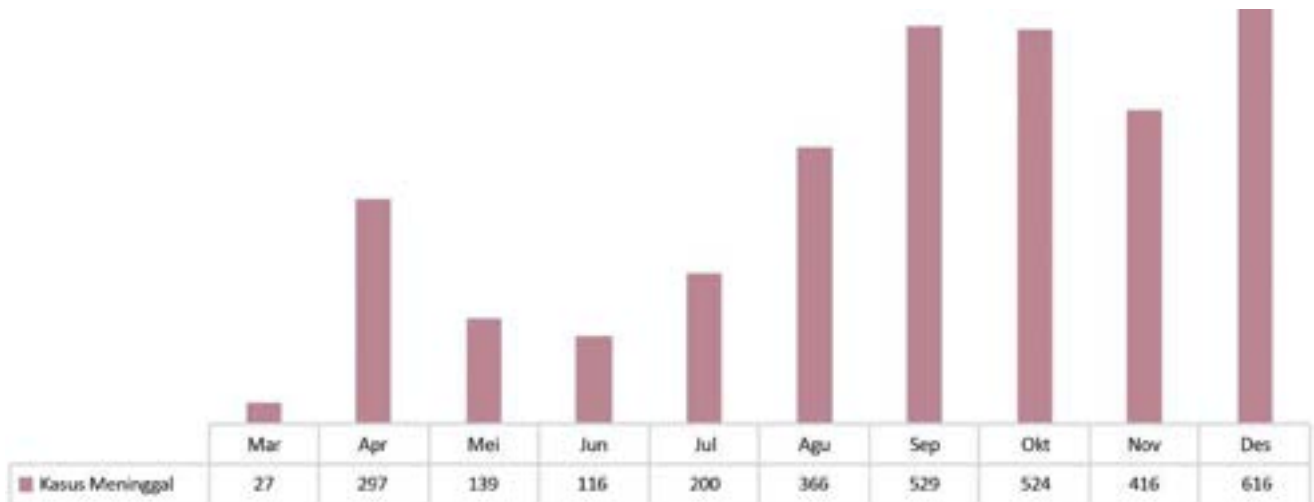
Gambar 6.13. Lima Kecamatan di DKI Jakarta dengan Kasus Positif Covid-19 Terbanyak pada Bulan Maret-Desember Tahun 2020

Sumber: JakartaGis/ <https://riwayat-file-covid-19-DKI-jakarta-jakartagis.hub.arcgis.com/>

Pada tingkat kecamatan, Kecamatan Tanjung Priok tercatat menjadi kecamatan dengan kasus positif terbanyak sepanjang Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 sebanyak 16.813 kasus positif. Jumlah ini diikuti oleh Kecamatan Cengkareng, Duren Sawit, Cakung, dan Kebon Jeruk. Dari lima kecamatan yang ada di atas, dua di antaranya yaitu Cakung dan Duren Sawit merupakan kecamatan yang berada di Jakarta Timur, dua kecamatan lainnya yaitu Cengkareng dan Kebon Jeruk berada di Jakarta Barat, dan satu kecamatan yaitu Tanjung Priok berada di Jakarta Utara.

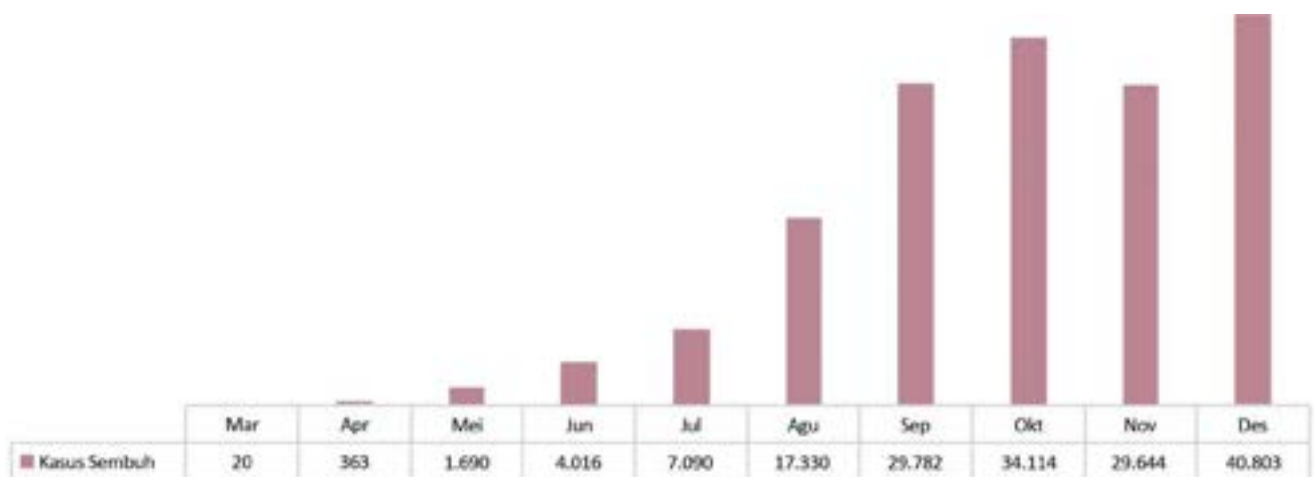
6.3.2. Kasus Meninggal dan Sembuh dari Covid-19

Covid-19 memberikan dampak yang beragam pada para penderitanya, pada kasus yang berat dapat mengakibatkan penderita virus ini meninggal dunia. Angka kematian akibat Covid-19 di DKI Jakarta makin memprihatinkan. Sejak Agustus sampai dengan Desember 2020, total kasus meninggal akibat terpapar virus ini melebihi 300 jiwa tiap bulannya.



Gambar 6.14. Gambar 6.14 Total Kasus Meninggal Covid-19 di DKI Jakarta Bulan Maret-Desember Tahun 2020
Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id>

Gambar di atas menunjukkan kasus meninggal dunia pada bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2020. Dapat dilihat bahwa trennya meningkat dari awal pandemi sejumlah 27 jiwa dan melonjak pada bulan berikutnya menjadi 297 jiwa. Puncak kasus meninggal Covid-19 berada pada bulan Desember yaitu 616 jiwa.



Gambar 6.15. Total Kasus Sembuh dari Covid-19 di DKI Jakarta Bulan Maret-Desember Tahun 2020
Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id>

Beberapa penderita Covid-19 dapat bertahan dan dinyatakan sembuh dari virus ini. Gambar di atas menunjukkan jumlah kasus sembuh Covid-19 di DKI Jakarta pada Maret sampai dengan Desember 2020. Trennya terus meningkat dari awal pandemi pada Maret sampai dengan Oktober 2020. Seiring berjalannya waktu, jumlah kasus sembuh dari virus ini lebih banyak daripada kasus meninggal dunia. Serupa dengan kasus meninggal, kasus sembuh dari Covid-19 juga mencapai puncaknya pada Desember 2020 sebanyak 40.803 jiwa.



BAB VII

POLITIK DALAM NEGERI DAN PENGAWASAN HUKUM

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Tiga Provinsi dengan skor IDI Tertinggi Pada Tahun 2020

DKI Jakarta	88,29
Kalimantan Utara	83,45
Kepulauan Riau	81,64

Aspek IDI di DKI Jakarta Pada Tahun 2020



Kebebasan Sipil
91,01



Hak-hak Politik
83,86



Lembaga Demokrasi
91,89

Ingat!
Skor IDI >80 itu baik,
60-79 itu sedang, dan
<60 itu buruk!

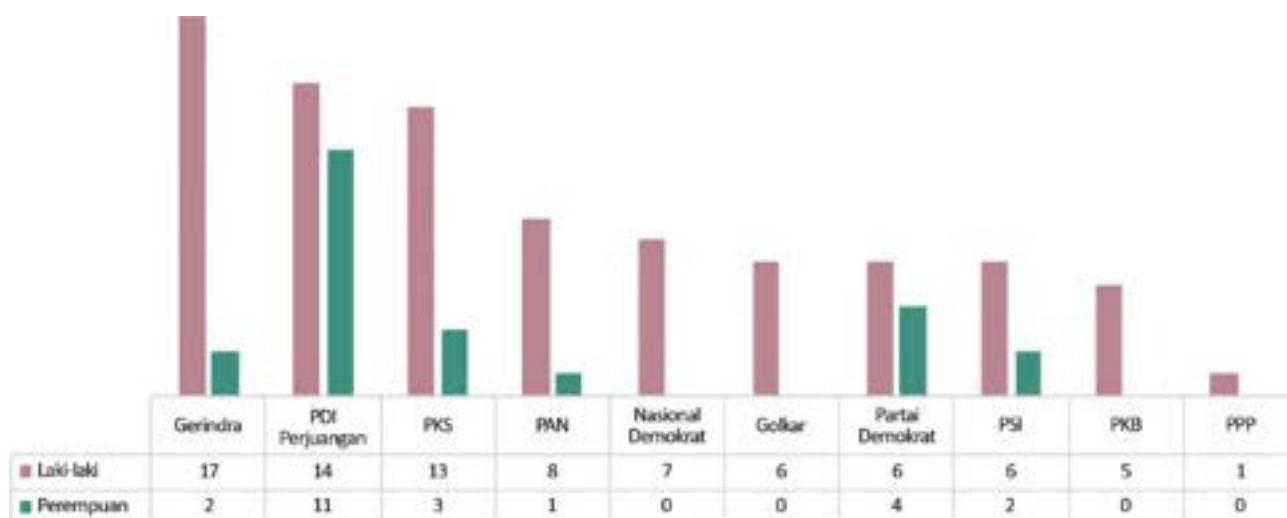


VII. Politik Dalam Negeri dan Pengawasan Hukum

7.1. Lembaga Demokrasi

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menjadi salah satu pusat dunia perihal bernegara. Ketika negara-negara menjadikan konstitusi atau undang-undang sebagai dasar negara, Indonesia malah merumuskan Pancasila dan menjadikannya sebagai dasar negara. Untuk menjalankan demokrasi, Indonesia memiliki tiga lembaga untuk menjalankan sistem tersebut. Lembaga-lembaga tersebut adalah yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ketiga lembaga tersebutlah yang berperan penting untuk menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga di sistem demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memiliki peran penting untuk menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pasal 3 mendefinisikan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan unsur pemerintah daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.



Gambar 7.1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DKI Jakarta Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Jumlah kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta yang diisi pada periode 2019 sampai dengan 2024 adalah sebanyak 106 kursi. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 10 partai yang menempati kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta yaitu Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sosial (PKS), Nasional Demokrat (Nasdem), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jika dilihat menurut jumlahnya, partai PDIP merupakan partai yang mendapatkan kursi paling banyak yaitu 25 kursi dan PPP merupakan partai yang mendapatkan paling sedikit kursi yaitu satu kursi.

Pada periode 2019 sampai dengan 2024, sebesar 78,30% atau sebanyak 83 anggota dewan di DKI Jakarta adalah laki-laki. DPRD DKI Jakarta yang berasal dari partai Gerindra memiliki anggota laki-laki terbanyak yaitu 17 orang. Jumlah ini disusul oleh PDIP pada urutan kedua yang memiliki anggota dewan laki-laki yaitu 14 orang. Di sisi lain, partai Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP tidak memiliki anggota perempuan.

7.2. Indeks Demokrasi Indonesia

Hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai peraturan yang memberikan sanksi kepada para pelanggarnya digunakan sebagai alat untuk melindungi warga negaranya. Berbagai aspirasi dari masyarakat dapat disalurkan melalui berbagai lembaga perwakilan rakyat untuk ditindaklanjuti. Masalah yang timbul di masyarakat dapat dipicu dari bermacam-macam faktor, salah satunya adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai untuk kepentingan sosial. Permasalahan yang ada pada masyarakat dapat disampaikan melalui delegasi masyarakat seperti berbagai organisasi dan gerakan yang akan menyampaikan aspirasinya.

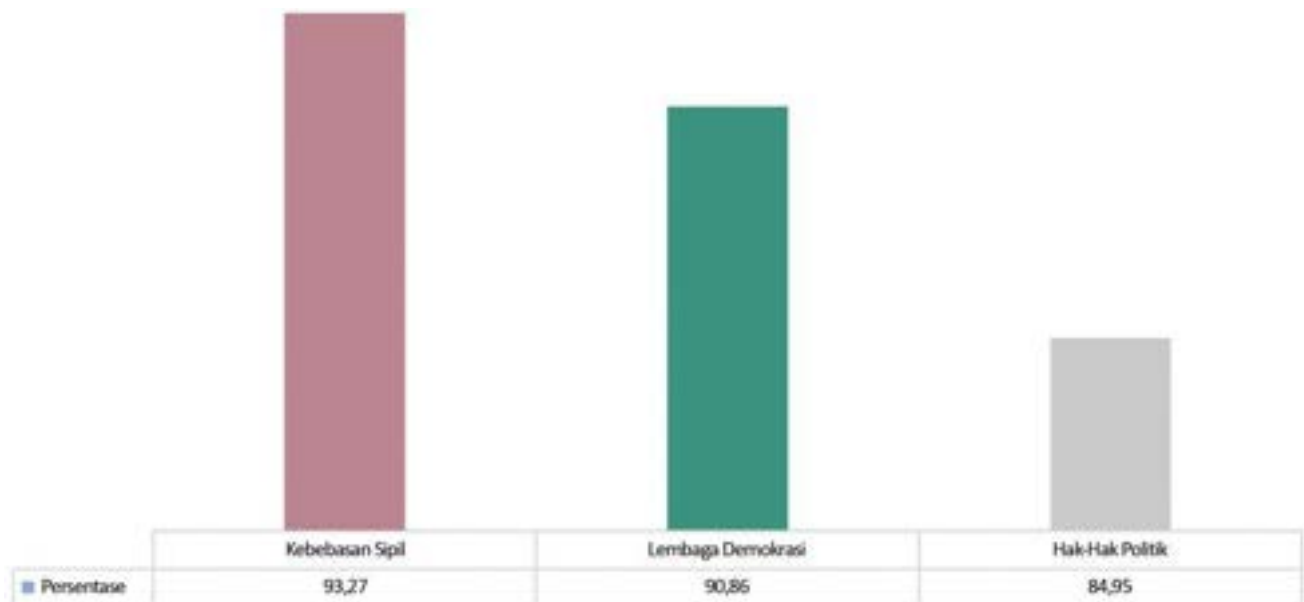
Berdasarkan data yang didapatkan dari Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, jumlah permasalahan yang disampaikan pada tahun 2020 sebanyak lima laporan. Jumlah permasalahan yang dilaporkan pada tahun 2020 menurun sebanyak 29 kasus jika dibandingkan dengan laporan yang disampaikan pada tahun sebelumnya. Data menunjukkan terjadi penurunan jumlah permasalahan yang disampaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Dalam kurun lima tahun ini, jumlah permasalahan yang disampaikan delegasi masyarakat kepada DPRD paling banyak berada pada tahun 2016 yaitu 65 kasus. Adapun lima jenis laporan atau permasalahan yang disampaikan oleh delegasi masyarakat kepada DPRD sepanjang tahun 2020 yaitu:

1. Delegasi warga RW 03 di Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara yaitu perihal keberatan warga atas pembangunan perumahan yang dianggap telah menyumbat sejumlah jalan air di kawasanya yang menyebabkan banjir.
2. Delegasi Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) yaitu perihal menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
3. Delegasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, dan Serikat Pengusaha Reklame DKI Jakarta yaitu perihal relaksasi pajak kepada sektor perusahaan yang terdampak PSBB.
4. Delegasi Gerakan Emak dan Bapak Peduli Pendidikan dan Keadilan (GEPRAK) yaitu perihal Penerimaan Peserta Didik Baru 2020.
5. Delegasi Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) yaitu perihal menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) didefinisikan sebagai angka yang menyatakan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia yang didasarkan pada berbagai aspek demokrasi seperti kebebasan sipil (*civil liberties*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*)³³

³³ Berdasarkan Buku Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Variabel aspek kebebasan sipil mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun dua variabel dari aspek hak-hak politik yaitu hak memilih dan dipilih dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan serta pengawasan pemerintahan. Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen merupakan variabel dari aspek lembaga demokrasi.



Gambar 7.2. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menunjukkan IDI tahun 2020 yang menunjukkan tingginya indeks kebebasan sipil di DKI Jakarta jika dibandingkan dengan aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Jika dilihat tren perkembangan IDI di DKI Jakarta dan nasional dari tahun 2010 sampai dengan 2020, angka di DKI Jakarta selalu berada di atas angka IDI nasional. Selisih tertinggi antara IDI tingkat nasional dan Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2020 sebesar 15,55 poin. Pada tahun 2019, aspek kebebasan sipil DKI Jakarta bernilai 91,01; aspek hak-hak politik bernilai 83,86; dan aspek lembaga demokrasi bernilai 91,89. Dalam 10 tahun terakhir, nilai yang terlihat cukup stabil adalah aspek kebebasan sipil sedangkan nilai aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi cenderung fluktuatif dengan selisih yang cukup signifikan. Tren perkembangan IDI di DKI Jakarta terlihat fluktuatif. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, aspek hak-hak politik bahkan sempat mendapatkan nilai dengan kategori buruk pada tahun 2010, 2011, dan 2013, namun secara keseluruhan nilai IDI DKI Jakarta masuk dalam kategori sedang dan baik.





Gambar 7.3. Sepuluh Provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia Tertinggi Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia dengan nilai 89,21 disusul oleh Provinsi Gorontalo sebesar 83,21 dan Kalimantan Timur sebesar 81,99. Tiga dari 10 peringkat provinsi dengan Indeks Demokrasi tertinggi di Indonesia masuk dalam kategori baik. Selain ketiga provinsi tersebut, Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kalimantan Barat masuk dalam kategori baik dengan nilai indeks demokrasi masing-masing sebesar 81,59 dan 81,09.

Demokrasi tidak hanya sebatas hak memilih dan dipilih oleh rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga berhubungan dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara dan begitupun sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin hak warganya.



CATATAN:

[illegible]

Statistik Sektor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 merupakan buku publikasi yang diterbitkan setiap tahun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Publikasi ini merupakan hasil kompilasi data statistik sektoral dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik dan instansi lain sampai dengan tahun 2020.

Publikasi ini memuat data dan informasi mulai dari keadaan geografi, iklim, pemerintahan, demografi, perkembangan sosial budaya sampai dengan keadaan perekonomian, politik, hukum dan keamanan, serta data insidensial seperti bencana alam dan penyakit menular di Provinsi DKI Jakarta. Tabel dan grafik disajikan pada tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi. Untuk memudahkan pemahaman disertakan juga narasi dan grafik dari setiap statistik yang disajikan.

Dengan kehadiran buku ini diharapkan pembaca dapat mengetahui gambaran Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data statistik sektoral yang disajikan.



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

UNIT PENGELOLA STATISTIK

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Gedung Balai kota Blok H Lt. 13
Jakarta Pusat, 10110, Indonesia

